RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN ASAHAN



RAMBATE RATA RAYA

KAB. ASAHAN

#KABUPATEN ASAHAN YANG SEJAHTERA, RELIGIUS, MAJU DAN BERKELANJUTAN

INDONESIA EMAS 2045










http://asahankab.go.id

Jl. Jend. Sudirman No.5
Kisaran - 21216

2025-2029





TAUFIK ZAINAL ABIDIN, S.Sos., M.Si

BUPATI ASAHAN

RIANTO, S.H., M.A.P

WAKIL BUPATI ASAHAN

SALINAN

BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksankan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Asahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan pada Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah penjabaran atau implementasi pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

15. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 2

(1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RPJM Nasional.

(2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Daerah.

Pasal 3

RPJM Daerah menjadi pedoman bagi :

a. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
b. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah; dan/atau
c. Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir.

(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

SISTEMATIKA RPJM DAERAH

Pasal 6

Sistematika RPJM Daerah meliputi:

a. Bab I : pendahuluan;

b. Bab II : gambaran umum Daerah;

c. Bab III : visi, misi, dan prioritas program pembangunan Daerah;

d. Bab IV : program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

e. Bab V : penutup.

Pasal 7

(1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJM Daerah bersifat indikatif.

(2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

ZAINAL ARIPIN SINAGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA UTARA : (2-50/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ASAHAN

AGUS PRANOTO, S.H.,M.H.
NIP. 19760815 199803 1 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayat-Nya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan.

RPJM Daerah Kabupaten Asahan ini disusun sesuai amanat Pasal 263 dan Pasal 269 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menyusun dokumen rencana pembangunan daerah. Selanjutnya pada Pasal 264 ayat 1 dan ayat 4 dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Asahan ini telah dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mulai dari tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Secara umum, RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 disusun dalam 5 (lima) bab dengan rincian. Bab 1 Pendahuluan; Bab 2 Gambaran Umum Daerah; Bab 3 Visi, Misi, dan Program Proritas Pembangunan Daerah; Bab 4 Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan Bab 5 Penutup.

RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan sampai dengan tahun 2030. Indikasi rencana program yang termuat dalam RPJM Daerah ini akan diimplementasikan Perangkat Daerah melalui kegiatan setiap tahunnya untuk mewujudkan Visi “KABUPATEN ASAHAN YANG SEJAHTERA, RELIGIUS, MAJU, DAN BERKELAJUTAN”.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dan penetapan RPJM Daerah ini, diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga aktivitas yang kita laksanakan senantiasa mendapat petunjuk dan ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Kisaran, 19 Agustus 2025

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN, S.Sos, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR viii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3 Hubungan antara dokumen RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya 4
1.3.1 Keterkaitannya dengan RPJPN Tahun 2025-2045 5
1.3.2 Keterkaitannya dengan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 6
1.3.3 Keterkaitannya dengan RPJPD Kabupaten Asahan Tahun 2025-2045 7
1.3.4 Keterkaitannya dengan RPJMN Tahun 2025-2029 8
1.3.5 Keterkaitannya dengan RPJM Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 10
1.3.6 Keterkaitannya dengan RTRW Kabupaten Asahan Tahun 2013-2033 11
1.3.7 Keterkaitannya dengan KLHS RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024-2029 12
1.4 Maksud dan Tujuan 13
1.4.1 Maksud 13
1.4.2 Tujuan 14
1.5 Sistematika Penulisan 14
BAB 2 GAMBARAN UMUM DAERAH 16
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 16
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 16
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 57
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah 67
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum 74
2.2 Gambaran Keuangan Daerah 118
2.2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 119
2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025-2029 140
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis 146
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah 146
BAB 3 VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 164
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 164
3.1.1 Visi RPJM Daerah Tahun 2025-2029 164
3.1.2 Misi RPJM Daerah Tahun 2025-2029 164

3.1.3 Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah Tahun 2025-2029 167
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah Tahun 2025-2029 175
3.2.1 Strategi 175
3.2.2 Penahapan Pembangunan RPJM Daerah Tahun 2025-2029 180
3.2.3 Lokus Pembangunan RPJM Daerah Tahun 2025-2029 189
3.2.4 Arah Kebijakan 191
3.3 Program Prioritas Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah Tahun 2025-2029 196
BAB 4 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 247
4.1 Program Perangkat Daerah 247
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 390
BAB 5 PENUTUP 412
5.1 Kaidah Pelaksanaan 412
5.1.1 Konsistensi Perencanaan Pembangunan 412
5.1.2 Kerangka Pengendalian 414
5.1.3 Sistem Insentif 418
5.1.4 Mekanisme Perubahan 419
5.1.5 Komunikasi Publik 420
5.2 Pembiayaan Pembangunan 421
5.3 Kesimpulan 421

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Asahan 16
Tabel 2.2 Peran Strategis Kabupaten Asahan 17
Tabel 2.3 Koefisien Limpasan Air Permukaan 22
Tabel 2.4 Ketersediaan Air Limpasan per Kecamatan (2022) 22
Tabel 2.5 Ketersediaan Air di Kabupaten Asahan (2022) 23
Tabel 2.6 Standar Kebutuhan Air Domestik dan Non Domestik 24
Tabel 2.7 Kebutuhan Air Kabupaten Asahan Menurut Pengunaan Lahan (2022) 24
Tabel 2.8 Kebutuhan Air di Kabupaten Asahan (2022) 25
Tabel 2.9 Daya Dukung Air Total Kabupaten Asahan Tahun 2022 26
Tabel 2.10 Perkiraan Perubahan Penggunaan Lahan dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 29
Tabel 2.11 Proyeksi Daya Dukung Daya Air Bersih 2025-2029 30
Tabel 2.12 Produksi Kalori Pangan Nabati (Kabupaten Asahan) Tahun 2022 32
Tabel 2.13 Produksi Kalori Pangan Hewani / Telur dan Unggas (Kabupaten Asahan) Tahun 2022 33
Tabel 2.14 Produksi Kalori Pangan Hewani/Ternak dan Ikan (Kabupaten Asahan) 2022 33
Tabel 2.15 Produksi Kalori Pangan Kabupaten Asahan Tahun 2022 (kkal) 34
Tabel 2.16 Kebutuhan Pangan Kabupaten Asahan tahun 2022 (Kkal/tahun) 35
Tabel 2.17 Daya Dukung Penyediaan Kalori Tahun 2022 di Wilayah Kabupaten Asahan 36
Tabel 2.18 Perkiraan Perubahan Penggunaan Lahan Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 38
Tabel 2.19 Capaian TPB Berdasarkan Kategori Capaian 40
Tabel 2.20 Capaian TPB Berdasarkan Pilar Pembangunan Berkelanjutan 40
Tabel 2.21 Pencapaian Indikator TPB di Kabupaten Asahan 41
Tabel 2.22 Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan tahun 2018-2023 45
Tabel 2.23 Proyeksi Data Lingkungan Kabupaten Asahan 46
Tabel 2.24 Ketahanan Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Asahan 50
Tabel 2.25 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sebaran Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024 53
Tabel 2.26 Distribusi Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2024 56
Tabel 2.27 Angka Literasi dan Numerasi SD dan SMP Kabupaten Asahan, Tahun 2022-2024 64
Tabel 2.29 Realisasi Indikator Persentase Penegakan Perda Tahun 2020-2024 76
Tabel 2.30 Realisasi Indikator Persentase Penegakan Perda Tahun 2020-2024 77
Tabel 2.31 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan 77
Tabel 2.32 Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan 78
Tabel 2.33 Indikator Kinerja Kunci Urusan PUTR 81
Tabel 2.34 Panjang Jalan menurut Jenis Jalan di Kabupaten Asahan, 2024 82
Tabel 2.35 Banyaknya Pelanggan PDAM menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Asahan, 2020-2024 85
Tabel 2.36 Kondisi Saluran Air Kabupaten Asahan, 2020-2024 87
Tabel 2.37 Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 88
Tabel 2.38 Indikator Kinerja Kunci Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat 89
Tabel 2.39 Indikator Kinerja Kunci Urusan Sosial 91
Tabel 2.40 Indikator Kinerja Utama Urusan Tenaga Kerja 91
Tabel 2.41 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 93
Tabel 2.42 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pangan 94
Tabel 2.43 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanahan 94

Tabel 2.44 Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup 96
Tabel 2.45 Indikator Kinerja Kunci Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 97
Tabel 2.46 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa 98
Tabel 2.47 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 99
Tabel 2.48 Indikator Kinerja Kunci Urusan Perhubungan 100
Tabel 2.49 Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informasi 101
Tabel 2.50 Indikator Kinerja Kunci Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 102
Tabel 2.51 Indikator Kinerja Kunci Urusan Penanaman Modal 102
Tabel 2.52 Indikator Kinerja Kunci Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 103
Tabel 2.53 Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik 104
Tabel 2.54 Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian 105
Tabel 2.55 Indikator Kinerja Kunci Urusan Kebudayaan 105
Tabel 2.56 Indikator Kinerja Kunci Urusan Perpustakaan 106
Tabel 2.57 Indikator Kinerja Kunci Urusan Kearsipan 107
Tabel 2.58 Indikator Kinerja Kunci Urusan Kelautan dan Perikanan 108
Tabel 2.59 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pariwisata 108
Tabel 2.60 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian 110
Tabel 2.61 Indikator Kinerja Kunci Urusan Perdagangan 111
Tabel 2.62 Indikator Kinerja Kunci Urusan Perindustrian 112
Tabel 2.63 Indikator Kinerja Kunci Urusan Perencanaan dan Keuangan 113
Tabel 2.64 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pengadaan 114
Tabel 2.65 Indikator Kinerja Kunci Urusan Kepegawaian 115
Tabel 2.66 Indikator Kinerja Kunci Urusan Manajemen Keuangan 116
Tabel 2.67 Indikator Kinerja Kunci Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik 117
Tabel 2.68 Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024 (Rp Juta) 120
Tabel 2.69 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran Tahun 2020-2024 (Rp Juta) 122
Tabel 2.70 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024 124
Tabel 2.71 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Kabupaten Asahan Tahun Anggaran Tahun 2020-2024 (Rp Juta) 126
Tabel 2.72 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024 127
Tabel 2.73 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2020-2024 (Rp Juta) 129
Tabel 2.74 Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Asahan, 2020-2024 (Rp) . 131
Tabel 2.75 Analisis Rasio Neraca Daerah Kabupaten Asahan, 2020-2024 (Rp Juta) 132
Tabel 2.76 Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024 134
Tabel 2.77 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024 (Rp juta) 135
Tabel 2.78 Surplus/Defisit Riil APBD Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024 (Rp juta) 135
Tabel 2.79 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Asahan (Rp Juta) 135
Tabel 2.80 Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024 (Rp) 137
Tabel 2.81 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan, Tahun 2025-2030 (Rp, Juta) 141
Tabel 2.82 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 (Rp Juta) 144
Tabel 2.83 Pohon Masalah Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan 147
Tabel 2.84 Pohon Masalah Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia 148

Tabel 2.85 Pohon Masalah Kualitas dan Pelayanan Infrastruktur Wilayah 149
Tabel 2.86 Pohon Masalah Pelestarian Lingkungan Hidup 150
Tabel 2.87 Pohon Masalah Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa 150
Tabel 2.88 Pohon Masalah Kemandirian dan Diversifikasi Pangan 151
Tabel 2.89 Pohon Masalah Mitigasi Terhadap Bencana, Gangguan Ketentaraman, Ketertiban dan Tingginya Jumlah Kirminalitas 152
Tabel 2.90 Transformasi dan Arah Kebijakan RPJMN 2025-2029 154
Tabel 2.91 Arah Pembangunan dan Isu Strategis RPJMN 2025-2029 155
Tabel 3.1 Keterkaitan Rumusan Misi terhadap Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan 2025-2029 165
Tabel 3.2 Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Asahan 2025-2045 dengan Misi RPJM DAERAH 165
Tabel 3.3 Keselarasan Misi RPJM Daerah Kabupaten Asahan 2025-2029 dengan Misi RPJM Daerah Provinsi Sumatera Utara 2025-2029 dan Misi RPJMN 2025-2029 . 166
Tabel 3.4 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 170
Tabel 3.5 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 179
Tabel 3.6 Penahapan Pembangunan RPJM Daerah 181
Tabel 3.7 Arah Kebijakan dan Lokus Prioritas Pembangunan Tahun 2025 181
Tabel 3.8 Arah Kebijakan dan Lokus Prioritas Pembangunan Tahun 2026 183
Tabel 3.9 Arah Kebijakan dan Lokus Prioritas Pembangunan Tahun 2027 184
Tabel 3.10 Arah Kebijakan dan Lokus Prioritas Pembangunan Tahun 2028 186
Tabel 3.11 Arah Kebijakan dan Lokus Prioritas Pembangunan Tahun 2029 188
Tabel 3.12 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan 192
Tabel 3.13 Keterkaitan Program Unggulan dengan Misi, Tujuan, dan Sasaran 197
Tabel 3.14 Program Prioritas Pembangunan Daerah 198
Tabel 3.15 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Asahan Tahun 2025-2030 210
Tabel 4.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 247
Tabel 4.2 Rencana Program Perangkat Daerah Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Asahan 249
Tabel 4.3 Dukungan Kabupaten/Kota Terhadap PHTC Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 306
Tabel 4.4 Dukungan terhadap Program Prioritas/Proyek Strategis Daerah (PSD) RPJMD Provinsi Sumatera utara Tahun 2025-2029 319
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Layanan 390
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Asahan 2025-2029 393

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya 5
Gambar 1.2 Keterkaitan Misi RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 7
Gambar 1.3 Keterkaitan Misi RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Asahan Tahun 2025-2045 8
Gambar 1.4 Keterkaitan Misi RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Indonesia Tahun 2025-2029 9
Gambar 1.5 Keterkaitan Misi RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 dengan RPJM Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 11
Gambar 1.6 Keterkaitan Misi RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 dengan TPB KLHS RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 13
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Asahan 16
Gambar 2.2 Jumlah Izin Pertambangan Berdasarkan Status di Kabupaten Asahan 20
Gambar 2.3 Jumlah Izin Pertambangan Berdasarkan Status di Kabupaten Asahan 20
Gambar 2.4 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Kabupaten Asahan, 2020-2024 43
Gambar 2.5 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan, 2020-2024 43
Gambar 2.6 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Persen) Per Kabupaten/kota (Persen) Kabupaten Asahan, 2020-2024 44
Gambar 2.7 Sebaran Jasa Ekosistem Pendukung 47
Gambar 2.8 Total Luas Ekosistem Mangrove Per Kecamatan di Kabupaten Asahan 48
Gambar 2.9 Luas Ekosistem Gambut Per Kecamatan di Kabupaten Asahan 48
Gambar 2.10 Sebaran Ekosistem Mangrove dan Gambut 49
di Kabupaten Asahan 49
Gambar 2.11 Sebaran Ketahanan Keanekaragaman Hayati 50
di Kabupaten Asahan 50
Gambar 2.12 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Asahan, 2020-2024 51
Gambar 2.13 Jasa Lingkungan Pengatur Iklim 52
Gambar 2.14 Sebaran Kerentanan Desa di Kabupaten Asahan 52
terhadap Dampak Perubahan Iklim 52
Gambar 2.15 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024 53
Gambar 2.16 Proyeksi Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk, 2025-2029 55
Gambar 2.17 Proyeksi Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur, Tahun 2025-2029 56
Gambar 2.18 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024 .. 57
Gambar 2.19 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024 58
Gambar 2.20 PDRB Per Kapita (ADHB) Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024 59
Gambar 2.21 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024 59
Gambar 2.22 Indeks Gini Kabupaten Asahan, 2020-2024 60
Gambar 2.23 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024 61
Gambar 2.24 Usia Harapan Hidup Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024 61
Gambar 2.25 Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2023 62
Gambar 2.26 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Asahan, 2020-2024 63
Gambar 2.27 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024 63
Gambar 2.28 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024 65
Gambar 2.29 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024 65
Gambar 2.30 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2023 67

Gambar 2.31 Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024 67
Gambar 2.32 Rasio PDRB Industri Pengolahan (ADHB) Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024 68
Gambar 2.33 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2023 69
Gambar 2.34 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024 69
Gambar 2.35 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2022 70
Gambar 2.36 Grafik Perkembangan Pembentukan Modal Tetap bruto Kabupaten Asahan Tahun 2020-2024 72
Gambar 2.37 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2023 74
Gambar 2.38 Grafik Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Asahan Tahun 2020-2024..... 75
Gambar 2.39 Grafik Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Asahan Tahun 2020-2024 75
Gambar 2.40 Panjang Jalan Berdasarkan Konstruksi Permukaan Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024 83
Gambar 2.41 Panjang Jalan berdasarkan Kondisi di Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024 84
Gambar 2.42 Grafik Perkembangan Jumlah Pelanggan PDAM di Kabupaten Asahan, 2020-2024 86
Gambar 2.43 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, 2020-2024 123
Gambar 2.44 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024 124
Gambar 2.45 Struktur Belanja Kabupaten Asahan, 2020-2024 127
Gambar 2.46 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Asahan, 2020-2024 128
Gambar 2.47 Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018-2021 139
Gambar 2.48 Tujuan SDG's 154
Gambar 3.1 Wilayah Asahan dalam Wilayah Pengembangan Timur Sumatera Utara 189
Gambar 5.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan 413
Gambar 5.2 Kerangka Kerja MRPN 415
Gambar 5.3 Tahapan Manajemen Risiko untuk Mencapai Target RPJM Daerah .. 415

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesta demokrasi melalui pemilihan kepala Daerah (Pilkada) serentak telah selesai dilaksanakan dan menghasilkan keputusan tetap mengenai kepala Daerah dan wakil kepala Daerah terpilih di 481 wilayah di Indonesia. Salah satu Daerah yang telah menetapkan pasangan pemimpin baru adalah Kabupaten Asahan, yang secara resmi memilih Taufik Zainal Abidin Siregar dan Rianto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan untuk periode 2025–2030. Pasangan ini memperoleh 178.671 suara, atau 74,92% dari total suara sah.

Pasangan ini mengusung visi: “Kabupaten Asahan Yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan.” Visi tersebut dijabarkan ke dalam lima misi utama, yang menjadi komitmen politik selama masa kampanye, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Asahan yang cerdas, sehat, dan berkarakter.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing perekonomian daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pemerataan kualitas infrastruktur, pengembangan komoditas unggulan, pertanian serta pengelolaan ekonomi biru dan ketahanan pangan.
3. Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan memelihara kerukunan dalam kehidupan beragama
4. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, berintegritas dan akuntabel.
5. Menyelenggarakan pembangunan yang berlandaskan prinsip keseimbangan, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan

Dalam pelaksanaan pemerintahan, visi dan misi kepala Daerah serta wakil kepala Daerah terpilih dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan. Dokumen tersebut menjadi pedoman pelaksanaan program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat dan akan dijalankan melalui sistem birokrasi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap pemerintah Daerah wajib menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan, di antaranya: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) rencana pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) rencana pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) rencana pembangunan Daerah untuk jangka waktu 1 tahun.

Pembangunan Kabupaten Asahan saat ini dihadapkan pada kompleksitas kondisi dan tantangan yang multidimensional. Secara sosial, masih terdapat disparitas kualitas hidup antar wilayah, isu kemiskinan, kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan, serta kebutuhan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dari aspek ekonomi, meskipun memiliki potensi di sektor pertanian dan perkebunan, Kabupaten Asahan perlu memperkuat diversifikasi ekonomi, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tantangan lingkungan hidup mencakup pengelolaan sumber daya alam yang lestari, penanganan limbah, mitigasi bencana, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Di sisi infrastruktur, pemerataan aksesibilitas jalan, ketersediaan air bersih, sanitasi, dan energi yang memadai masih menjadi prioritas untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi. Peningkatan daya saing daerah juga menjadi krusial, baik dalam menarik investasi, mengembangkan UMKM, maupun meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di tingkat regional dan nasional.

Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel merupakan fondasi penting dalam memastikan efektivitas program pembangunan. Isu-isu strategis lainnya yang relevan meliputi optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penguatan sinergi antar perangkat daerah, serta peningkatan kapasitas aparatur sipil negara. Seluruh gambaran kondisi dan tantangan ini menjadi dasar krusial dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Asahan. Dengan demikian, RPJM Daerah memegang peran vital dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang terpilih, memastikan arah pembangunan yang terpadu, terukur, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Asahan.

Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses sistematis dan terencana yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) Daerah. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel.

Dalam konteks ini, RPJM Daerah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. RPJM Daerah menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan selama lima tahun di bawah kepemimpinan Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis.

Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Daerah wajib menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Pasal 263 undang-undang yang sama juga mengamanatkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah harus disusun oleh Pemerintah Daerah.

RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang berisi visi, misi, serta program kerja Bupati dan Wakil Bupati Asahan periode 2025–2030. Dokumen ini akan menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna mencapai tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Asahan periode 2025–2030 telah dilaksanakan pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan ini menjadi catatan sejarah baru bagi Indonesia karena untuk pertama kalinya dilakukan secara serentak di tingkat nasional, menandai era baru dalam sistem Pemerintahan Daerah.

Penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029 mengacu pada beberapa dokumen perencanaan, termasuk: RPJMN Tahun 2025–2029, RPJM Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029, RPJPD Kabupaten Asahan Tahun 2025–2045, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJM Daerah Kabupaten Asahan, dan hasil evaluasi RPJM Daerah Kabupaten Asahan periode sebelumnya.

Penyusunan RPJM Daerah ini dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Teknokratik: menggunakan metode ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
2. Pendekatan Partisipatif: melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan.
3. Pendekatan Politis: menerjemahkan visi dan misi kepala Daerah ke dalam dokumen RPJM Daerah yang dibahas bersama DPRD.

4. Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up: mengombinasikan perencanaan dari tingkat desa hingga nasional melalui mekanisme musyawarah pembangunan (Musrenbang).

Tahapan penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Asahan 2025–2029 mencakup: Persiapan Penyusunan Rancangan Awal RPJM Daerah, Penyusunan Rancangan Awal RPJM Daerah, Forum Konsultasi Publik RPJM Daerah, Penyusunan Rancangan RPJM Daerah, Pelaksanaan Musrenbang RPJM Daerah, Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RPJM Daerah, Evaluasi Ranperda RPJM Daerah, dan Penetapan RPJM Daerah melalui Peraturan Daerah.

Dokumen RPJM Daerah yang telah ditetapkan akan menjadi dasar bagi seluruh perangkat Daerah dalam menjalankan pembangunan, dengan mengacu pada strategi, kebijakan, program, serta anggaran yang telah dirumuskan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RPJM Daerah Kabupaten Asahan periode 2025-2029 disusun berdasarkan berbagai aturan, di antaranya:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940)
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33)
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76)
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9)
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7)

1.3 Hubungan antara dokumen RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya

RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Keterkaitan antara RPJM Daerah dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya dijelaskan secara lebih rinci melalui diagram berikut.

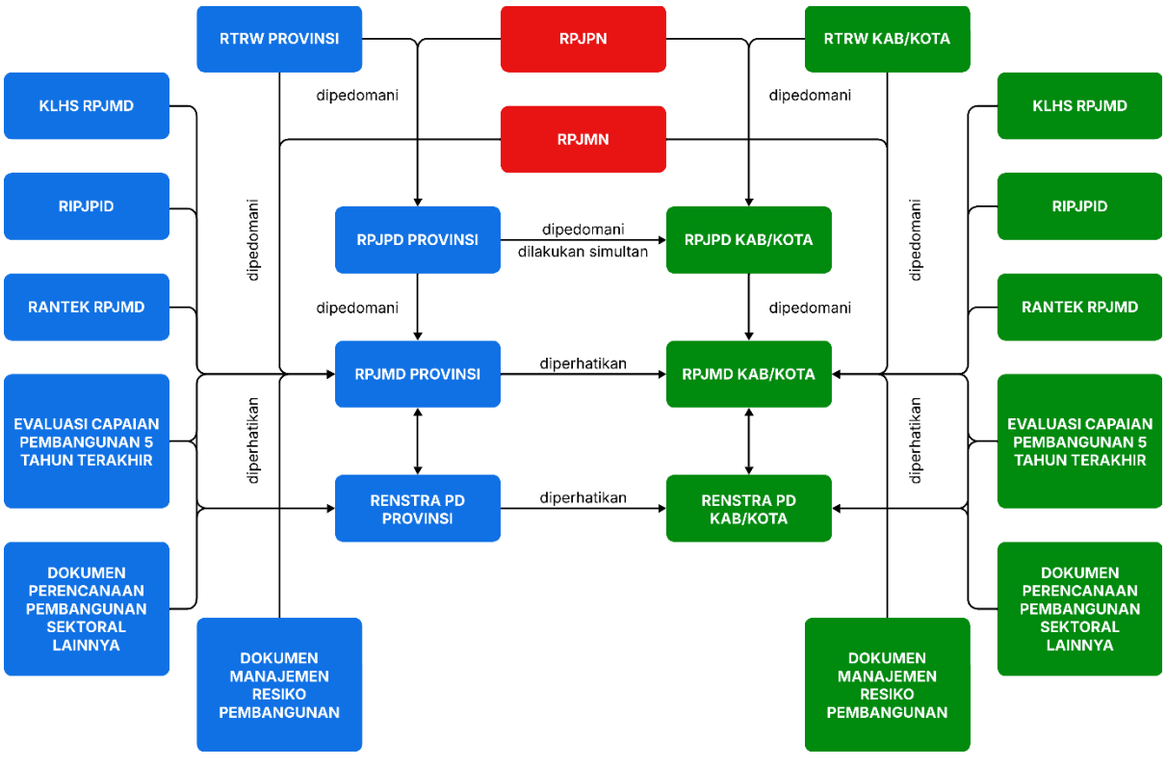

Gambar 1.1 Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya

Sumber: Instruksi Kemendagri

Selain keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, dokumen RPJM Daerah juga memiliki keterkaitan erat dengan dokumen penganggaran Daerah. Hubungan antara dokumen perencanaan dan kesinambungannya dengan fungsi penganggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sistem perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sehingga harus selaras dan mendukung tujuan pembangunan nasional; dan
3. Sistem perencanaan pembangunan Daerah juga menjadi satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan melalui proses penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan Daerah.

1.3.1 Keterkaitannya dengan RPJPN Tahun 2025-2045

RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029 memiliki keterkaitan erat dengan RPJPD Kabupaten Asahan Tahun 2025–2045 serta RPJPN Indonesia Tahun 2025–2045, mengingat ketiganya merupakan bagian integral dari siklus perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang.

Hubungan antara RPJM Daerah Kabupaten Asahan 2025–2029 dengan RPJPD Kabupaten Asahan 2025–2045 serta RPJPN Indonesia 2025–2045 tercermin dalam kesinambungan visi dan misi pembangunan. RPJM Daerah Kabupaten Asahan 2025–2029 menitikberatkan pada penguatan fondasi pembangunan daerah melalui visi "Kabupaten Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan", dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi Daerah,

penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel, serta pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.

Visi ini sejalan dengan sasaran jangka panjang RPJPD 2025–2045, seperti peningkatan pendapatan per kapita, pengurangan tingkat kemiskinan, penguatan daya saing sumber daya manusia, serta pengendalian emisi gas rumah kaca. Dengan demikian, RPJM Daerah Kabupaten Asahan berperan sebagai landasan awal dalam mewujudkan target pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam RPJPD.

Lebih lanjut, RPJPD Kabupaten Asahan 2025–2045 juga disusun selaras dengan RPJPN Indonesia 2025–2045, yang mengarahkan pembangunan nasional menuju terciptanya Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Salah satu keselarasan strategis terletak pada transformasi ekonomi daerah untuk mendorong peningkatan produktivitas, sebagaimana tertuang dalam misi RPJPD terkait penguatan kemandirian dan daya saing perekonomian daerah.

RPJPN juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan wilayah, sejalan dengan visi RPJPD Kabupaten Asahan yang mengedepankan pengembangan infrastruktur yang merata serta pembangunan yang berwawasan lingkungan dan tangguh terhadap bencana. Dengan demikian, RPJPD tidak hanya menjadi pedoman pembangunan Daerah, tetapi juga turut mendukung agenda pembangunan nasional dalam jangka panjang.

Keselarasan tersebut juga tercermin dalam prioritas pengembangan sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan. RPJPN menargetkan terwujudnya transformasi sosial melalui penciptaan masyarakat yang sehat, cerdas, dan berdaya saing, selaras dengan visi RPJPD Kabupaten Asahan yang mengarahkan pembangunan manusia yang maju, berbudaya, dan sejahtera.

Selain itu, aspek penguatan tata kelola yang adaptif dan berintegritas dalam RPJPN juga tercermin dalam misi RPJPD Kabupaten Asahan yang menekankan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang profesional, efektif, inovatif, serta akuntabel. Dengan demikian, keterkaitan antara ketiga dokumen ini memastikan bahwa pembangunan Kabupaten Asahan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang selaras dengan arah pembangunan nasional menuju tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

1.3.2 Keterkaitannya dengan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045

RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029 memiliki keterkaitan erat dengan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2045, mengingat keduanya merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dalam siklus pembangunan nasional.

Keterkaitan antara RPJM Daerah Kabupaten Asahan 2025–2029 dengan RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2025–2045 tercermin dalam kesinambungan visi dan misi pembangunan daerah. RPJM Daerah Kabupaten Asahan 2025–2029 berfokus pada penguatan fondasi pembangunan daerah melalui visi "Kabupaten Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan", dengan prioritas pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing ekonomi, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan berkelanjutan. Visi ini sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Utara yang menekankan pada transformasi sosial, transformasi ekonomi, serta penguatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung terwujudnya Sumatera Utara yang unggul, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Keselarasan antara RPJM Daerah Kabupaten Asahan dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara juga tercermin dalam fokus pembangunan sumber daya manusia berkualitas, penguatan daya saing Daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan.

Transformasi sosial dalam RPJPD Provinsi Sumatera Utara diarahkan pada penciptaan masyarakat yang sehat, cerdas, berdaya saing, dan berkarakter, selaras dengan misi RPJM Daerah Asahan dalam meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat, dan berkarakter. Demikian pula, strategi pembangunan ekonomi Daerah di Kabupaten Asahan untuk meningkatkan investasi, mengembangkan komoditas unggulan, pertanian, serta ekonomi biru, mendukung sasaran RPJPD Provinsi yang menekankan transformasi ekonomi berbasis nilai tambah dan daya saing global.



Gambar 1.2 Keterkaitan Misi RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045

1.3.3 Keterkaitannya dengan RPJPD Kabupaten Asahan Tahun 2025-2045

RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029 memiliki keterkaitan yang erat dengan RPJPD Kabupaten Asahan Tahun 2025–2045, mengingat RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun berdasarkan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD.

RPJM Daerah Kabupaten Asahan 2025–2029 berfungsi sebagai tahapan awal dalam mewujudkan visi jangka panjang Kabupaten Asahan yaitu "Kabupaten Asahan yang Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan."

Keterkaitan tersebut tercermin dalam kesinambungan visi dan misi pembangunan Daerah. RPJM Daerah Kabupaten Asahan 2025–2029 mengusung visi "Kabupaten Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan," yang merupakan elaborasi dan penjabaran lebih operasional dari visi RPJPD, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing ekonomi Daerah, penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel, serta pembangunan berbasis prinsip keberlanjutan lingkungan. Visi ini berkontribusi

langsung terhadap pencapaian sasaran visi RPJPD, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan wilayah, transformasi ekonomi berbasis nilai tambah, dan pelestarian lingkungan hidup. Selain itu, misi pembangunan dalam RPJM Daerah Kabupaten Asahan 2025–2029 juga dirancang untuk memperkuat arah transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola sebagaimana digariskan dalam RPJPD.

Upaya meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat, dan berkarakter; penguatan ekonomi Daerah melalui pengembangan investasi, pertanian, ekonomi biru, serta pemerataan infrastruktur; dan penguatan nilai-nilai religiusitas serta kerukunan kehidupan beragama di masyarakat, seluruhnya mendukung sasaran transformasi dalam RPJPD Kabupaten Asahan 2025–2045. Dengan demikian, RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen operasional jangka menengah, tetapi juga sebagai fondasi strategis dalam upaya mencapai visi besar pembangunan Kabupaten Asahan hingga tahun 2045.

Keterkaitan ini menjamin kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa setiap langkah pembangunan jangka menengah berkontribusi secara terarah terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.



Gambar 1.3 Keterkaitan Misi RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Asahan Tahun 2025-2045

1.3.4 Keterkaitannya dengan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada RPJMN Indonesia Tahun 2025–2029, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 . RPJMN ini menjadi pedoman bagi pemerintah Daerah dalam menyusun RPJM Daerah agar selaras dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan nasional.

RPJMN 2025–2029 menetapkan tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu:

1. Penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5–5 persen.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan indeks modal manusia (IMM) ditargetkan mencapai 0,59.
3. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, dengan target mencapai 8 persen pada tahun 2029.

Dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut, RPJM Daerah Kabupaten Asahan 2025–2029 menetapkan prioritas pembangunan yang meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi Daerah berbasis potensi lokal, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Upaya ini sejalan dengan agenda transformasi sosial dan ekonomi yang dicanangkan dalam RPJMN 2025–2029.

Selain itu, RPJMN 2025–2029 menekankan pentingnya transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas, serta penguatan sistem pelayanan publik yang berbasis digital. RPJM Daerah Kabupaten Asahan merespons hal ini dengan menetapkan misi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi layanan dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara.

Dengan demikian, RPJM Daerah Kabupaten Asahan 2025–2029 dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029, serta berkontribusi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

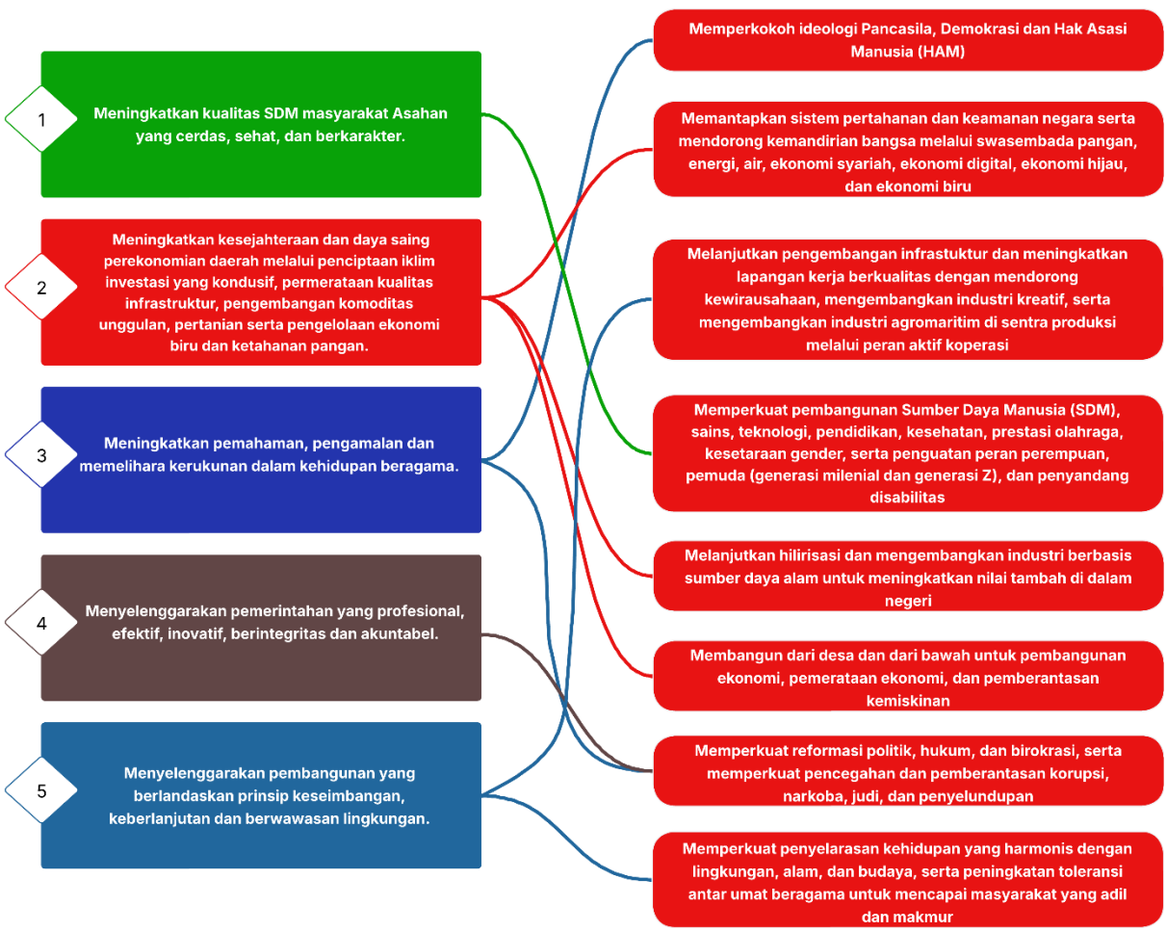

Gambar 1.4 Keterkaitan Misi RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Indonesia Tahun 2025-2029

1.3.5 Keterkaitannya dengan RPJM Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029 memiliki keterkaitan erat dengan RPJM Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029, mengingat keduanya merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang terintegrasi secara vertikal.

RPJM Daerah Kabupaten Asahan 2025–2029 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Provinsi Sumatera Utara 2025–2029, sehingga memastikan kesinambungan visi, misi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan antar tingkat pemerintahan.

RPJM Daerah Provinsi Sumatera Utara 2025–2029 mengusung visi pembangunan "Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan", dengan prioritas pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis nilai tambah dan daya saing, percepatan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Selaras dengan itu, RPJM Daerah Kabupaten Asahan 2025–2029 menetapkan visi "Kabupaten Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan", dengan fokus pembangunan pada peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi Daerah melalui investasi dan pengembangan sektor unggulan, pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, serta penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Prioritas pembangunan Kabupaten Asahan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia, secara substansi mendukung sasaran strategis pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Penguatan konektivitas antar wilayah, ketahanan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, serta perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Asahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari target pembangunan Sumatera Utara dalam lima tahun ke depan. Dengan demikian, penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Asahan 2025–2029 tidak hanya memperhatikan kebutuhan dan karakteristik lokal, tetapi juga dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi dan nasional secara konsisten, efektif, dan berkelanjutan, dalam kerangka mewujudkan Sumatera Utara yang lebih maju dan Indonesia Emas 2045.

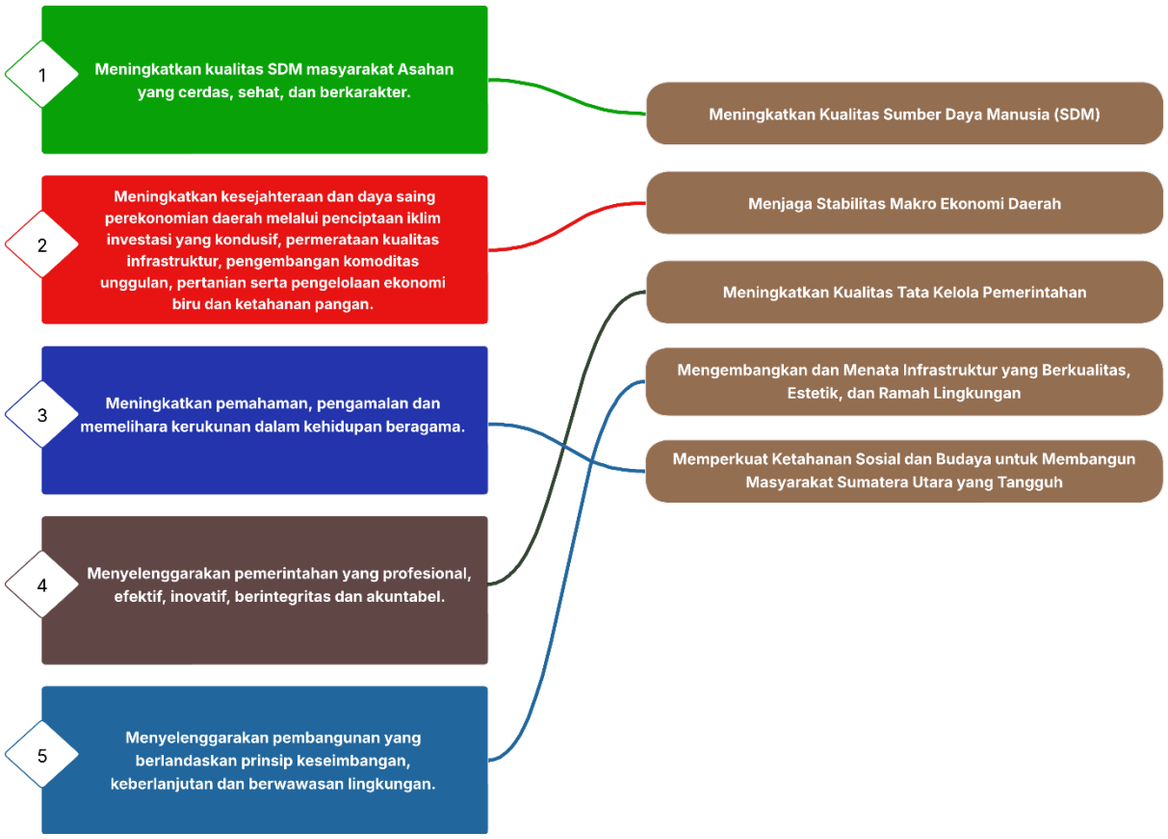

Gambar 1.5 Keterkaitan Misi RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 dengan RPJM Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

1.3.6 Keterkaitannya dengan RTRW Kabupaten Asahan Tahun 2013-2033

RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada berbagai dokumen perencanaan yang relevan, termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Asahan Tahun 2013–2033.

RTRW berfungsi sebagai dasar spasial dalam penentuan arah pembangunan wilayah, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga RPJM Daerah harus selaras dengan ketentuan struktur ruang, pola ruang, dan rencana kawasan strategis sebagaimana diatur dalam RTRW.

Dalam RTRW Kabupaten Asahan, tujuan utama penataan ruang adalah mewujudkan wilayah yang **makmur, sejahtera, berbasis agromaritim, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan**. Tujuan ini selaras dengan visi pembangunan Daerah dalam RPJM Daerah Kabupaten Asahan 2025–2029, yakni **"Kabupaten Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan,"** yang menempatkan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai pilar pembangunan.

Keterkaitan ini terlihat dalam beberapa aspek utama:

- **Pengembangan wilayah**: RPJM Daerah Asahan diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan sebagaimana diatur dalam sistem perkotaan dan pedesaan RTRW, termasuk penguatan Kota Kisaran sebagai pusat pertumbuhan wilayah dan pengembangan konektivitas antar kecamatan.
- **Pengembangan sektor unggulan**: Prioritas RPJM Daerah dalam pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri berbasis sumber daya lokal sejalan dengan rencana pola ruang budidaya dalam RTRW.

- **Pengelolaan kawasan lindung**: RPJM Daerah memperhatikan perlindungan kawasan lindung seperti sempadan sungai, kawasan resapan air, kawasan hutan lindung, dan kawasan rawan bencana, sebagaimana diarahkan dalam struktur dan pola ruang RTRW.
- **Pembangunan berkelanjutan**: Integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam RPJM Daerah mendukung strategi RTRW untuk menjaga daya dukung lingkungan hidup, keseimbangan ekosistem, dan keberlanjutan ruang wilayah.

Selain itu, program pembangunan infrastruktur dasar dalam RPJM Daerah, seperti jalan, jaringan air bersih, pengelolaan limbah, serta pengembangan pusat ekonomi baru, turut memperkuat implementasi sistem jaringan transportasi, energi, dan sumber daya air yang telah dirancang dalam RTRW. Dengan demikian, RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029 disusun dalam kerangka memperkuat implementasi RTRW, sekaligus memastikan bahwa seluruh program pembangunan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan keterpaduan spasial, keseimbangan wilayah, daya dukung lingkungan, dan kesinambungan fungsi ruang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

1.3.7 Keterkaitannya dengan KLHS RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024-2029

KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029 disusun sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam seluruh tahapan penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029.

Penyusunan KLHS ini dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018, yang mewajibkan setiap rencana pembangunan Daerah memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan sosial, ekonomi, dan ekologi.

KLHS RPJM Daerah Kabupaten Asahan mengidentifikasi lima isu strategis utama pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Asahan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas hidup manusia, keluarga, dan masyarakat inklusif yang lebih maju dan merata.
2. Pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan sektor perkebunan sebagai penggerak utama.
3. Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan hidup secara lestari.
4. Peningkatan kesiapan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana alam.
5. Penguatan kapasitas dan tata kelola kinerja pemerintahan serta pelayanan publik yang partisipatif.

Isu-isu strategis tersebut telah diintegrasikan secara langsung ke dalam rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program prioritas dalam RPJM Daerah Kabupaten Asahan 2025–2029.

Lebih lanjut, arah pembangunan yang diadopsi dalam RPJM Daerah mengacu pada alternatif skenario hasil KLHS, dengan mempertimbangkan proyeksi daya dukung air bersih, ketahanan pangan, pengelolaan risiko limbah, pengurangan kerentanan bencana, serta pengelolaan keanekaragaman hayati di wilayah Kabupaten Asahan.

Program-program prioritas dalam RPJM Daerah juga diarahkan untuk menjawab rekomendasi hasil analisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dirumuskan dalam KLHS, seperti peningkatan layanan sanitasi, penguatan ketahanan iklim, pengelolaan kawasan rawan bencana, dan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Dengan demikian, KLHS RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029 tidak hanya menjadi persyaratan administratif dalam penyusunan RPJM Daerah, tetapi lebih jauh berfungsi sebagai dasar analitis untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan daerah telah dirancang secara berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan lingkungan, serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal dan nasional.

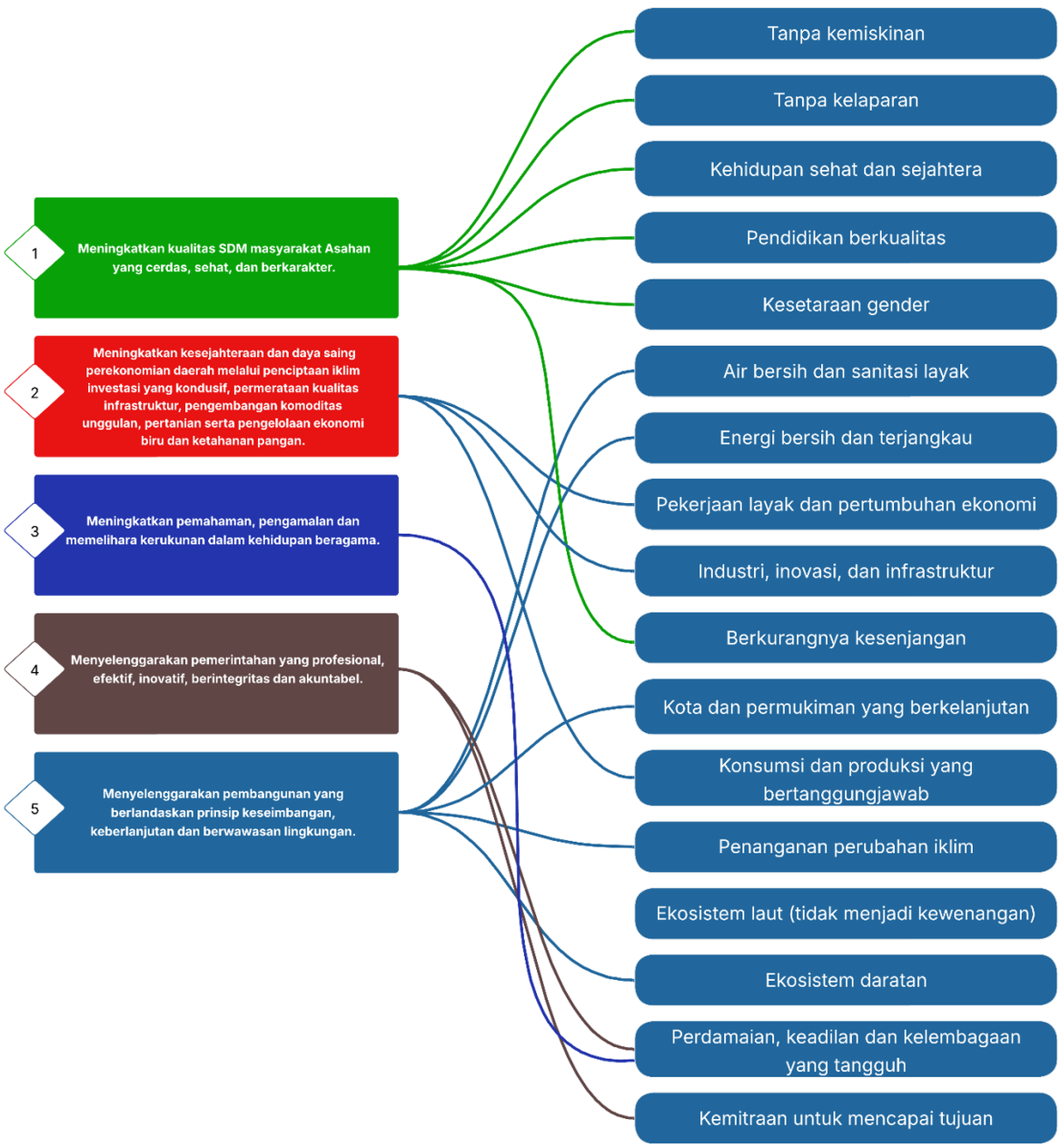

Gambar 1.6 Keterkaitan Misi RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 dengan TPB KLHS RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah, baik

pemerintah, masyarakat, dunia usaha, maupun pemangku kepentingan lainnya, dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. RPJM Daerah ini disusun agar dapat diimplementasikan secara terarah, terpadu, efektif, dan efisien guna mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Asahan terpilih.

1.4.2 Tujuan

Penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029 bertujuan untuk:

Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan Daerah yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat selama lima tahun ke depan.

Menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), serta dokumen perencanaan penganggaran Daerah lainnya.

Mewujudkan keterpaduan dan sinergi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota yang berbatasan, sehingga arah pembangunan daerah selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan regional.

Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Daerah dalam setiap tahun anggaran selama periode lima tahun.

Menjadi tolok ukur kinerja bagi Pemerintah Daerah dalam mengukur capaian pembangunan Daerah, serta sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan perangkat Daerah secara berkala dan terukur.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, hubungan RPJM Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran umum kondisi daerah yang mencakup empat aspek utama, yaitu: Aspek Geografi dan Demografi; Kesejahteraan Masyarakat; Pelayanan Umum; dan Daya Saing Daerah. Selain itu, bab ini juga memuat Gambaran Keuangan Daerah serta identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi daerah.

Gambaran Keuangan Daerah meliputi :

1. Kinerja keuangan masa lalu, meliputi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Neraca Daerah;
2. Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu;
3. Kerangka pendanaan, termasuk analisis pengeluaran wajib dan mengikat, serta prioritas utama; dan
4. Proyeksi Keuangan Daerah untuk periode Tahun 2025–2029.

Serta menguraikan permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta isu-isu strategis pembangunan lima tahun ke depan, baik yang bersumber dari permasalahan internal daerah, maupun isu yang berasal dari tingkat internasional, nasional, provinsi, dan regional yang berpotensi mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Asahan.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat visi dan misi Kepala Daerah terpilih, serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk periode Tahun 2025–2029 sebagai respons terhadap isu-isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya. Selain itu, bab ini menjabarkan strategi yang dipilih guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut, arah kebijakan yang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, serta program-program prioritas pembangunan Daerah untuk lima tahun ke depan.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisi uraian mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai kinerja pembangunan daerah, dilengkapi dengan target serta pagu indikatif masing-masing program untuk periode lima tahun ke depan. Selain itu, bab ini juga mencantumkan indikator-indikator kinerja beserta target pencapaiannya sebagai tolok ukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Asahan selama masa pelaksanaan RPJM Daerah, baik dalam pelaksanaan program prioritas maupun dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat penutup dokumen RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029, yang berisi penjelasan singkat mengenai fungsi, peran, dan kedudukan RPJM Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan mengikat.

BAB 2 GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

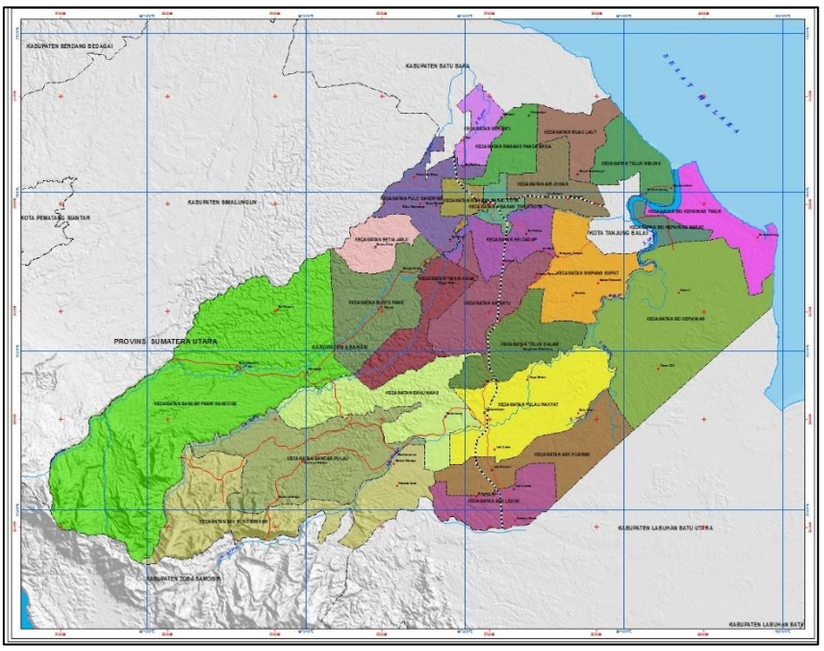

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Asahan

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021

Kabupaten Asahan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang berada di kawasan pantai timur. Luas wilayahnya mencakup 373.296,90 Ha, yang terdiri dari 25 kecamatan, 27 kelurahan, serta 177 desa. Kabupaten Asahan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

a. Utara : Kabupaten Batu Bara
b. Timur : Selat Malaka
c. Selatan : Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Kabupaten Toba
d. Barat : Kabupaten Simalungun

Secara lebih spesifik luas wilayah Kabupaten Asahan per kecamatan disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Asahan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Desa/ Kelurahan
1	B. P. Mandoge	713,6321	9
2	Bandar Pulau	268,4124	10
3	Aek Songsongan	282,2056	9
4	Rahuning	195,7978	7
5	Pulau Rakyat	213,6475	12
6	Aek Kuasan	143,1331	7
7	Aek Ledong	85,1169	7
8	Sei Kepayang	370,6919	6
9	Sei Kepayang Barat	49,1921	6
10	Sei Kepayang Timur	100,6451	5
11	Tanjung Balai	88,6836	8

12	Simpang Empat	135,7699	8
13	Teluk Dalam	117,0128	6
14	Air Batu	113,1523	12
15	Sei Dadap	86,7749	10
16	Buntu Pane	153,3985	9
17	Tinggi Raja	107,8977	7
18	Setia Janji	62,3702	5
19	Meranti	45,3276	7
20	Pulo Bandring	86,9936	10
21	Rawang Panca Arga	67,3702	7
22	Air Joman	98,0944	7
23	Silo laut	84,6758	5
24	Kota Kisaran Barat	32,8052	13
25	Kota Kisaran Timur	30,1678	12
Kabupaten Asahan		3.732,969	204

Sumber: RTRW Kabupaten Asahan Tahun 2013-2033

Mayoritas wilayah Kabupaten Asahan terletak di dataran rendah dengan ketinggian antara 0 hingga 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl), yang menyebabkan adanya 16 (enam belas) desa pesisir atau desa di tepi pantai. Desa-desa ini terbagi ke dalam 4 (empat) kecamatan, yaitu 4 (empat) desa di Kecamatan Sei Kepayang, 5 (lima) desa di Kecamatan Sei Kepayang Timur, 6 (enam) desa di Kecamatan Tanjung Balai, dan 1 (satu) desa di Kecamatan Silau Laut.

Berdasarkan posisi geografis, potensi sumber daya, serta keterhubungan Kabupaten Asahan dalam jaringan pengembangan wilayah regional, daerah ini memiliki berbagai fungsi dan kontribusi strategis yang mencakup aspek ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup, serta sosial-budaya. Peran strategis tersebut tidak hanya mendukung pembangunan Kabupaten Asahan sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan kawasan sekitarnya.

Tabel 2.2 Peran Strategis Kabupaten Asahan

Aspek	Peran Strategis
Ekonomi	1. Lumbung pangan dan perkebunan (sawit, karet, kakao, kelapa) 2. Basis industri pengolahan hasil pertanian & bioindustri 3. Bagian dari Sabuk Industri & Pertanian Selatan 4. Termasuk KAPET Simalungun–Batubara–Asahan (pengolahan pertanian, industri hilir, pelabuhan)
Infrastruktur & Konektivitas	5. Kisaran sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) 6. Lalu lintas sedang, dominasi angkutan pertanian 7. Jalur distribusi hasil pertanian & industri menuju pelabuhan (Kuala Tanjung, Teluk Nibung) 8. Bagian dari jaringan transportasi regional Sumatera Utara

Aspek	Peran Strategis
Lingkungan & Ekologi	9. Lahan pertanian produktif penopang ketahanan pangan regional 10. Revitalisasi sistem irigasi dan jaringan distribusi pertanian 11. Kawasan pesisir dengan potensi ekonomi biru berbasis perikanan 12. Peran ekologis dalam jasa lingkungan (air, lahan, hutan)
Sosial, Budaya & Pariwisata	13. Potensi wisata alam, pantai, sejarah, dan budaya lokal - Identitas sosial-budaya sebagai daya tarik pariwisata 14. Pusat layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan untuk wilayah sekitar

Dengan peran strategis yang dimiliki, keberlanjutan pembangunan Kabupaten Asahan sangat dipengaruhi oleh dinamika kependudukan. Potensi demografi tidak hanya menentukan ketersediaan tenaga kerja, tetapi juga menjadi dasar dalam pengembangan sektor ekonomi, penyediaan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi demografi Kabupaten Asahan menjadi penting sebagai pijakan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah.

Dari sisi ekonomi, PDRB Kabupaten Asahan tahun 2024 mencapai Rp 57,45 triliun (ADHB), dengan kontribusi utama pertanian (43,47%), industri pengolahan (20,71%), dan perdagangan besar serta eceran (18,15%). Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,68% disertai peningkatan PDRB per kapita menjadi Rp 70,61 juta. Meskipun kontribusi industri pengolahan cenderung menurun, sektor ini tetap penting sebagai basis hilirisasi produk pertanian.

Jumlah penduduk tahun 2024 mencapai 813.720 jiwa, dengan konsentrasi tertinggi di Kecamatan Kota Kisaran Timur dan Kecamatan Kota Kisaran Barat yang menjadi pusat perdagangan dan jasa. Angka ketergantungan meningkat menjadi 52,64, menandakan bertambahnya beban penduduk usia produktif, sehingga penciptaan lapangan kerja menjadi prioritas pembangunan.

Struktur ketenagakerjaan didominasi sektor jasa (51,46%) dan pertanian (31,90%), dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) relatif tinggi (67,64% pada 2024). Rasio kewirausahaan meningkat dari 3,45% (2020) menjadi 6,08% (2023), mencerminkan tumbuhnya iklim usaha lokal. Namun, Tingkat Pengangguran Terbuka masih berada pada kisaran 5,9%, sehingga perlu langkah strategis dalam penyerapan tenaga kerja.

Kualitas pembangunan manusia ditunjukkan dengan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 72,35 (2020) menjadi 74,17 (2024), meskipun masih di bawah rata-rata provinsi (75,76). Sementara itu, ketimpangan pendapatan relatif rendah dengan Indeks Gini 0,248 (2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, peran strategis Kabupaten Asahan adalah:

1. Lumbung pangan regional, dengan kontribusi besar sektor pertanian.
2. Pusat perdagangan dan jasa, didukung konsentrasi penduduk di Kisaran.
3. Potensi hilirisasi industri pengolahan, meski kontribusinya menurun.
4. Modal SDM dan kewirausahaan, dengan tren IPM dan semangat usaha yang meningkat.
5. Pembangunan inklusif, tercermin dari ketimpangan pendapatan yang rendah.

Implikasi pembangunan ke depan adalah perlunya modernisasi sektor pertanian, revitalisasi industri pengolahan, pengembangan jasa modern dan perdagangan perkotaan, serta peningkatan kualitas SDM dan kewirausahaan untuk memperkuat daya saing dan memastikan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Beberapa potensi sumberdaya alam yang dimiliki wilayah Kabupaten Asahan (RTRW Kabupaten Asahan), adalah :

a. Potensi perkebunan, pertanian dan perikanan

- Lahan di wilayah Kabupaten Asahan umumnya subur dan datar berpotensi untuk tanaman perkebunan tahunan (kelapa sawit, karet, kelapa dan coklat)
- Lahan di wilayah perbukitan berpotensi untuk hutan lindung dan pertanian tanaman pangan
- Hasil produk perkebunan, pertanian dan perikanan menjadi bahan baku bagi industri dengan pengembangan kawasan industri hulu dan industri hilir
- Sungai-sungai besar dan kecil yang melalui Kabupaten Asahan menjadi sumber air baku untuk pengembangan kegiatan pertanian didukung oleh sistem irigasi dan sistem drainase, dan juga untuk pengembangan kegiatan perikanan darat
- Wilayah pesisir berpotensi untuk pengembangan sumberdaya perikanan dan kelautan yang pengembangannya melalui konsep agromarinpolitan dan minapolitan

b. Potensi pertambangan

- Potensi tambang kaolin, emas dan batu padas di Kecamatan Aek Songsongam, Kecamatan Rahuning dan Kecamatan Bandar Pulau. Sebagian telah dikelola dan sebagian masih tahap penelitian.
- Bahan galian dimanfaatkan sebagai tanah urug oleh beberapa perusahaan dengan izin usahan penambangan seluas 51,23 ha.

c. Potensi wisata alam

- Wisata Bahari, berupa : pantai, sungai dan Pelabuhan Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai, Wisata Danau Teratai di Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja, Danau Kelapa Gading di Kisaran Timur serta Pasiran dan Unong Sisapa di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge.
- Wisata Air Terjun Ponot di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan, Arung Jeram di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan, Air Terjun Simonang-monang di Desa Padang Pulau Kecamatan Bandar Pulau.
- Wisata Hutan Mangrove di Desa Silo Baru Kecamatan Silau Laut.

2.1.1.2.A Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Kabupaten Asahan memiliki potensi sumber daya alam yang signifikan, salah satunya berasal dari usaha pertambangan bahan galian golongan C yang mencakup komoditas tanah urug, pasir, kerikil, marmer, kaolin, granit, serta batuan lainnya. Kegiatan pertambangan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, seperti degradasi lahan, perubahan bentang alam, penurunan kualitas air, dan gangguan ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan pertambangan memerlukan keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Pada tahun 2021 tercatat terdapat dua izin usaha pertambangan tanah urug yang dimiliki oleh PT. Porsea Alam Mandiri di Desa Sijabut Teratai, Kecamatan Air Batu, dan di Desa Bahung Sibatu-batu, Kecamatan Sei Dadap. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sejak Agustus 2021 kewenangan pengurusan izin pertambangan beralih ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sehingga Pemerintah Kabupaten Asahan tidak lagi memiliki kewenangan langsung dalam penerbitan izin, namun tetap memiliki peran penting dalam pemantauan dan evaluasi dampak lingkungan di wilayahnya.

Hingga saat ini, tercatat terdapat 16 izin pertambangan galian C di Kabupaten Asahan dengan rincian 3 izin berstatus operasi produksi dan 13 izin lainnya berstatus cadangan. Lokasi operasi produksi tersebar di Kecamatan Bandar Pulau, Kecamatan Tinggi Raja, dan Kecamatan Aek Songsongan. Berdasarkan komoditasnya, kegiatan

pertambangan meliputi kaolin, tanah urug, batu gunung, quarry besar, dan pasir pasang. Total luasan izin bervariasi mulai dari 5,7 hektare hingga 242,8 hektare.

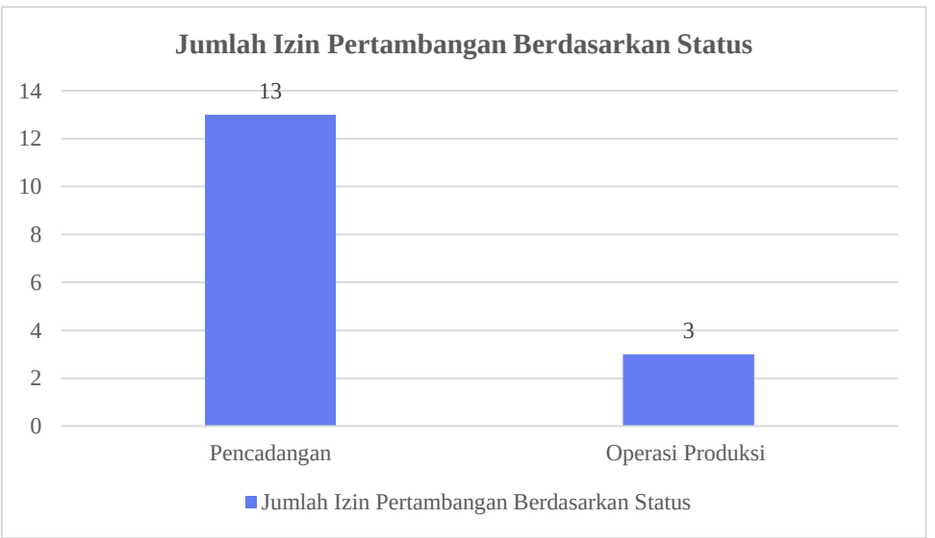

Gambar 2.2 Jumlah Izin Pertambangan Berdasarkan Status di Kabupaten Asahan

Sumber : KLHS RPJM Daerah Kabupaten Asahan, 2025-2029

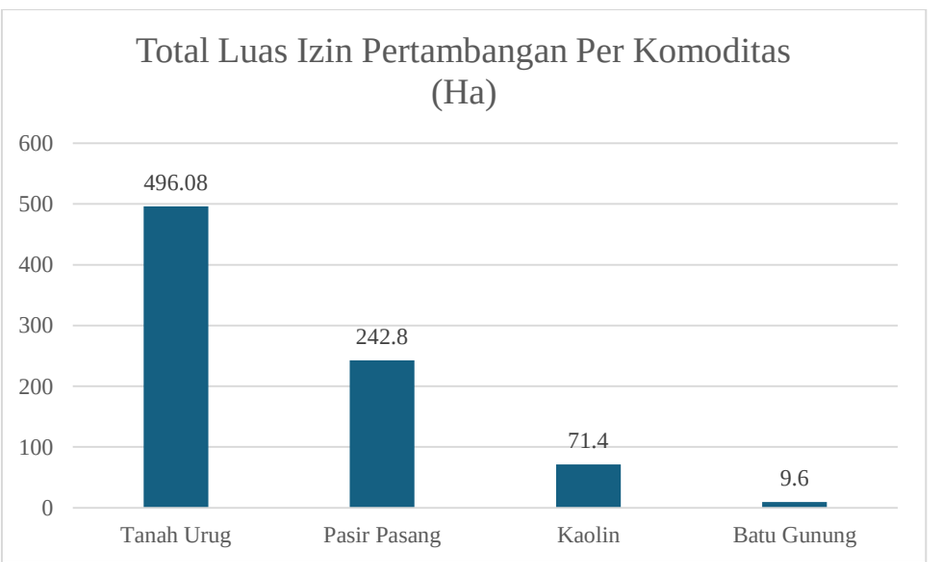

Gambar 2.3 Jumlah Izin Pertambangan Berdasarkan Status di Kabupaten Asahan

Sumber : KLHS RPJM Daerah Kabupaten Asahan, 2025-2029

Selain itu, terdapat isu tumpang tindih perizinan di delapan kawasan yang berada di bawah Hak Guna Usaha (HGU) PT. Inti Palm Sumatera dengan status pelepasan hutan untuk pertanian seluas total 6.041,287 hektare. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik tata ruang, mengurangi efektivitas pengelolaan lahan, dan menghambat penerapan prinsip efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.

Permasalahan utama dalam efisiensi pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Asahan meliputi:

1. Keterbatasan pengawasan akibat kewenangan perizinan yang berada di tingkat provinsi, sehingga koordinasi lintas pemerintah perlu diperkuat.
2. Potensi eksploitasi berlebih pada komoditas tertentu yang dapat mengancam daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3. Tumpang tindih perizinan antara izin tambang dan HGU yang dapat memicu konflik pemanfaatan lahan dan ketidakefisienan penggunaan ruang.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Pembangunan yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan (PB) harus dilakukan secara bijaksana, yaitu dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Definisi daya dukung dan daya tampung sendiri berdasarkan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

a. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya;
b. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Disamping UU PPLH Nomor 32/2009, daya dukung dan daya tampung lingkungan juga sudah menjadi dasar pertimbangan utama dalam perencanan tata ruang dan pembangunan sektor. Sebagai contoh antara lain:

a. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 20, Pasal 23 dan Pasal 25 menyiratkan bahwa penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional/provinsi/kabupaten /kota harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
b. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 1 (ayat 6) menyatakan bahwa pembangunan kelautan adalah pembangunan yang memberi arahan dalam pendayagunaan sumber daya Kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut;
c. UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 6 (ayat 1 huruf d) menyatakan bahwa perencanaan perkebunan dilakukan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
d. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, Pasal 32 (huruf c) (termasuk juga Pasal 18 dan Pasal 28), menyatakan bahwa kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus) dalam 1 (satu) WUPK (Wilayah Usaha Pertambangan Khusus) adalah Daya Dukung Lingkungan.
e. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pasal 7 (huruf c) menyatakan bahwa perencanaan pangan harus memperhatikan daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan

2.1.1.3.A Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Sumber daya air yang tersedia di suatu wilayah dapat berupa sumber air tanah dan air permukaan. Ketersediaan air tanah yang dimiliki suatu wilayah adalah air tanah pada aquifer bebas dengan jumlah sebesar kemampuan lahan pada wilayah tersebut menyerap air hujan. Untuk menjaga kelestarian sumberdaya air, air tanah dalam yang merupakan air pada aquifer tertekan tidak diperhitungkan dalam penghitungan ketersediaan air, karena air tanah dalam dikategorikan sebagai non- renewable resources (sumberdaya tidak terbarukan). Sementara sumber air permukaan dapat bersumber dari air sungai, air danau, situ, bendungan yang ada di wilayah tersebut dan atau dipasok/dialirkan dari luar wilayah.

Daya dukung air ditinjau dari ketersediaan air (supply air) dan kebutuhan air (demand air) terdapat dihitung melalui ketersediaan air dengan pendekatan limpasan air dan potensi mata air yang dibandingkan dengan kebutuhan air dari total kebutuhan air domestik dan non domestik.

Tabel 2.3 Koefisien Limpasan Air Permukaan

No	Deskripsi Permukaan	C_i
1.	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,03
2.	Belukar	0,07
3.	Hutan Primer	0,02
4.	Hutan Tanaman Industri	0,05
5.	Hutan Rawa Sekunder	0,15
6.	Perkebunan	0,4
7.	Pertanian Lahan Kering	0,1
8.	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	0,1
9.	Permukiman	0,6
10.	Sawah	0,15
11.	Tambak	0,05
12.	Lahan Terbuka	0,2
13.	Perairan	0,05

Sumber : Permen LH No. 17/2009

Debit limpasan air hujan ditentukan koefisien limpasan air hujan yang berbeda untuk setiap tipe tutupan lahan. Ketersediaan air (limpasan air permukaan) pada tahun 2022 di wilayah Kabupaten Asahan, sebesar 4,45 milyar m3.

Tabel 2.4 Ketersediaan Air Limpasan per Kecamatan (2022)

No	Kecamatan	Ketersediaan Air Limpasan
1	Aek Kuasan	195.662.460,58
2	Aek Ledong	123.985.719,76
3	Aek Songsongan	182.382.943,98
4	Air Batu	174.714.057,37
5	Air Joman	147.930.461,78
7	Bandar Pulau	426.097.007,00
8	Buntu Pane	206.432.924,04
9	Kota Kisaran Barat	43.335.479,19
10	Kota Kisaran Timur	45.981.336,11
11	Meranti	44.688.583,23
12	Pulau Rakyat	273.681.316,99
13	Pulo Bandring	115.161.087,34
14	Rahuning	251.626.270,47
15	Rawang Panca Arga	75.981.543,10
16	Sei Dadap	121.926.815,53
17	Sei Kepayang	433.811.293,32
18	Sei Kepayang Barat	66.824.323,58
19	Sei Kepayang Timur	86.943.153,72
20	Setia Janji	88.432.112,69

No	Kecamatan	Ketersediaan Air Limpasan
21	Silau Laut	104.937.353,27
22	Simpang Empat	175.122.530,49
23	Tanjung Balai	110.399.933,88
24	Teluk Dalam	142.610.941,98
25	Tinggi Raja	159.134.909,53
	Total	4.452.509.043,51

Sumber : KLHS RPJM Daerah Kabupaten Asahan, 2025-2029

Ketersediaan air limpasan terbanyak terdapat di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge sebesar 654,7 juta m3 . Jika ditambahkan debit aliran air sungai-sungai yang melalui wilayah Kabupaten Asahan seperti dijelaskan sebelumnya sebesar 30,6 liter/detik. Dengan asumsi penggunaan debit sebesar 20% dari intake penyediaan air bersih, sehingga terdapat penyediaan air bersih dari sungai sebesar 193.000.320 m3/tahun, sehingga total ketersediaan air bersih pada tahun 2022 menjadi 4,65 miliar m3.

Tabel 2.5 Ketersediaan Air di Kabupaten Asahan (2022)

Penggunaan Lahan	Luas	c	Luas * c
Vegetasi Lain	652,03	0,07	45,64
Danau/Waduk	96,83	0,05	4,84
Hutan Lahan Kering Primer	1,45	0,05	0,07
Hutan Lahan Kering Sekunder	35.726,14	0,05	1.786,31
Hutan Rawa Sekunder	15,81	0,05	0,79
Hutan Tanaman Industri	2.485,58	0,05	124,28
Ladang	4.920,85	0,10	492,09
Lahan Terbuka	131,96	0,07	9,24
Perkebunan Campuran	19.846,65	0,40	7.938,66
Perkebunan Karet	24.547,91	0,40	9.819,16
Perkebunan Kelapa Sawit	240.787,53	0,40	96.315,01
Permukiman	13.259,10	0,60	7.955,46
Pertambangan	1,90	0,07	0,13
Sawah Irigasi	7.323,39	0,15	1.098,51
Semak Belukar	21.432,14	0,07	1.500,25
Sungai	2.293,39	0,05	114,67
Tambak	188,58	0,05	9,43
Total	373.711,27		127.214,54
Koef. Tertimbang			0,34
Sedia Air Limpasan (m3) (10 Koef Tertimbang*Curah Hujan*Total Luas)*			*4.452.509.043,51*
Air Baku Sungai (m3/tahun) 20%* (Debit Sungai = 30,6 liter/detik)			193.000.320,00
Pasokan Air Total (m3)			4.645.509.363,51

Penggunaan Lahan	Luas	c	Luas * c
(Air Limpasan + Air Baku Sungai)			

Sumber : KLHS RPJM Daerah Kabupaten Asahan, 2025-2029

Kebutuhan Air

Berdasarkan Buku Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah (Kemen LHK, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor PDLKWS, 2019), menjelaskan bahwa standar kebutuhan air hidup layak bagi rumah tangga (domestik) dan non domestik disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.6 Standar Kebutuhan Air Domestik dan Non Domestik

No	Jenis Kebutuhan Air	Debit
1	Rumah Tangga	43,2 m3/kapita/tahun
2	Sawah Irigasi	10.368 m3/ha/tahun
3	Sawah Tadah Hujan	5.184 m3/ha/tahun
4	Sawad Pasang Surut	5.184 m3/ha/tahun
5	Ladang	7.776 m3/ha/tahun
6	Perkebunan	11.664 m3/ha/tahun
7	Kebun Campuran	7.776 m3/ha/tahun
8	Tanaman Campuran	7.776 m3/ha/tahun
9	Lahan terbangun	5 m3/ha/hari 30 % kebutuhan domestik
10	Bangunan Industri	0,4 liter/ha/detik
12	Bandar Udara	10 liter/ha/detik
13	Pelabuhan Laut	50 liter/ha/detik

Sumber : KLHS RPJM Daerah Kabupaten Asahan, 2025-2029

Kebutuhan air dengan penjumlahan kebutuhan domestik dan kebutuhan non domestik,

DA = DAd + DAnd

Keterangan :

DAd : kebutuhan air domestik (m3 /tahun)

DAnd : kebutuhan air non domestik/penggunan lahan (m3 /tahun)

Tabel 2.7 Kebutuhan Air Kabupaten Asahan Menurut Pengunaan Lahan (2022)

Penggunaan Lahan	Luas	D	Kebutuhan Air Penggunaan Lahan
Vegetasi Lain	652,03	0,00	0,00
Danau/Waduk	96,83	0,00	0,00
Hutan Lahan Kering Primer	1,45	0,00	0,00
Hutan Lahan Kering Sekunder	35.726,14	0,00	0,00
Hutan Rawa Sekunder	15,81	0,00	0,00

Penggunaan Lahan	Luas	D	Kebutuhan Air Penggunaan Lahan
Hutan Tanaman Industri	2.485,58	0,00	0,00
Ladang	4.920,85	7.776,00	38.264.566,92
Lahan Terbuka	131,96	0,00	0,00
Perkebunan Campuran	19.846,65	11.664,00	231.491.350,44
Perkebunan Karet	24.547,91	11.664,00	286.326.804,78
Perkebunan Kelapa Sawit	240.787,53	11.664,00	2.808.545.738,26
Permukiman	13.259,10	1.825,00	24.197.862,98
Pertambangan	1,90	0,00	0,00
Sawah Irigasi	7.323,39	10.368,00	75.928.904,62
Semak Belukar	21.432,14	0,00	0,00
Sungai	2.293,39	0,00	0,00
Tambak	188,58	10.368,00	1.955.223,98
Total	373.711,27	65.329,00	3.466.710.451,98

Sumber : KLHS RPJM Daerah Kabupaten Asahan, 2025-2029

Kebutuhan air total untuk penggunaan lahan di Kabupaten Asahan pada tahun 2022 sebesar 3,47 miliar m3. Kebutuhan air secara keseluruhan terdiri dari kebutuhan air domestik sebesar 68,06 juta m3 dan kebutuhan air untuk penggunaan lahan. Total kebutuhan air di Kabupaten Asahan pada tahun 2022 sebanyak 3,53 milyar m3.

Tabel 2.8 Kebutuhan Air di Kabupaten Asahan (2022)

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Domestik	Penggunaan Lahan	Kebutuhan Total
1	Aek Kuasan	26.215	2.264.976,00	155.311.373,61	157.576.349,61
2	Aek Ledong	20.717	1.789.948,80	98.226.219,36	100.016.168,16
3	Aek Songsongan	18.183	1.571.011,20	145.889.634,64	147.460.645,84
4	Air Batu	47.064	4.066.329,60	132.363.713,56	136.430.043,16
5	Air Joman	59.329	5.126.025,60	102.747.475,24	107.873.500,84
6	Bandar Pasir Mandoge	35.256	3.046.118,40	491.425.944,88	494.472.063,28
7	Bandar Pulau	24.234	2.093.817,60	333.044.809,06	335.138.626,66
8	Buntu Pane	24.984	2.158.617,60	162.858.612,91	165.017.230,51
9	Kota Kisaran Barat	61.201	5.287.766,40	23.397.647,11	28.685.413,51
10	Kota Kisaran Timur	83.795	7.239.888,00	19.815.817,76	27.055.705,76
11	Meranti	24.284	2.098.137,60	43.772.501,07	45.870.638,67
12	Pulau Rakyat	36.090	3.118.176,00	216.325.818,30	219.443.994,30
13	Pulo Bandring	34.537	2.983.996,80	86.172.205,06	89.156.201,86

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Domestik	Penggunaan Lahan	Kebutuhan Total
14	Rahuning	20.348	1.758.067,20	205.073.811,45	206.831.878,65
15	Rawang Panca Arga	20.351	1.758.326,40	74.304.372,64	76.062.699,04
16	Sei Dadap	37.055	3.201.552,00	83.797.326,23	86.998.878,23
17	Sei Kepayang	19.667	1.699.228,80	365.443.317,42	367.142.546,22
18	Sei Kepayang Barat	15.271	1.319.414,40	51.869.670,52	53.189.084,92
19	Sei Kepayang Timur	9.711	839.030,40	61.697.726,84	62.536.757,24
20	Setia Janji	12.998	1.123.027,20	71.021.704,27	72.144.731,47
21	Silau Laut	25.900	2.237.760,00	85.843.181,52	88.080.941,52
22	Simpang Empat	47.945	4.142.448,00	136.789.562,19	140.932.010,19
23	Tanjung Balai	42.636	3.683.750,40	85.234.965,73	88.918.716,13
24	Teluk Dalam	19.552	1.689.292,80	109.974.420,40	111.663.713,20
25	Tinggi Raja	20.358	1.758.931,20	124.308.620,22	126.067.551,42
	Total	787.681	68.055.638,40	3.466.710.451,98	3.534.766.090,38

Sumber : KLHS RPJM Daerah Kabupaten Asahan, 2025-2029

Daya Dukung Air Bersih

Besarnya daya dukung air dihitung dengan perbandingan antara potensi sumber air permukaan dengan kebutuhannya, sebagai berikut.

DDA = SA - DA

SA : Ketersediaan Air Bersih

DA : Kebutuhan Air Bersih

Tabel 2.9 Daya Dukung Air Total Kabupaten Asahan Tahun 2022

No	Kecamatan	Ketersediaan Limpasan	Kebutuhan	Surplus/Defisit	Daya Dukung
1	Aek Kuasan	195.662.460,58	157.576.349,61	38.086.110,97	Belum Terlampaui
2	Aek Ledong	123.985.719,76	100.016.168,16	23.969.551,60	Belum Terlampaui
3	Aek Songsongan	182.382.943,98	147.460.645,84	34.922.298,14	Belum Terlampaui
4	Air Batu	174.714.057,37	136.430.043,16	38.284.014,20	Belum Terlampaui
5	Air Joman	147.930.461,78	107.873.500,84	40.056.960,93	Belum Terlampaui
6	Bandar Pasir Mandoge	654.704.484,60	494.472.063,28	160.232.421,32	Belum Terlampaui

No	Kecamatan	Ketersediaan Limpasan	Kebutuhan	Surplus/Defisit	Daya Dukung
7	Bandar Pulau	426.097.007,00	335.138.626,66	90.958.380,34	Belum Terlampaui
8	Buntu Pane	206.432.924,04	165.017.230,51	41.415.693,53	Belum Terlampaui
9	Kota Kisaran Barat	43.335.479,19	28.685.413,51	14.650.065,68	Belum Terlampaui
10	Kota Kisaran Timur	45.981.336,11	27.055.705,76	18.925.630,36	Belum Terlampaui
11	Meranti	44.688.583,23	45.870.638,67	-1.182.055,44	Terlampaui
12	Pulau Rakyat	273.681.316,99	219.443.994,30	54.237.322,68	Belum Terlampaui
13	Pulo Bandring	115.161.087,34	89.156.201,86	26.004.885,48	Belum Terlampaui
14	Rahuning	251.626.270,47	206.831.878,65	44.794.391,82	Belum Terlampaui
15	Rawang Panca Arga	75.981.543,10	76.062.699,04	-81.155,94	Terlampaui
16	Sei Dadap	121.926.815,53	86.998.878,23	34.927.937,30	Belum Terlampaui
17	Sei Kepayang	433.811.293,32	367.142.546,22	66.668.747,10	Belum Terlampaui
18	Sei Kepayang Barat	66.824.323,58	53.189.084,92	13.635.238,66	Belum Terlampaui
19	Sei Kepayang Timur	86.943.153,72	62.536.757,24	24.406.396,48	Belum Terlampaui
20	Setia Janji	88.432.112,69	72.144.731,47	16.287.381,22	Belum Terlampaui
21	Silau Laut	104.937.353,27	88.080.941,52	16.856.411,75	Belum Terlampaui
22	Simpang Empat	175.122.530,49	140.932.010,19	34.190.520,31	Belum Terlampaui
23	Tanjung Balai	110.399.933,88	88.918.716,13	21.481.217,75	Belum Terlampaui
24	Teluk Dalam	142.610.941,98	111.663.713,20	30.947.228,77	Belum Terlampaui
25	Tinggi Raja	159.134.909,53	126.067.551,42	33.067.358,11	Belum Terlampaui
	Total	4.452.509.043,51	3.534.766.090,38	917.742.953,13	Belum Terlampaui

Sumber : KLHS RPJM Daerah Kabupaten Asahan, 2025-2029

Dengan memperhitungkan ketersediaan air limpasan serta kebutuhan total pada setiap kecamatan, terdapat 2 (dua) kecamatan yang daya dukung airnya sudah terlampaui, yaitu Kecamatan Meranti dan Rawang Panca Arga. Secara keseluruhan dengan

mempertimbangkan pasokan air sungai, maka daya dukung air di Kabupaten Asahan berada dalam status belum terlampaui dengan surplus sebesar 917.742.953,13 m3.

Proyeksi Daya Dukung Penyediaan air Bersih

Penghitungan daya dukung penyediaan Pangan Kabupaten Asahan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan perubahan guna lahan sekaligus. Perubahan guna lahan menggunakan pendekatan pembandingan penggunaan lahan saat ini dengan penggunaan lahan menurut rencana pola ruang RTRW Kabupaten Asahan.

Proyeksi Daya Dukung Air Bersih 2025-2029 di Kabupaten Asahan belum terlampaui atau surplus, pada tahun 2025 surplus sebanyak 1,127 miliar m3 dan surplus akan terus meningkat hingga pada tahun 2029 menjadi 1,15 miliar m3.

Tabel 2.10 Perkiraan Perubahan Penggunaan Lahan dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029

Penggunaan Lahan	2022	2045	Perubahan/ Tahun	2025	2026	2027	2028	2029
Hutan	38.213,17	102.940,62	2.814,24	46.655,88	49.470,12	52.284,36	55.098,59	57.912,83
Kawasan Perkebunan	285.182,09	220.096,92	-2.829,79	276.692,72	273.862,93	271.033,14	268.203,35	265.373,56
Kawasan Permukiman	13.259,10	28.619,18	667,83	15.262,59	15.930,42	16.598,25	17.266,08	17.933,91
Sawah	7.323,39	12.258,80	214,58	7.967,14	8.181,72	8.396,30	8.610,89	8.825,47
Ladang	4.920,85	7.459,36	110,37	5.251,96	5.362,33	5.472,70	5.583,07	5.693,44
Perikanan	188,58	950,90	33,14	288,02	321,16	354,30	387,45	420,59
Badan Air	2.390,22	692,74	-73,80	2.168,81	2.095,01	2.021,20	1.947,40	1.873,60
Kawasan Industri	0,00	692,74	30,12	90,36	120,48	150,60	180,72	210,84
Semak Belukar	22.233,86	0,00	-966,69	19.333,79	18.367,10	17.400,41	16.433,72	15.467,03
Total	373.711,27	373.711,27		373.711,27	373.711,27	373.711,27	373.711,27	373.711,27
Jumlah Penduduk				826.757	839.150	851.746	864.547	877.557

Sumber : KLHS RPJMD Asahan 2025-2029

Tabel 2.11 Proyeksi Daya Dukung Daya Air Bersih 2025-2029

DAYA DUKUNG AIR	2025		2026		2027		2028		2029	
	Ketersediaan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kebutuhan
Koef * Luas (ha)										
Hutan	2.332,79	0,00	2.473,51	0,00	2.614,22	0,00	2.754,93	0,00	2.895,64	0,00
Kawasan Perkebunan	110.677,09	3.227.343.889,17	109.545,17	3.194.337.221,07	108.413,26	3.161.330.552,96	107.281,34	3.128.323.884,86	106.149,42	3.095.317.216,76
Kawasan Permukiman	9.157,55	27.854.228,50	9.558,25	29.073.017,01	9.958,95	30.291.805,52	10.359,65	31.510.594,03	10.760,34	32.729.382,54
Sawah	1.195,07	82.603.291,40	1.227,26	84.828.086,99	1.259,45	87.052.882,58	1.291,63	89.277.678,18	1.323,82	91.502.473,77
Ladang	525,20	40.839.270,67	536,23	41.697.505,25	547,27	42.555.739,84	558,31	43.413.974,42	569,34	44.272.209,00
Perikanan	14,40	2.986.145,51	16,06	3.329.786,02	17,72	3.673.426,53	19,37	4.017.067,04	21,03	4.360.707,55
Badan Air	108,44	0,00	104,75	0,00	101,06	0,00	97,37	0,00	93,68	0,00
Kawasan Industri	18,07	1.139.812,00	24,10	1.519.749,34	30,12	1.899.686,67	36,14	2.279.624,00	42,17	2.659.561,34
Semak Belukar	1.353,37	0,00	1.285,70	0,00	1.218,03	0,00	1.150,36	0,00	1.082,69	0,00
Koef Tertimbang	*0,34*		*0,33*		*0,33*		*0,33*		*0,33*	
Sedia Air Limpasan (m3/tahun) (10* Koef Tertimbang*Curah Hujan*Total Luas)	4.388.369.374,06		4.366.985.794,54		4.345.602.215,03		4.324.218.635,51		4.302.835.056,00	
Air Baku Sungai (m3/tahun)	193.000.320,00		193.000.320,00		193.000.320,00		193.000.320,00		193.000.320,00	
Pasokan Air Total (m3/tahun)	4.581.369.694,06		4.559.986.114,54		4.538.602.535,03		4.517.218.955,51		4.495.835.376,00	

DAYA DUKUNG AIR	2025		2026		2027		2028		2029	
	Ketersediaan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kebutuhan
(Air Limpasan + Air Baku Sungai)										
Kebutuhan GL (m3/tahun		3.382.766.637,25		3.354.785.365,68		3.326.804.094,10		3.298.822.822,53		3.270.841.550,95
Kebutuhan Domestik (m3/tahun) (86,4 m3/kapita/tahun)		71.431.817,26		72.502.596,88		73.590.833,18		74.696.829,13		75.820.893,16
Kebutuhan Air Total (m3/tahun)		3.454.198.454,51		3.427.287.962,56		3.400.394.927,29		3.373.519.651,65		3.346.662.444,12
Surplus-Defisit (m3/tahun	1.127.171.239,55		1.132.698.151,98		1.138.207.607,74		1.143.699.303,86		1.149.172.931,88	
Daya Dukung	Belum Terlampaui		Belum Terlampaui		Belum Terlampaui		Belum Terlampaui		Belum Terlampaui	

Sumber : KLHS RPJMD Asahan 2025-2029

2.1.1.3.B Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

a. Ketersediaan Pangan

Kebutuhan pangan disediakan oleh sumber daya alam Kabupaten Asahan berupa komoditi pangan, yaitu jenis nabati : padi sawah dan ladang, jagung, kacang tanah, kacang ijo, ketela pohon, ketela rambat dan kedelai, jenis hewani: telur, unggas ternak, dan ikan yang menghasilkan kalori. Berikut jumlah Kalori Pangan yang tersedia oleh komoditi-komoditi pangan di Kabupaten Asahan.

Tabel 2.12 Produksi Kalori Pangan Nabati (Kabupaten Asahan) Tahun 2022

No	Kecamatan	ton	ton	ton	ton	ton	ton	ton	ton
		Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Kedelai	Kacang Hijau
	Kkalori /100 gr	**85**	**85**	**132**	**160**	**86**	**567**	**446**	**116**
1	B.P. Mandoge	-		570,63	1085,53				
2	Bandar Pulau	-		178,25	90,27				
3	Aek Songsongan	178,19	91,74	11,53	252,45				
4	Rahuning	-		67,32	252,86		1,23		
5	Pulau Rakyat			307,61	372,66	13,01	1,9		
6	Aek Kuasan	-		179,14	217,39	6,46			
7	Aek Ledong	-			174,69		0,59		
8	Sei Kepayang	26.670,78							
9	Sei Kepayang Barat								
10	Sei Kepayang Timur	66,31							
11	Tanjung Balai								
12	Simpang Empat	645,60		627,71	368,08	12,94			
13	Teluk Dalam			194,89	1450,87	22,55	1,94		
14	Air Batu			104,06	3162,18	110,08			
15	Sei Dadap			14,99	1133,89	12,25		1,27	
16	Buntu Pane		0,07	1232,67	249,72				
17	Tinggi Raja			16,61	961,37				1,28
18	Setia Janji	2.710,33			325,15	12,29			
19	Meranti	24.417,06		10,98	31,97				1,28
20	Pulo Bandring	1.565,38			88,79	12,99			
21	Rawang Panca Arga	320.000,78		5,48	166,38				2,56
22	Air Joman	246,14			67,12	26,31			
23	Silau Laut	867,21			57,72	6,43			
24	Kisaran Barat				45,08				
25	Kisaran Timur			2,71	330,94	12,97			
	Kab. Asahan	**377.367,78**	**91,81**	**3.524,58**	**10.885,11**	**248,28**	**5,66**	**1,27**	**5,12**

Sumber: KLHS RPJM Daerah Kabupaten Asahan, 2025-2029

Tabel 2.13 Produksi Kalori Pangan Hewani / Telur dan Unggas (Kabupaten Asahan) Tahun 2022

No	Kecamatan	Telur Ayam	Telur Ayam Kampung	Telur Itik	Broiler	Layer	Kampung	Itik
	Kkalori /100 gr	**154**	**154**	**189**	**117**	**117**	**117**	**117**
1	B.P. Mandoge		32,45	16,18	60,34		13,58	2,46
2	Bandar Pulau		163,25	11,05	113,73		90,16	2,32
3	Aek Songsongan		147,52	46,68	301,06		59,12	14,25
4	Rahuning		66,69	19,2	29,32		42,32	3,93
5	Pulau Rakyat	2800	84,11	224,03	195,67	468	32,53	36,17
6	Aek Kuasan		262,71	69,62	35,02		70,44	8,65
7	Aek Ledong	50	34,65	7,51	85,04	9,9	12,44	1,14
8	Sei Kepayang		1,93	0,46			4,75	0,1
9	Sei Kepayang Barat		1,71	0,51	42		0,75	0,11
10	Sei Kepayang Timur		2,36	0,86			1,63	0,12
11	Tanjung Balai		19,86	18,82			6,49	2,64
12	Simpang Empat	30,81	17,01	18,71	3541,49		6,48	0,1
13	Teluk Dalam		62,13	2,01	3415,06		14,1	0,53
14	Air Batu	34197,72	20,26	13,72	3977,58	7036,2	10,2	0,25
15	Sei Dadap	2650	38,97	3	3372,39	333	6,95	0,38
16	Buntu Pane		31,11	6,61			13,05	2,02
17	Tinggi Raja	6	47,25	3,13	147,32	1,08	5,83	1,38
18	Setia Janji	15	7,47	8	14,35		1,82	3,5
19	Meranti		25,75	28,37	20,02		6,88	3,24
20	Pulo Bandring		339,67	89,01	503,5	0,04	67,07	7,6
21	Rawang Panca Arga		23,09	36,49	29,7		5,49	4,18
22	Air Joman		35,93	16	3441,09		13,67	2,48
23	Silau Laut		69,15	38,73	3,15		24,73	5
24	Kisaran Barat		57,84	26,33			21,17	3,97
25	Kisaran Timur		7,43	5,03		367,98	18,56	4,81
	Kab. Asahan	**39.749,53**	**1.600,30**	**710,06**	**19.327,83**	**8.216,20**	**550,21**	**111,33**

Sumber: KLHS RPJM Daerah Kabupaten Asahan, 2025-2029

Tabel 2.14 Produksi Kalori Pangan Hewani/Ternak dan Ikan (Kabupaten Asahan) 2022

TERNAK POTONG				IKAN DARAT (ton)	
Sapi (200kg/ekor)	**Kerbau (342kg/ekor)**	**Kambing (10,14/ekor)**	**Babi (60,42/ekor)**	**Perairan Umum**	**Budidaya**
132,48	132	60	140	123	123
213		64			10,8

TERNAK POTONG				IKAN DARAT (ton)	
Sapi (200kg/ekor)	Kerbau (342kg/ekor)	Kambing (10,14/ekor)	Babi (60,42/ekor)	Perairan Umum	Budidaya
355		64			18,8
244		569	64		225,28
408		19			304,28
428		65			19,62
653		655	10		
89		765			
38		2			9,29
35		24			8,04
200		8			54,59
263		242			84
458		34			5,8
917		227			51,57
333		331	76		159,72
428		52			85,76
421		445			14,95
336		283			13,08
264	7	81	23		95,88
869	3	102			106,99
262		467	632		99
489	5	167			206,12
231		240			143,76
593		112			34,56
593		102			34,56
1520		233			19,2
10640	**15**	**5353**	**805**	-	**1805,65**

Sumber: KLHS RPJM Daerah Kabupaten Asahan, 2025-2029

Perhitungan kalori untuk pangan nabati dari padi menggunakan rasio Gabah Kering Panen (GKP) ke Gabah Kering Giling (GKG) sebesar 85,74 persen, dan rasio GKG ke Beras sebesar 63,68 persen.

Tabel 2.15 Produksi Kalori Pangan Kabupaten Asahan Tahun 2022 (kkal)

No	Kecamatan	Kalori Nabati	Kalori Telur dan Unggas	Kalori Ternak dan Ikan	Total Kalori Pangan (kkal)
1	B.P. Mandoge	2.490.079.600	168.385.100	70.110.245	2.728.574.945
2	Bandar Pulau	379.722.000	480.011.300	117.574.565	977.307.865
3	Aek Songsongan	543.675.452	741.403.000	350.618.735	1.635.697.187
4	Rahuning	500.412.500	206.125.200	482.483.792	1.189.021.492
5	Pulau Rakyat	1.024.262.800	5.757.340.200	137.931.335	6.919.534.335
6	Aek Kuasan	589.844.400	706.156.200	177.853.016	1.473.853.616
7	Aek Ledong	282.849.300	270.809.600	28.240.354	581.899.254
8	Sei Kepayang	12.304.924.686	4.777.600	21.507.360	12.331.209.646
9	Sei	-	45.658.800	19.308.962	64.967.762

No	Kecamatan	Kalori Nabati	Kalori Telur dan Unggas	Kalori Ternak dan Ikan	Total Kalori Pangan (kkal)
	Kepayang Barat				
10	Sei Kepayang Timur	30.593.014	6.464.900	120.186.421	157.244.335
11	Tanjung Balai	-	78.240.300	174.478.280	252.718.580
12	Simpang Empat	1.726.489.882	4.249.014.600	128.692.743	6.104.197.225
13	Teluk Dalam	2.609.039.600	4.103.265.900	307.781.869	7.020.087.369
14	Air Batu	5.291.516.000	64.471.941.700	293.126.092	70.056.583.792
15	Sei Dadap	1.850.210.000	8.648.738.500	219.204.364	10.718.152.864
16	Buntu Pane	2.026.708.695	76.618.500	132.646.747	2.235.973.943
17	Tinggi Raja	1.561.602.000	214.596.600	106.838.454	1.883.037.054
18	Setia Janji	1.781.256.763	70.462.050	190.318.942	2.042.037.755
19	Meranti	11.332.270.915	129.427.300	363.828.373	11.825.526.589
20	Pulo Bandring	875.444.612	1.433.755.900	247.445.862	2.556.646.374
21	Rawang Panca Arga	147.913.094.392	164.639.300	384.110.085	148.461.843.777
22	Air Joman	243.578.614	4.110.372.200	239.492.180	4.593.442.995
23	Silau Laut	497.980.850	220.710.900	200.312.169	919.003.919
24	Kisaran Barat	72.128.000	169.140.300	200.251.269	441.519.569
25	Kisaran Timur	544.235.400	25.125.800	427.774.190	997.135.390
	Kab. Asahan	**196.471.919.476,55**	**96.553.181.750,00**	**5.142.116.405,65**	**298.167.217.632,19**

Sumber: KLHS RPJM Daerah Kabupaten Asahan, 2025-2029

Total ketersediaan kalori pangan di Kabupaten Asahan pada tahun 2022 adalah sebesar 298,17 miliar kkal, terdiri dari kalori pangan nabati (padi, jagung, ubi, dan kacang-kacangan) 196,47 miliar kkal, kalori telur dan unggas sebanyak 96,55 miliar kkal serta kalori pangan ikan 5,14 miliar kkal. Ketersediaan pangan terbesar pada Kecamatan Rawang Panca Arga 148,46 Miliar kkal, dengan penyediaan kalori paling sedikit di Kecamatan Sei Kepayang Barat 64,97 juta kkal.

b. Kebutuhan Pangan

Kebutuhan Kalori pangan Kabupaten Asahan menggunakan penghitungan kalori, dimana kebutuhan kalori manusia per hari sebesar 2.100 Kkal per hari. Total kebutuhan kalori pangan Kabupaten Asahan sebesar 603,7 miliar Kkal per tahun. Kebutuhan pangan terbesar pada Kecamatan Kisaran Timur 64 miliar Kkal dan terkecil Kecamatan Sei Kepayang Timur 7,4 miliar Kkal.

Tabel 2.16 Kebutuhan Pangan Kabupaten Asahan tahun 2022 (Kkal/tahun)

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Pangan
1	B.P. Mandoge	35.256	27.023.724.000

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Pangan
2	Bandar Pulau	24.234	18.575.361.000
3	Aek Songsongan	18.183	13.937.269.500
4	Rahuning	20.348	15.596.742.000
5	Pulau Rakyat	36.090	27.662.985.000
6	Aek Kuasan	26.215	20.093.797.500
7	Aek Ledong	20.717	15.879.580.500
8	Sei Kepayang	**19.667**	15.074.755.500
9	Sei Kepayang Barat	15.271	11.705.221.500
10	Sei Kepayang Timur	9.711	7.443.481.500
11	Tanjung Balai	42.636	32.680.494.000
12	Simpang Empat	47.945	36.749.842.500
13	Teluk Dalam	19.552	14.986.608.000
14	Air Batu	47.064	36.074.556.000
15	Sei Dadap	37.055	28.402.657.500
16	Buntu Pane	24.984	19.150.236.000
17	Tinggi Raja	20.358	15.604.407.000
18	Setia Janji	12.998	9.962.967.000
19	Meranti	**24.284**	18.613.686.000
20	Pulo Bandring	34.537	26.472.610.500
21	Rawang Panca Arga	20.351	15.599.041.500
22	Air Joman	59.329	45.475.678.500
23	Silau Laut	25.900	19.852.350.000
24	Kisaran Barat	61.201	46.910.566.500
25	Kisaran Timur	83.795	64.228.867.500
	Kab. Asahan	**787.681**	**603.757.486.500**

Sumber: KLHS RPJM Daerah Kabupaten Asahan, 2025-2029

c. Daya Dukung Pangan

Penghitungan daya dukung penyediaan Pangan Kabupaten Asahan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan perubahan guna lahan sekaligus. Perubahan guna lahan menggunakan pendekatan pembandingan penggunaan lahan saat ini dengan penggunaan lahan menurut rencana pola ruang RTRW Kabupaten Asahan.

Tabel 2.17 Daya Dukung Penyediaan Kalori Tahun 2022 di Wilayah Kabupaten Asahan

No	Kecamatan	Ketersediaan	Kebutuhan Pangan	Surplus/Defisit	Daya Dukung Pangan
1	B.P. Mandoge	2.728.574.945	27.023.724.000	-24.295.149.055	TERLAMPAUI
2	Bandar Pulau	977.307.865	18.575.361.000	-17.598.053.135	TERLAMPAUI
3	Aek Songsongan	1.635.697.187	13.937.269.500	-12.301.572.313	TERLAMPAUI
4	Rahuning	1.189.021.492	15.596.742.000	-14.407.720.508	TERLAMPAUI
5	Pulau Rakyat	6.919.534.335	27.662.985.000	-20.743.450.665	TERLAMPAUI
6	Aek Kuasan	1.473.853.616	20.093.797.500	-18.619.943.884	TERLAMPAUI
7	Aek Ledong	581.899.254	15.879.580.500	-15.297.681.246	TERLAMPAUI
8	Sei Kepayang	12.331.209.646	15.074.755.500	-2.743.545.854	TERLAMPAUI
9	Sei Kepayang Barat	64.967.762	11.705.221.500	-11.640.253.738	TERLAMPAUI
10	Sei Kepayang Timur	157.244.335	7.443.481.500	-7.286.237.165	TERLAMPAUI

No	Kecamatan	Ketersediaan	Kebutuhan Pangan	Surplus/Defisit	Daya Dukung Pangan
11	Tanjung Balai	252.718.580	32.680.494.000	-32.427.775.420	TERLAMPAUI
12	Simpang Empat	6.104.197.225	36.749.842.500	-30.645.645.275	TERLAMPAUI
13	Teluk Dalam	7.020.087.369	14.986.608.000	-7.966.520.631	TERLAMPAUI
14	Air Batu	70.056.583.792	36.074.556.000	33.982.027.792	BELUM TERLAMPAUI
15	Sei Dadap	10.718.152.864	28.402.657.500	-17.684.504.636	TERLAMPAUI
16	Buntu Pane	2.235.973.943	19.150.236.000	-16.914.262.057	TERLAMPAUI
17	Tinggi Raja	1.883.037.054	15.604.407.000	-13.721.369.946	TERLAMPAUI
18	Setia Janji	2.042.037.755	9.962.967.000	-7.920.929.245	TERLAMPAUI
19	Meranti	11.825.526.589	18.613.686.000	-6.788.159.411	TERLAMPAUI
20	Pulo Bandring	2.556.646.374	26.472.610.500	-23.915.964.126	TERLAMPAUI
21	Rawang Panca Arga	148.461.843.777	15.599.041.500	132.862.802.277	BELUM TERLAMPAUI
22	Air Joman	4.593.442.995	45.475.678.500	-40.882.235.505	TERLAMPAUI
23	Silau Laut	919.003.919	19.852.350.000	-18.933.346.081	TERLAMPAUI
24	Kisaran Barat	441.519.569	46.910.566.500	-46.469.046.931	TERLAMPAUI
25	Kisaran Timur	997.135.390	64.228.867.500	-63.231.732.110	TERLAMPAUI
	Kab. Asahan	298.167.217.632	603.757.486.500	-305.590.268.868	**TERLAMPAUI**

Sumber: KLHS RPJM Daerah Kabupaten Asahan, 2025-2029

Dari data-data tersebut, dapat dihitung bahwa daya dukung pangan sudah terlampaui dengan defisit sebesar 305,59 miliar kkal, tetapi terdapat 2 (dua) kecamatan yang masih memiliki daya dukung pangan yang belum terlampaui/surplus, yaitu Kecamatan Rawang Panca Arga dengan surplus sebanyak 132,86 miliar kkal dan Kecamatan Air Batu yang memiliki surplus 33,98 miliar kkal.

Diproyeksikan daya dukung penyediaan pangan di Kabupaten Asahan tahun 2025-2029, maka pada tahun 2025 daya dukung penyediaan pangan di Kabupaten Asahan dalam status terlampaui, atau defisit sebesar -298,35 miliar kkal, dan akan terus menurun defisitnya pada tahun 2029 menjadi defisit sebesar 287,71 miliar kkal. Membaiknya kondisi daya dukung pangan disebabkan perluasan lahan sawah irigasi, ladang, dan budidaya perikanan.

Tabel 2.18 Perkiraan Perubahan Penggunaan Lahan Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029

Penggunaan Lahan	2022 (ha)	2045 (ha)	Perubahan /tahun	2025	2026	2027	2028	2029
Sawah (ha)	7.323,4	12.258,8	390	8.493,39	8.883,39	9.273,39	9.663,39	10.053,39
Ladang (ha)	4.920,9	7.459,4	110	5.251,96	5.362,33	5.472,70	5.583,07	5.693,44
Perikanan (ha)	188,6	950,9	33	288,02	321,16	354,30	387,45	420,59
Produksi Kalori Pangan (kkal/tahun)	**760.303.077.737,60**							
Beras	174.146.081.476,55							
Tanaman dan Ternak Ladang (Jagung, Ubi, Kacang-kacangan, Ayam, Ternak lainnya)	121.800.186.655,65							
Perikanan Darat	2.220.949.500,00							
	298.167.217.632,19							
Produktivitas Kalori Pangan (Kkal/ha/tahun)								
Beras	23.779.436,6							
Tanaman dan Ternak Ladang (Jagung, Ubi, Kacang-kacangan, Ayam, Ternak lainnya)	24.751.835,1							
Perikanan Darat	11.777.067,3							
Ketersedian Kalori Pangan (kkal/tahun)				**335.355.743.677,75**	**347.751.919.026,27**	**360.148.094.374,79**	**372.544.269.723,31**	**384.940.445.071,83**

Penggunaan Lahan	2022 (ha)	2045 (ha)	Perubahan /tahun	2025	2026	2027	2028	2029
Beras				201.968.022.287,80	211.242.002.558,21	220.515.982.828,63	229.789.963.099,05	239.063.943.369,46
Tanaman dan Ternak Ladang (Jagung, Ubi, Kacang-kacangan, Ayam, Ternak lainnya)				129.995.742.549,58	132.727.594.514,22	135.459.446.478,87	138.191.298.443,51	140.923.150.408,15
Perikanan Darat				3.391.978.840,38	3.782.321.953,84	4.172.665.067,29	4.563.008.180,75	4.953.351.294,21
Jumlah Penduduk (jiwa)				826.757	839.150	851.746	864.547	877.557
Kebutuhan Kalori Pangan (kkal/tahun)				**633.709.351.008,51**	**643.208.802.175,37**	**652.863.120.787,69**	**662.674.994.494,47**	**672.647.159.844,63**
Surplus/defisit Kalori Pangan (kkal/tahun)				**- 298.353.607.330,76**	**- 295.456.883.149,10**	**- 292.715.026.412,90**	**- 290.130.724.771,16**	**- 287.706.714.772,80**
Daya Dukung Pangan				**SUDAH TERLAMPAUI**	**SUDAH TERLAMPAUI**	**SUDAH TERLAMPAUI**	**SUDAH TERLAMPAUI**	**SUDAH TERLAMPAUI**

Sumber: KLHS RPJM Daerah Kabupaten Asahan, 2025-2029

2.1.1.3.C Percapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pencapaian target indikator pada pilar-pilar TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) memiliki hubungan yang erat dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Indikator pada pilar-pilar TPB dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dengan menghubungkan indikator TPB dengan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup, Pemerintah Daerah dapat merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan.

Jumlah indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) dalam kajian lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten Asahan ditetapkan sebanyak 209 indikator, 85 target dan 17 tujuan. Penetapan dilakukan dalam rapat internal Pokja dan sesuai dengan perkembangan dan hasil diskusi dan analisa bersama. Penilaian kinerja pencapaian target indikator TPB didasarkan pada target yang telah ditentukan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, serta nilai target RPJPN 2030-2045.

Secara umum kategori pencapaian indikator TPB Kabupaten Asahan dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu :

(1) SS: Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional;

(2) SB: Sudah Dilaksanakan, Belum Mencapai Target Nasional;

(3) TD: Tidak Ada Data;

(4) B: Belum Dilaksanakan.

Hasil capaian TPB di Kabupaten Asahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Data indikator yang telah mencapai target nasional di Kabupaten Asahan sudah mencapai kurang lebih 52,15%, atau sebanyak 109 indikator dari total 209 indikator, dan yang belum mencapai target nasional sebesar 40,67% atau 85 indikator. Sementara, indikator yang tidak memiliki data mencukupi dan belum dilaksanakan sebanyak 15 indikator atau sekitar 7,18%.

Tabel 2.19 Capaian TPB Berdasarkan Kategori Capaian

Pencapaian 2022	Jumlah	%
Sudah Dilaksanakan, Sudah Mencapai Target (SS)	109	52,15
Sudah Dilaksanakan, Belum Mencapai Target (SB)	85	40,67
Tidak Ada Data (TD)	14	6,7
Belum Dilaksanakan (B)	1	0,48
Total	**209**	**100**

Sumber: Bapperida Asahan, KLHS RPJM Daerah Kabupaten Asahan, periode 2025-2029, diolah

Sebanyak 209 indikator TPB dibagi atau dikelompokkan ke dalam 4 (empat) pilar pembangunan, yaitu:

1. Pilar Sosial (95 indikator).
2. Pilar Ekonomi (52 indikator),
3. Pilar Lingkungan (45 indikator), dan
4. Pilar Hukum dan Tata Kelola (21 indikator)

Kinerja pencapaian TPB berdasarkan pilar-pilar TPB adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.20 Capaian TPB Berdasarkan Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Pilar	SS	SB	TD	BB	Total	Persentase Capaian
SOSIAL	54	33	8		95	57%
EKONOMI	25	23	4		52	48%

Pilar	SS	SB	TD	BB	Total	Persentase Capaian
LINGKUNGAN	19	20	1	1	41	46%
HUKUM & TATA KELOLA	11	9	1		21	52%
Total	**109**	**85**	**14**	**1**	**209**	

Sumber: Bapperida Asahan, KLHS RPJM Daerah Kabupaten Asahan, periode 2025-2029, diolah

Dari pencapaian masing-masing pilar pembangunan, yang paling besar telah mencapai target adalah indikator-indikator pada Pilar Sosial sebanyak 54 indikator, diikuti Pilar Ekonomi sebanyak 25 indikator, kemudian Pilar Lingkungan sebanyak 19 indikator, dan Pilar Hukum dan Tata Kelola sebanyak 11 indikator. Dilihat dari pencapaian pada masing-masing Pilar, indikator-indikator Pilar Sosial sebesar 57% yang telah mencapai target nasional. Kemudian, Pilar Hukum & Tata Kelola sebanyak 52%, dan Pilar Ekonomi sebesar 48%, yang paling sedikit mencapai target nasional adalah Pilar Lingkungan sebesar 46%.

Sebaran jumlah indikator TPB pada masing-masing TPB berbeda-beda, dan jumlah yang terbesar adalah terkait TPB 3 Kehidupan yang Sehat, sebanyak 34 indikator; TPB 1 Mengakhiri Kemiskinan sebanyak 23 indikator; dan TPB 16 Masyarakat, Keadilan dan Kelembagaan sebanyak 21 indikator. Dilihat dari persentase pencapaian indikator TPB pada masing-masing TPB, yang telah mencapai target yang paling banyak berasal dari TPB 5 – Mencapai Kesetaraan Gender sebesar 71,43% atau 10 dari 14 indikator, TPB 4 – Mencapai Kualitas Pendidikan sebesar 69,23% atau 9 dari 13 indikator, dan TPB 14 – Melestarikan Ekosistem Laut sebesar 66,7% atau 2 dari 3 indikator. Sebaliknya, ketidakcapaian TPB untuk kategori belum mencapai target, paling besar berasal dari TPB 13 – Mengatasi Perubahan Iklim sebanyak 100% dari 2 indikator, dan TPB 15 – Melindungi, Merestorasi dan Memanfaatkan Ekosistem Daratan sebanyak 100% dari 4 indikatornya.

Tabel 2.21 Pencapaian Indikator TPB di Kabupaten Asahan

No.	TPB	SS	SB	TD	B	Jumlah
1	Mengakhir Kemiskinan	11	12			23
2	Menghilangkan Kelaparan	7	2	2		11
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat	17	12	5		34
4	Menjamin Kualitas Pendidikan	9	4		1	13
5	Mencapai Kesetaraan Gender	10	3	1		14
6	Menjamin Air Bersih dan Sanitasi	11	6			17
7	Menjamin Akses Energi	1		1	2	2
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	7	11	1		19
9	Membangun Infrastruktur	5	3	2		10
10	Mengurangi Industri Inovasi					
11	Mengurangi Kesenjangan	5	2	1		8
12	Menjadikan Kota dan Permukiman	4	4			8
13	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi	2	3			5

No.	TPB	SS	SB	TD	B	Jumlah
14	Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	2			2	2
15	Melestarikan dan Memanfaatkan sumber daya kelautan dan perairan	2	1		3	3
16	Memudahkan Merestorasi dan Memanfaatkan Ekosistem Daratan	4			4	4
17	Masyrakat yang Inklusif dan Damai	11	9	1		21
18	Merealisasikan Kemitraan	8	7			15
Total		**109**	**85**	**14**	**1**	**209**

Sumber: Bapperida Asahan, KLHS RPJM Daerah Kabupaten Asahan, periode 2025-2029, diolah

Berdasarkan hasil kajian diatas, Isu Strategis KLHS yang harus diperhatikan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia, Keluarga dan Masyarakat Inklusif, Lebih Maju dan Merata.
2. Pertumbuhan ekonomi yang Terintegrasi/Inklusif dan berkelanjutan dimotori oleh Sektor Perkebunan.
3. Perlindungan dan Pengelolaan Sumber daya alam dan Lingkungan Hidup (lahan hutan, dan pantai) yang aman, bermanfaat bagi semua pihak secara lestari.
4. Kesiapan penanganan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Alam dan peningkatan .
5. Terbatasnya Kapasitas dan Tata Kelola kinerja pemerintah Daerah dan pelayanan publik, masyarakat partisipatif.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi mensyaratkan jaminan akan ketersediaan sumber daya esensial. Mewujudkan masyarakat yang berketahanan energi, air, dan memiliki kemandirian pangan merupakan pilar fundamental dalam mencapai kesejahteraan dan stabilitas wilayah. Sub-bab ini akan menguraikan gambaran capaian untuk memastikan aksesibilitas energi yang andal dan terbarukan, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung berbagai sektor kehidupan, serta penguatan kedaulatan pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri dan berkesinambungan.

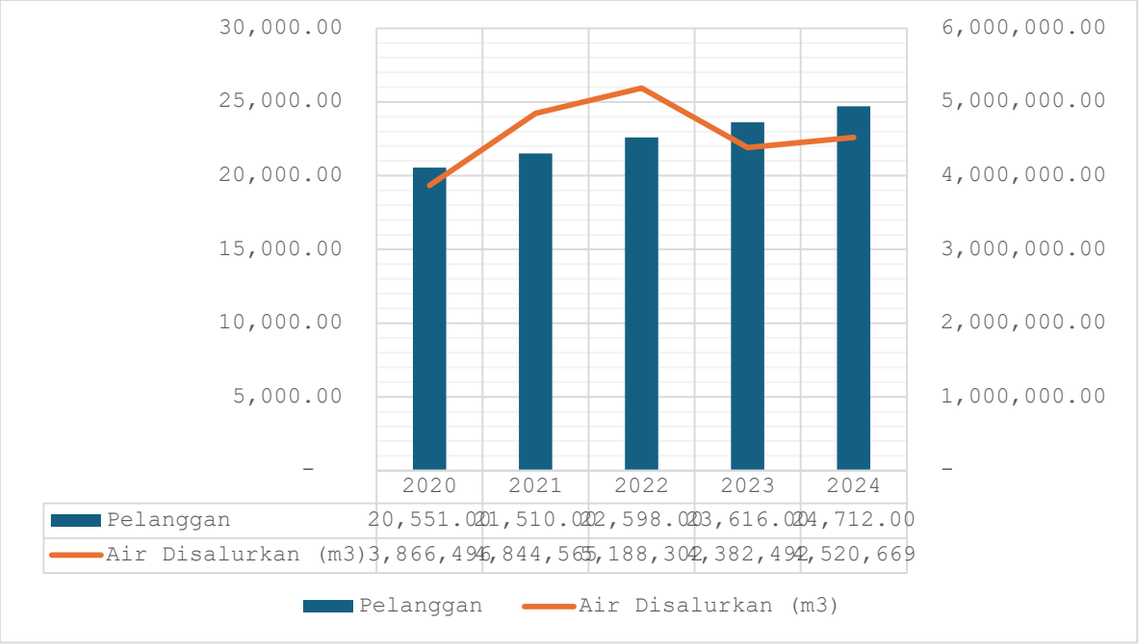

Gambar 2.4 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Kabupaten Asahan, 2020-2024

Sumber: Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kabupaten Asahan, 2025

Grafik di atas menunjukkan perkembangan jumlah pelanggan dan volume air yang disalurkan di Kabupaten Asahan selama periode 2020 hingga 2024. Jumlah pelanggan secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimulai dari 20.551 pada tahun 2020 dan mencapai 24.712 pada tahun 2024, menandakan pertumbuhan permintaan layanan air bersih. Sementara itu, volume air yang disalurkan juga menunjukkan tren kenaikan dari 3.866.496,0 m^3 di tahun 2020 menjadi 5.188.302,0 m^3 pada tahun 2022, sebelum sedikit menurun pada tahun 2023 menjadi 4.382.492,0 m^3 dan kembali meningkat di tahun 2024 menjadi 4.520.669,0 m^3. Meskipun ada sedikit fluktuasi pada volume air yang disalurkan di tahun 2023, tren umum menunjukkan peningkatan kapasitas penyaluran air seiring dengan bertambahnya jumlah pelanggan di Kabupaten Asahan.

Pangan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang tak tergantikan. Memenuhi kebutuhan makanan adalah suatu hal yang vital dan tidak bisa diabaikan. Ketersediaan pangan menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah Daerah. Komoditas beras, sebagai sumber makanan utama, menjadi poin utama dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk di Kabupaten Asahan.

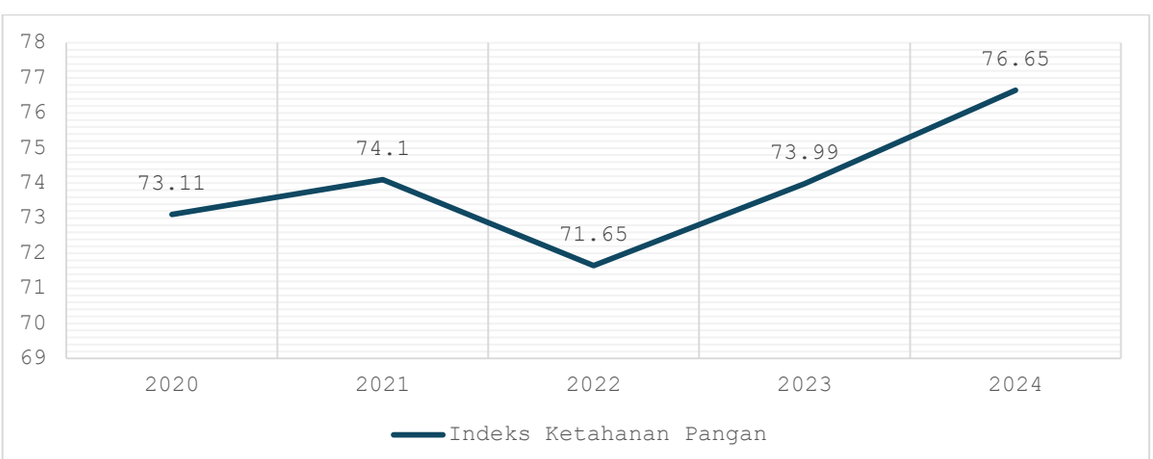

Gambar 2.5 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan, 2020-2024

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan

Grafik Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi namun dengan tren peningkatan secara keseluruhan. Pada tahun 2020, Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan tercatat sebesar 73,11. Angka ini sedikit meningkat di tahun berikutnya, yaitu sebesar 74,1. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan yang cukup signifikan, di mana indeks turun menjadi 71,65. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan atau kendala yang memengaruhi ketahanan pangan pada tahun tersebut, seperti faktor ekonomi, produksi pertanian, atau distribusi pangan. Meskipun demikian, Kabupaten Asahan berhasil bangkit kembali pada tahun 2023 dengan kenaikan indeks menjadi 73,99 yang menunjukkan adanya upaya pemulihan atau keberhasilan program-program yang dijalankan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Nilai tertinggi tercapai pada tahun 2024, di mana Indeks Ketahanan Pangan melonjak signifikan hingga mencapai 76,65. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam periode lima tahun terakhir. Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2022, tren Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan positif, yang puncaknya dicapai pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Asahan.

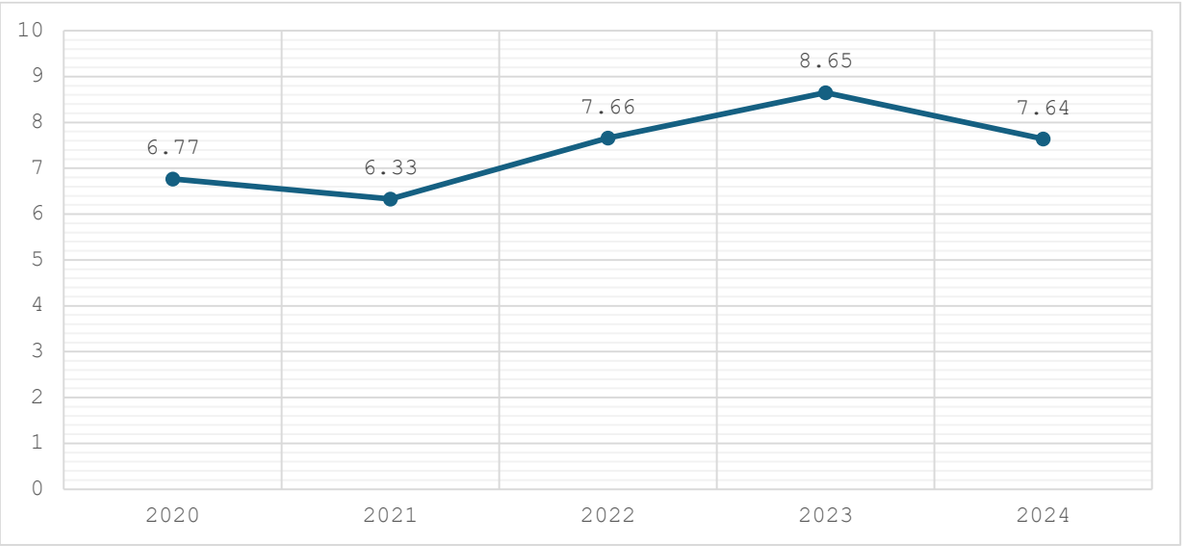

Gambar 2.6 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Persen) Per Kabupaten/kota (Persen) Kabupaten Asahan, 2020-2024

Sumber : BPS, 2025

Grafik Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Asahan dari tahun 2020 hingga 2024 menampilkan tren yang bervariasi. Pada awal periode, angka ketidakcukupan konsumsi pangan berada di 6,77 persen. Angka ini kemudian menunjukkan sedikit perbaikan pada tahun 2021 dengan penurunan menjadi 6,33 persen yang mengindikasikan bahwa proporsi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan semakin berkurang. Namun, tren positif ini berbalik arah pada tahun-tahun berikutnya. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan meningkat cukup tajam menjadi 7,66 persen pada tahun 2022, dan terus melonjak hingga mencapai puncaknya di 8,65 persen pada tahun 2023. Meskipun terjadi sedikit penurunan menjadi 7,64 persen di tahun 2024, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan prevalensi di awal periode tahun 2020 dan 2021. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanganan ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Asahan menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam periode 2022-2024.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Indikator yang menjadi fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mengelola urusan lingkungan hidup meliputi penanganan dan pengurangan sampah. Adapun capaian kinerja lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22 Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan tahun 2018-2023

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	61,1	61,8	65,04	66,81	64,61
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	24,6	32,36	32,44	32,87	33,2
Persentase Penurunan Emisi GRK	Persen	n/a	-16,06	0	-0,69	12,71
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	43,1	44,05	45,15	49,69	30,26
Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	10,8	26,21	26,21	26,21	46,73

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menunjukkan peningkatan dari 61,1 pada tahun 2020 menjadi 64,61 pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa meskipun kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Asahan sudah cukup baik, masih belum sepenuhnya optimal. Indeks Kualitas Tutupan Lahan juga mengalami peningkatan setiap tahun, dari 24,6 pada tahun 2020 menjadi 33,2 pada tahun 2024, menandakan bahwa kondisi tutupan hutan dan vegetasi non-hutan di Kabupaten Asahan terus membaik.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Kabupaten Asahan telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam peningkatan cakupan layanan persampahan, khususnya pada aspek pengumpulan sampah rumah tangga. Berdasarkan data, proporsi rumah tangga yang memperoleh layanan pengumpulan sampah secara penuh meningkat tajam dari hanya 10,8 persen pada tahun 2020 menjadi 46,73 persen pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan kinerja yang sangat baik dalam penyediaan layanan dasar kepada masyarakat, sekaligus menunjukkan keberhasilan perluasan akses dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah.

Namun demikian, peningkatan pada aspek pengumpulan sampah belum sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan kapasitas dan efektivitas pengolahan sampah. Indikator *sampah terolah di fasilitas pengolahan persampahan* justru mengalami penurunan dalam periode yang sama. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara volume sampah yang berhasil dikumpulkan dan kapasitas fasilitas yang tersedia untuk mengelolanya. Tanpa penguatan sistem pengolahan, peningkatan pengumpulan sampah berisiko menimbulkan persoalan baru, seperti penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pencemaran lingkungan, serta peningkatan emisi gas rumah kaca dari sektor limbah.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan inovatif dalam penguatan sistem pengolahan persampahan. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas infrastruktur pengolahan, seperti pembangunan atau revitalisasi fasilitas pemrosesan, perluasan program pemilahan sampah dari sumber, serta penerapan teknologi tepat

guna untuk mendukung pengomposan, daur ulang, dan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi (*waste-to-energy*). Di samping itu, diperlukan penguatan tata kelola pengelolaan sampah melalui pembentukan kelembagaan yang kuat, peningkatan kompetensi SDM, serta kolaborasi multipihak, termasuk masyarakat, swasta, dan organisasi masyarakat sipil.

Pendekatan tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pengelolaan persampahan yang berkelanjutan, sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular dan target nasional dalam pengurangan dan penanganan sampah. Dengan demikian, Kabupaten Asahan diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan capaian layanan pengumpulan sampah yang tinggi, tetapi juga memastikan bahwa sampah yang terkumpul dapat dikelola secara efektif, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat.

2.1.1.5.A Perkiraan Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis risiko lingkungan hidup. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menilai besaran dampak, serta menentukan langkah pengelolaan yang tepat guna menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan manusia.

Analisis risiko di Kabupaten Asahan mencakup tiga komponen utama:

1. Pengkajian Risiko: Meliputi identifikasi potensi bahaya, penilaian konsekuensi, dan perkiraan kemungkinan munculnya dampak terhadap kualitas lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat.
2. Pengelolaan Risiko: Meliputi penentuan prioritas dan strategi pengendalian risiko, termasuk penerapan teknologi pengolahan limbah, perbaikan tata kelola persampahan, serta upaya pencegahan bencana.
3. Komunikasi Risiko: Melibatkan pertukaran informasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pengelolaan risiko.

Berdasarkan proyeksi data lingkungan Kabupaten Asahan, perkiraan dampak dan risiko yang dihadapi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.23 Proyeksi Data Lingkungan Kabupaten Asahan

Aspek Lingkungan	Kondisi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2029	Potensi Dampak	Risiko Lingkungan
Timbulan Sampah	206,69 ton/hari	219,39 ton/hari	Peningkatan volume sampah akan menambah beban TPA dan berpotensi meningkatkan pencemaran tanah, air, dan udara	Penurunan kualitas lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat jika tidak dikelola optimal
Produksi Lumpur Tinja	150.883 m^3	160.154 m^3	Peningkatan volume lumpur tinja memerlukan kapasitas pengolahan yang memadai untuk mencegah pencemaran air tanah	Risiko kontaminasi sumber air dan penyebaran penyakit berbasis air
Volume Air Limbah Domestik	12.070.654 m^3	12.812.327 m^3	Peningkatan volume air limbah domestik memerlukan pengelolaan sistem	Risiko pencemaran badan air dan penurunan kualitas

Aspek Lingkungan	Kondisi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2029	Potensi Dampak	Risiko Lingkungan
			sanitasi dan IPAL yang efektif	lingkungan perairan
Potensi Banjir	-	-	Karakteristik morfologi wilayah yang memiliki aliran sungai menuju lembah cekungan meningkatkan kerentanan banjir	Kerugian ekonomi, kerusakan infrastruktur, dan ancaman keselamatan jiwa

Sumber : KLHS RPJM Daerah Kabupaten Asahan, 2025-2029

2.1.1.5.B Jasa Ekosistem

Kabupaten Asahan memiliki dua ekosistem utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, yaitu ekosistem mangrove dan ekosistem gambut. Kedua ekosistem ini tidak hanya berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan sumber keanekaragaman hayati, tetapi juga memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan karbon dan perlindungan tata air.

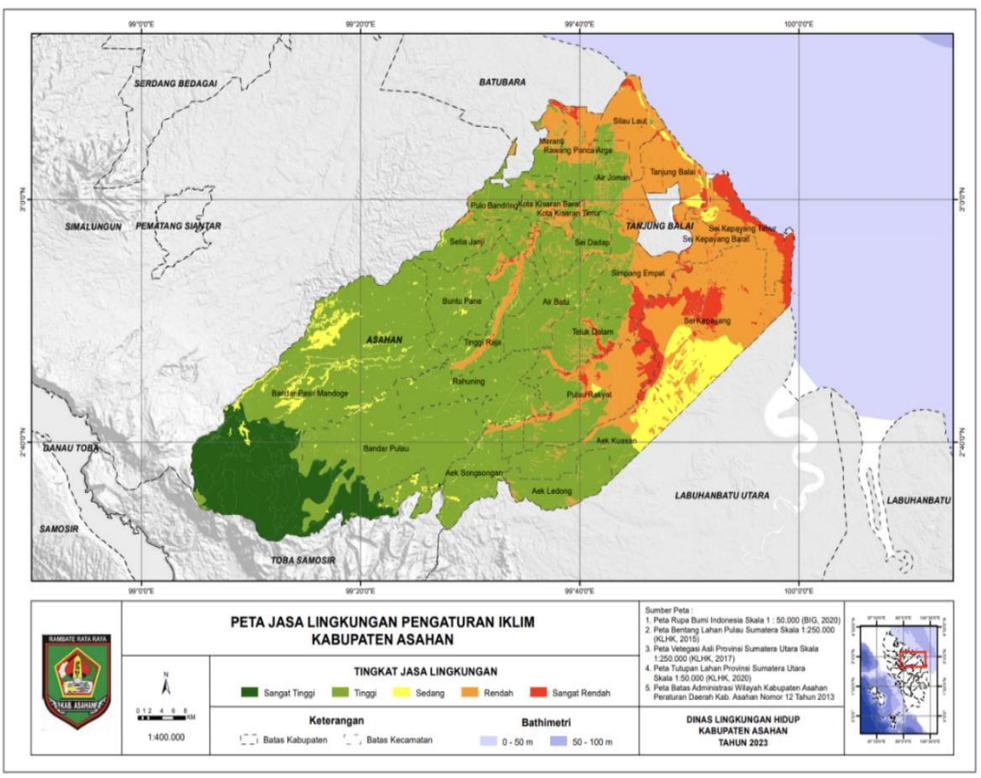

Gambar 2.7 Sebaran Jasa Ekosistem Pendukung

Sumber : KLHS RPJM Daerah Kabupaten Asahan, 2025-2029

1. Ekosistem Mangrove

Mangrove di Kabupaten Asahan memiliki luasan total 5.096,54 hektare yang tersebar di enam kecamatan. Komposisi terbesar adalah mangrove kerapatan jarang seluas 4.795,90 ha (94,1% dari total), disusul mangrove kerapatan sedang 298,39 ha (5,9%) dan mangrove kerapatan lebat hanya 2,25 ha (0,04%). Sebaran terbesar berada di Kecamatan Sei Kepayang Timur (3.429,59 ha atau 67,3% dari total).

Analisis menunjukkan dominasi mangrove kerapatan jarang menjadi indikasi tekanan ekologis yang cukup tinggi. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh alih fungsi lahan pesisir, penebangan, dan konversi menjadi tambak atau pemukiman.

Rendahnya luasan mangrove kerapatan lebat menunjukkan berkurangnya area dengan fungsi ekologi optimal, yang berdampak pada penurunan kemampuan perlindungan pantai dari abrasi, penyediaan habitat biota pesisir, serta kapasitas penyerapan karbon.

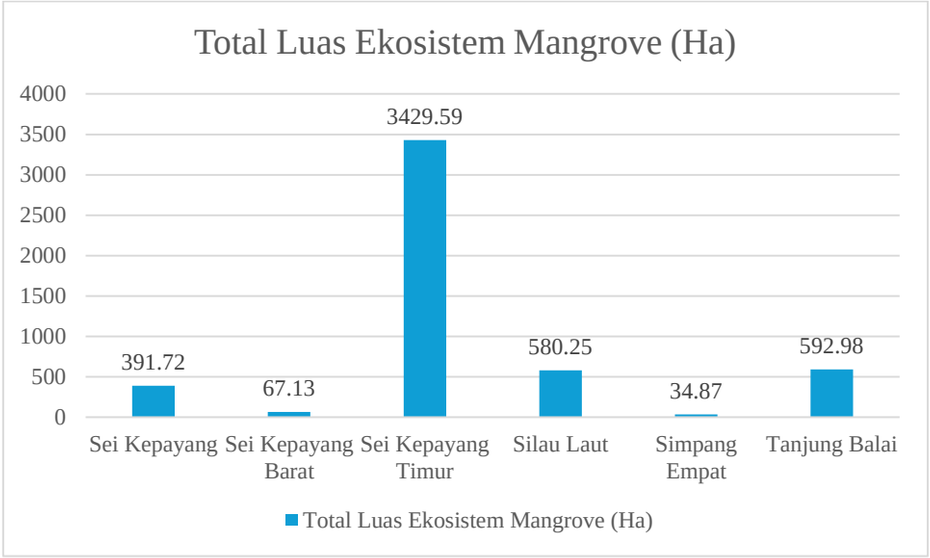

Gambar 2.8 Total Luas Ekosistem Mangrove Per Kecamatan di Kabupaten Asahan

Sumber : KLHS RPJM Daerah Kabupaten Asahan, 2025-2029

2. Ekosistem Gambut

Luas ekosistem gambut di Kabupaten Asahan mencapai 62.737,04 hektare dengan konsentrasi terbesar di Kecamatan Sei Kepayang (36.817 ha atau 58,7% dari total), diikuti Pulau Rakyat (15,2%) dan Aek Kuasan (9,2%). Gambut memiliki peran penting sebagai penyerap karbon jangka panjang, pengatur tata air, serta pencegah intrusi air laut.

Namun, distribusi yang terkonsentrasi pada wilayah tertentu membuat ekosistem gambut rentan terhadap degradasi apabila tidak dikelola secara berkelanjutan. Bukti degradasi terlihat dari adanya perubahan penggunaan lahan gambut untuk perkebunan dan permukiman, yang dapat mengakibatkan pelepasan karbon dalam jumlah besar, meningkatkan risiko kebakaran lahan, serta mengganggu keseimbangan hidrologis wilayah.

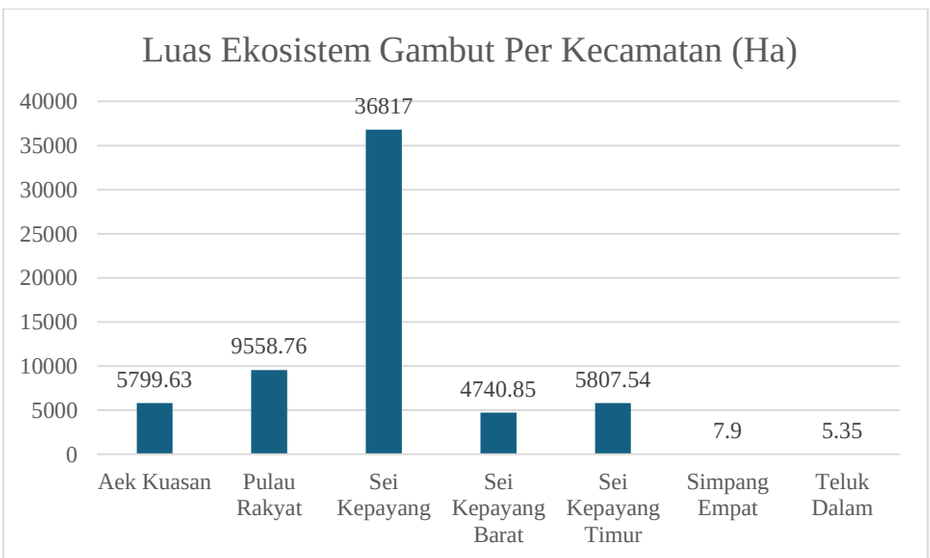

Gambar 2.9 Luas Ekosistem Gambut Per Kecamatan di Kabupaten Asahan

Sumber : KLHS RPJM Daerah Kabupaten Asahan, 2025-2029

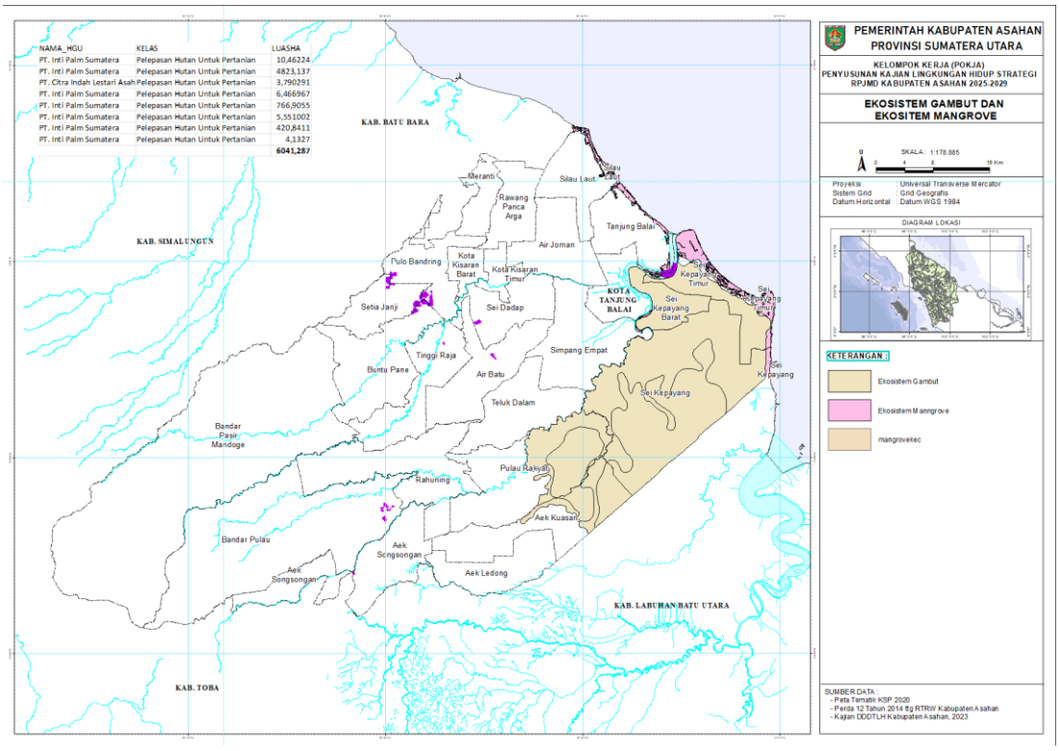

Gambar 2.10 Sebaran Ekosistem Mangrove dan Gambut di Kabupaten Asahan

Sumber : KLHS RPJM Daerah Kabupaten Asahan, 2025-2029

2.1.1.5.C Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

a. Potensi Ekosistem Hutan, Mangrove, dan Gambut

Kabupaten Asahan memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang tersebar di berbagai tipe ekosistem, mulai dari ekosistem hutan pegunungan, ekosistem sungai dan riparian, ekosistem pantai, hingga ekosistem mangrove dan gambut. Keberadaan ekosistem ini mencerminkan tingginya nilai jasa lingkungan, termasuk penyediaan habitat satwa liar, pengaturan tata air, penyerapan karbon, dan perlindungan pesisir.

Ekosistem hutan di kawasan perbukitan dan pegunungan berperan sebagai pusat keanekaragaman hayati dengan status kinerja tinggi, menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna endemik. Ekosistem gambut berfungsi sebagai penyerap karbon jangka panjang dan pengatur tata air, sedangkan ekosistem mangrove berperan menahan abrasi dan menyediakan habitat bagi biota pesisir. Ekosistem sungai dan riparian menghubungkan ekosistem darat dan laut, memungkinkan aliran energi dan nutrien yang menjaga keseimbangan ekologi wilayah.

b. Tingkat Ketahanan Keanekaragaman Hayati (Shape Index)

Ketahanan keanekaragaman hayati di Kabupaten Asahan dipengaruhi oleh tingkat fragmentasi habitat, yang dapat diukur menggunakan Shape Index (rasio luas terhadap keliling patch hutan). Semakin tinggi fragmentasi, semakin rapuh habitat tersebut terhadap gangguan, kehilangan rantai makanan, dan terganggunya aliran material ekosistem.

Hutan di bagian utara Kabupaten Asahan menjadi habitat penting bagi satwa dilindungi seperti harimau (Panthera tigris). Namun, sebagian habitat telah mengalami tekanan hingga masuk dalam kategori endangered dan critical endangered. Data menunjukkan variasi tingkat ketahanan:

Tabel 2.24 Ketahanan Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Asahan

Kawasan/Patch Hutan (Kecamatan)	Ketahanan
Hutan Mangrove Sei Kepayang, Sei Kepayang, Sebagian kecil Kec. Tanjung Balai – 1,056 Ha	Rendah
Hutan Mangrove Sei Kepayang, Sei Kepayang, Sebagian kecil Kec. Tanjung Balai, dan sebagian kecil Kec. Silau Laut – 1,056 Ha	Agak Rendah
Hutan Mangrove sebagian besar Kec. Tanjung Balai, dan sebagian kecil Kec. Silau Laut – 111,88 Ha	Sedang
Hutan Primer Kec. Aek Songsongan – 1719,95 Ha	Tinggi
Hutan Primer sebagian besar di Kec. BP Mandoge dan Kec. Bandar Pulau – 37997,55 Ha	Tinggi

Sumber : KLHS RPJM Daerah Kabupaten Asahan, 2025-2029

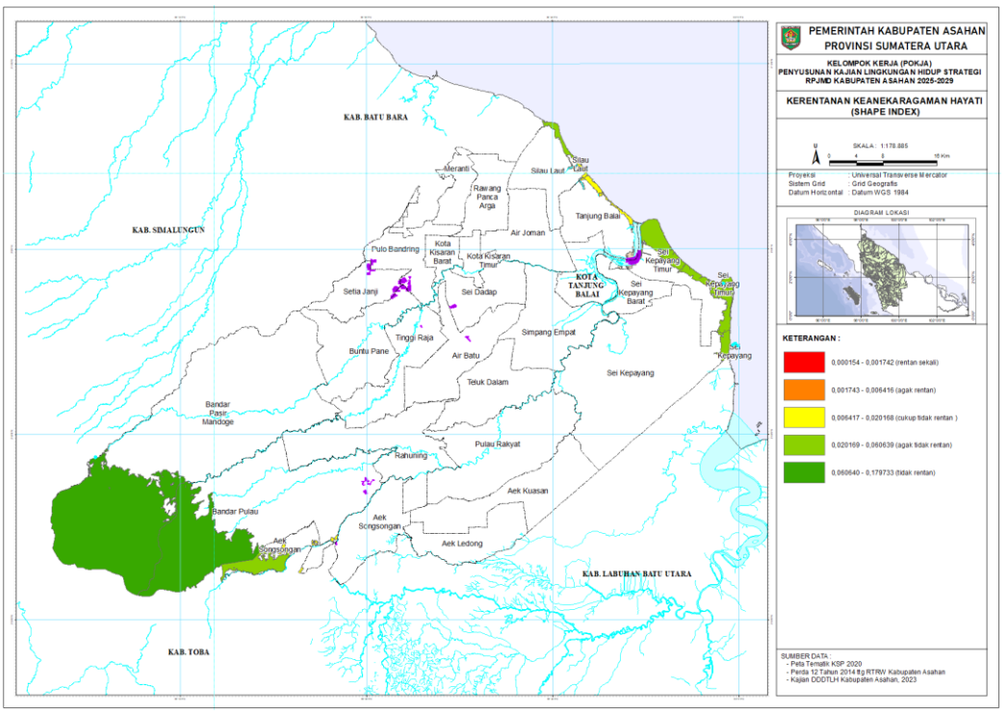

Gambar 2.11 Sebaran Ketahanan Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Asahan

Sumber : KLHS RPJM Daerah Kabupaten Asahan, 2025-2029

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Persentase penurunan emisi GRK juga meningkat setiap tahun, dari 24,60 persen pada tahun 2018 hingga 29,10 persen pada tahun 2023, menunjukkan perbaikan dalam pengurangan emisi GRK di Kabupaten Asahan. Pengolahan sampah di fasilitas pengolahan sampah meningkat setiap tahun, dari 42,78 persen pada tahun 2018 menjadi 49,69 persen pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa sampah rumah tangga sudah diolah dengan baik, meskipun belum sepenuhnya optimal, sehingga kesadaran masyarakat masih diperlukan.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) adalah alat ukur komprehensif yang mengintegrasikan data ancaman bahaya, kerentanan, dan kapasitas suatu wilayah untuk menilai potensi kerugian akibat bencana. Kegunaannya sangat vital dalam perencanaan pembangunan, memungkinkan pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi area prioritas dengan risiko tertinggi, mengalokasikan sumber daya secara efisien, serta merumuskan kebijakan mitigasi dan adaptasi yang tepat sasaran. Capaian indeks risiko bencana Kabupaten Asahan ditunjukkan oleh gambar berikut:

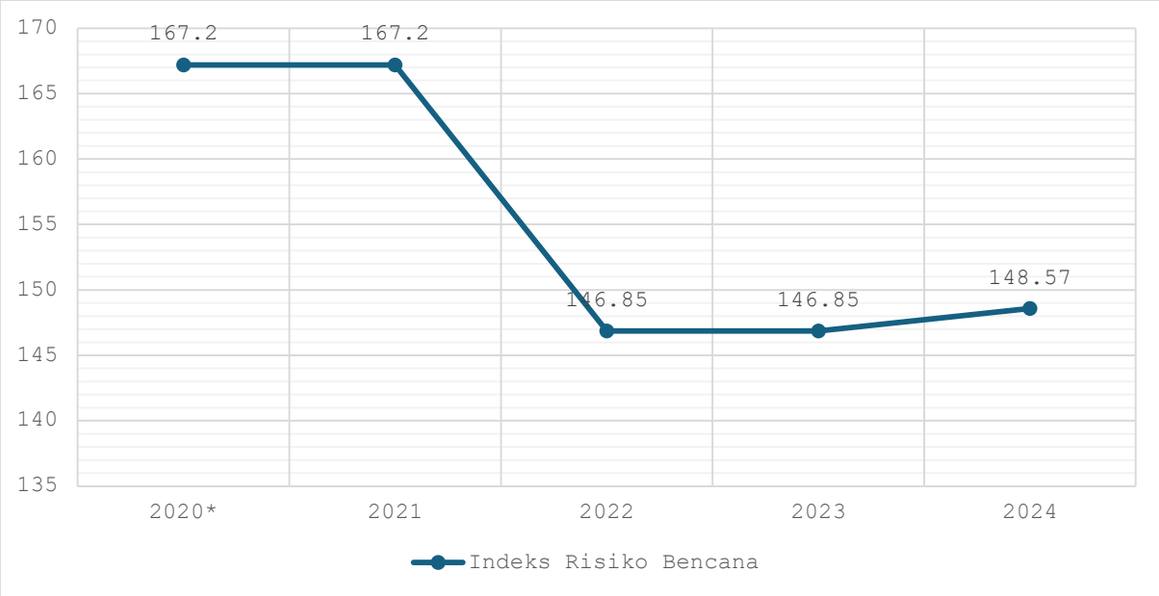

Gambar 2.12 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Asahan, 2020-2024

Sumber : inarisk.bnpb.go.id, 2025

IRBI Kabupaten Asahan menunjukkan dinamika yang signifikan dalam periode 2020-2024, merefleksikan upaya mitigasi dan adaptasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Daerah. Pada tahun 2020-2021, capaian IRBI Kabupaten Asahan berada pada level yang relatif tinggi yaitu sebesar 167,2. Selanjutnya, pada tahun 2022 tercatat peningkatan signifikan dalam upaya mitigasi bencana dengan menurunnya capaian IRBI hingga 146,85. Meskipun demikian, pada tahun 2024, terlihat sedikit peningkatan capaian IRBI menjadi 148,57. Meskipun peningkatan ini relatif kecil dan masih jauh di bawah level tahun 2020-2021, namun perlu menjadi catatan untuk mengevaluasi penyebab peningkatan tersebut guna menjaga tren penurunan risiko bencana di masa mendatang.

2.1.1.6.A Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Kabupaten Asahan memiliki ekosistem yang secara alami memberikan jasa lingkungan berupa pengaturan iklim mikro, termasuk pengaturan suhu, kelembaban, curah hujan, angin, serta pengendalian gas rumah kaca dan penyerapan karbon. Fungsi ini dipengaruhi oleh faktor biotik seperti vegetasi dan faktor fisik seperti ketinggian dan bentuk lahan. Wilayah dengan kepadatan vegetasi tinggi dan topografi pegunungan memiliki kapasitas adaptasi yang lebih baik, seperti kawasan hutan di bagian tengah hingga perbukitan kabupaten.

Namun, beberapa kawasan ekosistem strategis mengalami degradasi. Mangrove dan lahan gambut di Kabupaten Asahan berada dalam kategori kondisi rendah hingga sangat rendah akibat konversi lahan untuk permukiman dan perkebunan, penebangan, serta penghilangan vegetasi alami. Degradasi ini mengurangi kemampuan wilayah dalam menyerap karbon dan mengendalikan dampak pemanasan global.

Hasil analisis Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) menunjukkan terdapat desa-desa dengan status *cukup rentan* terhadap perubahan iklim, yaitu Desa Siumbut Baru (Kecamatan Kisaran Timur), Desa Batu Anam (Kecamatan Rahuning), dan Desa Perkebunan Teluk Dalam (Kecamatan Teluk Dalam). Kerentanan tersebut mencakup aspek sosial-ekonomi (pendapatan rendah, tingkat pendidikan rendah), kerentanan fisik (fasilitas kesehatan dan pendidikan terbatas), serta kerentanan lingkungan (vegetasi mudah terbakar).

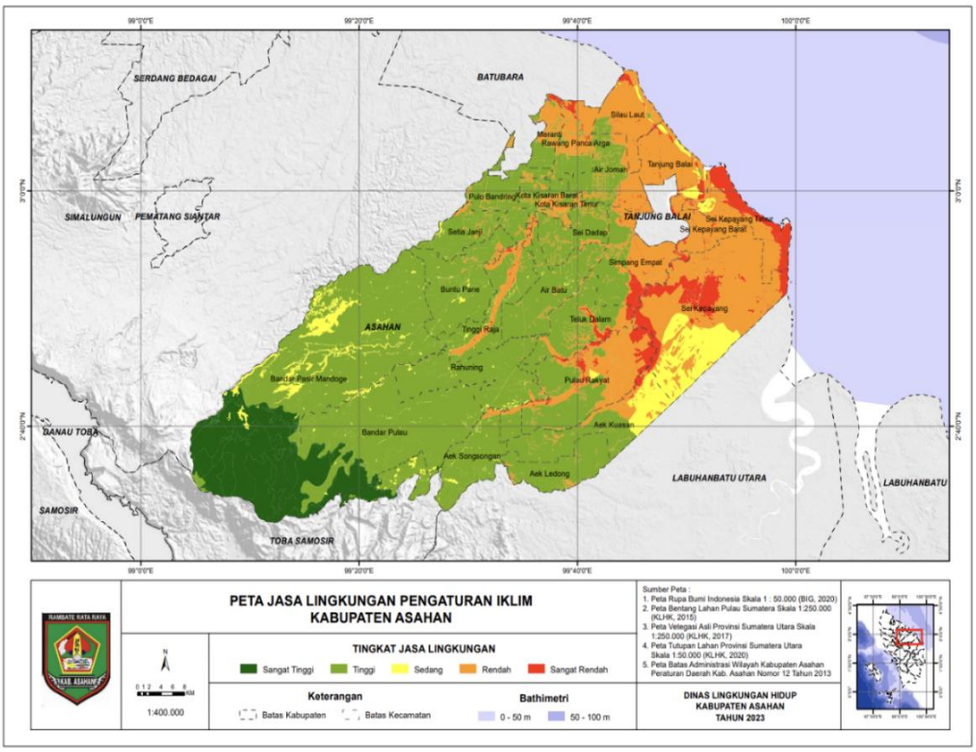

Gambar 2.13 Jasa Lingkungan Pengatur Iklim

Sumber: KLHS RPJM Daerah Kabupaten Asahan, 2025-2029

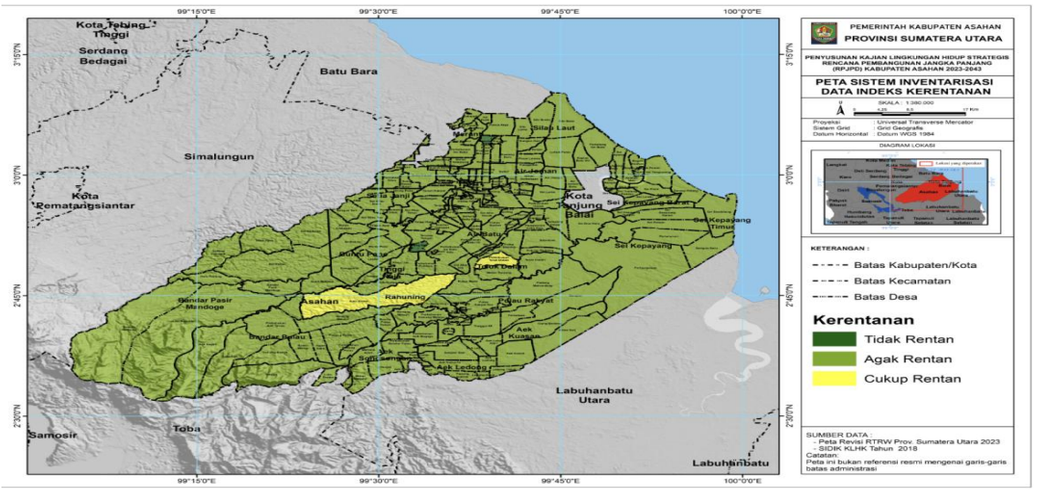

Gambar 2.14 Sebaran Kerentanan Desa di Kabupaten Asahan terhadap Dampak Perubahan Iklim

Sumber: KLHS RPJM Daerah Kabupaten Asahan, 2025-2029

2.1.1.7 Demografi Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Hasil analisis komposisi penduduk dari tahun 2020 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi perubahan signifikan dalam komposisi penduduk. Mayoritas penduduk masih terdiri dari usia muda, menandakan tingkat kelahiran yang tinggi, sehingga jumlah penduduk usia muda tetap tinggi. Kondisi ini menekankan pentingnya fokus pemerintah pada pendidikan awal, pelatihan, dan pengembangan keterampilan agar generasi mendatang siap untuk mengambil peran dalam pembangunan dan mencegah kemunduran Daerah. Ini dapat dicapai melalui

pembangunan infrastruktur pendidikan, lembaga pelatihan, sarana sosial masyarakat, dan upaya serupa lainnya.

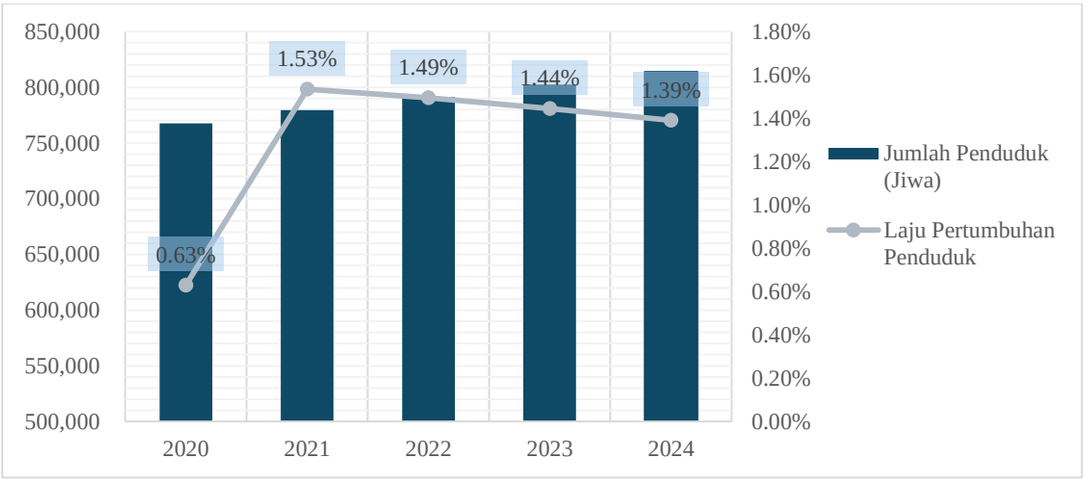

Gambar 2.15 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024

Sumber: Kabupaten Asahan Dalam Angka, 2021-2025

Hasil analisis komposisi penduduk dari tahun 2020 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi perubahan signifikan dalam komposisi penduduk. Mayoritas penduduk masih terdiri dari usia muda, menandakan tingkat kelahiran yang tinggi, sehingga jumlah penduduk usia muda tetap tinggi. Kondisi ini menekankan pentingnya fokus pemerintah pada pendidikan awal, pelatihan, dan pengembangan keterampilan agar generasi mendatang siap untuk mengambil peran dalam pembangunan dan mencegah kemunduran Daerah. Ini dapat dicapai melalui pembangunan infrastruktur pendidikan, lembaga pelatihan, sarana sosial masyarakat, dan upaya serupa lainnya.

Selama rentang waktu 2020-2024, populasi di Kabupaten Asahan terus meningkat, mencapai 813.720 jiwa pada tahun 2024. Pada tahun tersebut, perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan adalah sebesar 50,53 persen untuk laki-laki dan 49,47 persen untuk perempuan.

Tabel 2.25 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sebaran Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)			Persebaran Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
		L	P	Jumlah		
1	B. P. Mandoge	18.021	17.843	35.864	4,41%	50,26
2	Bandar Pulau	12.817	12.222	25.039	3,08%	93,29
3	Aek Songsongan	9.363	9.215	18.578	2,28%	65,83
4	Rahuning	10.618	10.349	20.967	2,58%	107,08
5	Pulau Rakyat	18.507	18.588	37.095	4,56%	173,63
6	Aek Kuasan	13.691	13.265	26.956	3,31%	188,33
7	Aek Ledong	10.646	10.359	21.005	2,58%	246,78
8	Sei Kepayang	10.326	9.904	20.230	2,49%	54,57
9	Sei Kepayang Barat	8.004	7.794	15.798	1,94%	321,15
10	Sei Kepayang Timur	5.094	4.866	9.960	1,22%	98,96

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)			Persebaran Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
		L	P	Jumlah		
11	Tanjung Balai	22.716	21.574	44.290	5,44%	499,42
12	Simpang Empat	25.226	24.538	49.764	6,12%	366,53
13	Teluk Dalam	10.083	9.976	20.059	2,47%	171,43
14	Air Batu	24.676	24.086	48.762	5,99%	416,25
15	Sei Dadap	19.530	18.853	38.383	4,72%	463,66
16	Buntu Pane	12.702	12.845	25.547	3,14%	166,54
17	Tinggi Raja	10.582	10.285	20.867	2,56%	193,40
18	Setia Janji	6.694	6.649	13.343	1,64%	213,93
19	Meranti	12.686	12.643	25.329	3,11%	558,80
20	Pulo Bandring	18.368	17.618	35.986	4,42%	413,66
21	Rawang Panca Arga	10.567	10.399	20.966	2,58%	311,21
22	Air Joman	31.732	30.485	62.217	7,65%	634,26
23	Silau Laut	13.878	13.245	27.123	3,33%	320,32
24	Kota Kisaran Barat	31.356	31.231	62.587	7,69%	1.907,84
25	Kota Kisaran Timur	43.255	43.750	87.005	10,69%	2.884,04
Jumlah		411.138	402.582	813.720	100%	217,98

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2025

Jika berdasarkan kecamatan, maka Kecamatan Kota Kisaran Timur memegang posisi sebagai kecamatan dengan populasi terbesar, mencapai 87.005 jiwa, dengan tingkat persebaran penduduk sebesar 10,69 persen. Sementara itu, Kecamatan Kota Kisaran Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 62.587 jiwa, dengan tingkat persebaran penduduk sebesar 7,69 persen. Di sisi lain, Kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Sei Kepayang Timur, mencapai 9.960 jiwa, dengan tingkat persebaran penduduk sebesar 1,22 persen, diikuti oleh Kecamatan Setia Janji, yang memiliki 13.343 jiwa dengan tingkat persebaran penduduk sebesar 1,64 persen.

Perencanaan pembangunan harus disusun dengan mempertimbangkan data dan informasi terkini mengenai jumlah penduduk serta estimasinya di masa mendatang. Informasi ini menjadi dasar untuk mengevaluasi kemajuan pembangunan yang telah terjadi dan merumuskan kebijakan pembangunan di masa depan. Selain jumlah penduduk, penting juga untuk memperhitungkan faktor-faktor demografis seperti distribusi usia penduduk, sex ratio, angka ketergantungan, dan kepadatan penduduk. Data-data ini sangat berperan dalam merancang perencanaan pembangunan yang presisi. Informasi semacam ini dapat diperoleh melalui perhitungan proyeksi penduduk. Untuk keperluan proyeksi, dilakukan pergeseran penduduk dasar dari hasil Survei Penduduk 2020.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, diperkirakan jumlah penduduk di Kabupaten Asahan pada akhir periode RPJM Daerah (2029) bertambah sebanyak 62,7 ribu jiwa dari tahun 2025, sehingga menjadi 865,26 ribu jiwa pada tahun 2029. Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Asahan diperkirakan akan terus mengalami penurunan, dari 1,28% pada

tahun 2026 menjadi 1,14% pada tahun 2029. Tren ini menunjukkan perlambatan pertumbuhan populasi, yang dapat berdampak pada dinamika sosial dan ekonomi Daerah.

Pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dengan ketersediaan lahan yang terbatas menyebabkan semakin tingginya kepadatan penduduk di Kabupaten Asahan. Pada tahun 2029, diproyeksikan kepadatan penduduk di Kabupaten Asahan mencapai angka 231,79 jiwa per km². Oleh karena itu, kebijakan perencanaan tata ruang dan pengelolaan sumber daya harus disusun secara optimal untuk menyeimbangkan pertumbuhan penduduk dengan daya dukung lingkungan dan ketersediaan infrastruktur. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 2.16 berikut.

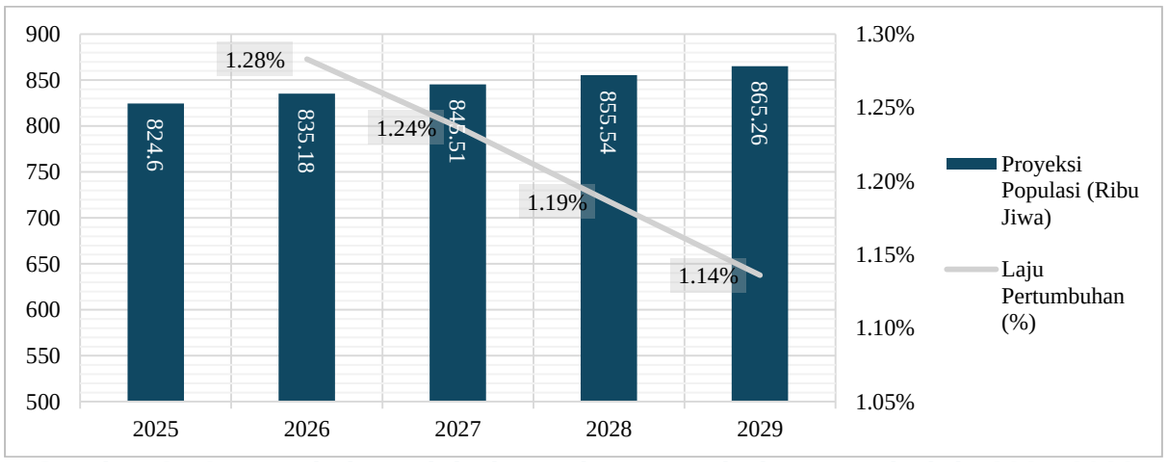

Gambar 2.16 Proyeksi Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk, 2025-2029

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2023 (diolah)

Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, proporsi penduduk usia 0-14 tahun di Kabupaten Asahan diproyeksikan mengalami penurunan dari 26,93 persen pada tahun 2025 menjadi 26,16 persen pada tahun 2028. Penurunan ini mencerminkan adanya tren penurunan angka Total Fertility Rate (TFR) yang berkontribusi terhadap menurunnya jumlah kelahiran.

Selain itu, proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) juga menunjukkan tren penurunan dari 66,93 persen pada tahun 2025 menjadi 66,79 persen pada tahun 2028. Penurunan ini dapat berdampak pada dinamika tenaga kerja dan produktivitas ekonomi Daerah, sehingga diperlukan kebijakan strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Di sisi lain, proporsi penduduk lansia (65 tahun ke atas) mengalami peningkatan dari 6,13 persen pada tahun 2025 menjadi 7,05 persen pada tahun 2028. Kenaikan ini mengindikasikan adanya tren peningkatan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Asahan, yang perlu diantisipasi dengan kebijakan yang mendukung kesejahteraan lansia, seperti peningkatan layanan kesehatan, jaminan sosial, serta fasilitas pendukung bagi kelompok usia tua.

Perubahan dalam struktur demografi ini menunjukkan perlunya perencanaan pembangunan yang adaptif untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kebutuhan tenaga kerja, serta kesiapan infrastruktur dan layanan sosial bagi seluruh kelompok usia

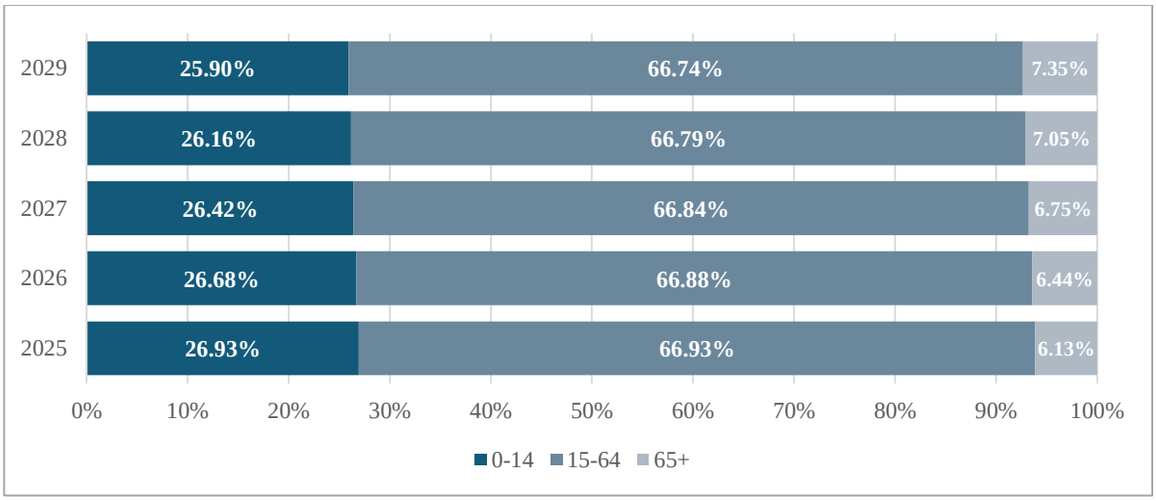

Gambar 2.17 Proyeksi Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur, Tahun 2025-2029

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2023 (diolah)

Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Asahan diproyeksikan meningkat dari 49,40 persen pada tahun 2025 menjadi 49,83 persen pada tahun 2029. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung hampir 50 penduduk usia nonproduktif. Meskipun meningkat, Kabupaten Asahan masih menikmati bonus demografi, dengan proporsi penduduk usia produktif yang relatif tinggi.

Namun, tren kenaikan rasio ketergantungan ini menunjukkan perlunya strategi penguatan sumber daya manusia, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan tenaga kerja, serta jaminan sosial bagi penduduk nonproduktif guna menjaga keseimbangan ekonomi Daerah.

Distribusi Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Distribusi penduduk menurut lapangan pekerjaan utama merupakan salah satu indikator yang mencerminkan struktur dan dinamika perekonomian daerah, serta komposisi angkatan kerja berdasarkan sektor ekonomi. Berdasarkan data yang tersedia, total penduduk bekerja di Kabupaten Asahan sebanyak 378.039 orang, yang tersebar pada tiga kelompok sektor utama, yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan (manufaktur), dan sektor jasa.

Tabel 2.26 Distribusi Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2024

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian	97.895	22.711	120.606
Manufaktur	45.875	17.025	62.900
Jasa-Jasa	93.216	101.317	194.533
Jumlah/Total	236.986	141.053	378.039

1. Dominasi Sektor Jasa sebagai Penunjang Ekonomi Tersier

   Sektor jasa menyerap tenaga kerja terbanyak, yakni 194.533 orang atau sekitar 51,5% dari total penduduk yang bekerja. Tingginya proporsi tenaga kerja di sektor ini menunjukkan pergeseran struktur ekonomi masyarakat dari sektor primer dan sekunder ke arah sektor tersier, yang menandai peningkatan aktivitas ekonomi berbasis layanan. Selain itu, sektor ini mencerminkan kontribusi penting terhadap penciptaan lapangan kerja inklusif, ditunjukkan dengan dominasi tenaga kerja perempuan yang mencapai 101.317 orang atau sekitar 52,1% dari total pekerja sektor jasa.

2. Sektor Pertanian Masih Berperan Strategis meskipun Cenderung Menurun

   Sektor pertanian mencakup 120.606 orang atau 31,9% dari total tenaga kerja, menempatkannya sebagai sektor terbesar kedua. Meskipun proporsinya relatif lebih rendah dibandingkan sektor jasa, keberadaan sektor pertanian tetap strategis dalam menopang ketahanan pangan dan ekonomi perdesaan. Distribusi tenaga kerja di sektor ini didominasi oleh laki-laki sebanyak 97.895 orang (81,2%), yang menunjukkan bahwa kegiatan produksi pertanian masih bersifat padat karya dan tradisional. Ke depan, transformasi sektor pertanian melalui mekanisasi dan diversifikasi perlu terus diupayakan untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan petani.

3. Sektor Industri Pengolahan sebagai Penopang Industrialisasi Daerah

   Sektor industri pengolahan (manufaktur) menyerap 62.900 orang atau 16,6% dari total penduduk yang bekerja. Proporsi ini menunjukkan bahwa sektor sekunder telah memberikan kontribusi terhadap struktur ekonomi daerah, khususnya dalam menciptakan nilai tambah dan peluang kerja formal. Tenaga kerja di sektor ini didominasi oleh laki-laki sebanyak 45.875 orang (72,9%), yang menunjukkan bahwa sektor industri di wilayah ini masih terpusat pada aktivitas padat modal dan belum sepenuhnya menyerap tenaga kerja perempuan secara proporsional.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dipahami melalui perubahan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh semua sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik akibat aktivitas ekonomi dalam periode tertentu, tanpa memperhatikan apakah faktor produksi tersebut dimiliki oleh residen atau non-residen. PDRB menjadi indikator utama dalam menggambarkan kemampuan suatu Daerah dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarnya PDRB dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, teknologi, serta semangat kewirausahaan masyarakat.

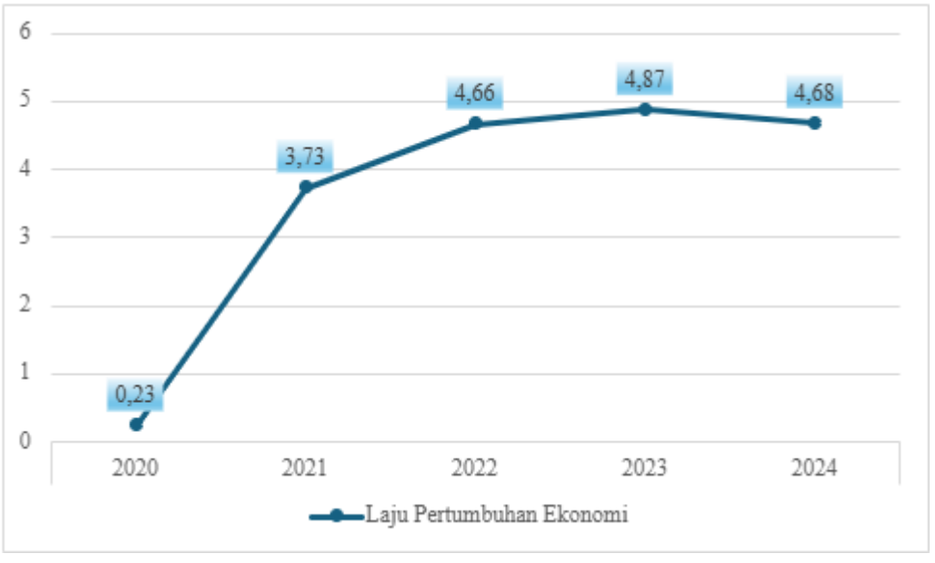

Gambar 2.18 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Asahan

Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Asahan mencapai 4,66 persen, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Secara historis, dalam rentang waktu 2020 hingga 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan menunjukkan tren positif meskipun sempat mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, dengan laju pertumbuhan hanya 0,23 persen. Setelah tahun 2020, ekonomi mulai pulih dengan pertumbuhan sebesar 3,73 persen pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 4,66 persen pada 2022, 4,87 persen pada 2023, sebelum sedikit melambat menjadi 4,68 persen pada 2024. Dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional yang mengalami kontraksi lebih besar selama pandemi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan yang tetap positif menunjukkan ketahanan ekonomi Daerah. Namun, perlambatan pertumbuhan pada tahun 2024 menandakan pentingnya kebijakan yang berkelanjutan untuk menjaga momentum pemulihan dan mendorong sektor-sektor unggulan agar ekonomi daerah tetap tumbuh secara stabil.

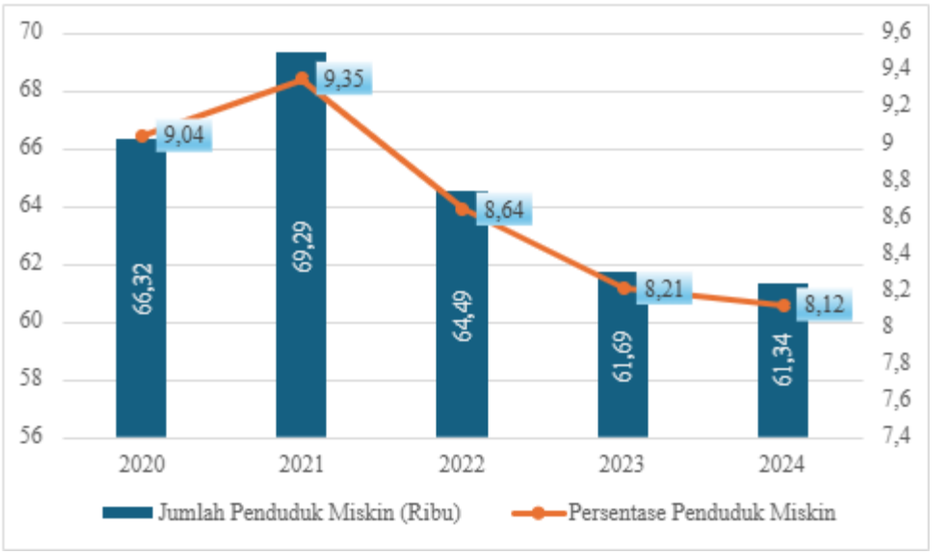

Gambar 2.19 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Asahan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Asahan mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 66,32 ribu jiwa (9,04 persen), kemudian meningkat menjadi 69,29 ribu jiwa (9,35 persen) pada tahun 2021. Namun, sejak tahun 2022, tren penurunan kembali terjadi, dengan jumlah penduduk miskin turun menjadi 64,49 ribu jiwa (8,64 persen), lalu berkurang lagi menjadi 61,69 ribu jiwa (8,21 persen) pada 2023, dan mencapai 61,34 ribu jiwa (8,12 persen) pada tahun 2024.

Tren ini menunjukkan keberhasilan Kabupaten Asahan dalam menekan angka kemiskinan, terutama setelah peningkatan yang terjadi pada tahun 2021. Program-program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah terbukti efektif dalam menurunkan jumlah serta persentase penduduk miskin, meskipun tantangan tetap ada. Upaya berkelanjutan diperlukan agar penurunan kemiskinan terus berlanjut dan ketimpangan ekonomi semakin berkurang.

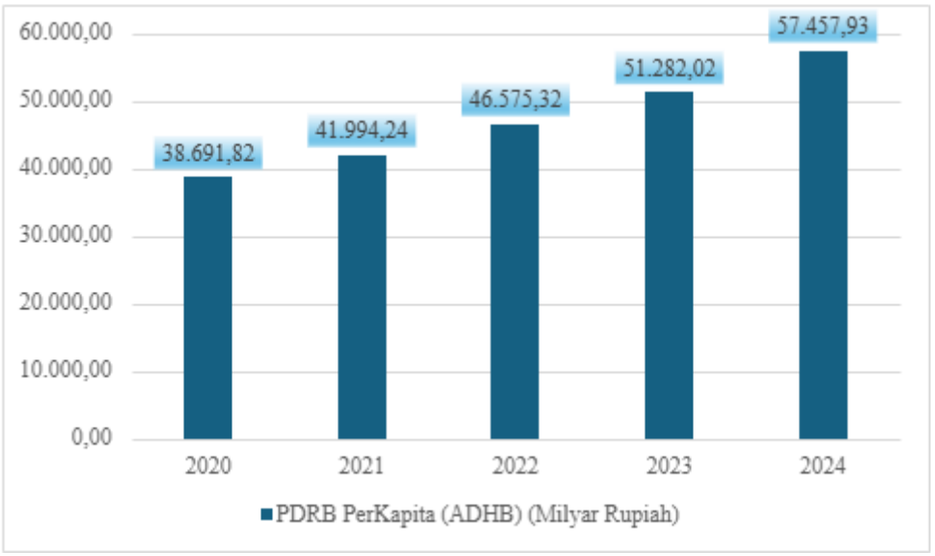

Gambar 2.20 PDRB Per Kapita (ADHB) Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Asahan

PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai proxy yang sesuai untuk menggambarkan kesejahteraan rata-rata penduduk di suatu Daerah karena dapat mengukur rata-rata nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku per kapita mengalami pertumbuhan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai PDRB per kapita Kabupaten Asahan tercatat sebesar 38,691.82 miliar rupiah. Nilai ini terus mengalami kenaikan menjadi 41,994.24 miliar rupiah pada tahun 2021 dan 46,575.82 miliar rupiah pada tahun 2022. Pertumbuhan positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan nilai PDRB per kapita mencapai 51,282.06 miliar rupiah, hingga akhirnya pada tahun 2024, nilainya tercatat sebesar 57,457.95 miliar rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pendapatan per individu di Kabupaten Asahan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

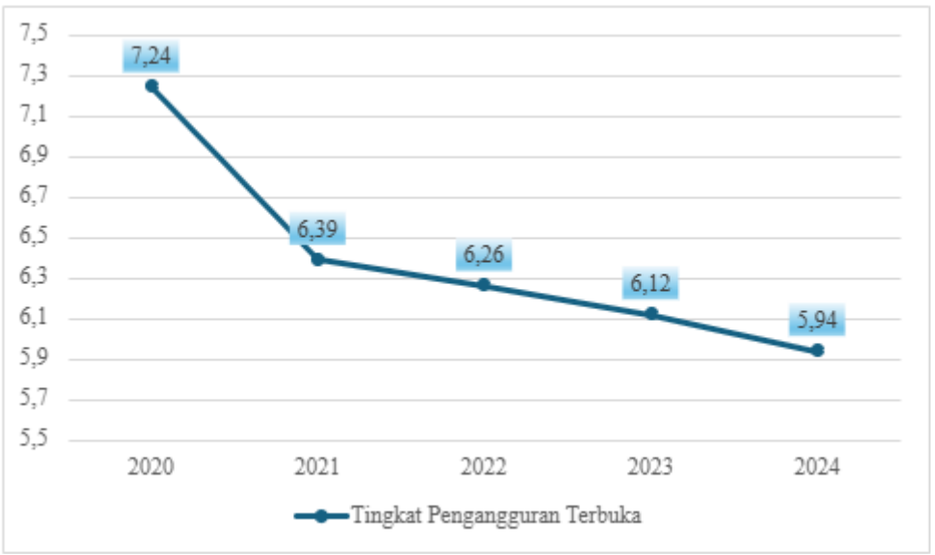

Gambar 2.21 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024

Sumber: Kabupaten Asahan dalam Angka

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Asahan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan setelah mengalami lonjakan pada tahun 2020. Pada tahun tersebut, TPT mencapai angka tertinggi sebesar 7,24 persen, mencerminkan dampak pandemi terhadap pasar tenaga kerja. Namun, sejak tahun 2021, TPT mulai menurun secara bertahap, dari 6,39 persen pada tahun 2021

menjadi 6,26 persen pada tahun 2022, lalu turun lagi menjadi 6,12 persen pada tahun 2023, dan mencapai 5,94 persen pada tahun 2024.

Penurunan ini mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi dan meningkatnya ketersediaan lapangan kerja di Kabupaten Asahan. Namun, fluktuasi yang terjadi sebelumnya menunjukkan bahwa stabilitas pasar tenaga kerja tetap perlu dijaga melalui kebijakan yang mendukung investasi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan keterampilan tenaga kerja lokal agar tren positif ini dapat terus berlanjut.

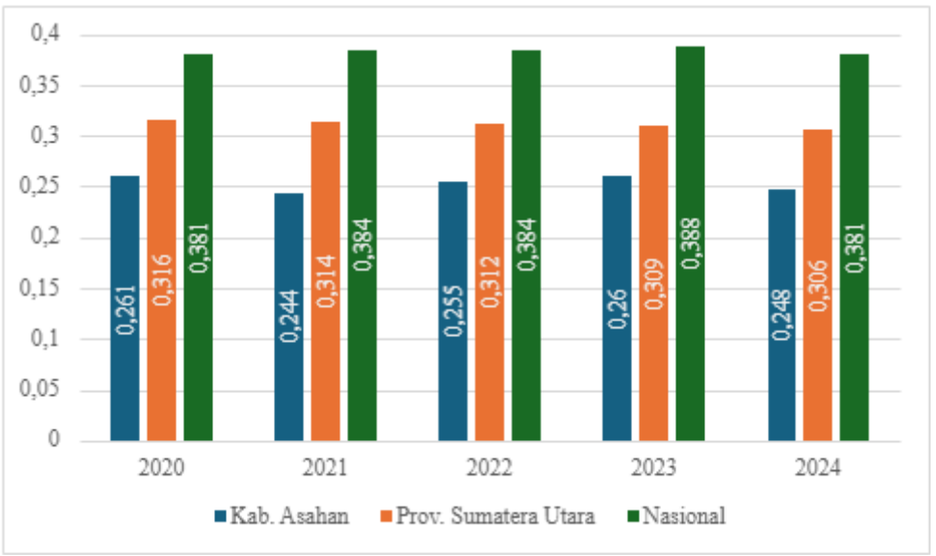

Gambar 2.22 Indeks Gini Kabupaten Asahan, 2020-2024

Sumber: BPS

Salah satu cara untuk mengevaluasi keberhasilan program pemerataan pembangunan adalah dengan melihat kesenjangan pendapatan atau pengeluaran penduduk. Kesenjangan yang tinggi menandakan tingkat pemerataan yang rendah. Salah satu indikator umum untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Koefisien Gini. Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna). Semakin rendah nilai Koefisien Gini, semakin rendah tingkat ketimpangan, dan sebaliknya.

Pada tahun 2020, Indeks Gini Kabupaten Asahan tercatat sebesar 0,261 dan mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Secara umum, ketimpangan distribusi pendapatan menunjukkan tren penurunan. Nilai terendah tercapai pada tahun 2021 sebesar 0,244, meskipun mengalami kenaikan kembali pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2024, Indeks Gini menunjukkan perbaikan dengan capaian sebesar 0,248.

Pembangunan ekonomi yang mengutamakan pertumbuhan diharapkan juga akan meningkatkan dan memeratakan pendapatan. Pemerataan hasil pembangunan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial, serta kesempatan ekonomi.

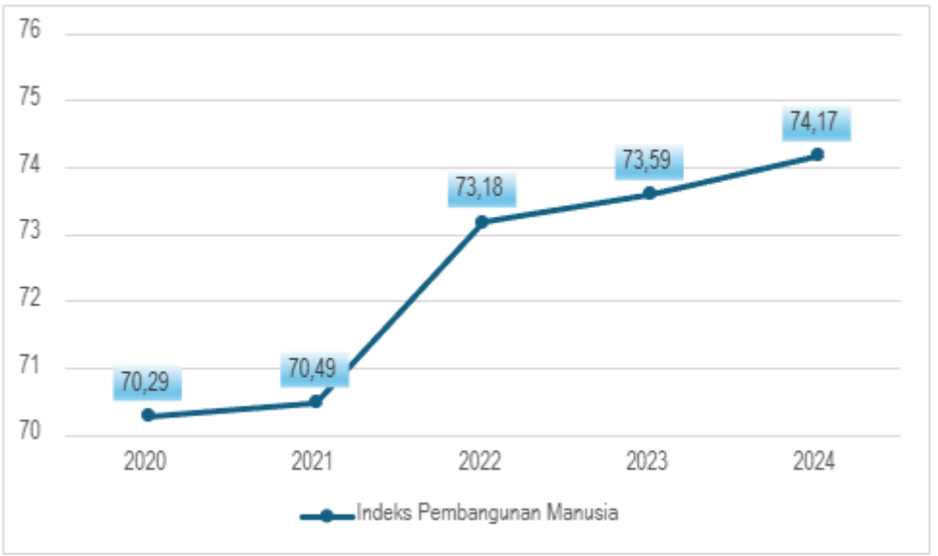

Gambar 2.23 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024

Sumber: Kabupaten Asahan dalam Angka

Di Kabupaten Asahan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, IPM tercatat sebesar 70,29 dan terus meningkat menjadi 70,49 pada tahun 2021. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan IPM mencapai 73,18. Setelahnya, nilai IPM terus mengalami kenaikan menjadi 73,59 dan 74,17 masing-maisng pada tahun 2023 dan 2024. Peningkatan IPM ini menunjukkan kemajuan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat. Dampaknya terhadap pembangunan sangat luas. Pertama, peningkatan IPM mencerminkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terlihat dari perbaikan angka harapan hidup, tingkat melek huruf, serta partisipasi sekolah. Kedua, kenaikan IPM juga menandakan adanya investasi yang lebih besar dalam sektor kesehatan dan pendidikan, yang berkontribusi pada pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketiga, dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, Kabupaten Asahan memiliki daya saing yang lebih tinggi, menarik lebih banyak investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan IPM setiap tahun tidak hanya mencerminkan kemajuan pembangunan manusia, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap pembangunan sosial dan ekonomi Daerah secara keseluruhan.

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

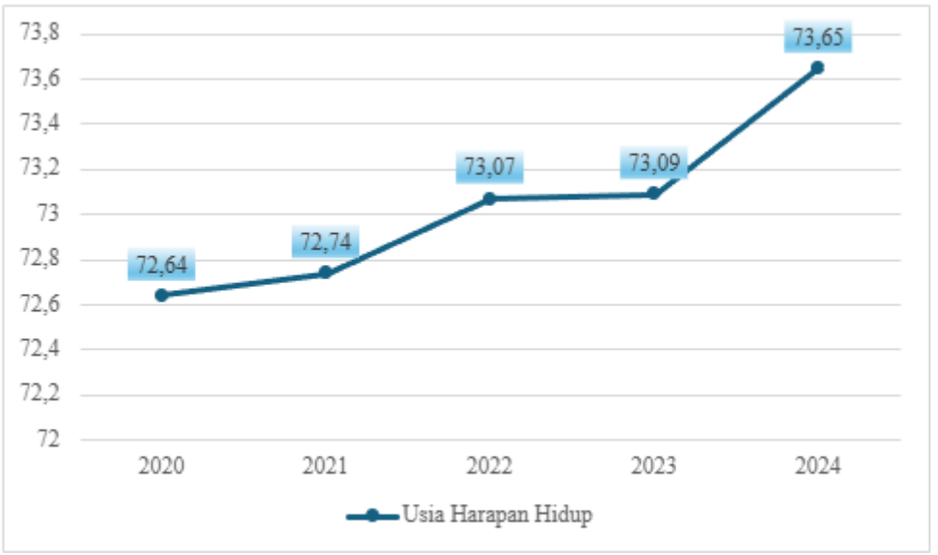

Gambar 2.24 Usia Harapan Hidup Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024

Sumber: Kabupaten Asahan dalam Angka

Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Asahan pada periode 2020–2024 menunjukkan tren yang konsisten meningkat. Pada tahun 2020, angka UHH berada di angka 72,64 tahun dan mengalami kenaikan tipis menjadi 72,74 tahun pada tahun 2021. Tahun 2022 mencatat lonjakan yang lebih signifikan hingga mencapai 73,07 tahun, kemudian kembali meningkat meskipun relatif kecil pada tahun 2023 menjadi 73,09 tahun. Peningkatan yang paling tajam terjadi pada tahun 2024, ketika UHH naik menjadi 73,65 tahun.

Kenaikan angka UHH ini mencerminkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek pembangunan daerah, terutama dalam sektor kesehatan, gizi, dan lingkungan. Akses layanan kesehatan yang semakin merata, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, efektivitas program pencegahan penyakit, serta perbaikan sanitasi dan kualitas lingkungan turut mendorong peningkatan usia harapan hidup. Selain itu, keberhasilan program peningkatan gizi dan penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih memadai juga menjadi faktor penting.

Dengan tren peningkatan yang konsisten ini, tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga keberlanjutan pencapaian tersebut. Strategi kebijakan yang lebih komprehensif, berfokus pada penguatan sistem kesehatan, penanggulangan penyakit degeneratif, serta peningkatan kualitas sosial-ekonomi masyarakat, diperlukan agar UHH terus meningkat dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asahan.

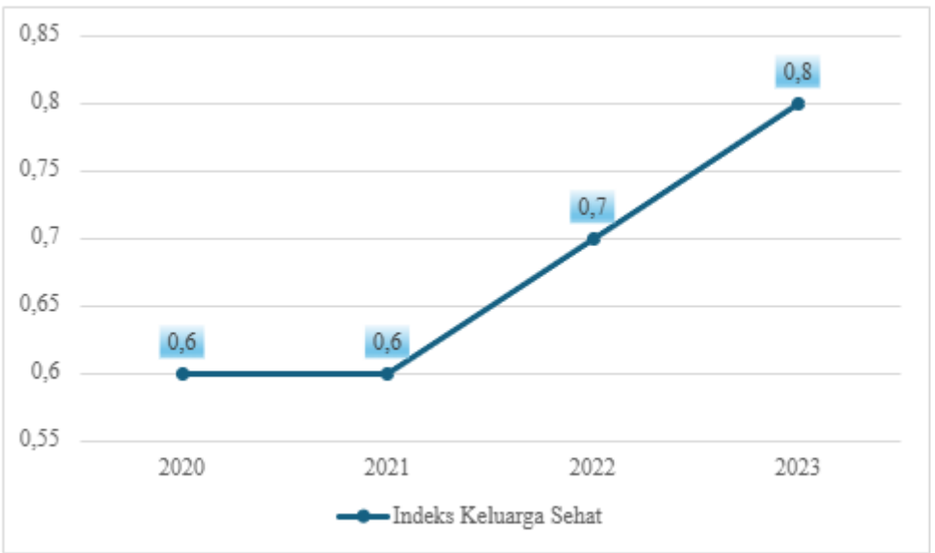

Gambar 2.25 Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan

Berdasarkan data tahun 2020 dengan Indeks Keluarga Sehat sebesar 0,6 dan tahun 2023 mencapai 0,8, terlihat adanya kecenderungan positif dalam peningkatan Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Asahan setiap tahunnya. Peningkatan ini mungkin disebabkan oleh berbagai program dan kebijakan yang telah diterapkan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, seperti peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Evaluasi terus menerus terhadap implementasi program-program ini akan membantu dalam memastikan bahwa peningkatan tersebut berkelanjutan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Asahan secara keseluruhan.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

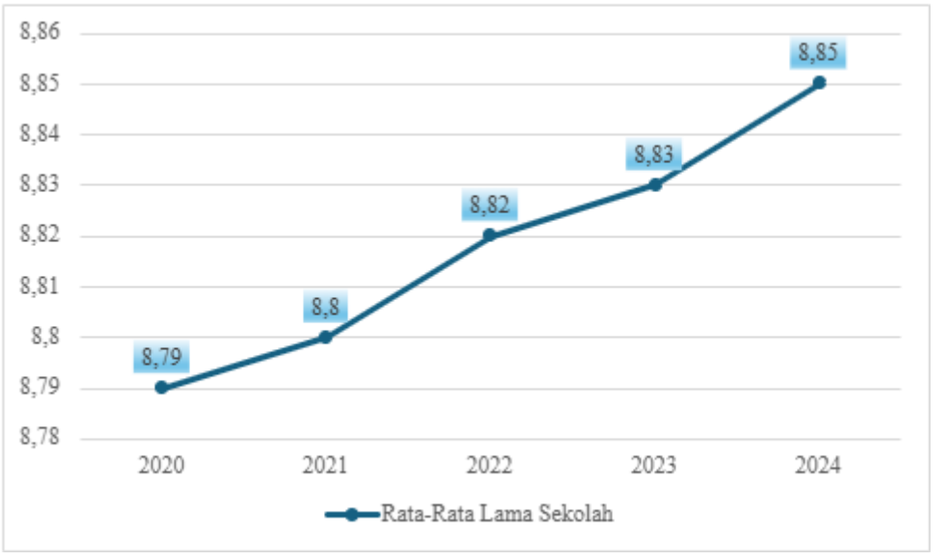

Gambar 2.26 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Asahan, 2020-2024

Sumber: Kabupaten Asahan dalam Angka

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Asahan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah tercatat sebesar 8,79 tahun. Angka ini mengalami kenaikan bertahap menjadi 8,80 tahun pada tahun 2021, lalu meningkat lagi menjadi 8,82 tahun pada tahun 2022. Peningkatan ini berlanjut hingga 8,83 tahun pada tahun 2023, dan mencapai 8,85 tahun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan akses dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal. Peningkatan rata-rata lama sekolah ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang menempuh pendidikan lebih lama, yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Asahan. Investasi dalam pendidikan ini menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial daerah, karena pendidikan yang lebih tinggi umumnya berkorelasi dengan peningkatan keterampilan, produktivitas, serta peluang pendapatan masyarakat.

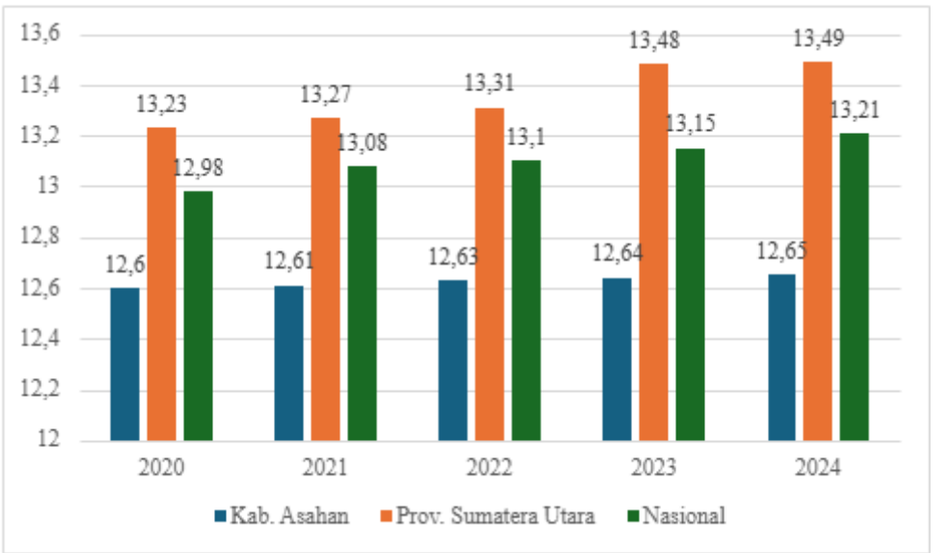

Gambar 2.27 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Asahan

Sejalan dengan peningkatan rata-rata lama sekolah, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Asahan pada periode tahun 2020–2024 menunjukkan tren kenaikan yang stabil, mencerminkan optimisme terhadap akses pendidikan di masa depan. HLS mengukur perkiraan lama waktu (dalam tahun) yang akan dijalani oleh

anak usia 7 tahun dalam sistem pendidikan, apabila mengikuti pola partisipasi pendidikan saat ini.

Berdasarkan data yang tersedia, HLS di Kabupaten Asahan meningkat dari 12,60 tahun pada tahun 2020 menjadi 12,65 tahun pada tahun 2024. Sebagai perbandingan, Provinsi Sumatera Utara mencatatkan peningkatan dari 13,23 tahun pada tahun 2020 menjadi 13,49 tahun pada tahun 2024. Sementara itu, tingkat nasional juga menunjukkan tren kenaikan dari 12,98 tahun menjadi 13,21 tahun pada periode yang sama.

Walaupun angka HLS Kabupaten Asahan masih berada di bawah rata-rata provinsi maupun nasional, tren peningkatan yang konsisten ini menunjukkan adanya perbaikan dalam akses pendidikan serta minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Peningkatan ini merupakan indikator positif dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Asahan. Namun demikian, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan fasilitas pendidikan tetap perlu diperkuat agar kenaikan HLS dapat diikuti dengan peningkatan mutu pendidikan yang merata di seluruh wilayah.

Tabel 2.27 Angka Literasi dan Numerasi SD dan SMP Kabupaten Asahan, Tahun 2022-2024

No	Indikator	2022	2023	2024
1	Angka Literasi SD	43,82	56,59	64,32
2	Angka Literasi SMP	62,22	42,17	59,64
3	Angka Numerasi SD	42,23	55,13	64,56
4	Angka Numerasi SMP	25,24	37,51	64,23

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan

Analisis kondisi literasi di Kabupaten Asahan menunjukan bahwa perkembangannya positif karena setiap tahunnya selalu meningkat. Kemampuan literasi pada tingkat SD dan SMP tentunya masih perlu perhatian lebih lanjut. Peningkatan terjadi secara signifikan pada tahun 2022 hingga tahun 2023. Hal tersebut mencerminkan keberhasilan program dan upaya peningkatan literasi pada tingkat SD dan SMP yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan kualitas pengajar, penggunaan metode belajar yang tepat dan efektif, serta peran aktif orang tua dalam memberikan pemberlajaran terkait membaca dan menulis.

Analisis kondisi numerasi di Kabupaten Asahan pada tahun 2022-2024 juga menunjukkan tren yang positif. Terlihat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada kemampuan numerasi tingkat SD pada tahun 2022 hingga 2023. Begitu pula terjadi pada kemampuan numerasi pada tingkat SMP, terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2023-2024. Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi ini merupakan indikator positif dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Asahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya dan program yang telah dilakukan memberikan dampak yang baik dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada tingkat dasar dan tingkat menengah.

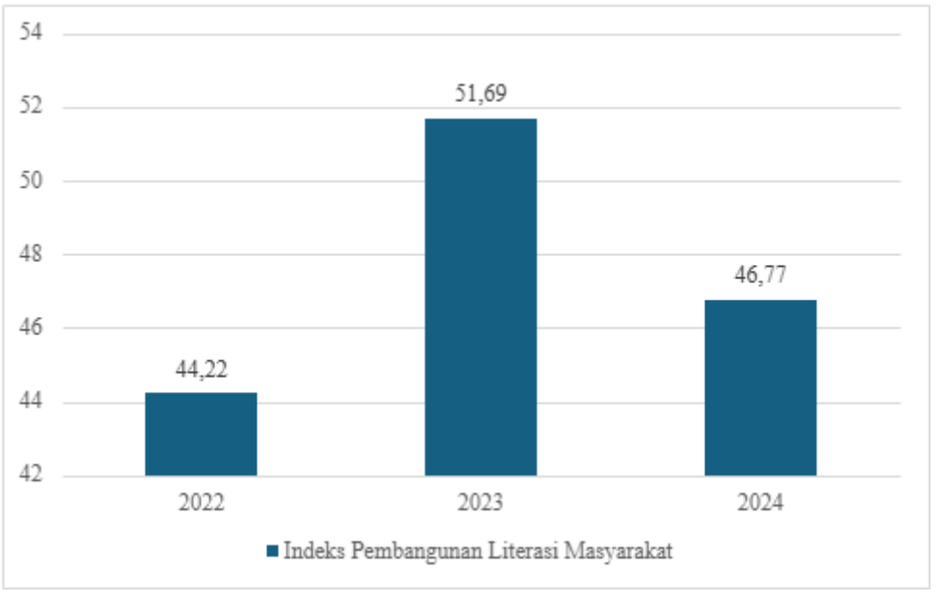

Gambar 2.28 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024

Sumber: Kajian Pembangunan Indeks Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Asahan menunjukkan fluktuasi dalam periode tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, indeks tercatat sebesar 44,22, kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi 51,69 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, indeks mengalami sedikit penurunan menjadi 46,77.

Meskipun terdapat penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, secara umum capaian indeks ini tetap lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Peningkatan indeks pada tahun 2023 menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya pembangunan literasi masyarakat, seperti peningkatan akses terhadap bahan bacaan, program literasi, serta dukungan terhadap budaya membaca. Penurunan yang terjadi di tahun 2024 menjadi catatan penting bahwa upaya peningkatan literasi perlu terus ditingkatkan dan dijaga konsistensinya, agar pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Asahan dapat terus berlanjut secara berkelanjutan.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

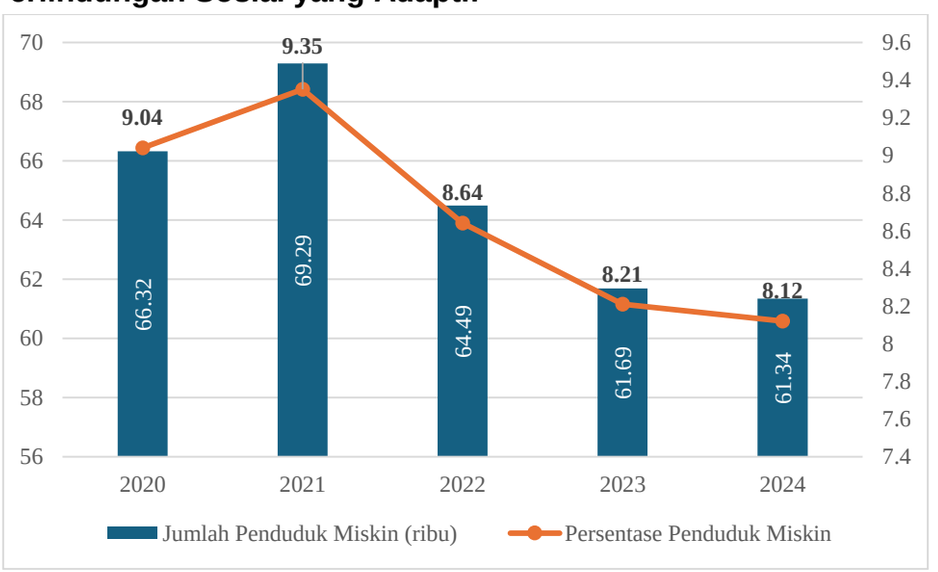

Gambar 2.29 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Asahan

Kemiskinan di Kabupaten Asahan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah yang perlu terus diminimalkan secara sistematis dan berkelanjutan. Ketimpangan dalam kepemilikan sumber daya dan akses terhadap kesempatan ekonomi menjadi salah satu penyebab utama dari tingginya tingkat kemiskinan. Badan Pusat Statistik secara periodik mengukur tingkat kemiskinan melalui indikator jumlah dan persentase penduduk miskin, yang menjadi acuan penting dalam evaluasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Asahan mengalami dinamika yang mencerminkan pengaruh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 66,32 ribu jiwa dengan persentase sebesar 9,04 persen. Namun, pada tahun 2021 terjadi lonjakan jumlah penduduk miskin menjadi 69,29 ribu jiwa atau 9,35 persen, yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Peningkatan ini terutama dipicu oleh dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi dan hilangnya banyak mata pencaharian masyarakat.

Setelah puncak tersebut, tren kemiskinan mulai menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin turun menjadi 64,49 ribu jiwa (8,64 persen), kemudian menurun lagi menjadi 61,69 ribu jiwa (8,21 persen) pada tahun 2023. Pada tahun 2024, penurunan masih berlanjut meskipun lebih moderat, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 61,34 ribu jiwa dan persentase kemiskinan sebesar 8,12 persen.

Penurunan ini mengindikasikan bahwa berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan mulai menunjukkan hasil yang positif. Intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran, termasuk bantuan sosial, program padat karya, penguatan UMKM, serta pelatihan keterampilan kerja, turut mempercepat proses pemulihan ekonomi masyarakat miskin dan rentan.

Meskipun demikian, tantangan kemiskinan tetap memerlukan perhatian serius, mengingat lebih dari 60 ribu penduduk masih berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya berkelanjutan yang terintegrasi lintas sektor dengan pendekatan yang adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja produktif harus menjadi prioritas dalam strategi pembangunan ke depan guna memastikan penurunan kemiskinan yang lebih signifikan dan berkelanjutan.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Asahan menunjukkan stabilitas pada angka 0,41 dari tahun 2020 hingga 2022. Stabilitas ini mencerminkan bahwa upaya dalam menjaga keseimbangan gender telah berhasil dipertahankan selama periode tersebut, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun partisipasi ekonomi.

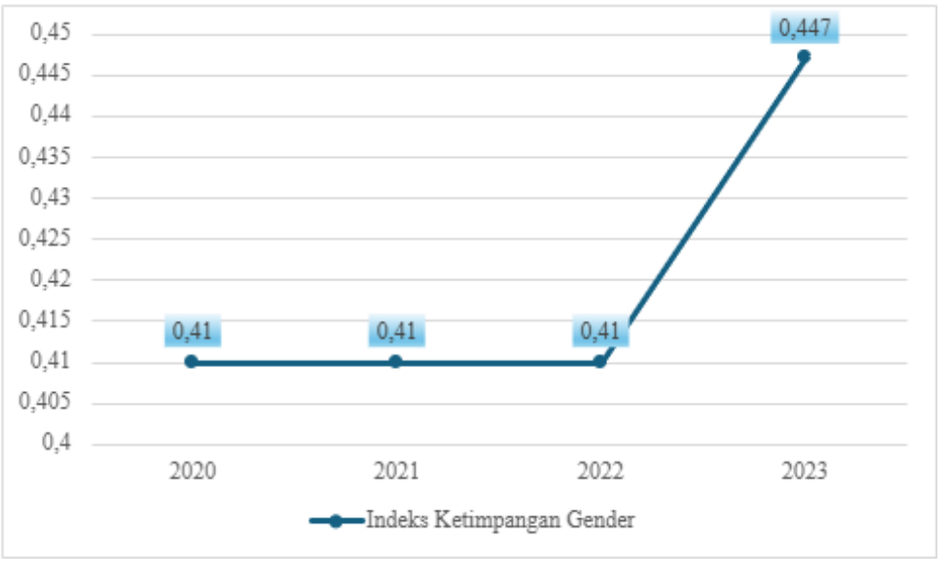

Gambar 2.30 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2023

Sumber: BPS

Namun, pada tahun 2023, terjadi sedikit peningkatan indeks menjadi 0,447. Kenaikan ini menunjukkan adanya tantangan baru dalam upaya mengurangi ketimpangan gender di Kabupaten Asahan. Meskipun demikian, perubahan ini perlu dilihat sebagai dorongan untuk memperkuat kebijakan dan program yang mendorong kesetaraan gender, sehingga kualitas hidup dan kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan dapat terus ditingkatkan di masa depan. Upaya berkelanjutan dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menjaga pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting untuk mencapai pembangunan ekonomi daerah yang merata dan berkelanjutan. Daya Saing SDM diukur melalui berbagai indikator, salah satunya adalah Angka Ketergantungan, yang mencerminkan beban tanggungan penduduk produktif (15-64) terhadap penduduk non-produktif (0-14 dan 65+). Data dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa Angka Ketergantungan di Kabupaten Asahan telah meningkat dari 50,29% di tahun 2020 menjadi 52,64% di tahun 2024.

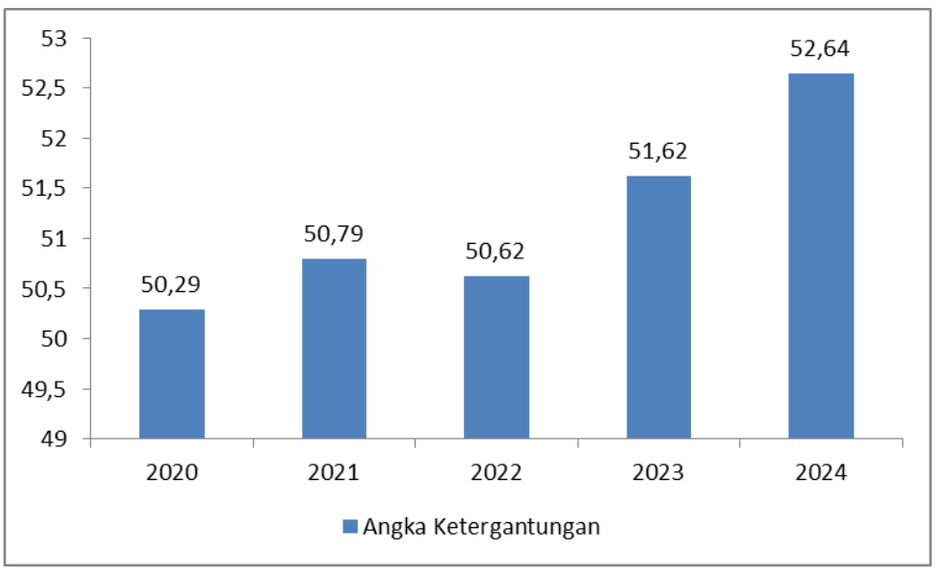

Gambar 2.31 Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Asahan

Peningkatan ini mengindikasikan bahwa beban yang diangkat penduduk produktif terhadap penduduk non-produktif semakin berat setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk produktif harus menanggung lebih banyak penduduk non-produktif. Tren ini harus diperhatikan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam meningkatkan daya saing SDM. Hal ini penting untuk mencegah potensi beban yang lebih berat di masa depan dan memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan SDM menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya koordinasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan industri untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kapasitas adaptasi SDM terhadap perubahan sosial, teknologi, dan pasar kerja. Ini akan membantu Kabupaten Asahan dalam menghadapi tantangan demografi dan mengoptimalkan potensi penduduknya untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

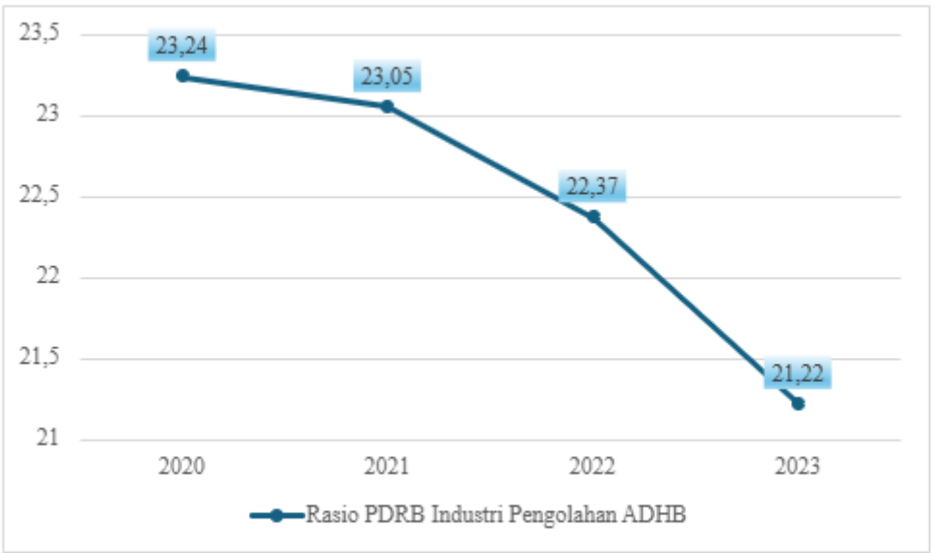

Gambar 2.32 Rasio PDRB Industri Pengolahan (ADHB) Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Asahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Asahan menunjukkan tren penurunan bertahap dari 23,24 persen pada tahun 2020 menjadi 20,71 persen pada tahun 2024. Sepanjang periode tersebut, rasio ini mengalami penurunan konsisten, dari 23,05 persen di tahun 2021, menjadi 22,37 persen di tahun 2022, hingga mencapai 21,22 persen pada tahun 2023. Tren ini mengindikasikan melemahnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total perekonomian Daerah dalam lima tahun terakhir.

Penurunan berkelanjutan ini menjadi sinyal perlunya perhatian serius dan intervensi strategis untuk memperkuat peran sektor industri pengolahan. Upaya-upaya seperti penguatan inovasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pelaku usaha, serta adopsi teknologi yang lebih relevan perlu didorong untuk mengakselerasi transformasi sektor ini. Dengan langkah tersebut, diharapkan sektor industri pengolahan dapat kembali menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan kompetitif di Kabupaten Asahan.

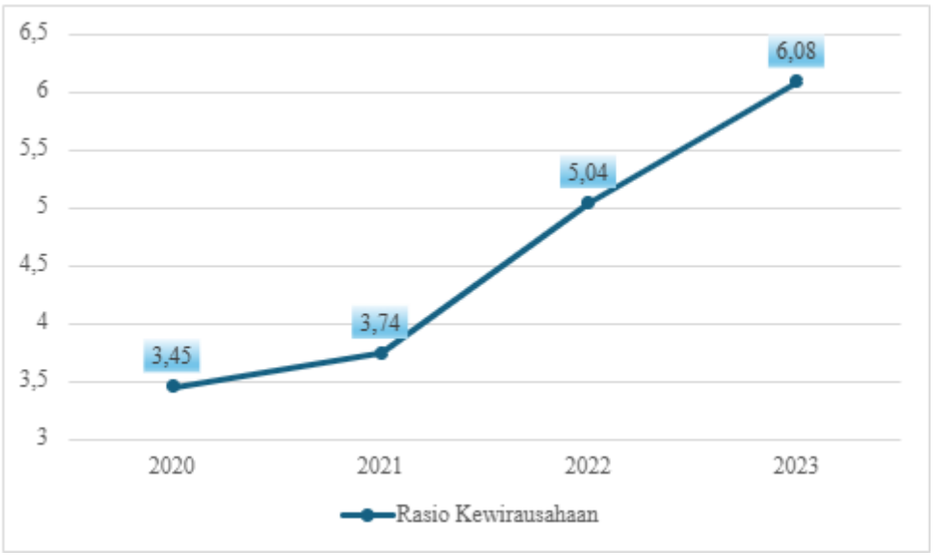

Gambar 2.33 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2023

Sumber: BPS Kabupaten Asahan

Rasio kewirausahaan di Kabupaten Asahan menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan selama periode tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, rasio kewirausahaan tercatat sebesar 3,45 persen dan terus meningkat menjadi 3,74 persen di tahun 2021. Peningkatan ini berlanjut dengan lebih tajam pada tahun-tahun berikutnya, mencapai 5,04 persen di tahun 2022 dan 6,08 persen pada tahun 2023.

Pertumbuhan ini mencerminkan adanya dinamika positif dalam semangat kewirausahaan masyarakat Kabupaten Asahan. Bertambahnya jumlah pelaku usaha menandakan membaiknya iklim usaha, bertambahnya peluang ekonomi, serta meningkatnya keberanian masyarakat untuk berwirausaha. Tren positif ini menjadi modal penting dalam memperkuat struktur ekonomi daerah, mengurangi pengangguran, dan mendorong kemandirian ekonomi lokal.

Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan rasio ini ke depan, dibutuhkan dukungan berkelanjutan dalam bentuk pelatihan, akses pembiayaan, fasilitasi pasar, dan inovasi teknologi agar para wirausaha mampu berkembang secara berkelanjutan dan kompetitif di pasar yang semakin dinamis.

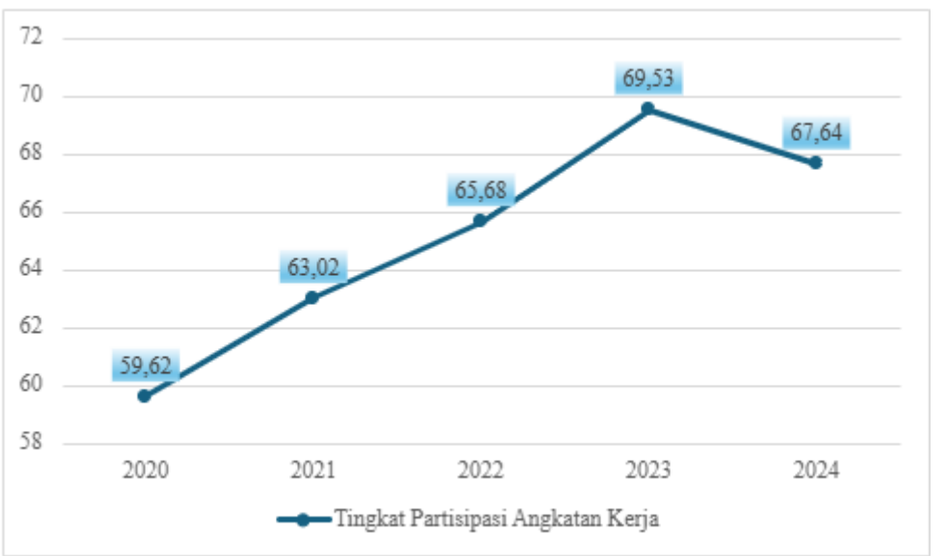

Gambar 2.34 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024

Sumber: Kabupaten Asahan dalam Angka

Tren Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Asahan dari tahun 2020 hingga 2024 cenderung meningkat. Pada tahun 2020, TPAK mencapai 59,62 persen. Kemudian, TPAK terus meningkat hingga mencapai 69,53 persen pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 67,64 persen. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor ekonomi dan sosial, seperti perubahan dalam jenis pekerjaan yang tersedia, pertumbuhan ekonomi di tingkat regional, dan faktor-faktor demografi seperti pertumbuhan populasi. Kenaikan TPAK dapat mencerminkan dinamika ekonomi yang berubah di Kabupaten Asahan, serta dampak dari investasi infrastruktur dan kebijakan ketenagakerjaan. Penting untuk dicatat bahwa fluktuasi dalam TPAK memerlukan perhatian khusus dari pembuat kebijakan guna memastikan stabilitas dan peningkatan kesempatan kerja dalam jangka panjang. Peningkatan yang konsisten dalam TPAK menjadi kunci penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Asahan.

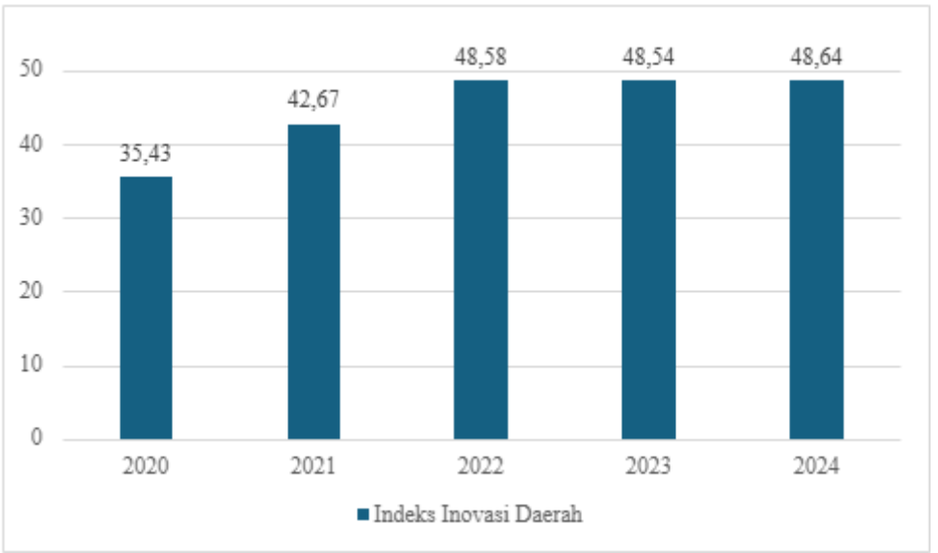

Gambar 2.35 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2022

Sumber: BPS Kabupaten Asahan

Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Asahan cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang sebesar 35,43 menjadi 48,64 pada tahun 2024. Namun, angkanya sempat mengalami penurunan pada 2023, dari yang sebelumnya 48,58 menjadi 48,54, yang menunjukkan peningkatan yang stagnan sejak tahun 2022. Walaupun begitu, peningkatan ini mencerminkan adanya upaya nyata dari Pemerintah Daerah dalam mendorong budaya inovasi, memperbaiki tata kelola, serta mengembangkan solusi kreatif dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah, yang menjadi fondasi penting bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

1. Penerapan Ekonomi Hijau

Kabupaten Asahan dapat memanfaatkan potensi wilayahnya dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti hutan, ladang, dan sumber air. Melalui penerapan teknologi hijau dan praktik agraris yang lebih efisien, Kabupaten Asahan dapat meningkatkan produksi dan ketersediaan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Investasi dalam energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, akan membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Peningkatan porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer akan menjadi indikator utama dalam mengevaluasi

kemajuan Kabupaten Asahan menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

2. Penerapan Ekonomi Biru

Kabupaten Asahan, dengan aksesnya ke laut, memiliki peluang besar untuk mengembangkan Ekonomi Biru. Melalui pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, termasuk perikanan, pariwisata laut, dan energi terbarukan berbasis laut, Kabupaten Asahan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa merusak ekosistem laut. Indeks Ekonomi Biru akan menjadi instrumen pengukuran kinerja Kabupaten Asahan dalam mengelola sumber daya laut dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Peningkatan indeks ekonomi biru akan menunjukkan bahwa Kabupaten Asahan sukses dalam mengoptimalkan potensi kelautan tanpa merusak lingkungan, yang penting untuk mendukung kesejahteraan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem laut. Dalam implementasinya, Kabupaten Asahan harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, lembaga penelitian, dan industri, untuk mengembangkan strategi dan proyek yang tepat. Hal ini akan memungkinkan Kabupaten Asahan untuk mengambil langkah konkret dalam mewujudkan penerapan Ekonomi Hijau dan Biru, yang akan membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.

2.1.3.4 Transformasi Digital

Hingga saat ini, proses transformasi digital masih belum dikembangkan secara sistematis untuk percepatan pembangunan daerah. Arah pembangunan transformasi digital Kabupaten Asahan adalah Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang ditetapkan sebagai indikator proksi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Indeks ini merupakan indeks komposit yang menggabungkan sebelas indikator dan dikelompokkan ke dalam tiga subindeks utama, yaitu: akses dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta keahlian teknologi informasi dan komunikasi. Indeks ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk memantau dan membandingkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antarwilayah dan antarwaktu, mengukur kesenjangan digital, serta menilai potensi pembangunan digital dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan berdasarkan kapasitas serta keahlian yang tersedia di daerah.

Pemanfaatan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan gambaran menyeluruh terhadap kesiapan dan kemajuan digital suatu wilayah, sekaligus mencerminkan efektivitas kebijakan transformasi digital yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam konteks Kabupaten Asahan, keberadaan indeks ini diharapkan menjadi dasar yang kuat dalam merancang intervensi pembangunan digital yang tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan, serta sejalan dengan arah kebijakan transformasi digital nasional.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan regional merupakan salah satu pilar penting dalam memperkuat daya saing dan produktivitas ekonomi daerah. Dalam konteks Kabupaten Asahan, keterhubungan antarsektor ekonomi, baik melalui konektivitas infrastruktur, arus barang dan jasa, maupun peran dalam rantai pasok kawasan, menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu indikator utama yang mencerminkan dinamika investasi produktif adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang mencerminkan porsi investasi terhadap aset tetap seperti bangunan, peralatan, dan sarana produksi lainnya.

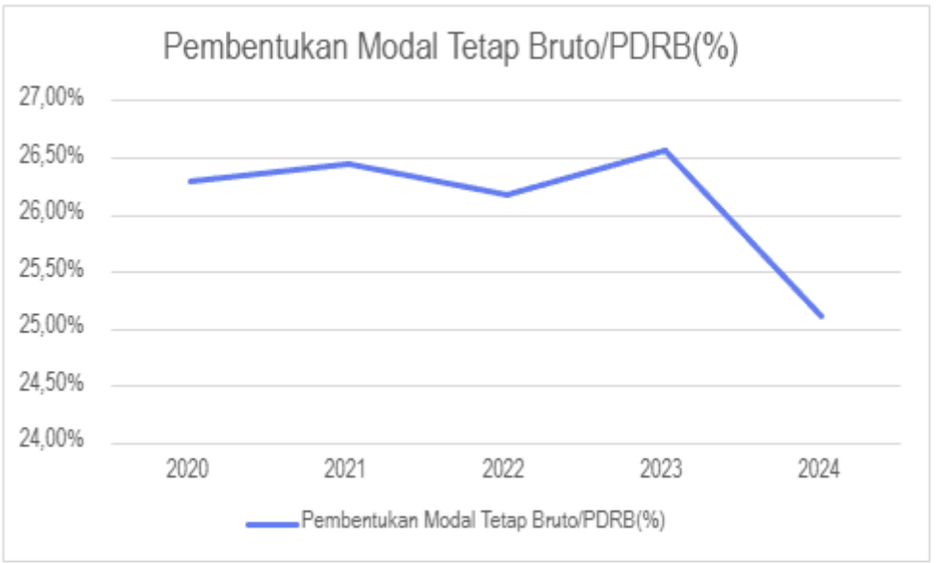

Gambar 2.36 Grafik Perkembangan Pembentukan Modal Tetap bruto Kabupaten Asahan Tahun 2020-2024

Sepanjang periode tahun 2020 hingga 2024, rasio PMTB terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Asahan menunjukkan tren yang relatif stabil, meskipun belum mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2020, PMTB tercatat sebesar 26,30 persen terhadap PDRB dan mengalami fluktuasi kecil di tahun-tahun berikutnya, dengan angka tertinggi sebesar 26,58 persen pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 25,11 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kontribusi investasi terhadap pembentukan aset tetap di Kabupaten Asahan masih berada pada kisaran moderat, dan belum sepenuhnya mencerminkan akselerasi investasi jangka panjang yang dibutuhkan untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah.

Fluktuasi PMTB ini juga menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga momentum investasi yang konsisten, baik dari sektor publik maupun swasta. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi hal ini antara lain masih terbatasnya infrastruktur pendukung investasi, keterbatasan akses pembiayaan, serta dinamika eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global dan perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan investasi produktif melalui perbaikan iklim usaha, insentif fiskal, penyediaan infrastruktur ekonomi yang terintegrasi, serta penguatan kapasitas SDM lokal.

Kedepan, peningkatan PMTB secara berkelanjutan menjadi penting untuk memperkuat struktur ekonomi Kabupaten Asahan, meningkatkan nilai tambah sektor unggulan, serta mendukung keterhubungan ekonomi daerah dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya, baik di tingkat regional maupun nasional.

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan diarahkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan strategi pemerataan pembangunan yang menempatkan desa dan kota sebagai simpul produktivitas, distribusi layanan, dan pengungkit pertumbuhan wilayah. Dalam konteks ini, pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan tidak lagi dipisahkan secara sektoral, tetapi diposisikan sebagai satu kesatuan sistem wilayah yang saling melengkapi dalam mendukung kemandirian ekonomi daerah.

Tabel 2.28 Realisasi Indikator Pada Arah Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Asahan Tahun 2020-2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
III.6	**Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**						
III.6.1	Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	NA	0,27	0,62	0,64	0,68
III.6.2	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	NA	NA	NA	NA	NA
III.6.3	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,6454	0,6447	0,6543	0,6662	0,6807

Sumber Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Asahan, 2025

Arah pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan Kabupaten Asahan diukur melalui sejumlah indikator, antara lain Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, persentase rumah tangga dengan akses terhadap hunian layak, serta Indeks Desa Membangun. Ketiga indikator ini memberikan gambaran terhadap kualitas layanan dasar, kondisi infrastruktur permukiman, dan kapasitas pembangunan desa sebagai bagian dari ekosistem wilayah yang produktif.

Namun, berdasarkan data hingga tahun 2024, pencatatan capaian indikator masih terbatas. Nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,68, sedangkan Indeks Desa Membangun mencapai 0,6807. Data pada tahun-tahun sebelumnya belum tersedia, yang mencerminkan masih terbatasnya sistem monitoring dan evaluasi terpadu terkait pembangunan infrastruktur wilayah dan pengelolaan kawasan perdesaan secara sistemik. Selain itu, data mengenai rumah tangga dengan akses terhadap hunian layak belum tercatat dalam lima tahun terakhir, yang menandakan perlunya penguatan basis data sektoral, terutama yang berkaitan dengan permukiman, perumahan rakyat, dan penghidupan layak.

Ke depan, pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan Kabupaten Asahan perlu diarahkan pada peningkatan konektivitas antar wilayah, pengembangan infrastruktur dasar yang merata, serta penguatan kapasitas kelembagaan desa dan kelurahan. Hal ini menjadi kunci untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru yang tidak hanya terfokus di kota, tetapi juga tersebar hingga wilayah perdesaan melalui optimalisasi potensi lokal dan tata ruang yang inklusif.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro merupakan fondasi utama untuk menciptakan lingkungan pembangunan Daerah yang sehat, berkelanjutan, dan inklusif. Di tingkat Daerah, stabilitas ini diwujudkan melalui keberlanjutan fiskal yang didukung oleh optimalisasi pendapatan asli Daerah, pengendalian inflasi, serta pengelolaan belanja publik yang efisien dan tepat sasaran. Selain itu, kestabilan sektor moneter dan keuangan lokal turut berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendorong aktivitas ekonomi yang produktif. Oleh sebab itu, analisis terhadap indikator seperti rasio pajak Daerah terhadap PDRB, tingkat inflasi, dan indikator ekonomi relevan lainnya menjadi instrumen strategis untuk mengukur ketahanan dan kinerja ekonomi makro di Kabupaten Asahan, sekaligus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang mendukung stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi.

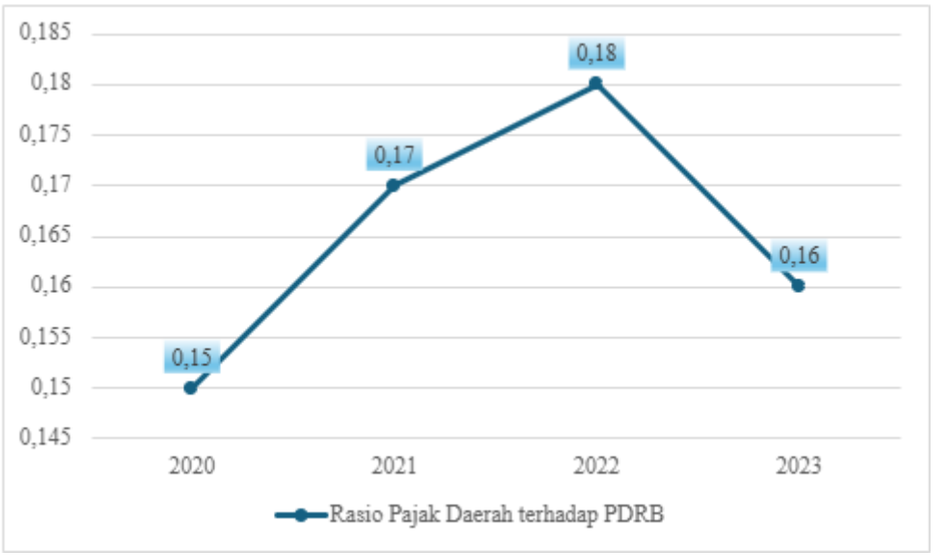

Gambar 2.37 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2023

Sumber: BKAD Kabupaten Asahan

Berdasarkan data, Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Asahan menunjukkan fluktuasi dalam periode tahun 2020–2023. Rasio ini tercatat sebesar 0,15 persen pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 0,17 persen di tahun 2021, dan kembali naik menjadi 0,18 persen di tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 rasio ini mengalami penurunan menjadi 0,16 persen. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika dalam optimalisasi pendapatan Daerah yang perlu dicermati lebih lanjut. Meskipun terdapat peningkatan di awal, penurunan di tahun 2023 menjadi catatan penting bagi upaya konsolidasi fiskal, yang menuntut strategi lebih efektif dalam memperkuat basis penerimaan Daerah sekaligus menjaga stabilitas ekonomi makro di Kabupaten Asahan.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas serta adaptif merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tata kelola yang baik tercermin dari kepatuhan terhadap ketentuan hukum, keterbukaan dalam pelayanan informasi publik, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi. Untuk menilai kondisi serta kemajuan tata kelola tersebut, digunakan sejumlah indikator antara lain Indeks Reformasi Hukum, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Integritas Nasional. Subbagian ini menyajikan gambaran kondisi aktual serta capaian Kabupaten Asahan selama periode tahun 2020–2024 dalam upaya mewujudkan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.

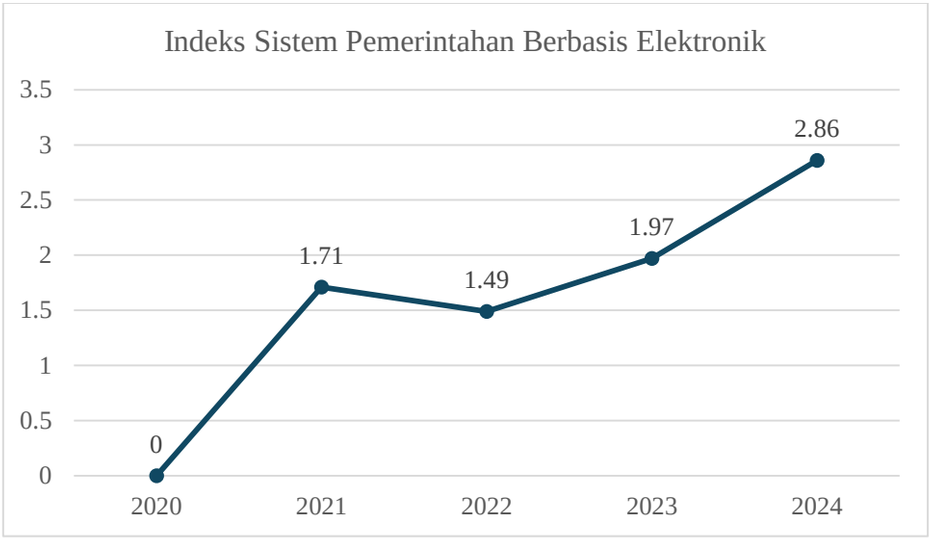

Gambar 2.38 Grafik Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Asahan Tahun 2020-2024

Sumber : Bapperida 2025, diolah

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Asahan menunjukkan tren peningkatan yang positif dari tahun 2020 hingga 2024. Meskipun pada tahun 2020 belum terdapat pencapaian indeks (0), perkembangan dimulai pada tahun 2021 dengan skor 1,71, kemudian mengalami sedikit penurunan pada 2022 menjadi 1,49, dan kembali meningkat pada tahun 2023 dengan nilai 1,97. Puncak capaian terjadi pada tahun 2024 dengan skor 2,86, mencerminkan upaya nyata dalam memperkuat digitalisasi tata kelola pemerintahan. Fluktuasi skor pada periode tahun 2021–2023 menunjukkan adanya tantangan dalam membangun konsistensi kinerja, yang dapat disebabkan oleh faktor kebijakan, dinamika organisasi, maupun kendala teknis. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya penguatan tata kelola digital secara berkelanjutan melalui evaluasi berkala, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

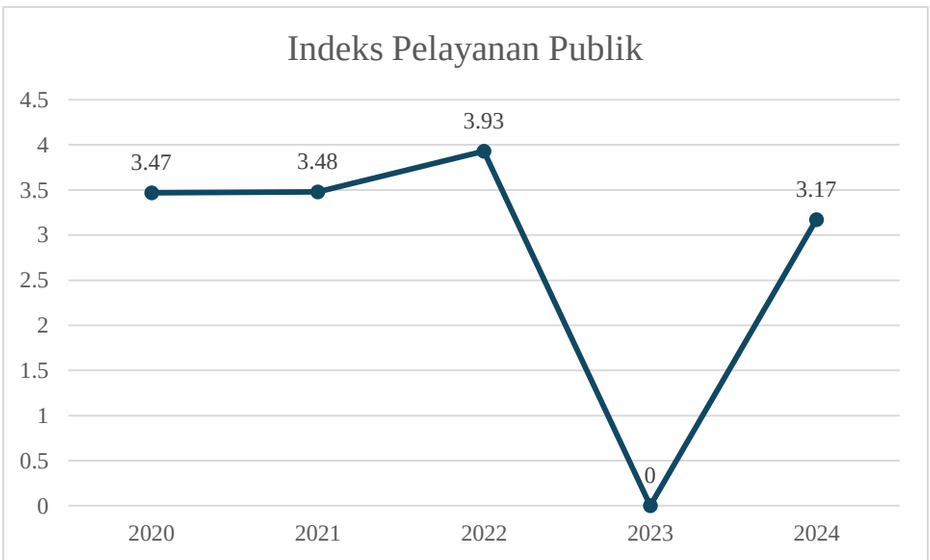

Gambar 2.39 Grafik Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Asahan Tahun 2020-2024

Sumber : Bapperida 2025, diolah

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Asahan menunjukkan tren capaian yang dinamis sepanjang periode 2020–2024. Skor indeks mengalami peningkatan dari 3,47 pada tahun 2020 menjadi 3,93 pada tahun 2022, yang mencerminkan adanya upaya perbaikan kualitas layanan publik. Namun, pada tahun 2024, indeks tercatat sebesar

3,17, menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan mutu pelayanan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan strategi dalam menjaga konsistensi kualitas layanan, antara lain melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, optimalisasi digitalisasi prosedur layanan, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis umpan balik dari masyarakat. Pendekatan yang partisipatif dan inovatif tetap menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang responsif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Pembangunan hukum dan demokrasi merupakan fondasi utama dalam membentuk tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, memastikan kepastian hukum, serta mengutamakan prinsip keadilan. Supremasi hukum yang berkeadilan diarahkan untuk mewujudkan kepastian dan kemanfaatan hukum yang mampu memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Di sisi lain, pembangunan demokrasi ditujukan untuk mengokohkan demokrasi substansial yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek prosedural, melainkan juga mendorong partisipasi rakyat secara nyata dan bermakna dalam proses pengambilan keputusan publik. Selain itu, penguatan sistem keamanan nasional menjadi faktor strategis dalam menjaga stabilitas sosial serta melindungi masyarakat dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu ketertiban umum

Tabel 2.29 Realisasi Indikator Persentase Penegakan Perda Tahun 2020-2024

IV	ASPEK PELAYANAN UMUM	SATUAN	REALISASI TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
IV.2	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial						
IV.2.1	Persentase Penegakan Perda	persen	55,55	100	100	100	155,56

Sumber : Bapperida 2025, diolah

Data persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Asahan menunjukkan tren yang progresif sepanjang periode tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, capaian berada di angka 55,55%, kemudian meningkat secara signifikan menjadi 100% pada tahun 2021 dan berhasil dipertahankan hingga tahun 2023. Pada tahun 2024, persentase penegakan Perda bahkan tercatat mencapai 155,56%, yang mengindikasikan adanya intensifikasi upaya pelaksanaan regulasi daerah serta penguatan kapasitas kelembagaan dalam penegakan aturan. Peningkatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan dalam memastikan setiap regulasi daerah dapat diimplementasikan secara efektif di tengah dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan dalam diplomasi dan pertahanan Daerah merupakan unsur strategis dalam memperkuat posisi serta meningkatkan daya saing wilayah baik di tingkat nasional maupun regional. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ketangguhan tersebut tercermin dari kemampuan daerah dalam memperjuangkan kepentingan strategis, membangun kemitraan lintas wilayah secara konstruktif, serta mendorong peningkatan daya saing di berbagai sektor pembangunan. Di sisi lain, kapasitas pertahanan kawasan menunjukkan kesiapsiagaan daerah dalam menjaga stabilitas sosial dan ketahanan wilayah terhadap berbagai tantangan eksternal maupun internal. Untuk mengukur aspek ini, digunakan indikator seperti Indeks Daya Saing Daerah serta indikator lain yang relevan dengan kewenangan dan urusan pemerintahan Daerah.

Tabel 2.30 Realisasi Indikator Persentase Penegakan Perda Tahun 2020-2024

IV	ASPEK PELAYANAN UMUM	SATUAN	REALISASI TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
IV.3	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan						
IV.3.1	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	n.a	n.a	2,87	3,09	3,66

Sumber : Bapperida 2025, diolah

Meskipun data Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Asahan belum tersedia untuk tahun 2020 dan 2021, tren yang tercatat dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan arah perkembangan yang positif. Indeks tercatat sebesar 2,87 pada tahun 2022, meningkat menjadi 3,09 pada tahun 2023, dan mencapai 3,66 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam berbagai aspek yang mendukung daya saing daerah, seperti penguatan infrastruktur, perbaikan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas ekonomi lokal.

2.1.4.4 Kinerja setiap urusan pemerintahan Daerah

2.1.4.4.A Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.4.4.A-a Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan serta memperluas jangkauan pembangunan di berbagai wilayah. Pencapaian tujuan tersebut dapat didorong melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi. Upaya ini akan memperkuat pengembangan klaster-klaster industri di berbagai sektor. Penyediaan sumber daya manusia yang terampil dan berwawasan luas menjadi elemen penting dalam mendukung pelaksanaan proyek-proyek strategis di setiap klaster industri.

Tabel 2.31 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	persen	69,85	94,44	94,44	70,11	61,81
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen	103,11	99,26	99,26	104,56	103,91
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	persen	100,97	97,08	97,08	103,26	104,93
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	persen	0,63	89,12	89,12	96,13	96,66

Sumber : LPPD 2020-2024; diolah

Tingkat partisipasi pendidikan di Kabupaten Asahan menunjukkan dinamika yang cukup positif dalam lima tahun terakhir.

Tingkat partisipasi warga usia 5–6 tahun dalam pendidikan anak usia dini (PAUD) tercatat sebesar 69,85 persen pada tahun 2020, meningkat signifikan menjadi 94,44 persen pada tahun 2021 dan 2022, meskipun mengalami penurunan kembali menjadi 70,11 persen pada 2023 dan 61,81 persen pada tahun 2024. Sementara itu, tingkat partisipasi pendidikan dasar (usia 7–12 tahun) tetap tinggi, dengan capaian di atas 99 persen sepanjang periode tahun 2020–2024, dan mencapai 104,56 persen pada tahun 2023 serta 103,91 persen pada 2024, mengindikasikan adanya penerimaan siswa di luar rentang usia formal pendidikan dasar.

Pada jenjang pendidikan menengah pertama (usia 13–15 tahun), tingkat partisipasi warga negara juga menunjukkan stabilitas dengan kisaran 97,08 persen hingga 104,93 persen, memperlihatkan tren peningkatan partisipasi pada tahun 2023 dan 2024.

Selain itu, partisipasi warga usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam program pendidikan kesetaraan meningkat secara signifikan, dari 0,63 persen pada tahun 2020 menjadi 96,66 persen pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan upaya Kabupaten Asahan dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem pendidikan formal. Peningkatan tingkat partisipasi ini menjadi landasan penting dalam mendorong perbaikan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Asahan, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menempatkan pendidikan sebagai pilar strategis untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, berdaya saing, dan berkarakter.

2.1.4.4.A-b Kesehatan

Dalam kerangka pembangunan manusia, terdapat tiga aspek utama yang menjadi pilar, yakni kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Ketiga aspek tersebut saling berinteraksi dan membentuk keterkaitan yang erat satu sama lain. Tanpa kondisi kesehatan yang memadai, proses pendidikan tidak dapat berjalan optimal; sementara tanpa kesehatan dan pendidikan yang baik, peningkatan ekonomi keluarga maupun masyarakat menjadi sulit tercapai. Sebaliknya, tanpa fondasi ekonomi yang kuat, upaya untuk memperbaiki tingkat kesehatan dan kualitas pendidikan juga akan menghadapi berbagai kendala. Dengan demikian, ketiga aspek ini harus dikembangkan secara seimbang dan terintegrasi untuk mencapai kemajuan pembangunan manusia secara holistik.

Tabel 2.32 Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.b.1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	persen	93,04	95,68	13,32	15,55	96,22
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	persen	63,64	63,64	63,64	90,00	100,00
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	persen	77,31	87,00	87,23	95,75	95,88
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	persen	77,61	85,00	81,96	92,93	94,09
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	persen	80,39	85,00	93,20	99,85	99,85
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	persen	46,70	78,25	90,92	86,92	93,24

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	0,00	99,53	79,43	92,23	89,54
1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	41,20	94,00	93,79	86,70	99,99
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	63,00	75,00	78,26	92,60	90,30
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	69,24	92,00	91,16	85,90	100,00
1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	98,86	72,00	72,92	103,99	99,70
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	persen	55,19	73,45	73,45	88,70	100,00
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	persen	41,68	45,95	100,00	72,75	129,56
1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	persen	0,97	37,74	78,18	72,75	106,67

Sumber : LPPD 2020-2024; diolah

Upaya pembangunan kesehatan di Kabupaten Asahan menunjukkan berbagai capaian yang cukup signifikan dalam periode tahun 2020–2024.

Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan meningkat dari 77,31 persen pada tahun 2020 menjadi 95,88 persen pada tahun 2024. Demikian pula, persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan meningkat dari 77,61 persen menjadi 94,09 persen pada periode yang sama. Capaian ini menunjukkan membaiknya akses dan kualitas layanan kesehatan maternal di Kabupaten Asahan.

Pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir juga mencatatkan peningkatan, dari 80,39 persen pada tahun 2020 menjadi 99,85 persen pada tahun 2024. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar meningkat dari 46,70 persen menjadi 93,24 persen, memperlihatkan komitmen kuat dalam memperkuat layanan kesehatan anak usia dini.

Pada kelompok usia pendidikan dasar, persentase anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meningkat dari 0 persen pada tahun 2020 menjadi 89,54 persen pada tahun 2024. Di kelompok usia produktif (15–59 tahun), tingkat skrining kesehatan meningkat dari 41,20 persen menjadi 99,99 persen. Sementara pada warga lanjut usia (60 tahun ke atas), skrining kesehatan juga membaik dari 63,00 persen pada tahun 2020 menjadi 90,30 persen pada tahun 2024.

Dalam pengendalian penyakit tidak menular (PTM), persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meningkat dari 69,24 persen pada tahun 2020 menjadi 100,00 persen pada tahun 2024. Pelayanan untuk penderita diabetes melitus (DM) juga tercapai sebesar 99,70 persen pada tahun 2024.

Untuk pelayanan kesehatan jiwa, persentase orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar meningkat dari 55,19 persen menjadi 100,00 persen. Dalam upaya pengendalian penyakit menular, cakupan pelayanan terhadap orang terduga Tuberkulosis (TBC) meningkat dari 41,68 persen menjadi 129,56 persen. Cakupan deteksi dini risiko infeksi HIV pun menunjukkan peningkatan dari 0,97 persen pada tahun 2020 menjadi 106,67 persen pada tahun 2024. Dari sisi ketersediaan fasilitas kesehatan, rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kabupaten Asahan mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 93,04 persen dan meningkat menjadi 95,00 persen pada tahun 2021. Namun demikian, rasio ini menurun drastis menjadi 13,32 persen pada tahun 2022, 15,55 persen pada tahun 2023, dan meningkat drastis 96,22 persen pada tahun 2024.

Fluktuasi ini mengindikasikan perlunya evaluasi dan penguatan kapasitas rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan, terutama dalam menghadapi dinamika jumlah penduduk dan kebutuhan layanan kesehatan spesifik.

Di sisi lain, kualitas fasilitas layanan kesehatan menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Persentase rumah sakit rujukan tingkat kabupaten/kota yang telah terakreditasi meningkat dari 63,64 persen pada tahun 2020 menjadi 90,00 persen pada tahun 2023, dan akhirnya mencapai 100,00 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan komitmen Kabupaten Asahan dalam memperkuat kualitas layanan kesehatan rujukan melalui upaya standardisasi dan akreditasi rumah sakit.

Secara keseluruhan, capaian indikator kesehatan di Kabupaten Asahan menunjukkan perbaikan akses, cakupan, dan mutu layanan, serta mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bidang kesehatan dan visi pembangunan Daerah menuju masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing.

2.1.4.4.A-c Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kondisi suatu Daerah dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat dari berbagai indikator, di antaranya adalah kondisi jalan dan infrastruktur pendukung lainnya. Kualitas jaringan jalan memiliki hubungan yang erat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi serta dinamika sosial budaya masyarakat.

Infrastruktur jalan yang memadai menjadi landasan penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sulit dicapai tanpa dukungan infrastruktur jalan yang baik. Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup, serta penataan ruang yang mengedepankan prinsip kota ramah lingkungan.

Sasaran utama dalam bidang ini meliputi peningkatan kualitas layanan transportasi, pengembangan sistem drainase, pengendalian banjir, serta penyediaan akses terhadap air bersih. Untuk mengukur kinerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, digunakan beberapa indikator kunci yang menggambarkan capaian pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan pengelolaan ruang wilayah.

Tabel 2.33 Indikator Kinerja Kunci Urusan PUTR

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	persen	0	0	0	100	100
1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	persen	0	0	0	100	100
1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	persen	11,65	8,04	76,63	30,15	26,15
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	persen	35,73	40,25	40,54	41,69	41,88
1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen	0,17	94,90	98,89	94,93	95,00
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	persen	100	100	100	100	100
1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	persen	37,54	32,11	46,39	43,17	45,73
1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	persen	0	60	60	0	28
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	persen	0	100	100	100	100

Sumber : LPPD 2020-2024; diolah

1. Panjang Jalan berdasarkan Konstruksi dan Kondisi

Jalan merupakan infrastruktur yang sangat vital dalam mendukung dan mempercepat aktivitas ekonomi. Konsep jalan mencakup semua komponen yang terlibat dalam sistem transportasi, termasuk elemen-elemen yang terletak di permukaan tanah, di atas tanah, di bawah tanah, dan bahkan di atas air. Fungsi jalan adalah untuk memberikan akses bagi kendaraan dan pejalan kaki, kecuali untuk jalur khusus seperti jalur kereta api, jalur lori, dan jalur kabel. Infrastruktur jalan yang baik dapat meningkatkan mobilitas masyarakat serta memperlancar pergerakan barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Panjang total jalan di Kabupaten Asahan pada tahun 2020 mencapai 1.721,38 km. Jaringan jalan tersebut terdiri dari jalan nasional sepanjang 82,28 km, jalan Provinsi sepanjang 240,97 km, dan jalan kabupaten sepanjang 1.398,13 km. Jalan nasional tersebar di 13 wilayah kecamatan, termasuk di antaranya Kecamatan Rahuning, Pulau Rakyat, Aek Kuasan, Aek Ledong, Tanjung Balai, Simpang Empat, Teluk Dalam, Air Batu, Sei Dadap, Meranti, Pulo Bandring, Kisaran Barat, dan Kisaran Timur. Sementara itu, jalan Provinsi tersebar di 15 wilayah kecamatan, sedangkan jaringan jalan kabupaten tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Tabel 2.34 Panjang Jalan menurut Jenis Jalan di Kabupaten Asahan, 2024

No	Kecamatan	Jenis Jalan			Jumlah Total
		Nasional	Provinsi	Kabupaten	
1	B. P. Mandoge	-	28,59	130,19	158,78
2	Bandar Pulau	-	5,96	84,85	90,81
3	Aek Songsongan	-	28,6	38,2	66,8
4	Rahuning	3,02	5,15	47,27	55,44
5	Pulau Rakyat	4,51	5,32	70,65	80,48
6	Aek Kuasan	5,62	-	64,31	69,93
7	Aek Ledong	4,75	-	19,4	24,15
8	Sei Kepayang	-	60,1	40,26	100,36
9	Sei Kepayang Barat	-	6,5	5,9	12,4
10	Sei Kepayang Timur	-	14,2	30,84	45,04
11	Tanjung Balai	4,99	7,8	56,06	68,85
12	Simpang Empat	14,87	6,1	66,45	87,42
13	Teluk Dalam	8,32	-	52,05	60,37
14	Air Batu	12,1	-	79,56	91,66
15	Sei Dadap	5,25	-	58,61	63,86
16	Buntu Pane	-	24,11	45,97	70,08
17	Tinggi Raja	-	-	59,84	59,84
18	Setia Janji	-	-	48,07	48,07
19	Meranti	5,75	-	26,5	32,25
20	Pulo Bandring	2	4,36	53,37	59,73
21	Rawang Panca Arga	-	-	53,71	53,71
22	Air Joman	-	34,2	47,62	81,82
23	Silau Laut	-	-	71,92	71,92
24	Kisaran Barat	5,8	6,04	61,55	73,39
25	Kisaran Timur	5,3	3,94	84,98	94,22
JUMLAH		82,28	240,97	1398,13	1721,38

Sumber: Kabupaten Asahan dalam Angka 2025

Berdasarkan Grafik 2.1.4.4.1-c-1, panjang jalan berdasarkan jenis konstruksi permukaan di Kabupaten Asahan mengalami perubahan selama periode tahun 2020-2024. Panjang jalan dengan permukaan hotmix cenderung meningkat dari 412,16 km pada tahun 2020 menjadi 506,85 km pada tahun 2024. Sementara

itu, jalan beraspal mengalami sedikit penurunan dari 183,82 km pada tahun 2020 menjadi 175,30 km pada tahun 2024. Jalan berkerikil menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari 13,48 km pada tahun 2020 menjadi 313,12 km pada tahun 2024. Panjang jalan dengan rabat beton mengalami fluktuasi, dengan angka 367,17 km pada tahun 2020, turun hingga 351,45 km pada 2023, lalu meningkat kembali menjadi 376,75 km pada tahun 2024. Sementara itu, panjang jalan tanah cenderung stabil di sekitar 363 km selama periode 2020-2023, sebelum akhirnya mengalami kenaikan menjadi 376,75 km pada tahun 2024. Hal ini menandakan kemajuan positif dalam pembangunan jaringan jalan di Kabupaten Asahan secara keseluruhan. Meskipun demikian, ke depannya diperlukan program pemeliharaan dan peningkatan konstruksi jalan secara lebih merata.

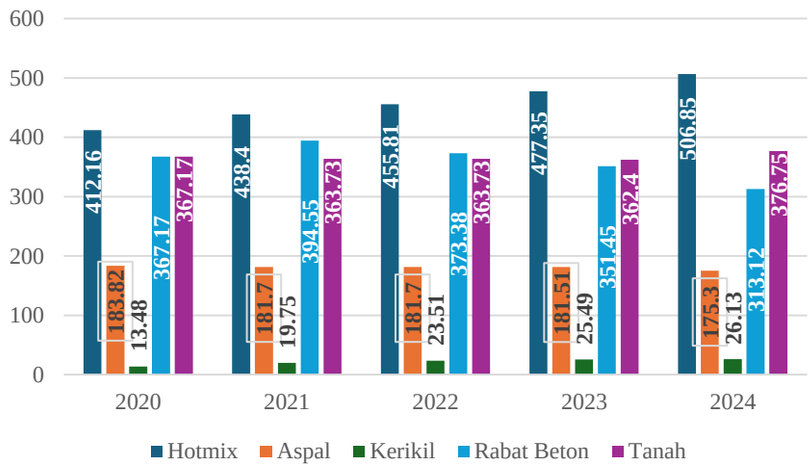

Gambar 2.40 Panjang Jalan Berdasarkan Konstruksi Permukaan Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024

Sumber: Kabupaten Asahan dalam Angka, 2025

Kondisi jalan di Kabupaten Asahan selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren perbaikan yang cukup signifikan, terutama ditandai oleh peningkatan panjang jalan yang berada dalam kondisi baik. Pada tahun 2020, panjang jalan berkondisi baik tercatat sebesar 397,58 km. Angka ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, yakni menjadi 423,01 km pada tahun 2021, naik lagi menjadi 489,70 km pada tahun 2022, sedikit menurun ke 475,91 km pada tahun 2023, dan kembali meningkat tajam menjadi 505,91 km pada 2024. Hal ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Asahan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan.

Sementara itu, panjang jalan dalam kondisi sedang relatif stabil, yaitu sebesar 127,33 km pada tahun 2020, meningkat menjadi 127,6 km selama tiga tahun berturut-turut (2021–2023), dan kembali naik menjadi 133,5 km pada 2024. Kondisi ini mengindikasikan adanya upaya pemeliharaan yang cukup konsisten pada ruas-ruas jalan yang belum tergolong baik namun masih layak digunakan.

Untuk kategori jalan dengan kondisi rusak sedang, terjadi penurunan bertahap dari 73,41 km pada tahun 2020 menjadi 73,4 km pada 2021, lalu menurun menjadi 72,91 km pada 2022, 71,73 km pada 2023, dan mencapai titik terendah sebesar 69,22 km pada tahun 2024. Penurunan ini merupakan indikasi positif dari proses rehabilitasi jalan yang cukup efektif.

Panjang jalan dalam kondisi rusak juga menunjukkan tren menurun, dari 346,01 km pada 2020 menjadi 343,69 km pada 2021, dan terus menurun hingga mencapai 321,23 km pada 2024. Di sisi lain, jalan dengan kondisi rusak berat mengalami fluktuasi. Dari 352,87 km pada tahun 2020, sempat turun ke 340,81 km pada 2021, kemudian meningkat menjadi 406,81 km pada 2022, sebelum turun kembali ke 390,77 km pada 2023, dan menjadi 368,27 km pada 2024.

Secara keseluruhan, kondisi jalan di Kabupaten Asahan selama lima tahun terakhir memperlihatkan arah perbaikan yang jelas, terutama pada peningkatan kualitas jalan yang baik dan penurunan proporsi jalan rusak dan rusak berat. Peningkatan ini diharapkan dapat mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, efisiensi logistik, serta memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah secara berkelanjutan.

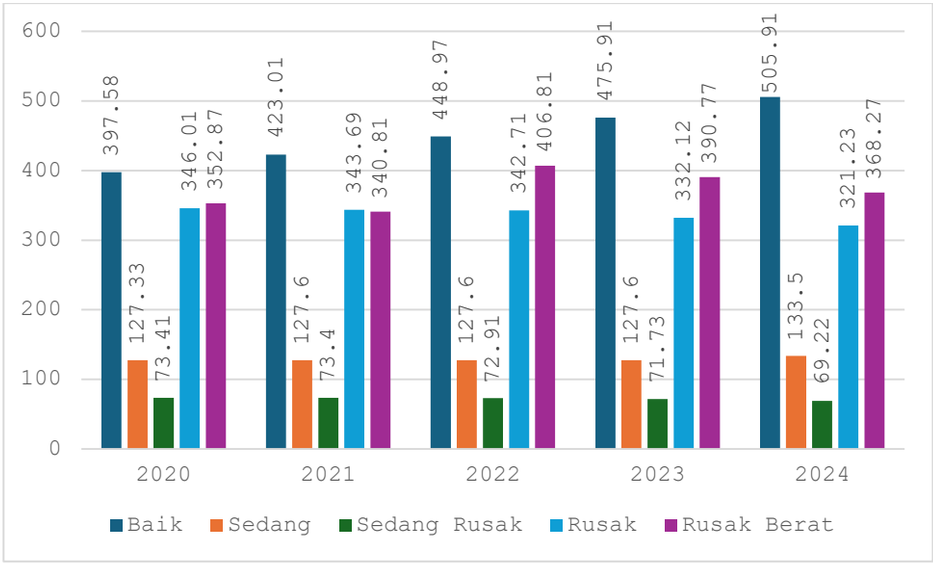

Gambar 2.41 Panjang Jalan berdasarkan Kondisi di Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024

Sumber: Kabupaten Asahan dalam Angka 2024

2. Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum

Berdasarkan kajian pengembangan SPAM yang pernah dilakukan pada tahun 2017, secara umum dapat diklasifikan permasalahan pengelolaan SPAM di Kabupaten Asahan, meliputi:

1) Permasalahan Pemenuhan Kebutuhan Air Baku, terdiri dari:
   - Pelayanan Skala Ibu kota Kabupaten
     a. Kapasitas daya dukung (debit air) dan kualitas air baku Sungai Silau makin menurun khususnya saat musim kemarau;
     b. Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih kurang optimal;
     c. Pelestarian Daerah tangkapan air di hulu Sungai Silau belum optimal.
     d. Kapasitas jaringan distribusi khususnya Kota Kisaran masih lebih rendah dari kapasitas produksi dan distribusi.
   - Pelayanan Skala Ibu kota Kecamatan dan Perdesaan
     a. Cakupan pelayanan SPAM perpipaan masih relative rendah
   - Iddle capacity (kapasitas terpasang yang belum terserap) masih ada khususnya pada SPAM ibu kota kecamatan karena beroperasi kurang dari 24 jam per hari.
     a. Tingkat kehilangan air sulit ditentukan karena tidak adanya meteran induk, tetapi diperkirakan masih tinggi
   - SPAM perdesaan non perpipaan berupa sumur bor & tangki air yang pengelolaannya diserahkan pada kelompok masyarakat masih belum dikelola dengan baik.
     a. Pelayanan pada Daerah Rawan Banjir
        - Air tanah dangkal tidak potensial, karena kelangkaannya atau kualitasnya keruh, berbau, kadar Fe berlebih, sehingga masyarakat tidak mau menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari

2) Permasalahan dalam hal peran dan kemitraan swasta dan masyarakat, terdiri dari:
    a. Potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan secara optimal,
    b. Kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah,
    c. Pembinaan Pemerintah Kabupaten ke kelompok masyarakat Penyelenggara SPAM masih kurang,
    d. Sektor swasta masih kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam pengembangan SPAM akibat kurang kondusifnya iklim usaha.

Secara khusus terkait dengan upaya pengembangan infrastruktur penyediaan air minum bagi masyarakat di Kabupaten Asahan, upaya utama yang telah dilakukan adalah melalui implementasi sistem jaringan perpipaan terpadu yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silau Piasa. Data menunjukkan bahwa jumlah pelanggan yang dilayani oleh PDAM terus meningkat selama lima tahun terakhir, sebagaimana terlihat pada Grafik 2.1.4.4.1-c-3. Dari 18.512 pelanggan pada tahun 2020, jumlahnya meningkat menjadi 24.712 pelanggan pada tahun 2024. Perlu dicatat bahwa kenaikan jumlah pelanggan, terutama dari segmen rumah tangga, menunjukkan potensi pengembangan yang signifikan dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum perpipaan yang diurus oleh PDAM, dan hal ini perlu dipertahankan secara konsisten.

Tabel 2.35 Banyaknya Pelanggan PDAM menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Asahan, 2020-2024

No	Jenis Konsumen	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sosial					
	Tempat Ibadah/ Fasilitas Umum	7	203	208	206	220
	Badan Sosial dan RS	189				
2	Non-Niaga					
	Rumah Tangga	19.115	20.054	21.331	22.335	23.354
	Instansi Pemerintah	341	347	177	189	187
3	Niaga	898	899	878	895	949
4	Industri	1	-	-	-	-
5	Hidran Umum	-	6	4	3	2
	JUMLAH	18.512	19.753	22.598	23.628	24.712

Sumber: Asahan Dalam Angka, 2021-2025

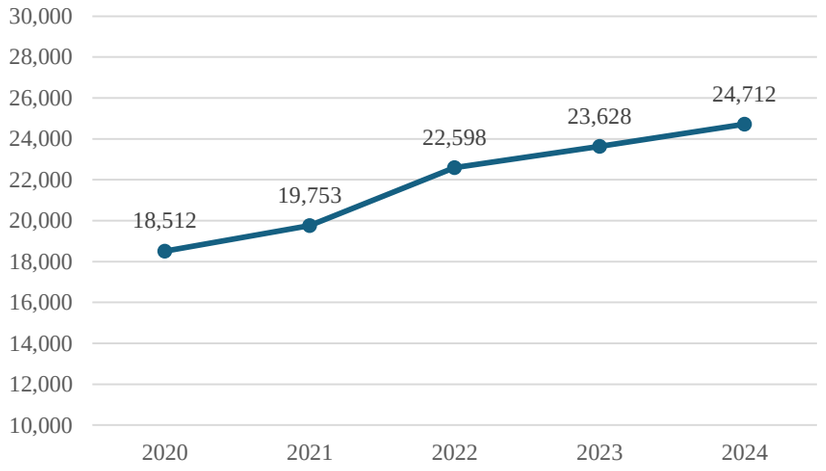

Gambar 2.42 Grafik Perkembangan Jumlah Pelanggan PDAM di Kabupaten Asahan, 2020-2024

Sumber: Asahan Dalam Angka, 2021-2025

3. Drainase Dalam Kondisi Baik

Drainase merujuk pada proses mengalirkan, menguras, atau membuang air, serta mengalihkannya. Sistem drainase dapat dianggap sebagai satu kesatuan yang terdiri dari komponen teknis dan non-teknis yang melibatkan prasarana dan sarana drainase. Prasarana drainase mencakup struktur saluran air baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang bertujuan untuk mengarahkan kelebihan air dari suatu wilayah ke badan air penerima. Sedangkan, sarana drainase merujuk pada bangunan pelengkap yang berperan dalam mengatur dan mengendalikan aliran air hujan untuk memastikan kelancaran dan keamanan saat melewati berbagai kondisi, seperti jalan, tikungan, daerah berlereng, dan lain sebagainya. Contoh sarana drainase meliputi gorong-gorong, persimpangan saluran, bangunan penurun air, jembatan, saluran air, pompa, dan pintu air.

Kondisi riil drainase lingkungan di Kabupaten Asahan ditandai dengan permasalahan seperti:

a. Tidak memadainya daya tampung saluran sehingga air buangan meluber ke kanan kiri saluran dan mengakibatkan genangan;
b. Lokasi saluran drainase yang berada di dalam rumah warga sehingga menyulitkan pemeliharaan; dan
c. Adanya pengendapan material di saluran yang menyebabkan permasalahan meluapnya air saluran di musim hujan.

Secara keseluruhan, di kawasan perkotaan Kabupaten Asahan, telah ada sistem drainase yang terdiri dari saluran terbuka yang dibangun dengan batu kali dan ditempatkan di sisi jalan. Saluran ini mengalirkan air ke sungai atau anak sungai terdekat. Hierarki saluran tersebut dimulai dari saluran lingkungan dengan ukuran 40-60 cm yang kemudian dialirkan ke saluran sekunder berukuran 80-100 cm, dan akhirnya dibuang ke saluran primer (sungai). Sebagian besar saluran drainase yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten mencakup lingkungan permukiman di wilayah perkotaan. Namun, tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten adalah memperluas cakupan layanan ke wilayah yang belum terjangkau. Di luar wilayah perkotaan, saluran drainase sering kali bergabung dengan saluran irigasi atau selokan alami yang kemudian mengalirkan air ke sungai utama.

Pengelolaan drainase di lingkungan perkotaan Kabupaten Asahan saat ini masih terutama bergantung pada pihak pemerintah, sementara partisipasi dari masyarakat dan sektor swasta masih kurang signifikan. Hal ini telah

menyebabkan penanganan genangan air menjadi tidak optimal karena keterbatasan sumber daya pemerintah. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan membersihkan saluran drainase juga menyebabkan banyaknya saluran yang tersumbat oleh sampah dari jalanan atau limbah rumah tangga, seperti air bekas mandi dan cucian, sehingga menyebabkan genangan air terutama saat musim hujan karena saluran tidak mampu menampung aliran air dengan baik.

Untuk mengatasi permasalahan drainase dan meningkatkan infrastrukturnya, telah disusun rencana dan konsep pengembangan jaringan drainase di Kabupaten Asahan, yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Asahan 2013-2032 sebagai bagian dari infrastruktur kabupaten. Dalam penjelasannya, fokus pengembangan sistem drainase di Kabupaten Asahan adalah pada sistem drainase makro dan sistem drainase perkotaan yang memiliki kapasitas yang memadai. Rencana pengembangan sistem drainase tersebut mencakup rincian sebagai berikut:

a. Normalisasi jaringan drainase yang ada;
b. Pembangunan dan pengembangan kolam retensi di kawasan perkotaan;
c. Pembangunan sumur resapan di kawasan perkotaan;
d. Pembuatan waduk sebagai penampung limpasan air sungai dan laut yang berlokasi pada pesisir pantai dan muara sungai termasuk anak sungai; dan
e. Pengelolaan sumber daya air bekerjasama dengan pemerintahan daerah terdekat di daerah perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain.

Selain menjamin ketersediaan drainase di sepanjang jalan, perlu juga memperhatikan kualitas dari drainase tersebut. Drainase yang baik akan mengurangi potensi banjir di suatu wilayah. Drainase dalam kondisi baik dalam hal ini termasuk pula kondisi pembuangan air yang tidak tersumbat. Drainase dalam Kondisi Baik

Tabel 2.36 Kondisi Saluran Air Kabupaten Asahan, 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Persen	77,47	79,94	82,74	86,09	78,36
Persentase Drainase Kota dengan Kondisi Baik	Persen	85,12	47	91,13	91,23	91,49

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2020-2024

2.1.4.4.A-d Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan elemen fundamental dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Aspek ini mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan penyediaan hunian bagi individu dan komunitas, termasuk penyediaan perumahan yang layak, aman, nyaman, serta pengembangan kawasan permukiman yang tertata dan berkelanjutan. Kondisi perumahan dan kawasan permukiman dapat diukur melalui ketersediaan rumah layak huni, yaitu unit hunian yang memenuhi standar kelayakan dari segi kualitas konstruksi, keamanan, kesehatan, serta akses terhadap fasilitas dasar. Capaian kinerja di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.37 Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.d.1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	persen	0	20	100	100	0
1.d.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	persen	0	0	0	100	0
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	persen	100	0	0	1,91	3,95
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	persen	8,18	5,79	3,69	5,09	4,94
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	persen	0,31	0,72	100	0,69	78,65

Sumber : LPPD 2020-2024, diolah

Capaian kinerja di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Asahan selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang beragam pada berbagai indikator outcome yang diukur. Pada indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, terjadi peningkatan realisasi yang signifikan, dari 0 persen pada tahun 2020 menjadi 20 persen pada tahun 2021, dan mencapai 100 persen pada tahun 2022 dan 2023. Namun demikian, pada tahun 2024, realisasi kembali menjadi 0 persen, yang menunjukkan bahwa tidak ada program rehabilitasi baru untuk korban bencana pada tahun tersebut.

Untuk indikator fasilitasi hunian layak bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah, realisasi tercatat 0 persen pada tahun 2020 hingga 2022. Peningkatan baru terjadi pada tahun 2023 dengan capaian 100 persen, sebelum kembali menjadi 0 persen pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa program fasilitasi relokasi masyarakat berjalan optimal pada tahun 2023. Indikator penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektare mengalami perubahan capaian. Pada tahun 2020, realisasi penanganan kawasan kumuh mencapai 100 persen, namun tidak ada capaian pada tahun 2021 dan 2022. Kegiatan penanganan mulai aktif kembali pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 1,91 persen dan meningkat menjadi 3,95 persen pada tahun 2024, menandakan adanya kesinambungan upaya dalam mengurangi kawasan kumuh di Kabupaten Asahan.

Dalam hal pengurangan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), capaian realisasi bervariasi. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 8,18 persen, menurun menjadi 5,79 persen pada tahun 2021, namun menurun menjadi 3,69 pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 dan 2024, menjadi 5,09 persen dan 4,94 persen. Pada indikator penyediaan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) di perumahan, capaian juga menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020, capaian masih rendah di angka 0,31 persen, kemudian meningkat menjadi 0,72 persen pada 2021, dan melonjak signifikan

menjadi 100 persen pada tahun 2022. Pada 2023, realisasi kembali turun menjadi 0,69 persen, namun meningkat lagi menjadi 78,65 persen pada tahun 2024. Perkembangan ini menggambarkan bahwa penyediaan PSU di perumahan menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur dasar dalam mendukung kualitas hidup masyarakat.

Secara umum, capaian kinerja di sektor perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Asahan selama lima tahun terakhir menunjukkan upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan ketersediaan hunian layak, mengurangi kawasan kumuh, mengurangi jumlah RTLH, dan menyediakan infrastruktur pendukung di permukiman. Namun, fluktuasi capaian juga mengindikasikan perlunya perencanaan yang lebih konsisten dan berkelanjutan di masa mendatang.

2.1.4.4.A-e Kententraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan wilayah. Sejalan dengan itu, pemantauan terhadap tingkat kriminalitas di daerah menjadi aspek yang krusial untuk memastikan terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan terlindungi. Monitoring ini berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan, strategi pencegahan, serta intervensi untuk memperkuat ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.

Tabel 2.38 Indikator Kinerja Kunci Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	persen	100	100	100	100	100
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	persen	55,56	100	100	100	155,56
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	persen	0	1,64	100	100	100
1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	0	1,69	100	100	9,09
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	0	100	100	100	100
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persen	100	100	100	100	217,33
1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	25	15	15	23	18

Sumber : LPPD 2020-2024, diolah

Capaian indikator urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Asahan selama periode 2020–2024 menunjukkan tren kinerja yang positif dan konsisten di berbagai aspek pelayanan. Pada indikator persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) yang dapat diselesaikan, Kabupaten Asahan berhasil mempertahankan capaian 100 persen secara konsisten selama lima tahun berturut-turut.

Hal ini mencerminkan efektivitas respons pemerintah daerah dalam menangani berbagai gangguan trantibum di wilayahnya. Untuk indikator penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), terjadi peningkatan yang signifikan dari 55,56 persen pada tahun 2020 menjadi 100 persen pada tahun 2021 hingga 2023, dan bahkan meningkat lagi menjadi 155,56 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan upaya intensif dalam menegakkan regulasi daerah secara lebih luas dan efektif.

Dalam hal layanan informasi rawan bencana, capaian mengalami peningkatan signifikan dari 0 persen pada tahun 2020 menjadi 1,64 persen pada tahun 2021, dan mencapai 100 persen pada tahun 2022 hingga 2024. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Asahan telah mendapatkan akses penuh terhadap layanan informasi rawan bencana sejak tahun 2022. Untuk indikator layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, capaian meningkat dari 0 persen pada tahun 2020 menjadi 1,69 persen pada 2021, dan mencapai 100 persen pada 2022 dan 2023. Namun, pada tahun 2024, realisasi turun menjadi 9,09 persen, yang mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap keberlanjutan program kesiapsiagaan bencana di tahun tersebut.

Sementara itu, untuk indikator layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, capaian konsisten di angka 100 persen sejak tahun 2021 hingga 2024, menunjukkan kesigapan pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan darurat bencana kepada masyarakat. Pada aspek pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, persentase capaian juga menunjukkan konsistensi 100 persen pada tahun 2020 hingga 2023, dan melonjak menjadi 217,33 persen pada tahun 2024. Lonjakan ini mengindikasikan peningkatan kapasitas dan frekuensi pelayanan evakuasi dalam kasus kebakaran.

Adapun indikator waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun awal. Pada tahun 2020, waktu tanggap tercatat 25 menit, menurun menjadi 15 menit pada 2021 dan 2022, sedikit meningkat menjadi 23 menit pada 2023, dan kembali membaik menjadi 18 menit pada tahun 2024. Perbaikan waktu tanggap ini menunjukkan peningkatan efektivitas layanan darurat kebakaran.

Secara keseluruhan, capaian indikator menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, meskipun beberapa aspek masih memerlukan penguatan konsistensi ke depan.

2.1.4.4.A-f Sosial

Perlindungan sosial merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat kurang mampu dapat menikmati layanan publik secara adil dan merata. Upaya ini diharapkan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, sehingga seluruh lapisan masyarakat memperoleh manfaat yang setara. Dalam rangka mendukung tujuan tersebut, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program jaminan kesehatan yang ditujukan khusus bagi masyarakat kurang mampu, sehingga mereka dapat mengakses layanan kesehatan secara layak tanpa dibebani oleh kendala biaya.

Tabel 2.39 Indikator Kinerja Kunci Urusan Sosial

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	persen	100	100	100	100	100
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	persen	100	100	100	100	100

Sumber : LPPD 2020-2024, diolah

Capaian kinerja di bidang perlindungan sosial Kabupaten Asahan selama periode tahun 2020–2024 menunjukkan konsistensi yang sangat baik pada dua indikator utama. Pada indikator pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti, realisasi tercatat sebesar 100 persen secara konsisten selama lima tahun berturut-turut. Pencapaian ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial bagi kelompok rentan yang tidak berada dalam lembaga panti.

Demikian pula, pada indikator pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial selama masa tanggap darurat dan pasca-bencana, realisasi juga tercapai 100 persen pada setiap tahun dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini mencerminkan kesiapan dan kesigapan pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan bantuan darurat bagi masyarakat terdampak bencana, sesuai dengan ketentuan penanganan bencana Daerah. Secara keseluruhan, kinerja perlindungan sosial di Kabupaten Asahan memperlihatkan konsistensi yang tinggi dalam memastikan kelompok rentan dan korban bencana mendapatkan akses terhadap layanan dasar secara layak dan tepat waktu, mendukung tercapainya tujuan pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.4.4.B Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.1.4.4.B-a Tenaga Kerja

Aspek ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan penduduk.

Berbagai permasalahan masih ditemukan di sektor ini, antara lain konflik hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja, kebutuhan peningkatan keterampilan tenaga kerja, keterbatasan cakupan layanan ketenagakerjaan, rendahnya tingkat penempatan tenaga kerja, serta kebutuhan pengembangan tenaga kerja mandiri untuk mengurangi ketergantungan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan ketenagakerjaan yang memadai bagi seluruh warga negara. Dalam rangka mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor ketenagakerjaan.

Tabel 2.40 Indikator Kinerja Utama Urusan Tenaga Kerja

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	persen	0	18,52	100	100	100
2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	persen	0,01	1,71	62,83	1,72	50,05

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	persen	8,28	13,00	13,00	12,39	13,48
2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	persen	100	18,36	39,90	0	9,43
2.a.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	persen	45,50	63,52	63,52	85,67	100

Sumber : LPPD 2020-2024, diolah

Kinerja sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Asahan selama periode tahun 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang bervariasi pada sejumlah indikator strategis. Pada indikator persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada rencana tenaga kerja, realisasi mengalami peningkatan signifikan, dari 0 persen pada tahun 2020 menjadi 18,52 persen pada tahun 2021, dan mencapai 100 persen pada tahun 2022 hingga 2024. Capaian ini mencerminkan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program ketenagakerjaan yang lebih sistematis dan berbasis dokumen perencanaan tenaga kerja.

Untuk indikator persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi, terjadi peningkatan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2020, realisasi masih sangat rendah sebesar 0,01 persen, meningkat menjadi 1,71 persen pada tahun 2021, dan melonjak menjadi 62,83 persen pada tahun 2022. Namun, capaian kembali menurun menjadi 1,72 persen pada tahun 2023 sebelum kembali naik menjadi 50,05 persen pada tahun 2024. Perkembangan ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja, meskipun perlu dilakukan penguatan keberlanjutan program sertifikasi di tahun-tahun mendatang.

Indikator tingkat produktivitas tenaga kerja juga menunjukkan tren positif. Produktivitas tenaga kerja meningkat dari 8,28 persen pada tahun 2020 menjadi 13,00 persen pada tahun 2021 dan 2022. Meskipun sempat menurun sedikit menjadi 12,39 persen pada 2023, produktivitas kembali naik menjadi 13,48 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan stabilitas dalam peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja di Kabupaten Asahan.

Pada indikator persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (meliputi penerapan PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan), capaian mengalami fluktuasi besar. Setelah mencapai 100 persen pada tahun 2020, angka ini menurun drastis menjadi 18,36 persen pada tahun 2021, sedikit membaik menjadi 39,90 persen pada 2022, kemudian kembali turun menjadi 0 persen pada tahun 2023, dan meningkat menjadi 9,43 persen pada tahun 2024. Perkembangan ini menunjukkan perlunya perhatian serius dalam memperkuat tata kelola ketenagakerjaan yang layak di tingkat perusahaan.

Sementara itu, pada indikator persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja, terdapat tren peningkatan yang positif. Realisasi meningkat dari 45,50 persen pada tahun 2020 menjadi 63,52 persen pada tahun 2021 dan 2022, lalu naik lagi menjadi 85,67 persen pada tahun 2023, dan mencapai 100 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan efektivitas layanan antar kerja dalam memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja di Kabupaten Asahan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Secara keseluruhan, capaian kinerja ketenagakerjaan di Kabupaten Asahan menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan peningkatan tata kelola ketenagakerjaan di tingkat perusahaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Daerah secara berkelanjutan.

2.1.4.4.B-b Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan upaya strategis untuk meningkatkan posisi, hak, dan kesejahteraan perempuan, serta memberikan perlindungan optimal bagi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi.

Kedua isu ini saling berkaitan, mengingat perempuan dan anak-anak sering berada dalam kondisi rentan terhadap ketidaksetaraan dan kekerasan. Capaian kinerja terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Asahan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.41 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	persen	0	2,22	2,22	0,13	25,76
2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	persen	100	100	100	100	100
2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	persen	0,55	50,17	50,17	37,78	12,43

Sumber : LPPD 2020-2024, diolah

Capaian kinerja di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Asahan selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang bervariasi di beberapa indikator kunci. Pada indikator persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam belanja langsung APBD, terjadi fluktuasi capaian dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, capaian ARG masih sebesar 0 persen, kemudian meningkat menjadi 2,22 persen pada tahun 2021 dan bertahan di angka yang sama pada tahun 2022. Namun, capaian menurun menjadi 0,13 persen pada tahun 2023 sebelum akhirnya meningkat tajam menjadi 23,77 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya komitmen yang lebih kuat di tahun terakhir untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran Daerah.

Untuk indikator persentase anak korban kekerasan yang ditangani oleh instansi terkait, Kabupaten Asahan berhasil mempertahankan capaian 100 persen secara konsisten sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Hal ini mencerminkan kesiapan dan keseriusan pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan serta pemulihan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan.

Pada indikator rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) per 100.000 penduduk perempuan, terjadi fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 0,55, kemudian melonjak menjadi 50,17 pada tahun 2021 dan tetap bertahan pada angka yang sama di tahun 2022. Rasio tersebut kemudian menurun menjadi 37,78 pada tahun 2023, dan terus membaik hingga mencapai 12,43 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, meskipun upaya penguatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan tetap perlu ditingkatkan.

Secara umum, capaian ini menunjukkan kemajuan penting dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Asahan, meskipun konsistensi pengintegrasian gender dalam penganggaran dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan masih perlu mendapatkan perhatian khusus untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender.

2.1.4.4.B-c Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang bersifat esensial dan tidak dapat digantikan. Dalam konteks pembangunan Daerah, ketersediaan pangan menjadi salah satu prioritas utama yang harus dijaga. Di Kabupaten Asahan, beras berperan sebagai komoditas pangan pokok utama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk. Capaian kinerja di bidang urusan pangan Kabupaten Asahan selama tahun 2018 hingga 2023 disajikan dalam uraian berikut.

Tabel 2.42 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pangan

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	persen	72,46	100,14	100,14	0	50

Sumber : LPPD 2020-2024, diolah

Capaian kinerja dalam bidang pangan di Kabupaten Asahan pada periode tahun 2020–2024 menunjukkan fluktuasi dalam ketersediaan pangan, khususnya terkait penyediaan cadangan beras dan jagung sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2020, persentase ketersediaan pangan tercatat sebesar 72,46 persen. Angka ini meningkat signifikan pada tahun 2021 dan 2022, dengan capaian sebesar 100,14 persen, yang menunjukkan bahwa pada dua tahun tersebut ketersediaan cadangan beras dan jagung telah melampaui kebutuhan konsumsi masyarakat. Namun demikian, pada tahun 2023, persentase ketersediaan pangan tercatat 0 persen, yang mengindikasikan tidak adanya atau belum tersedianya cadangan pangan sesuai kebutuhan pada tahun tersebut. Pada tahun 2024, capaian ketersediaan pangan kembali meningkat menjadi 50 persen, meskipun masih belum mencapai tingkat optimal sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan bahwa, meskipun sempat mencapai kondisi ideal pada tahun 2021–2022, terdapat tantangan dalam menjaga kesinambungan ketersediaan cadangan pangan di tahun-tahun berikutnya.

Diperlukan penguatan sistem ketahanan pangan Daerah untuk memastikan bahwa ketersediaan pangan dapat stabil dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan, terutama dalam menghadapi potensi risiko bencana, fluktuasi produksi, dan dinamika pasar pangan.

2.1.4.4.B-d Pertanahan

Sektor pertanahan memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan, investasi, serta perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat. Evaluasi terhadap kinerja urusan pertanahan di Kabupaten Asahan dapat dilihat melalui sejumlah indikator yang mencerminkan pengelolaan, pemanfaatan, dan penyelesaian permasalahan pertanahan. Berikut disajikan capaian indikator kinerja urusan pertanahan Kabupaten Asahan selama periode tahun tahun 2020–2024.

Tabel 2.43 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanahan

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	persen	0	100	100	100	100

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.i.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	persen	0	0	100	100	74,20
2.i.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	persen	0	100	100	100	100
2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	persen	0	0	0	19,2	17,66
2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	persen	0	0	100	100	100
2.i.6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	persen	100	100	22,22	100	100

Sumber : LPPD 2020-2024, diolah

Pada indikator persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan di atas izin lokasi, capaian menunjukkan tren positif, dari 0 persen pada tahun 2020 menjadi 100 persen pada tahun 2021, dan bertahan di angka 100 persen hingga tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah di Kabupaten Asahan telah dilakukan sesuai dengan izin lokasi yang diterbitkan, mendukung keteraturan tata ruang dan kepastian hukum dalam pemanfaatan tanah.

Indikator persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum menunjukkan progres signifikan. Setelah tidak ada capaian pada tahun 2020 dan 2021, realisasi meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2022 dan 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 74,20 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengalokasian tanah untuk fasilitas publik telah menjadi perhatian serius pemerintah Daerah, meskipun konsistensi capaian perlu terus ditingkatkan.

Pada indikator tersedianya lokasi pembangunan untuk penanaman modal, capaian berada di angka 0 persen pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2021 dan konsisten terjaga hingga tahun 2024. Ketersediaan lokasi ini menjadi modal penting dalam mendukung kemudahan investasi dan pengembangan sektor ekonomi Daerah.

Sementara itu, indikator tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan menunjukkan capaian yang mulai berkembang pada tahun 2023, yakni sebesar 19,2 persen, dan sedikit menurun menjadi 17,66 persen pada tahun 2024. Ketersediaan TOL ini menjadi bagian dari upaya reforma agraria untuk pemerataan akses atas tanah bagi masyarakat.

Untuk indikator tersedianya tanah bagi masyarakat, capaian meningkat tajam dari 0 persen pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 100 persen pada tahun 2022 hingga 2024. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan pemerintah Daerah dalam menyiapkan tanah untuk kepentingan masyarakat secara luas.

Pada indikator penanganan sengketa tanah garapan melalui mediasi, capaian cukup stabil. Tercatat 100 persen pada tahun 2020 dan 2021, menurun menjadi 22,22 persen pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa tanah berbasis musyawarah di Kabupaten Asahan.

Secara keseluruhan, kinerja urusan pertanahan di Kabupaten Asahan menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam aspek pemanfaatan tanah, penyediaan tanah untuk investasi dan masyarakat, serta penyelesaian sengketa pertanahan, meskipun pada beberapa indikator masih diperlukan penguatan konsistensi dan percepatan capaian.

2.1.4.4.B-e Lingkungan Hidup

Indikator yang menjadi fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mengelola urusan lingkungan hidup meliputi penanganan dan pengurangan sampah. Adapun capaian kinerja lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44 Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	nilai	61,097	61,80	65,04	66,81	64,61
2.j.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	persen	12,06	15,44	22,76	21,08	29,82
2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	persen	0	75	10,53	77,78	100

Sumber : LPPD 2020-2024, diolah

Pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota, Kabupaten Asahan menunjukkan tren peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam periode 2020 hingga 2023. Nilai IKLH tercatat sebesar 61,097 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 61,80 pada tahun 2021. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan capaian 65,04 dan mencapai nilai tertinggi sebesar 66,81 pada tahun 2023. Capaian ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan kualitas udara, air, dan tutupan lahan, yang menjadi komponen utama penyusun IKLH.

Namun demikian, pada tahun 2024, terjadi penurunan nilai IKLH menjadi 64,61. Meskipun penurunan ini tidak tergolong drastis, tren ini tetap perlu menjadi perhatian, karena dapat menjadi indikasi awal menurunnya kualitas lingkungan akibat tekanan pembangunan, pertumbuhan permukiman, serta meningkatnya timbulan limbah dan sampah. Fluktuasi nilai IKLH ini menegaskan pentingnya upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Indikator pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, tingkat pelaksanaan pengelolaan sampah tercatat sebesar 12,06 persen, meningkat menjadi 15,44 persen pada tahun 2021, 22,76 persen pada tahun 2022, 21,08 persen pada tahun 2023, dan mencapai 29,82 persen pada tahun 2024. Meskipun capaian ini masih relatif rendah, tren positif menunjukkan adanya upaya peningkatan kapasitas dan sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Asahan.

Sementara itu, pada indikator ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, capaian mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, capaian ketaatan berada pada 0 persen, meningkat signifikan menjadi 75 persen pada 2021. Namun, terjadi penurunan tajam menjadi 10,53 persen pada tahun 2022, sebelum kembali meningkat menjadi 77,78 persen pada tahun 2023 dan mencapai 100 persen pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan hidup.

Secara keseluruhan, capaian kinerja di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Asahan menunjukkan upaya perbaikan yang konsisten, khususnya dalam aspek pengelolaan sampah dan peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap regulasi

lingkungan. Namun, penurunan tajam pada nilai IKLH di tahun 2024 perlu menjadi perhatian utama dalam perencanaan program lingkungan hidup ke depan, agar kualitas lingkungan dapat dipulihkan dan dipertahankan untuk mendukung pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

2.1.4.4.B-f Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan perlindungan hak-hak dasar penduduk. Capaian indikator kinerja di bidang administrasi kependudukan mencerminkan efektivitas pelayanan publik, penguatan basis data penduduk, serta dukungan terhadap perencanaan pembangunan berbasis data. Berikut disajikan capaian kinerja urusan administrasi kependudukan di Kabupaten Asahan selama periode tahun 2020–2024.

Tabel 2.45 Indikator Kinerja Kunci Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.k.1.1	Perekaman KTP elektronik	persen	90,54	98,09	91,85	66,91	94,83
2.k.1.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	persen	15,85	35,19	38,36	45,78	50,68
2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	persen	90,55	90,68	94,16	98,59	98,77
2.k.1.4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	persen	100	21,05	86,67	75	38,71

Sumber : LPPD 2020-2024, diolah

Pada indikator perekaman KTP elektronik, capaian di Kabupaten Asahan menunjukkan fluktuasi. Tingkat perekaman mencapai 90,54 persen pada tahun 2020, meningkat menjadi 98,09 persen pada 2021, kemudian sedikit menurun menjadi 91,85 persen pada 2022, mengalami penurunan lebih lanjut menjadi 66,91 persen pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 94,83 persen pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan bahwa upaya percepatan perekaman KTP elektronik perlu terus diperkuat secara konsisten.

Pada indikator kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak usia 0–7 tahun kurang satu hari, terjadi peningkatan capaian dari 15,85 persen pada tahun 2020 menjadi 35,19 persen pada 2021, dan terus meningkat menjadi 38,36 persen pada 2022, 45,78 persen pada 2023, serta 50,68 persen pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan pelayanan administrasi kependudukan untuk kelompok usia anak, meskipun cakupan masih perlu terus ditingkatkan untuk mencapai target universal.

Indikator kepemilikan akta kelahiran menunjukkan perkembangan yang sangat positif dan stabil. Pada tahun 2020, persentase kepemilikan akta kelahiran tercatat sebesar 90,55 persen, meningkat menjadi 90,68 persen pada 2021, dan naik lagi menjadi 94,16 persen pada 2022. Capaian ini terus membaik hingga mencapai 98,59 persen pada 2023 dan 98,77 persen pada 2024, mendekati target kepemilikan akta kelahiran universal di tingkat nasional.

Sementara itu, pada indikator pemanfaatan data kependudukan oleh Perangkat Daerah (PD) berdasarkan perjanjian kerja sama, capaian menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020, capaian tercatat sebesar 100 persen, namun menurun drastis menjadi 21,05 persen pada tahun 2021. Capaian meningkat menjadi 86,67 persen pada tahun 2022, lalu kembali menurun menjadi 75 persen pada 2023 dan turun lagi menjadi 38,71 persen pada 2024. Fluktuasi ini mengindikasikan perlunya penguatan koordinasi dan konsistensi dalam pemanfaatan data kependudukan oleh

berbagai Perangkat Daerah guna mendukung perencanaan dan pelayanan publik berbasis data yang akurat.

Secara keseluruhan, capaian administrasi kependudukan di Kabupaten Asahan menunjukkan perkembangan positif terutama dalam aspek perekaman identitas dasar dan pemenuhan hak-hak administrasi penduduk, meskipun aspek pemanfaatan data antar instansi Daerah masih memerlukan penguatan sinergi dan optimalisasi.

2.1.4.4.B-g Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas utama dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan.

Pengentasan desa tertinggal dan peningkatan jumlah desa mandiri menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas intervensi pembangunan di tingkat desa. Berikut disajikan capaian indikator kinerja pembangunan desa di Kabupaten Asahan selama periode tahun 2020–2024.

Tabel 2.46 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.I.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	persen	26,67	92,31	92,31	83,33	100
2.I.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	persen	2,76	86,54	86,54	80	84

Sumber : LPPD 2020-2024, diolah

Pada indikator persentase pengentasan desa tertinggal, capaian di Kabupaten Asahan menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2020, persentase pengentasan desa tertinggal tercatat sebesar 26,67 persen. Angka ini melonjak tajam menjadi 92,31 persen pada tahun 2021, dan bertahan di angka yang sama pada tahun 2022. Pada tahun 2023, capaian sedikit menurun menjadi 83,33 persen, namun kembali meningkat hingga mencapai 100 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh desa tertinggal di Kabupaten Asahan berhasil dientaskan pada akhir periode perencanaan, mencerminkan keberhasilan program-program pembangunan berbasis desa.

Untuk indikator persentase peningkatan status desa mandiri, capaian juga menunjukkan tren yang positif meskipun mengalami sedikit fluktuasi. Pada tahun 2020, capaian awal sebesar 2,76 persen, meningkat pesat menjadi 86,54 persen pada tahun 2021, dan tetap stabil di angka tersebut hingga 2022. Pada tahun 2023, capaian mengalami sedikit penurunan menjadi 80 persen, sebelum kembali naik menjadi 84 persen pada tahun 2024. Perkembangan ini menunjukkan kemajuan dalam pemberdayaan desa menuju status mandiri, walaupun diperlukan penguatan keberlanjutan program untuk memastikan lebih banyak desa mampu meningkatkan kemandiriannya secara optimal.

Secara keseluruhan, capaian pembangunan desa di Kabupaten Asahan selama periode tahun 2020–2024 menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan, khususnya dalam pengentasan desa tertinggal. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah menjaga kesinambungan status desa mandiri dan meningkatkan kapasitas desa untuk mengelola pembangunan secara mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan.

2.1.4.4.B-h Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas keluarga merupakan bagian penting dari strategi pembangunan berkelanjutan. Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) berperan strategis dalam

mengatur laju pertumbuhan penduduk, menurunkan angka kelahiran, serta memenuhi kebutuhan pelayanan keluarga berencana. Berikut disajikan capaian indikator kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Asahan selama periode tahun 2020–2024.

Tabel 2.47 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	2,9	2,79	2,79	2,13	2,37
2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	persen	65,33	50,17	50,17	56,82	65,88
2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	persen	0	35,30	35,30	20,56	12,40

Sumber : LPPD 2020-2024, diolah

Pada indikator Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total, Kabupaten Asahan menunjukkan tren penurunan yang cukup baik. TFR tercatat sebesar 2,9 jiwa pada tahun 2020, menurun menjadi 2,79 jiwa pada tahun 2021 dan 2022. Penurunan lebih signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan angka TFR sebesar 2,13 jiwa, sebelum sedikit meningkat menjadi 2,37 jiwa pada tahun 2024. Secara umum, tren ini menunjukkan keberhasilan upaya pengendalian angka kelahiran, meskipun masih diperlukan penguatan agar TFR semakin mendekati target nasional.

Pada indikator persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR), capaian mengalami fluktuasi. Tingkat penggunaan kontrasepsi modern tercatat 65,33 persen pada tahun 2020, kemudian menurun cukup tajam menjadi 50,17 persen pada tahun 2021 dan tetap bertahan di angka tersebut pada tahun 2022. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan menjadi 56,82 persen dan kembali meningkat menjadi 65,88 persen pada tahun 2024. Perkembangan ini menunjukkan adanya pemulihan dalam capaian pemakaian kontrasepsi modern setelah sempat mengalami penurunan, yang penting untuk mendukung pengendalian angka kelahiran dan perencanaan keluarga.

Sementara itu, pada indikator persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), capaian menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, unmet need tercatat 0 persen, namun meningkat menjadi 35,30 persen pada tahun 2021 dan tetap di angka yang sama pada 2022. Pada tahun 2023, unmet need menurun menjadi 20,56 persen dan terus membaik menjadi 12,40 persen pada tahun 2024.

Penurunan unmet need ini mengindikasikan perbaikan akses dan efektivitas pelayanan program KB di Kabupaten Asahan.

Secara keseluruhan, capaian pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Asahan selama lima tahun terakhir menunjukkan kemajuan positif, khususnya dalam menurunkan angka kelahiran dan meningkatkan akses terhadap layanan kontrasepsi. Upaya berkelanjutan masih diperlukan untuk memperkuat pelayanan keluarga berencana, memastikan kebutuhan KB terpenuhi secara lebih merata, serta mendukung perencanaan keluarga yang berkualitas.

2.1.4.4.B-i Perhubungan

Peningkatan konektivitas wilayah dan optimalisasi kinerja lalu lintas merupakan faktor penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah. Capaian indikator kinerja bidang konektivitas dan transportasi di Kabupaten Asahan mencerminkan sejauh mana pembangunan infrastruktur transportasi mendukung efisiensi dan efektivitas pergerakan di wilayah tersebut. Berikut disajikan capaian kinerja urusan konektivitas dan transportasi Kabupaten Asahan selama periode tahun 2020–2024.

Tabel 2.48 Indikator Kinerja Kunci Urusan Perhubungan

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.n.1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	persen	80,87	80,87	80	80	83,37
2.n.2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	nilai	0	0,7	0,4	0,4	0,4

Sumber : LPPD 2020-2024, diolah

Pada indikator rasio konektivitas kabupaten/kota, capaian Kabupaten Asahan menunjukkan tren stabil dengan sedikit peningkatan pada akhir periode. Pada tahun 2020 dan 2021, rasio konektivitas tercatat sebesar 80,87 persen. Capaian ini sedikit menurun menjadi 80 persen pada tahun 2022 dan 2023, sebelum akhirnya meningkat menjadi 83,37 persen pada tahun 2024.

Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya perbaikan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Asahan, baik melalui pembangunan maupun peningkatan kualitas jaringan transportasi.

Sementara itu, pada indikator kinerja lalu lintas kabupaten/kota, realisasi pada tahun 2020 tercatat sebesar 0, yang mengindikasikan belum adanya data atau kinerja yang terukur pada tahun tersebut. Namun, mulai tahun 2021, kinerja lalu lintas mulai menunjukkan capaian nilai sebesar 0,7, yang kemudian menurun menjadi 0,4 pada tahun 2022 dan bertahan di angka 0,4 hingga tahun 2024. Nilai kinerja ini menunjukkan adanya kestabilan dalam pengelolaan lalu lintas, meskipun tingkat efisiensinya masih perlu ditingkatkan untuk mendorong kelancaran pergerakan kendaraan dan mengurangi potensi kemacetan di wilayah Kabupaten.

Secara keseluruhan, capaian indikator konektivitas dan transportasi di Kabupaten Asahan menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas mobilitas dan aksesibilitas wilayah. Namun, ke depan, diperlukan penguatan program peningkatan kapasitas jalan, manajemen lalu lintas, serta integrasi moda transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Daerah secara lebih optimal dan berkelanjutan.

2.1.4.4.B-j Komunikasi dan Informasi

Transformasi digital dalam pemerintahan menjadi pilar utama untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memperluas akses informasi, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat. Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi langkah strategis dalam mendukung pelayanan berbasis digital di tingkat Daerah.
Berikut disajikan capaian indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Asahan selama periode 2020–2024.

Tabel 2.49 Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informasi

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.o.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	persen	100	100	100	100	100
2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	100	100	100	100	100
2.o.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah kabupaten/kota	persen	100	100	100	100	100

Sumber : LPPD 2020-2024, diolah

Pada indikator persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Asahan mencatatkan capaian maksimal sebesar 100 persen secara konsisten sejak tahun 2020 hingga 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh perangkat Daerah telah mendapatkan akses konektivitas internet, yang menjadi prasyarat penting untuk mendukung digitalisasi pemerintahan.

Indikator persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi juga menunjukkan capaian 100 persen sepanjang lima tahun terakhir. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mendorong penyelenggaraan layanan publik berbasis teknologi informasi yang mudah diakses, lebih cepat, dan transparan bagi masyarakat.

Demikian pula, pada indikator persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik serta mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah Daerah, capaian tercatat sebesar 100 persen selama periode tahun 2020–2024. Ini menunjukkan efektivitas strategi komunikasi publik yang dilakukan, baik dalam penyebarluasan informasi kebijakan maupun dalam membangun keterlibatan masyarakat terhadap program-program prioritas pemerintah.

Secara keseluruhan, capaian indikator urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Asahan menunjukkan hasil yang sangat positif dan stabil. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memperluas pemanfaatan layanan digital secara lebih optimal, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta memperkuat sistem keamanan informasi untuk mendukung pemerintahan berbasis elektronik yang berkelanjutan.

2.1.4.4.B-k Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat struktur ekonomi Daerah, mendorong pertumbuhan wirausaha baru, serta menciptakan lapangan kerja. Kualitas koperasi dan peningkatan jumlah usaha mikro yang bertransformasi menjadi wirausaha produktif menjadi indikator keberhasilan pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan. Berikut disajikan capaian indikator kinerja urusan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Asahan selama periode tahun 2020–2024.

Tabel 2.50 Indikator Kinerja Kunci Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.p.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	persen	16,38	20,76	46,02	29,97	28,71
2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	persen	0,00	2,10	57,23	1,99	0,09

Sumber : LPPD 2020-2024, diolah

Pada indikator persentase koperasi yang berkualitas, capaian Kabupaten Asahan menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020, persentase koperasi berkualitas tercatat sebesar 16,38 persen, meningkat menjadi 20,76 persen pada tahun 2021, dan terus naik secara signifikan hingga mencapai 46,02 persen pada tahun 2022. Namun, capaian ini mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 29,97 persen, dan kembali sedikit menurun menjadi 28,71 persen pada tahun 2024. Fluktuasi ini mengindikasikan perlunya penguatan berkelanjutan dalam pembinaan dan pengawasan koperasi untuk menjaga kualitas kelembagaan koperasi di Daerah.

Sementara itu, pada indikator persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha produktif, capaian juga menunjukkan dinamika yang cukup besar. Pada tahun 2020, capaian masih 0 persen, meningkat menjadi 2,10 persen pada tahun 2021, dan melonjak tajam menjadi 57,23 persen pada tahun 2022. Namun, capaian ini kembali turun drastis menjadi 1,99 persen pada tahun 2023, dan menjadi hanya 0,09 persen pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembentukan wirausaha mikro belum berkelanjutan dan memerlukan strategi yang lebih efektif dalam pendampingan, akses pembiayaan, serta penguatan kapasitas usaha mikro.

Secara umum, capaian urusan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Asahan memperlihatkan adanya upaya pengembangan sektor ekonomi kerakyatan, meskipun konsistensi capaian memerlukan perhatian lebih. Diperlukan langkah strategis untuk menjaga kesinambungan peningkatan kualitas koperasi dan memperkuat ekosistem kewirausahaan mikro secara lebih berkelanjutan, adaptif, dan inklusif.

2.1.4.4.B-l Penanaman Modal

Investasi merupakan salah satu motor penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi Daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing wilayah. Indikator peningkatan investasi di tingkat kabupaten/kota menjadi cerminan keberhasilan pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan kepercayaan investor, serta memperkuat fondasi ekonomi lokal. Berikut disajikan capaian indikator kinerja bidang investasi Kabupaten Asahan selama periode tahun 2020–2024.

Tabel 2.51 Indikator Kinerja Kunci Urusan Penanaman Modal

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.q	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	persen	-11,22	14,42	14,42	13,20	3,80

Sumber : LPPD 2020-2024, diolah

Capaian indikator persentase peningkatan investasi di Kabupaten Asahan menunjukkan dinamika yang cukup signifikan selama periode tahun 2020–2024. Pada tahun 2020, persentase peningkatan investasi tercatat mengalami kontraksi sebesar -11,22 persen, yang mencerminkan adanya penurunan investasi, kemungkinan dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 dan ketidakpastian ekonomi global. Namun demikian, pada tahun 2021, investasi mulai menunjukkan perbaikan dengan

pertumbuhan positif sebesar 14,42 persen, yang berhasil dipertahankan hingga tahun 2022. Meskipun pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 13,20 persen, capaian ini masih menunjukkan pertumbuhan investasi yang positif di tengah berbagai tantangan ekonomi. Pada tahun 2024, pertumbuhan investasi tercatat sebesar 3,80 persen. Meskipun angka ini menunjukkan perlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetap menggambarkan adanya keberlanjutan aktivitas investasi di Kabupaten Asahan.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Asahan mampu memulihkan pertumbuhan investasi pasca-pandemi, meskipun ke depan diperlukan strategi yang lebih agresif dan inovatif untuk menarik investasi baru, memperluas sektor-sektor prioritas investasi, serta meningkatkan kemudahan berusaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan.

2.1.4.4.B-m Kepemudaan dan Olah Raga

Pemberdayaan pemuda dan peningkatan prestasi olahraga merupakan bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter. Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi, organisasi sosial, serta pengembangan prestasi olahraga mencerminkan peran aktif generasi muda dalam mendorong kemajuan sosial dan ekonomi daerah. Berikut disajikan capaian indikator kinerja urusan kepemudaan dan keolahragaan Kabupaten Asahan selama periode tahun 2020–2024.

Tabel 2.52 Indikator Kinerja Kunci Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	persen	0,09	0,11	38,11	0,48	0,49
2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persen	11,50	11,74	11,82	7,71	7,97
2.r.3	Peningkatan prestasi olahraga	persen	n.a	98,46	166	56	40

Sumber : LPPD 2020-2024, diolah

Pada indikator tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, capaian menunjukkan fluktuasi yang cukup besar. Partisipasi tercatat sebesar 0,09 persen pada tahun 2020, sedikit meningkat menjadi 0,11 persen pada tahun 2021, dan melonjak signifikan menjadi 38,11 persen pada tahun 2022. Namun demikian, terjadi penurunan kembali menjadi 0,48 persen pada tahun 2023 dan 0,49 persen pada tahun 2024. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan pemuda dalam sektor ekonomi mandiri belum berjalan konsisten dan memerlukan strategi yang lebih terarah untuk mendorong keberlanjutan keterlibatan pemuda dalam kegiatan produktif. Indikator tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan menunjukkan tren relatif stabil namun rendah. Capaian berada di angka 11,50 persen pada tahun 2020, sedikit meningkat menjadi 11,74 persen pada tahun 2021, dan 11,82 persen pada tahun 2022. Namun, partisipasi menurun menjadi 7,71 persen pada tahun 2023 dan 7,97 persen pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan perlunya revitalisasi peran organisasi kepemudaan untuk meningkatkan minat dan partisipasi aktif generasi muda dalam aktivitas sosial dan kemasyarakatan.

Sementara itu, pada indikator peningkatan prestasi olahraga, capaian menunjukkan dinamika yang cukup tinggi. Data tahun 2020 tidak tersedia (n.a), namun pada tahun 2021 capaian sebesar 98,46 persen, melonjak tajam menjadi 166 persen pada tahun 2022. Setelah itu, capaian menurun menjadi 56 persen pada tahun 2023 dan 40 persen pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun

sempat mengalami lonjakan prestasi, keberlanjutan pembinaan dan dukungan terhadap pengembangan atlet dan kegiatan olahraga perlu diperkuat agar prestasi daerah tetap terjaga dan meningkat.

Secara keseluruhan, capaian kinerja bidang kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Asahan menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi dan prestasi pemuda, meskipun masih diperlukan penguatan program dan kolaborasi lintas sektor untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan.

2.1.4.4.B-n Statistik

Penggunaan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Data statistik yang akurat dan terintegrasi menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Berikut disajikan capaian indikator kinerja penggunaan data statistik dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah Kabupaten Asahan selama periode tahun 2020–2024.

Tabel 2.53 Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.s.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan Daerah	persen	0	100	100	100	100
2.s.2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan Daerah	persen	0	100	100	100	100

Sumber : LPPD 2020-2024, diolah

Pada indikator persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan Daerah, capaian menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Pada tahun 2020, realisasi masih 0 persen, namun mulai tahun 2021 hingga 2024, seluruh perangkat Daerah (100 persen) telah menggunakan data statistik sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan. Hal ini mencerminkan transformasi penting dalam pola kerja birokrasi menuju perencanaan yang lebih berbasis data, akuntabel, dan terukur.

Demikian pula, pada indikator persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah, capaian mengalami perkembangan serupa. Realisasi sebesar 0 persen pada tahun 2020 meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2021, dan konsisten bertahan di angka tersebut hingga tahun 2024. Penggunaan data statistik dalam evaluasi pembangunan memastikan bahwa pengukuran capaian program dan kegiatan daerah dilakukan secara objektif dan berbasis indikator yang terukur.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Asahan telah berhasil membangun budaya kerja berbasis data (data-driven governance) dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan. Ke depan, penguatan kualitas data, integrasi sistem informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dan analisis data menjadi langkah strategis untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan.

2.1.4.4.B-o Persandian

Keamanan informasi pemerintah menjadi salah satu aspek krusial dalam era digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan informasi yang aman dan terlindungi tidak hanya menjaga integritas dan kerahasiaan data, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pemerintahan berbasis elektronik. Berikut disajikan capaian indikator kinerja tingkat keamanan informasi pemerintah di Kabupaten Asahan selama periode tahun 2020–2024.

Tabel 2.54 Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	persen	0	0	0	100	23,41

Sumber : LPPD 2020-2024, diolah

Pada indikator tingkat keamanan informasi pemerintah, capaian di Kabupaten Asahan menunjukkan dinamika perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan positif terjadi pada tahun 2023, di mana tingkat keamanan informasi pemerintah mencapai 100 persen. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut telah dilakukan inisiatif besar dalam membangun dan menerapkan sistem keamanan informasi di lingkungan pemerintahan daerah. Namun, pada tahun 2024, capaian menurun menjadi 23,41 persen.

Penurunan ini mengindikasikan bahwa meskipun telah terdapat upaya untuk meningkatkan keamanan informasi, konsistensi implementasi dan keberlanjutan pengelolaan keamanan informasi masih memerlukan penguatan, baik dari aspek kebijakan, teknologi, maupun sumber daya manusia.

Secara keseluruhan, capaian ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Asahan telah memulai langkah penting dalam membangun sistem keamanan informasi pemerintah, namun ke depan diperlukan strategi berkelanjutan untuk memastikan penerapan standar keamanan informasi yang konsisten, adaptif terhadap risiko digital, serta mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang handal dan terpercaya.

2.1.4.4.B-p Kebudayaan

Pelestarian cagar budaya merupakan bagian penting dalam menjaga identitas daerah, memperkaya warisan budaya nasional, serta mendukung pengembangan sektor pariwisata dan pendidikan. Upaya pelestarian cagar budaya menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan nilai sejarah, seni, dan budaya untuk generasi mendatang. Berikut disajikan capaian indikator kinerja pelestarian cagar budaya di Kabupaten Asahan selama periode tahun 2020–2024.

Tabel 2.55 Indikator Kinerja Kunci Urusan Kebudayaan

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	persen	70,83	85	100	80	100

Sumber : LPPD 2020-2024, diolah

Pada indikator terlestarinya cagar budaya, capaian Kabupaten Asahan menunjukkan tren yang cukup positif dengan beberapa fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, capaian pelestarian cagar budaya tercatat sebesar 70,83 persen, yang kemudian meningkat menjadi 85 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2022, capaian berhasil mencapai 100 persen, menunjukkan bahwa seluruh target pelestarian cagar budaya telah tercapai pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2023, capaian mengalami penurunan menjadi 80 persen, yang mengindikasikan adanya tantangan atau kendala dalam menjaga kesinambungan upaya pelestarian. Meskipun demikian, pada tahun 2024, capaian kembali mencapai 100 persen, menunjukkan keberhasilan pemerintah Daerah dalam memperbaiki dan menuntaskan program pelestarian yang sempat tertunda.

Secara umum, capaian ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Asahan telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga dan melestarikan cagar budaya yang ada. Ke depan, penting untuk memastikan bahwa pelestarian tidak hanya sekadar

memenuhi target administratif, tetapi juga diiringi dengan peningkatan pemanfaatan cagar budaya untuk pendidikan, pariwisata, dan penguatan identitas budaya Daerah secara berkelanjutan.

2.1.4.4.B-q Perpustakaan

Peningkatan kegemaran membaca dan pembangunan literasi masyarakat merupakan kunci dalam membentuk sumber daya manusia yang berpengetahuan, kritis, dan produktif. Penguatan budaya literasi menjadi landasan penting untuk mendukung kemajuan pendidikan, inovasi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan Daerah. Berikut disajikan capaian indikator kinerja terkait kegemaran membaca dan pembangunan literasi masyarakat di Kabupaten Asahan selama periode tahun 2020–2024.

Tabel 2.56 Indikator Kinerja Kunci Urusan Perpustakaan

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	nilai	0	0	0	53,02	52,32
2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	nilai	0	44,22	44,22	25,73	46,77

Sumber : LPPD 2020-2024, diolah

Pada indikator nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat, capaian Kabupaten Asahan belum menunjukkan perkembangan pada awal periode, yakni sebesar 0 pada tahun 2020 hingga 2022. Perubahan positif terjadi pada tahun 2023, dengan tercapainya nilai 53,02, yang kemudian sedikit menurun menjadi 52,32 pada tahun 2024. Meskipun capaian ini masih perlu ditingkatkan, hal ini menunjukkan adanya upaya awal yang signifikan dalam membangun minat baca di masyarakat setelah sebelumnya tidak terdata.

Pada indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, perkembangan yang terjadi juga menunjukkan dinamika. Pada tahun 2020, capaian masih 0, kemudian meningkat menjadi 44,22 pada tahun 2021 dan bertahan di angka tersebut hingga tahun 2022. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 25,73, sebelum kembali meningkat menjadi 46,77 pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan perlunya penguatan yang lebih konsisten dalam program-program literasi masyarakat, termasuk pengembangan fasilitas perpustakaan, penyelenggaraan kegiatan literasi, serta peningkatan akses informasi yang inklusif.

Secara umum, capaian bidang literasi di Kabupaten Asahan menunjukkan kemajuan awal yang positif, meskipun masih diperlukan upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk membangun budaya baca dan meningkatkan kualitas literasi masyarakat di seluruh lapisan.

2.1.4.4.B-r Kearsipan

Pengelolaan arsip yang baik merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung akuntabilitas pemerintahan, perlindungan hak-hak hukum, serta penyediaan informasi yang akurat untuk pelayanan publik. Ketersediaan dan keutuhan arsip berfungsi sebagai alat bukti yang sah, bahan pertanggungjawaban nasional, serta sumber informasi untuk mendukung berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut disajikan capaian indikator kinerja pengelolaan kearsipan di Kabupaten Asahan selama periode tahun 2020–2024.

Tabel 2.57 Indikator Kinerja Kunci Urusan Kearsipan

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	persen	51,9	51,9	51,8	52,1	73,6
2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	persen	0	43,7	43,7	64	33,3

Sumber : LPPD 2020-2024, diolah

Pada indikator tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah, capaian menunjukkan tren yang relatif stabil dengan peningkatan signifikan di akhir periode. Pada tahun 2020 dan 2021, capaian tercatat sebesar 51,9 persen, sedikit menurun menjadi 51,8 persen pada tahun 2022, dan kembali naik menjadi 52,1 persen pada tahun 2023. Kenaikan yang lebih substansial terjadi pada tahun 2024, dengan capaian sebesar 73,6 persen. Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan dalam penyediaan dan pengelolaan arsip sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Sementara itu, indikator tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional memperlihatkan perkembangan yang lebih fluktuatif. Pada tahun 2020, capaian masih 0 persen, namun meningkat menjadi 43,7 persen pada tahun 2021 dan bertahan di angka yang sama pada tahun 2022. Pada tahun 2023, capaian mengalami peningkatan menjadi 64 persen, namun kembali menurun menjadi 33,3 persen pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan dalam pengelolaan keutuhan arsip, keberlanjutan upaya penyelamatan, perawatan, dan pelestarian arsip masih perlu mendapatkan perhatian serius.

Secara keseluruhan, capaian bidang kearsipan di Kabupaten Asahan menunjukkan kemajuan positif, terutama dalam aspek ketersediaan arsip. Ke depan, diperlukan strategi penguatan yang lebih komprehensif dalam menjaga keberadaan dan keutuhan arsip, termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi arsip, serta penyadaran akan pentingnya arsip sebagai aset strategis bagi pemerintahan dan pelayanan publik.

2.1.4.4.C Urusan Pelayanan Pilihan

2.1.4.4.C-a Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan, baik tangkap maupun budidaya, memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jumlah produksi perikanan menjadi indikator utama untuk mengukur kinerja sektor ini dalam kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Berikut disajikan capaian indikator kinerja produksi perikanan di Kabupaten Asahan selama periode tahun 2020–2024 berdasarkan sumber data One Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Tabel 2.58 Indikator Kinerja Kunci Urusan Kelautan dan Perikanan

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	persen	98,8749	113,1628	113,1628	107,402	107,876

Sumber : LPPD 2020-2024, diolah

Pada indikator jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya), capaian Kabupaten Asahan menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup positif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, produksi perikanan tercatat sebesar 98,87 persen, yang kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi 113,16 persen pada tahun 2021 dan stabil di angka yang sama pada tahun 2022. Stabilitas produksi ini mencerminkan keberhasilan dalam mempertahankan volume produksi baik dari subsektor perikanan tangkap maupun budidaya. Pada tahun 2023, produksi sedikit menurun menjadi 107,40 persen, namun kembali mengalami sedikit kenaikan menjadi 107,88 persen pada tahun 2024. Meskipun terjadi sedikit fluktuasi, secara umum capaian ini tetap menunjukkan kinerja produksi perikanan yang kuat dan konsisten, dengan tingkat produksi yang melampaui 100 persen dari target yang ditetapkan. Capaian ini mengindikasikan bahwa sektor perikanan di Kabupaten Asahan telah memberikan kontribusi nyata terhadap ekonomi Daerah, serta menunjukkan ketahanan sektor ini terhadap berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim, dinamika pasar, dan kondisi lingkungan perairan. Ke depan, penguatan inovasi teknologi budidaya, pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan, serta pengembangan pasar hasil perikanan menjadi kunci untuk menjaga dan meningkatkan kinerja sektor perikanan secara berkelanjutan.

2.1.4.4.C-b Pariwisata

Sektor pariwisata memiliki kontribusi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat identitas dan daya tarik wilayah. Pengembangan pariwisata yang terencana dan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, meningkatkan tingkat hunian akomodasi, serta memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berikut disajikan capaian indikator kinerja sektor pariwisata di Kabupaten Asahan selama periode tahun 2020–2024.

Tabel 2.59 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pariwisata

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	persen	-84,92	26,23	0	261,29	-79,46
3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	persen	-42,9	26,23	26,23	4,35	2,07
3.b.3	Tingkat hunian akomodasi	persen	21,89	32,46	32,46	31,28	9,23
3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	persen	0,78	0,72	0,70	0,71	0,69

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	persen	0,00	60,48	0,04	59,10	0,13

Sumber : LPPD 2020-2024, diolah

Pada indikator persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan, capaian mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 2020 terjadi kontraksi sebesar -84,92 persen, kemungkinan besar akibat dampak pandemi Covid-19 yang menekan pergerakan wisatawan internasional. Pertumbuhan membaik menjadi 26,23 persen pada tahun 2021, stabil di 0 persen pada tahun 2022, dan melonjak signifikan hingga 261,29 persen pada tahun 2023, mencerminkan pemulihan sektor pariwisata. Namun, pada tahun 2024 kembali terjadi penurunan tajam sebesar -79,46 persen, yang mengindikasikan ketidakstabilan kunjungan wisatawan mancanegara dan perlunya strategi promosi internasional yang lebih agresif.

Indikator persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara ke Kabupaten Asahan juga menunjukkan dinamika yang serupa. Pada tahun 2020 terjadi kontraksi sebesar -42,9 persen, kemudian meningkat sebesar 26,23 persen pada tahun 2021 dan bertahan di angka tersebut pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 pertumbuhan melambat menjadi 4,35 persen dan lebih rendah lagi menjadi 2,07 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan kunjungan wisatawan domestik terjadi, tetapi cenderung melambat dalam dua tahun terakhir.

Pada indikator tingkat hunian akomodasi, capaian meningkat dari 21,89 persen pada tahun 2020 menjadi 32,46 persen pada tahun 2021 dan 2022. Namun, terjadi sedikit penurunan menjadi 31,28 persen pada 2023, dan penurunan signifikan ke 9,23 persen pada 2024. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan tingkat okupansi akomodasi di tengah dinamika kunjungan wisatawan. Indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku relatif stabil namun cenderung sedikit menurun, dari 0,78 persen pada tahun 2020 menjadi 0,72 persen pada tahun 2021, lalu 0,70 persen pada tahun 2022, dan bertahan di kisaran 0,71 persen pada tahun 2023 dan 0,69 persen pada tahun 2024.

Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pariwisata terhadap struktur ekonomi Daerah masih perlu diperkuat. Pada indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD, terjadi fluktuasi tajam. Pada tahun 2020 kontribusi tercatat 0 persen, melonjak menjadi 60,48 persen pada tahun 2021, turun drastis menjadi 0,04 persen pada tahun 2022, naik kembali menjadi 59,10 persen pada tahun 2023, dan turun lagi menjadi 0,13 persen pada tahun 2024. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa penerimaan PAD dari sektor pariwisata belum stabil, dan sangat dipengaruhi oleh faktor musiman dan program-program unggulan yang belum berjalan konsisten.

Secara keseluruhan, capaian sektor pariwisata Kabupaten Asahan menunjukkan upaya pemulihan pasca-pandemi, namun masih menghadapi tantangan stabilitas, keberlanjutan kontribusi ekonomi, serta perlunya penguatan promosi, diversifikasi produk wisata, dan peningkatan kualitas layanan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

2.1.4.4.C-c Pertanian dan Kesehatan Hewan

Sektor pertanian dan kesehatan hewan memiliki peranan vital dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak, serta menjaga stabilitas sosial ekonomi daerah. Produktivitas pertanian dan pengendalian penyakit hewan menular menjadi indikator kunci dalam mengukur kinerja pembangunan sektor ini. Berikut disajikan capaian indikator kinerja sektor pertanian dan kesehatan hewan di Kabupaten Asahan selama periode tahun 2020–2024.

Tabel 2.60 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Kw/Ha	558,199976	269,779756	450,4	544,7386	660,6072843
3.c.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota	persen	0	0	2100	-100	-99,7245179

Sumber : LPPD 2020-2024, diolah

Pada indikator produktivitas pertanian per hektar per tahun, capaian Kabupaten Asahan menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, produktivitas tercatat sebesar 558,20 kwintal per hektar, namun menurun drastis menjadi 269,78 kwintal per hektar pada tahun 2021. Pada tahun 2022, produktivitas kembali meningkat menjadi 450,40 kwintal per hektar, dan berlanjut naik menjadi 544,74 kwintal per hektar pada tahun 2023. Peningkatan berlanjut hingga tahun 2024 dengan capaian 660,61 kwintal per hektar, yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Perkembangan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam praktik budidaya, penggunaan teknologi pertanian, serta dukungan sarana dan prasarana produksi yang lebih baik di Kabupaten Asahan. Sementara itu, pada indikator persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (zoonosis), capaian mengalami fluktuasi yang sangat ekstrem.Pada tahun 2020 dan 2021, persentase tercatat 0 persen, menunjukkan belum adanya perubahan yang signifikan dalam upaya pengendalian kasus zoonosis. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan angka hingga 2100 persen, yang kemungkinan besar menunjukkan adanya pelaporan atau identifikasi kasus yang sangat meningkat. Setelah itu, capaian membaik secara drastis dengan penurunan menjadi -100 persen pada tahun 2023 dan -99,72 persen pada tahun 2024, yang mengindikasikan keberhasilan dalam upaya pengendalian dan penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular di Kabupaten Asahan.

Secara keseluruhan, capaian sektor pertanian dan kesehatan hewan di Kabupaten Asahan menunjukkan tren perbaikan positif, baik dari sisi produktivitas pertanian maupun pengendalian penyakit hewan. Ke depan, diperlukan penguatan berkelanjutan dalam inovasi pertanian, biosekuriti peternakan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian yang telah diraih.

2.1.4.4.C-d Perdagangan

Pengelolaan sektor perdagangan dan perlindungan konsumen merupakan bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta menjaga kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi. Indikator terkait perizinan usaha, distribusi pupuk, dan validitas alat ukur mencerminkan kualitas pelayanan pemerintah kepada pelaku usaha dan masyarakat konsumen. Berikut disajikan capaian indikator kinerja urusan perdagangan dan perlindungan konsumen di Kabupaten Asahan selama periode tahun 2020–2024.

Tabel 2.61 Indikator Kinerja Kunci Urusan Perdagangan

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	persen	100	100	100	90,07	88,62
3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	persen	29,42	22,76	85,00	80,18	56,56
3.f.3	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	persen	24,07	64,74	64,74	37,09	18,12

Sumber : LPPD 2020-2024, diolah

Pada indikator persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan), capaian menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi. Pada tahun 2020 hingga 2022, capaian berada pada angka 100 persen, menunjukkan seluruh pelaku usaha telah mengantongi izin usaha sesuai ketentuan. Namun, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 90,07 persen dan berlanjut turun menjadi 88,62 persen pada tahun 2024. Penurunan ini perlu menjadi perhatian, mengingat kepatuhan perizinan menjadi salah satu fondasi dalam mewujudkan iklim usaha yang tertib dan berdaya saing. Pada indikator persentase kinerja realisasi pupuk, capaian menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, capaian sebesar 29,42 persen, menurun menjadi 22,76 persen pada tahun 2021. Kemudian capaian meningkat tajam menjadi 85,00 persen pada tahun 2022, sedikit menurun menjadi 80,18 persen pada tahun 2023, dan kembali menurun ke 56,56 persen pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun sempat terjadi peningkatan dalam pendistribusian pupuk, konsistensi kinerja perlu ditingkatkan untuk mendukung produktivitas sektor pertanian secara optimal.

Sementara itu, pada indikator persentase alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah, capaian menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2020, capaian sebesar 24,07 persen, meningkat signifikan menjadi 64,74 persen pada tahun 2021 dan 2022. Namun, terjadi penurunan menjadi 37,09 persen pada 2023 dan turun lebih lanjut menjadi 18,12 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa upaya pengawasan dan penjaminan keakuratan alat ukur perlu diperkuat untuk melindungi konsumen dan menjaga keadilan dalam transaksi perdagangan

Secara keseluruhan, capaian urusan perdagangan dan perlindungan konsumen di Kabupaten Asahan menunjukkan adanya pencapaian awal yang baik, namun masih memerlukan penguatan konsistensi, pengawasan, serta pembinaan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan membangun ekosistem perdagangan yang lebih adil dan terpercaya.

2.1.4.4.C-e Perindustrian

Pembangunan sektor industri kecil dan menengah (IKM) merupakan motor penggerak ekonomi Daerah yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah, serta kemandirian ekonomi lokal. Pengembangan industri juga ditopang oleh sistem perizinan yang baik, pengawasan berkala, serta ketersediaan informasi industri yang akurat. Berikut disajikan capaian indikator kinerja sektor industri di Kabupaten Asahan selama periode tahun 2020–2024.

Tabel 2.62 Indikator Kinerja Kunci Urusan Perindustrian

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	persen	0	0	0	-89,9305556	4,59770115
3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	persen	0	0	1	0	1
3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persen	0	263,64	9,40	100	100
3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persen	0	0	0	100	100
3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	persen	0	0	0	100	100
3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	persen	0	0	0	0	18,91

Sumber : LPPD 2020-2024, diolah

Pada indikator pertambahan jumlah industri kecil dan menengah (IKM), capaian Kabupaten Asahan mengalami fluktuasi, dengan 0 persen pada tahun 2020–2022, penurunan -89,93 persen pada tahun 2023, dan pertumbuhan 4,60 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan pengembangan sektor IKM.

Pencapaian sasaran pembangunan industri dalam RPIP bergerak terbatas, hanya mencapai 1 persen pada tahun 2022 dan 2024, menandakan perlunya akselerasi implementasi program industri.

Pada pemantauan dan pengawasan Izin Usaha Industri (IUI), capaian meningkat tajam dari 0 persen pada tahun 2020 menjadi 263,64 persen pada tahun 2021, turun di tahun 2022, dan kembali stabil di 100 persen pada tahun 2023–2024, mencerminkan perbaikan pengawasan.

Pemantauan Izin Perluasan Industri (IPUI) dan Izin Kawasan Industri (IUKI/IPKI) mulai tercapai 100 persen pada tahun 2023 dan 2024 setelah sebelumnya belum ada realisasi.

Indikator tersedianya informasi industri menunjukkan tren positif, dari 0 persen di tahun 2020 menjadi 100 persen mulai tahun 2022, mendukung transparansi dan perencanaan industri yang lebih baik.

Secara keseluruhan, sektor industri Kabupaten Asahan mengalami kemajuan signifikan dalam pengawasan dan informasi, meskipun penguatan pertumbuhan IKM dan akselerasi pembangunan industri masih diperlukan.

2.1.4.4.D Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.4.4.D-a Perencanaan dan Keuangan

Penguatan tata kelola keuangan daerah merupakan bagian fundamental dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil. Indikator rasio belanja, rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan sistem pengendalian intern, serta kualitas laporan keuangan menjadi ukuran penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah. Berikut disajikan capaian indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Asahan selama periode tahun 2020–2024.

Tabel 2.63 Indikator Kinerja Kunci Urusan Perencanaan dan Keuangan

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
4.a.1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	persen	0,25	6,23	21,02	5,56	13,55
4.a.2	Rasio PAD	persen	0,41	9,54	9,54	9,80	9,04
4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	nilai	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3 Skor 3,000
4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	nilai	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3 Skor 3,000
4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	persen	120,89	19,33	19,33	75,85	66,19
4.a.6	Opini Laporan Keuangan	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : LPPD 2020-2024, diolah

Pada indikator rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan, capaian menunjukkan tren fluktuatif. Capaian sebesar 0,25 persen pada tahun 2020 meningkat menjadi 6,23 persen pada tahun 2021 dan 21,02 persen pada tahun 2022, lalu menurun kembali menjadi 5,56 persen pada tahun 2023 dan meningkat lagi menjadi 13,55 persen pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan dinamika dalam pengelolaan belanja pegawai non-tenaga pendidikan dan kesehatan, yang perlu dikendalikan untuk menjaga proporsionalitas belanja daerah.

Indikator rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil. Pada tahun 2020, rasio PAD tercatat sebesar 0,41 persen, meningkat menjadi 9,54 persen pada tahun 2021 dan 2022, serta sedikit naik menjadi 9,80 persen pada tahun 2023 sebelum turun menjadi 9,04 persen pada tahun 2024. Perkembangan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Pada indikator Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), capaian menunjukkan konsistensi pada level 3 dari tahun 2020 hingga 2024. Ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian intern dan kapasitas pengawasan telah

berada pada tingkat "terdefinisi", meskipun masih perlu terus ditingkatkan menuju level lebih tinggi untuk memperkuat pengendalian risiko dan efektivitas pengawasan.

Indikator rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures) menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. Capaian sebesar 120,89 persen pada tahun 2020 turun drastis menjadi 19,33 persen pada tahun 2021 dan 2022, kemudian naik menjadi 75,85 persen pada 2023, dan sedikit turun menjadi 66,19 persen pada 2024. Perubahan ini menunjukkan dinamika dalam alokasi anggaran untuk urusan pemerintahan umum, yang perlu dioptimalkan agar lebih proporsional dengan kebutuhan pelayanan publik.

Sementara itu, pada indikator opini laporan keuangan, kualitas opini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah telah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Pencapaian opini WTP secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024 mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik. Hal ini juga menjadi indikator penting bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan telah memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4.4.D-b Pengadaan

Pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif, transparan, dan kompetitif merupakan elemen penting dalam mendukung efisiensi belanja daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Penggunaan metode kompetitif, pengutamaan produk dalam negeri, serta percepatan pelaksanaan proyek menjadi indikator utama dalam mengukur kinerja sektor pengadaan daerah. Berikut disajikan capaian indikator kinerja pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Asahan selama periode tahun 2020–2024.

Tabel 2.64 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pengadaan

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	persen	0	0	0	0	0
4.b.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	persen	28,12	18,86	15,87	5,76	0,17
4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	persen	105,60	84,06	102,25	35,70	40,67
4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	persen	n.a	761,04	761,04	335,63	115,57

Sumber : LPPD 2020-2024, diolah

Pada indikator persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama, capaian Kabupaten Asahan dari tahun 2020 hingga 2024 tercatat sebesar 0 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa belum ada percepatan signifikan dalam penandatanganan kontrak proyek konstruksi pada awal tahun, yang dapat berdampak pada efektivitas serapan anggaran dan kelancaran pelaksanaan program.

Indikator persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif menunjukkan tren penurunan cukup tajam. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 28,12 persen, turun menjadi 18,86 persen pada tahun 2021, 15,87 persen

pada tahun 2022, 5,76 persen pada tahun 2023, dan hanya 0,17 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan menurunnya porsi pengadaan yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif, yang dapat berdampak pada efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran daerah.

Pada indikator rasio nilai belanja yang dilakukan melalui mekanisme pengadaan, capaian menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Rasio sebesar 105,60 persen pada tahun 2020 menurun menjadi 84,06 persen pada tahun 2021, kembali meningkat menjadi 102,25 persen pada tahun 2022, namun turun signifikan menjadi 35,70 persen pada tahun 2023 dan naik sedikit ke 40,67 persen pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa realisasi belanja melalui pengadaan perlu dioptimalkan agar lebih konsisten untuk mendukung kinerja pembangunan daerah.

Indikator peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta produk UMKM dan koperasi dalam pengadaan pemerintah daerah menunjukkan capaian yang sangat tinggi pada awal periode. Meskipun data tahun 2020 tidak tersedia (n.a), capaian melonjak hingga 761,04 persen pada tahun 2021 dan bertahan pada tahun 2022. Namun, terjadi penurunan menjadi 335,63 persen pada tahun 2023 dan 115,57 persen pada tahun 2024.

Walaupun masih di atas standar minimal, tren penurunan ini menunjukkan pentingnya penguatan kembali komitmen penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKM dalam belanja daerah. Secara keseluruhan, capaian pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Asahan menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga prinsip kompetisi, percepatan proyek, dan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri. Diperlukan penguatan strategi pengadaan yang lebih adaptif, transparan, dan berbasis pada pemberdayaan ekonomi lokal untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas belanja daerah.

2.1.4.4.D-c Kepegawaian

Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) merupakan faktor strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik. Indikator terkait rasio pegawai berpendidikan tinggi, proporsi jabatan fungsional, serta kepemilikan sertifikasi kompetensi mencerminkan tingkat profesionalitas dan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah. Berikut disajikan capaian indikator kinerja penguatan kapasitas ASN di Kabupaten Asahan selama periode tahun 2020–2024.

Tabel 2.65 Indikator Kinerja Kunci Urusan Kepegawaian

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	235,74	335,40	77,03	73,99	75,90
4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	7,32	19,76	19,76	24,54	19,88
4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	39,04	34,57	34,57	25,27	39,53

Sumber : LPPD 2020-2024, diolah

Pada indikator rasio pegawai berpendidikan tinggi terhadap menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), capaian menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 235,74 persen, meningkat menjadi 335,40 persen pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan menjadi 77,03 persen, berlanjut turun menjadi 73,99 persen pada 2023, dan sedikit meningkat menjadi 75,90 persen pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa

meskipun sebelumnya capaian pendidikan pegawai tinggi, ke depan perlu upaya konsisten untuk menjaga proporsi pegawai berpendidikan tinggi dalam mendukung kinerja birokrasi Daerah.

Indikator rasio pegawai fungsional menunjukkan tren meningkat dari 7,32 persen pada tahun 2020 menjadi 19,76 persen pada tahun 2021 dan bertahan pada 2022.Capaian ini kemudian meningkat lagi menjadi 24,54 persen pada tahun 2023 sebelum sedikit menurun menjadi 19,88 persen pada tahun 2024. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa orientasi terhadap penguatan jabatan fungsional sudah mulai berjalan, namun masih perlu dipertahankan dan diperluas untuk meningkatkan spesialisasi teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, pada indikator rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi, capaian mengalami variasi. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 39,04 persen, sedikit menurun menjadi 34,57 persen pada tahun 2021 dan bertahan di tahun 2022. Selanjutnya menurun lebih jauh menjadi 25,27 persen pada tahun 2023 sebelum kembali meningkat menjadi 39,53 persen pada tahun 2024. Perkembangan ini menandakan pentingnya peningkatan program sertifikasi kompetensi untuk memastikan bahwa pegawai fungsional memiliki kualifikasi profesional yang memadai.

Secara keseluruhan, capaian kinerja penguatan kapasitas ASN di Kabupaten Asahan memperlihatkan adanya kemajuan dalam penguatan jabatan fungsional dan sertifikasi kompetensi, namun tetap diperlukan langkah berkelanjutan dalam meningkatkan proporsi pegawai berpendidikan tinggi serta memperkuat manajemen ASN berbasis kompetensi.

2.1.4.4.D-d Manajemen Keuangan

Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efektif tercermin dari efisiensi pelaksanaan anggaran, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, pengelolaan aset yang profesional, serta pengendalian saldo anggaran. Indikator budget execution, revenue mobilization, manajemen aset, dan rasio sisa anggaran menjadi alat ukur penting dalam menilai tingkat akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Berikut disajikan capaian indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Asahan selama periode tahun 2020–2024.

Tabel 2.66 Indikator Kinerja Kunci Urusan Manajemen Keuangan

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
4.d.1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	persen	-0,1	4,97	4,97	4,09	1,82
4.d.2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	persen	5,07	3,22	3,22	1,44	8,79
4.d.3	Manajemen Aset	Kategori	3	4	4	4	4
4.d.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	persen	1,13	3,19	3,19	4,74	4,78

Sumber : LPPD 2020-2024, diolah

Pada indikator budget execution (deviasi realisasi belanja terhadap total belanja dalam APBD), capaian menunjukkan deviasi yang relatif kecil dan stabil. Pada tahun 2020, deviasi tercatat sebesar -0,1 persen, meningkat menjadi 4,97 persen pada tahun 2021 dan bertahan di tahun 2022, sebelum menurun menjadi 4,09 persen pada tahun 2023 dan 1,82 persen pada tahun 2024. Deviasi yang kecil menunjukkan bahwa realisasi belanja cukup mendekati rencana anggaran, menandakan perbaikan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Indikator revenue mobilization (deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD) menunjukkan tren deviasi yang juga semakin kecil. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 5,07 persen, menurun menjadi 3,22 persen pada tahun 2021 dan 2022, kemudian

turun lagi menjadi 1,44 persen pada tahun 2023, namun meningkat menjadi 8,79 persen pada tahun 2024. Penurunan deviasi hingga tahun 2023 mengindikasikan kinerja pemungutan PAD yang semakin mendekati target, meskipun kenaikan pada tahun 2024 menunjukkan perlunya penguatan pengelolaan potensi PAD.

Pada indikator manajemen aset, Kabupaten Asahan mengalami perbaikan kategori dari level 3 pada tahun 2020 menjadi level 4 mulai tahun 2021 hingga tahun 2024. Konsistensi pada kategori 4 mencerminkan peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah yang lebih tertib administrasi, akuntabel, dan mendukung optimalisasi penggunaan aset.

Sementara itu, pada indikator rasio anggaran sisa terhadap total belanja tahun sebelumnya, capaian menunjukkan peningkatan. Rasio sebesar 1,13 persen pada tahun 2020 naik menjadi 3,19 persen pada tahun 2021 dan bertahan pada tahun 2022, kemudian naik lagi menjadi 4,74 persen pada tahun 2023 dan 4,78 persen pada tahun 2024. Peningkatan rasio sisa anggaran menunjukkan perlunya perhatian terhadap optimalisasi serapan anggaran agar belanja lebih efektif dan mendukung percepatan pembangunan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Asahan menunjukkan perbaikan dalam efektivitas belanja, pengelolaan aset, dan pemungutan PAD, meskipun perlu diantisipasi adanya peningkatan sisa anggaran serta fluktuasi deviasi pendapatan di tahun terakhir.

2.1.4.4.D-e Transparansi dan Partisipasi Publik

Transparansi informasi publik, khususnya terkait sumber daya pelayanan dan keuangan daerah, merupakan pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan partisipatif. Ketersediaan informasi yang memadai kepada masyarakat dan unit pelayanan garis depan menjadi ukuran dalam menilai keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah Daerah. Berikut disajikan capaian indikator kinerja transparansi informasi publik di Kabupaten Asahan selama periode tahun 2020–2024.

Tabel 2.67 Indikator Kinerja Kunci Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	persen	100	99,999	99,998	99,15	92,36
4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan Daerah (Public access to fiscal information)	persen	100	100	100	100	100

Sumber : LPPD 2020-2024, diolah

Pada indikator informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units), capaian Kabupaten Asahan menunjukkan tren yang cukup tinggi meskipun terdapat sedikit penurunan. Pada tahun 2020, capaian tercatat sempurna di angka 100 persen, lalu sedikit menurun menjadi 99,999 persen pada tahun 2021, dan 99,998 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023, capaian turun lebih jauh menjadi 99,15 persen dan menurun lagi menjadi 92,36 persen pada tahun 2024. Meskipun tetap tergolong tinggi, tren penurunan ini menunjukkan pentingnya penguatan kembali sistem penyampaian informasi kepada unit pelayanan agar ketepatan, kelengkapan, dan keterbukaan data tetap terjaga optimal.

Sementara itu, indikator akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) menunjukkan capaian yang sangat konsisten dan

maksimal. Selama periode tahun 2020-2024, akses publik terhadap informasi keuangan daerah tercatat stabil di angka 100 persen setiap tahunnya. Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Asahan telah berhasil mempertahankan keterbukaan informasi fiskal, yang menjadi salah satu komponen utama dalam mendukung partisipasi masyarakat dan pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Asahan telah menunjukkan komitmen kuat dalam transparansi informasi publik, khususnya di bidang keuangan daerah, meskipun perlu perhatian terhadap menjaga konsistensi penyampaian informasi terkait sumber daya layanan agar kualitas pelayanan publik tetap optimal.

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Kondisi keuangan daerah menjadi satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Jika pemerintahan daerah diibaratkan sebagai satu organ tubuh maka fungsi keuangan daerah dalam hal ini dapat diibaratkan sebagai jantung yang senantiasa memompakan darah segar bagi fungsi/sektor pemerintahan dan pembangunan daerah lainnya guna aktualisasi produktivitas daerah secara keseluruhan.

Berbagai literatur dan *best practice* mengemukakan bahwa manajemen pembelanjaan pemerintah daerah adalah *instrumen kunci dari* kebijakan pemerintah daerah, karena itu disarankan kepada otoritas penganggaran untuk mencermati adanya hubungan integral dan keseimbangan antara "*revenue* dan *expenditure*". Hal ini penting untuk menjaga terciptanya keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) daerah serta perspektif pembangunan yang berorientasi jangka menengah dan panjang.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Selanjutnya, beberapa prinsip yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran daerah yaitu:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak dapat dicukupi dalam APBD/Perubahan APBD.

3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening kas umum daerah.

2.2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Asahan meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68 Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024 (Rp Juta)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	r (%)
Pendapatan	**1.627.537,56**	**1.644.723,64**	**1.675.529,39**	**1.787.840,79**	**1.830.268,18**	**3,00%**
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	159.308,33	134.864,41	157.521,13	169.326,02	165.416,89	1,66%
Pendapatan Transfer	1.361.012,30	1.406.038,43	1.496.386,43	1.595.037,29	1.603.928,84	4,22%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	107.216,93	103.820,80	21.621,83	23.477,48	60.922,46	29,63%
Belanja	**1.328.127,66**	**1.319.092,56**	**1.429.652,56**	**1.471.124,05**	**1.552.268,42**	**4,03%**
Belanja Operasi	1.131.523,14	1.126.624,59	1.131.414,15	1.200.173,96	1.320.396,36	4,02%
Belanja Modal	146.983,02	192.281,53	298.238,41	270.950,09	231.453,46	15,55%
Belanja Tak Terduga	49.621,50	186,44	-	-	418,60	
Transfer	**275.053,06**	**273.676,79**	**281.402,97**	**297.468,10**	**298.334,14**	**2,08%**
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	6.117,13	8.677,11	10.032,04	11.279,54	11.084,15	
Transfer Bantuan Keuangan	268.935,93	264.999,68	271.370,94	286.188,56	287.249,99	1,69%
Surplus / (Defisit)	**24.356,83**	**51.954,29**	**-35.526,15**	**19.248,64**	**-20.334,38**	**-103,77%**
					-	
Pembiayaan					-	
Penerimaan Pembiayaan	20.069,33	41.935,71	91.422,24	61.949,40	81.200,65	56,45%
Pengeluaran Pembiayaan	2.500,00	2.500,00	-	-	-	
Pembiayaan Netto	**17.569,33**	**39.435,71**	**91.422,24**	**61.949,40**	**81.200,65**	**63,78%**
					-	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	**41.926,16**	**91.390,00**	**55.896,09**	**81.198,04**	**60.866,27**	**24,82%**

Sumber: LRA 2020-2023 dan LKPJ Kabupaten Asahan 2024 (diolah)

Tabel di atas menunjukkan perkembangan realisasi APBD Kabupaten Asahan tahun 2020-2024, selama periode tersebut realisasi total pendapatan daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,00 persen per tahun. Selama periode tersebut total realisasi pendapatan mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, realisasi total pendapatan Kabupaten Asahan sebesar Rp 1,63 triliun meningkat signifikan menjadi Rp 1,83 triliun pada tahun 2024.

Realisasi belanja yang meliputi belanja operasi, modal, dan tak terduga secara rata-rata mengalami peningkatan yakni mencapai rata-rata sebesar 4,03 persen per tahun meski terjadi penurunan pada tahun 2021. Total realisasi belanja meningkat dari sebesar Rp 1,33 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 1,55 triliun pada tahun 2024. Penurunan yang terjadi dipengaruhi penurunan pada selama masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 hingga 12,77 persen daripada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022-2024 seiring dengan membaiknya perekonomian pasca pemulihan, realisasi belanja dan pendapatan semakin membaik. Adapun belanja dalam bentuk transfer mengalami peningkatan signifikan dengan rata-rata peningkatan per tahun mencapai 2,08 persen. Pada tahun 2020 capaian belanja transfer mencapai Rp 275,05 miliar meningkat hingga mencapai Rp 298,33 miliar pada tahun 2024. Selanjutnya, dari segi realisasi pembiayaan, indikator pembiayaan *netto* secara rata-rata mengalami peningkatan yaitu sebesar 63,78 persen per tahun.

Jika dilihat dari pola perimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, terjadi defisit APBD Kabupaten Asahan pada tahun 2022 dan 2024 kemudian mengalami surplus anggaran pada tahun 2020, 2021, dan 2023. Pada tahun 2022 dan 2024 terjadi defisit anggaran yang masing-masing sebesar Rp 35,53 miliar dan Rp 20,33 miliar. Pada tahun 2020 terjadi surplus anggaran sebesar Rp 24,36 miliar kemudian mengalami peningkatan surplus menjadi sebesar Rp 51,95 miliar pada tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi penurunan surplus anggaran menjadi sebesar Rp 19,25 miliar.

2.2.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berjalan. Pendapatan daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sesuai dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kategorisasi pendapatan daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 2.69 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran Tahun 2020-2024 (Rp Juta)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	R (%)
Pendapatan	**1.627.537,56**	**1.644.723,64**	**1.675.529,39**	**1.787.840,79**	**1.830.268,18**	**3,00%**
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**159.308,33**	**134.864,41**	**157.521,13**	**169.326,01**	**165.416,89**	**1,66%**
Pendapatan Pajak Daerah	59.944,43	69.628,89	81.553,66	83.447,89	85.775,40	9,72%
Pendapatan Retribusi Daerah	7.845,11	6.053,18	6.639,13	8.723,16	6.398,55	-2,18%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.976,04	7.923,06	9.082,92	8.174,89	8.488,11	1,95%
Lain-lain PAD Yang Sah	83.542,75	51.259,27	60.245,42	68.976,19	64.754,81	-3,35%
Pendapatan Transfer	**1.361.012,30**	**1.406.038,43**	**1.496.386,43**	**1.595.037,29**	**1.603.928,84**	**4,22%**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.071.185,61	1.135.082,77	1.224.720,41	1.285.221,55	1.329.113,83	5,55%
Bagi Hasil Pajak	35.460,40	118.568,60	97.673,94	81.069,31	58.235,91	42,90%
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3.074,80	-	-	-	20.379,48	
Dana Alokasi Umum (DAU)	830.586,75	818.693,95	812.852,36	874.171,02	945.361,24	3,39%
Dana Alokasi Khusus (DAK)	202.063,66	197.820,22	314.194,11	329.981,22	305.137,21	13,56%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	206.158,43	167.875,53	151.463,89	184.924,82	187.045,95	-1,28%
Dana Insentif Daerah*	57.564,94	16.152,61	-	12.060,03	13.120,68	
Dana Desa *	148.593,49	151.722,92	151.463,89	172.864,79	173.925,28	4,17%
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	83.668,27	103.080,13	96.117,18	98.080,13	85.774,06	1,49%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	83.668,27	103.080,13	96.117,18	98.080,13	85.774,06	1,49%
Bantuan Keuangan	-	-	24.084,95	26.810,79	1.995,00	-40,62%
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	-	-	24.084,95	26.810,79	1.995,00	-40,62%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**107.216,93**	**103.820,80**	**21.621,83**	**23.477,48**	**60.922,46**	**29,63%**
Pendapatan Hibah	107.216,93	3.626,47	842,03	4,40	35.393,10	267793,96%
Pendapatan Lainnya	-	100.194,33	20.779,80	23.473,08	25.529,35	-19,18%

Sumber: LRA 2020-2023 dan LKPJ Kabupaten Asahan 2024 (diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama periode tahun 2020-2024 realisasi total pendapatan mengalami tren peningkatan. Secara keseluruhan pada periode tersebut, kontribusi sumber pendapatan terbesar di Kabupaten Asahan masih berasal dari pendapatan transfer, khususnya dana alokasi umum. Hal ini menunjukkan ketergantungan fiskal terhadap dana transfer masih cukup tinggi. Capaian PAD yang merupakan indikator kemandirian dan keberlanjutan fiskal Daerah selama periode menunjukkan kondisi fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. PAD mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,66 persen per tahun. Penurunan PAD secara signifikan terjadi pada tahun 2021 dengan penurunan mencapai 15,34 persen dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020. Pada tahun 2022, PAD kembali meningkat dengan capaian sebesar Rp 157,52 miliar atau meningkat sebesar 16,80 persen. Adapun kinerja komponen PAD pada pajak daerah menunjukkan capaian sangat baik dengan terus mengalami peningkatan hingga 9,72 persen rata-rata per tahun. Berdasarkan struktur PAD, pajak daerah merupakan penerimaan yang dominan dengan rata-rata kontribusi mencapai 48,49 persen, meskipun pada 2020 PAD didominasi oleh kontribusi Lain-lain PAD Yang Sah. Peningkatan PAD khususnya pada potensi penerimaan melalui pajak dan retribusi tetap perlu diupayakan diantaranya melalui pemetaan potensi pajak dan retribusi serta peningkatan efisiensi dan efektivitas penerimaan melalui digitalisasi. Selain itu, peningkatan PAD dapat dilakukan melalui peningkatan inovasi sumber penerimaan salah satunya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagai salah satu komponen PAD yang belum dioptimalkan kinerjanya diantaranya melalui bagi hasil pembiayaan dan BUMD.

Di sisi lain, dalam perspektif distribusi, struktur pendapatan daerah Kabupaten Asahan dapat dikatakan masih sangat didominasi oleh besarnya kontribusi pendapatan transfer pemerintah pusat khususnya dana alokasi umum. Lain-lain pendapatan yang sah dan PAD masih menjadi sumber yang memiliki kontribusi paling sedikit dibandingkan pendapatan transfer seperti dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

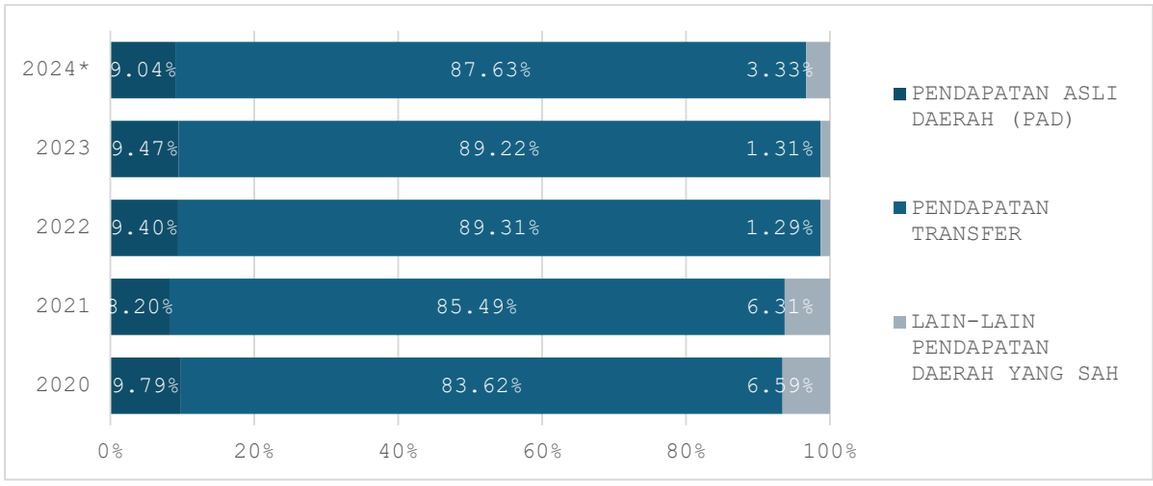

Gambar 2.43 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, 2020-2024
Sumber: LRA 2020-2023 dan LKPJ Kabupaten Asahan 2024 (diolah)

Grafik di atas menunjukkan perkembangan struktur pendapatan daerah Kabupaten Asahan sepanjang tahun 2020-2024. Pada periode tersebut terlihat bahwa pendapatan transfer memiliki kontribusi terbesar terhadap total pendapatan daerah dengan rata-rata kontribusi sebesar 87,06 persen. Selanjutnya, PAD merupakan kontributor terbesar kedua terhadap total pendapatan daerah dengan rata-rata kontribusi sebesar 9,18 persen. Adapun lain-lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 3,06 persen. Berdasarkan pola perkembangan capaian selama periode tersebut, kontribusi pendapatan transfer secara umum mengalami tren peningkatan, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami tren

penurunan dan PAD berfluktuasi namun cenderung meningkat pada dua tahun terakhir.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Selama periode tahun 2020-2024, pendapatan daerah Kabupaten Asahan belum mencapai target 100 persen. Pada tahun 2020, capaian realisasi mencapai 95,84 persen dan terus meningkat hingga mencapai 99,87 persen pada tahun 2023, nemun kembali menurun paa tahun 2024 dengan capaian sebesar 99,85 persen.

Tabel 2.70 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Selisih
2020	1.698.111.574.562,28	1.627.537.561.825,54	95,84 %	-70.574.012.736,74
2021	1.712.198.452.184,00	1.644.723.292.696,92	96,06 %	-67.475.159.487,08
2022	1.684.299.402.539,00	1.675.529.388.615,69	99,48 %	-8.770.013.923,31
2023	1.790.178.753.298,00	1.787.840.787.807,98	99,87 %	-2.337.965.490,02
2024	1.833.076.223.495,97	1.830.268.180.907,57	99,85 %	-2.808.042.588,40

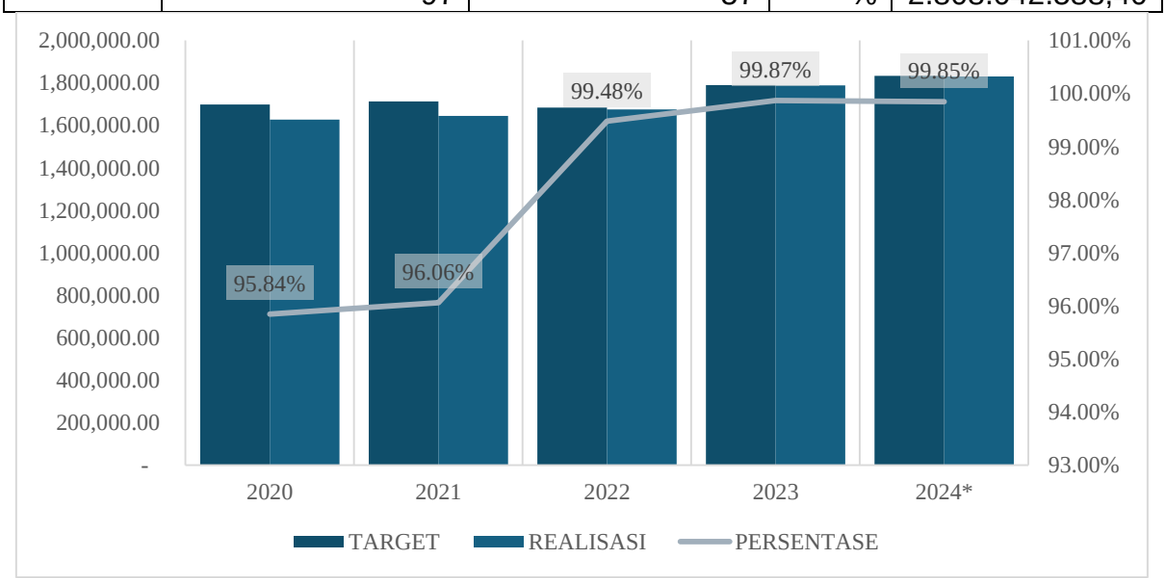

Gambar 2.44 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024

Sumber: LRA 2020-2023 dan LKPJ Kabupaten Asahan 2024 (diolah)

2.2.1.2 Belanja Daerah dan Transfer

Belanja daerah meliputi belanja operasi, modal, dan belanja tak terduga. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Sedangkan, Belanja Tak Terduga adalah

pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Transfer daerah meliputi transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan.

Tabel berikut menunjukkan jumlah nominal dan rata-rata pertumbuhan realisasi total belanja daerah dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Total realisasi belanja daerah Kabupaten Asahan pada tahun 2020 sebesar Rp 1,33 triliun yang kemudian menurun hingga menjadi Rp 1,32 triliun pada tahun 2022 dengan penurunan sebesar 0,68 persen. Kemudian, pada tahun 2022-2024, total realisasi belanja kembali meningkat setiap tahun. Adapun transfer daerah berfluktuasi namun cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,08 persen per tahun. Realisasi capaian transfer mencapai Rp 175,05 miliar pada tahun 2020 meningkat hingga Rp 298,33 miliar pada tahun 2024. Uraian secara lengkap per jenis belanja dalam realisasi belanja APBD Kabupaten Asahan dapat dilihat pada Tabel 2.2.1-4 berikut.

Tabel 2.71 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Kabupaten Asahan Tahun Anggaran Tahun 2020-2024 (Rp Juta)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	R(%)
Belanja	**1.328.127,66**	**1.319.092,56**	**1.429.652,56**	**1.471.124,05**	**1.552.268,42**	**4,03%**
Belanja Operasi	**1.131.523,14**	**1.126.624,59**	**1.131.414,15**	**1.200.173,96**	**1.320.396,36**	**4,02%**
Belanja Pegawai	658.161,27	689.921,86	650.906,50	653.302,87	687.230,98	1,18%
Belanja Barang Dan Jasa	354.022,67	394.140,09	439.324,90	475.907,65	537.600,49	11,02%
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	
Belanja Hibah	114.323,09	42.155,63	37.731,47	70.180,50	94.504,03	11,76%
Belanja Bantuan Sosial	5.016,11	407,00	3.451,28	782,94	1.060,86	
Belanja Modal	**146.983,02**	**192.281,53**	**298.238,41**	**270.950,09**	**231.453,46**	**15,55%**
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	61.768,38	48.710,90	59.375,15	52.566,46	53.146,74	-2,40%
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	33.994,24	28.540,42	44.012,87	96.000,08	68.445,29	31,90%
Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	50.017,45	114.595,11	171.743,91	103.482,10	100.128,93	34,00%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.202,96	435,10	23.106,49	18.901,45	9.732,50	1269,98%
Belanja Tak Terduga	**49.621,50**	**186,44**	**-**	**-**	**418,60**	
Belanja Tak Terduga	49.621,50	186,44	-	-	418,60	
Transfer	**275.053,06**	**273.676,79**	**281.402,97**	**297.468,10**	**298.334,14**	**2,08%**
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	6.117,13	8.677,11	10.032,04	11.279,54	11.084,15	
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	6.117,13	8.677,11	10.032,04	11.279,54	11.084,15	
Transfer Bantuan Keuangan	**268.935,93**	**264.999,68**	**271.370,94**	**286.188,56**	**287.249,99**	**1,69%**
Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	267.698,55	264.999,68	271.370,94	286.188,56		0,70%
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.237,38	-	-	-		

Sumber: LRA 2020-2023 dan LKPJ Kabupaten Asahan 2024(diolah)

Selanjutnya jika ditelaah struktur belanja daerah berdasarkan kelompok belanja dan transfer maka terlihat kontribusi terbesar belanja daerah dialokasikan pada belanja operasi. Selama periode tahun 2020-2024, peranan belanja operasi mencapai rata-rata sebesar 69,33 persen dengan pos belanja operasi didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Sementara itu, proporsi transfer merupakan terbesar kedua dengan rata-rata kontribusi sebesar 16,75 persen. Adapun belanja modal memberikan kontribusi terbesar ketiga dengan rata-rata capaian sebesar 13,30 persen, alokasi terbesar pada belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Di sisi lain, belanja tidak terduga fluktuatif namun dengan kontribusi rendah. Capaian kontribusi belanja tak terduga rata-rata sebesar 0,63 persen.

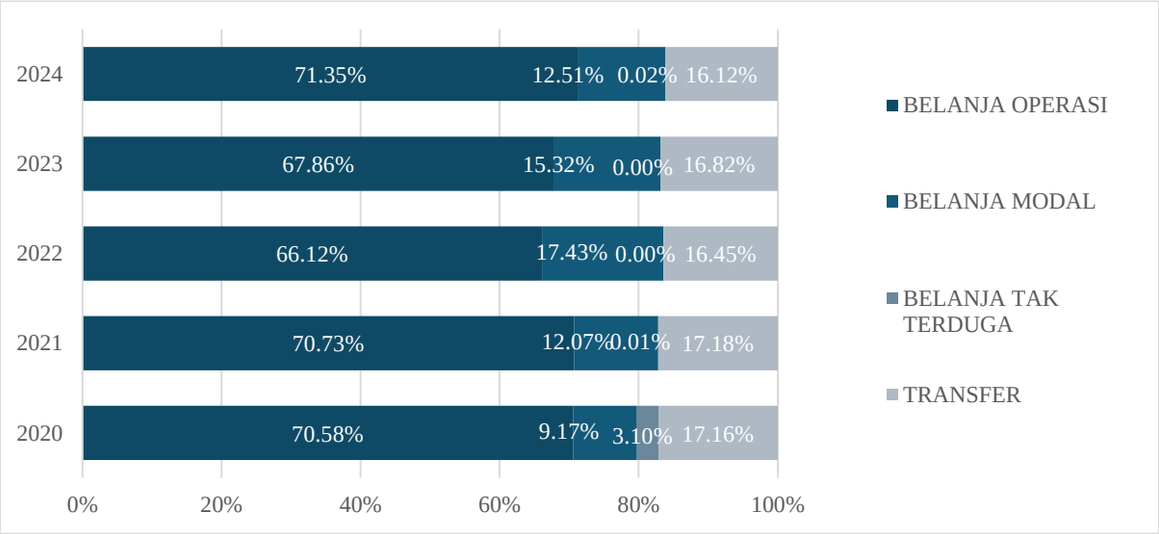

Gambar 2.45 Struktur Belanja Kabupaten Asahan, 2020-2024

Sumber: LRA 2020-2023 dan LKPJ Kabupaten Asahan 2024(diolah)

Target dan Realisasi Belanja

Selama periode tahun 2020-2024, target belanja yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD belum dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari data realisasi belanja yang mencapai kurang dari 100 persen. Selama periode tersebut, capaian realisasi berkisar pada 89,28 persen sampai dengan 96,12 persen dari anggaran.

Tabel 2.72 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Selisih
2020	1.440.528.107.531,72	1.328.127.664.173,23	92,20 %	-112.400.443.358,49
2021	1.477.518.039.779,00	1.319.092.212.515,34	89,28 %	-158.425.827.263,66
2022	1.489.762.837.666,00	1.429.652.563.360,51	95,97 %	-60.110.274.305,49
2023	1.547.665.962.111,00	1.471.124.048.804,55	95,05 %	-76.541.913.306,45
2024	1.614.890.614.366,00	1.552.268.421.630,05	96,12 %	-62.622.192.735,95

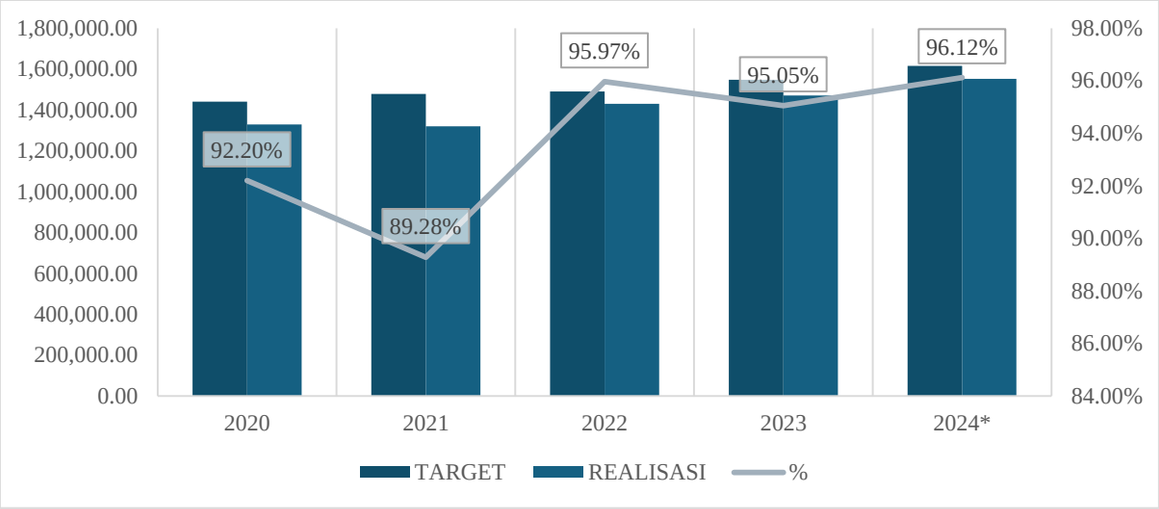

Gambar 2.46 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Asahan, 2020-2024

Sumber: LRA 2020-2023 dan LKPJ Kabupaten Asahan 2024(diolah)

2.2.1.3 Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Namun ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Tabel berikut menunjukkan gambaran pembiayaan daerah Kabupaten Asahan tahun 2020-2024. Selama periode tersebut, terlihat penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Asahan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan dana bergulir. Adapun pengeluaran pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal terjadi pada tahun 2020-2021. Selama tahun 2022-2024 tidak terdapat penyertaan modal dalam pembiayaan daerah Kabupaten Asahan.

Tabel 2.73 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2020-2024 (Rp Juta)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	R(%)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**20.069,33**	**41.935,71**	**91.422,24**	**61.949,40**	**81.200,65**	**56,45%**
Penggunaan SiLPA	19.992,15	41.926,94	91.390,00	55.896,09	81.200,65	58,53%
Penerimaan Kembali Dana Bergulir	77,17	8,78	32,24	6.053,31	-	4688,93%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**2.500,00**	**2.500,00**	**-**	-	-	
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.500,00	2.500,00	-	-	-	
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	
PEMBIAYAAN NETTO	**17.569,33**	**39.435,71**	**91.422,24**	**61.949,40**	**81.200,65**	**63,78%**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**41.926,16**	**91.390,00**	**55.896,09**	**81.198,04**	**60.866,27**	**24,82%**

Sumber: LRA 2020-2023 dan LKPJ Kabupaten Asahan 2024 (diolah)

2.2.1.4 Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah daerah.

Neraca daerah menyajikan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang aset (aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya), kewajiban (jangka pendek), dan ekuitas suatu pemerintah daerah. Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, rasio aktivitas, serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Dengan demikian neraca daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Tabel 2.74 Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Asahan, 2020-2024 (Rp)

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ASET					
	A. Aset Lancar	112.399.270.000,00	163.953.980.000,00	165.033.470.000,00	225.246.010.000,00	262.588.293.753,41
	B. Investasi Jangka Panjang	-	-	-	-	59.490.515.311,46
	C. Aset Tetap	3.524.292.900.000,00	3.636.291.650.000,00	3.869.489.570.000,00	4.184.712.070.000,00	3.179.643.672.424,99
	D. Aset Lainnya	-	-	-	-	203.628.407.491,79
	JUMLAH ASET	3.636.692.170.000,00	3.800.245.630.000,00	4.034.523.040.000,00	4.409.958.080.000,00	3.705.350.888.981,65
2	KEWAJIBAN					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	7.813.910.000,00	5.564.420.000,00	10.696.660.000,00	10.778.740.000,00	6.013.990.130,72
	B. Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	7.813.910.000,00	5.564.420.000,00	10.696.660.000,00	10.778.740.000,00	6.013.990.130,72
3	EKUITAS					
	Ekuitas	3.516.478.990.000,00	3.630.727.230.000,00	3.858.792.910.000,00	4.173.933.330.000,00	3.720.050.921.350,93
	JUMLAH EKUITAS	3.516.478.990.000,00	3.630.727.230.000,00	3.858.792.910.000,00	4.173.933.330.000,00	3.720.050.921.350,93
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.524.292.900.000,00	3.636.291.650.000,00	3.869.489.570.000,00	4.184.712.070.000,00	3.726.064.911.481,65

Tabel 2.74 menampilkan gambaran mengenai perkembangan neraca daerah Kabupaten Asahan dari tahun 2020 hingga proyeksi tahun 2024. Data ini menguraikan struktur keuangan daerah melalui tiga pilar utama: Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Bagian Aset diperinci menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, yang keseluruhannya berkontribusi pada total jumlah aset. Sementara itu, komponen Kewajiban mengidentifikasi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang harus ditanggung pemerintah daerah, dan Ekuitas mencerminkan nilai bersih kepemilikan setelah kewajiban dikurangi dari aset.

Berdasarkan tabel, dapat dianalisis dinamika perubahan pada setiap komponen neraca. Terlihat bahwa jumlah aset mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 sebesar Rp 3,53 triliun hingga mencapai puncaknya di tahun 2023 sebesar Rp 4.18 triliun, meskipun tahun 2024 menunjukkan adanya sedikit penurunan menjadi Rp 3.73 triliun. Penurunan di tahun 2024 ini terutama dipengaruhi oleh perubahan pada aset tetap dan aset lainnya. Di sisi lain, jumlah kewajiban menunjukkan fluktuasi, namun angkanya relatif stabil dan jauh lebih kecil dibandingkan dengan total aset, mengindikasikan struktur utang yang terkontrol. Pertumbuhan yang stabil juga terlihat pada bagian ekuitas, yang meningkat seiring dengan peningkatan aset dan mencerminkan penguatan posisi keuangan daerah dari tahun ke tahun. Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa total aset selalu seimbang dengan jumlah kewajiban ditambah ekuitas pada setiap tahunnya..

Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Oleh karena itu selain analisis di atas, analisis neraca daerah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah Kabupaten Asahan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, rumusnya yaitu aset lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek.

Tabel 2.75 Analisis Rasio Neraca Daerah Kabupaten Asahan, 2020-2024 (Rp Juta)

Rasio	Rumus	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Likuiditas	Aset Lancar	112.399,27	163.953,98	165.033,47	225.246,01	262.588,29
	Kewajiban Jangka Pendek	7.813,91	5.564,42	10.696,66	10.778,74	6.013,99
	Rasio Lancar	**14,38**	**29,46**	**15,43**	**20,9**	**43,66**
	Aset Lancar Persediaan	18.826,63	22.110,10	31.211,22	38.233,10	37.100,53
	Kewajiban Jangka Pendek	7.813,91	5.564,42	10.696,66	10.778,74	6.013,99
	Quick Ratio	**2,41**	**3,97**	**2,92**	**3,55**	**6,17**
Rasio Solvabilitas	Total Hutang	7.813,91	5.564,42	10.696,66	10.778,74	6.013,99
	Total Aset	3.524.292,90	3.636.291,65	3.869.489,57	4.184.712,07	3.726.064,91
	Rasio Total Hutang (%)	**0,22**	**0,15**	**0,28**	**0,26**	**0,16**

Rasio	Rumus	2020	2021	2022	2023	2024
	Total Hutang	7.813,91	5.564,42	10.696,66	10.778,74	6.013,99
	Total Ekuitas	3.516.478,99	3.630.727,23	3.858.792,91	4.173.933,33	3.720.050,92
	Rasio Hutang/Modal (%)	**0,22**	**0,15**	**0,28**	**0,26**	**0,16**

Sumber: Neraca Kabupaten Asahan, 2019-2023 (diolah)

Nilai rasio lancar neraca keuangan pemerintah Kabupaten Asahan mengindikasikan bahwa pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar selama kurun waktu tahun 2020-2024 relatif tinggi, yang berarti bahwa pemerintah Kabupaten Asahan dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio lancar pada tahun 2024 mencapai 43,66 yang berarti bahwa aset lancar pemerintah Kabupaten Asahan adalah 43,66 kali lipat bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo. Persediaan masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Apalagi persediaan di pemerintah daerah bukan merupakan barang dagangan, sehingga sebagai faktor pengurang dalam aset lancar. Namun apabila diperhatikan nilai rasio lancar menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena *Quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Angka rasio di atas 1 berarti menunjukkan kemampuan yang kuat dalam melunasi kewajiban-kewajibannya yang jatuh tempo. Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai *quick ratio* neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan yang fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar daerah setelah dikurangi persediaan, mengalami perubahan dari tahun ke tahun dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Selama periode tahun 2020-2024 rasio cepat di Kabupaten Asahan selalu menunjukkan nilai diatas 1. Adapun capain rasio cepat pada tahun 2024 mencapai 6,17. Peningkatan quick ratio perlu terus diupayakan khususnya melalui peningkatan aset lancar persediaan.

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap total aset (*total debt to total asset ratio*) dan rasio hutang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio*). Rasio total hutang terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya, rumusnya total hutang dibagi total aset. Sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas mengukur seberapa jauh aset pemerintah daerah dibelanjai pihak kreditur dan modal sendiri (ekuitas), rumusnya total hutang dibagi total ekuitas. Semakin kecil rasio ini berarti semakin kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya. Dari tabel di atas, rasio total hutang terhadap total aset pemerintah Kabupaten Asahan tahun 2024 sebesar 0,26 persen artinya sebesar Rp 0,26 dari setiap Rp 1,00 total aktiva merupakan pendanaan dari hutang, atau aktiva pemerintah Kabupaten Asahan yang didanai oleh hutang adalah sebesar 0,26 persen, sisanya dari modal sendiri (ekuitas). Sedangkan dari tahun 2020-2024, rasio hutang terhadap modal, memiliki rasio yang hampir sama dengan rasio total hutang terhadap total aset pemerintah Kabupaten Asahan.

2.2.1.5 Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta mendekati *value of money* dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi diacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan. Proporsi belanja langsung terhadap jumlah belanja dan pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Asahan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 ditunjukkan oleh tabel berikut :

Tabel 2.76 Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024

Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp Juta)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp Juta)	Persentase
	(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
2020	658.161,27	1.605.680,73	40,99%
2021	689.921,86	1.595.269,00	43,25%
2022	650.906,50	1.711.055,53	38,04%
2023	653.302,87	1.768.592,79	36,94%
2024	687.230,98	1.850.569,86	37,14%
Rata-rata	**667.904,70**	**1.706.233,58**	**39,27%**

Sumber: LRA 2020-2023 dan LKPJ Kabupaten Asahan 2024 (diolah)

Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Asahan mengalami fluktuasi selama periode tahun 2020-2024, baik dari segi nominal maupun proporsinya terhadap total pengeluaran. Pada tahun 2020, total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mencapai Rp 658,16 miliar, kemudian meningkat hingga mencapai Rp 689,92 miliar di tahun 2021. Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur menurun di tahun 2022 menjadi Rp 650,91 miliar. Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur kembali meningkat pada tahun 2023-2024 hingga mencapai Rp 686,23 miliar. Sementara itu, proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran pemerintah Kabupaten Asahan juga berfluktuasi. Selama periode 2019-2023 proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran pemerintah berkisar antara 36,94 persen hingga 43,25 persen, dengan rata-rata proporsi selama periode tersebut sebesar 39,27 persen. Berdasarkan data tersebut, proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran pemerintah telah kurang dari 50 persen sehingga biaya pemenuhan kebutuhan aparatur bukan merupakan porsi besar dalam beban total realisasi belanja, namun perlu dioptimalisasi kembali sehingga belanja yang memiliki manfaat langung kepada masyarakat meningkat dan dapat mencapai angka di bawah 30 persen.

2.2.1.6 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Surplus/defisit riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus/defisit riil APBD Kabupaten Asahan selama kurun waktu tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.77 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024 (Rp juta)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Daerah	1.627.537,56	1.644.723,29	1.675.529,39	1.787.731,73	1.830.259,89
2	Belanja Daerah	1.603.180,73	1.592.769,00	1.711.055,53	1.768.592,79	1.850.569,86
	Surplus/Defisit	24.356,83	51.954,29	-35.526,15	19.138,94	-20.309,96
3	Pembiayaan Daerah					
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	20.069,33	41.935,71	91.422,24	61.937,34	81.198,04
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.500,00	2.500,00	-	-	-
	Pembiayaan Netto	17.569,33	39.435,71	91.422,24	61.937,34	81.198,04
	Sisa Lebih/Kurang Pembiyaaan Tahun Berkenaan	41.926,16	91.390,00	55.896,09	81.076,28	60.888,08

Sumber: LRA 2020-2023 dan RKPD Kabupaten Asahan 2025(diolah)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari kurun waktu tahun 2020-2024 terjadi peningkatan pembiayaan *netto* setiap tahunnya. Adapun pembiayaan netto bersumber dari penerimaan pembiayaan dengan tidak ada pengeluaran pembiayaan daerah. Pada tahun 2020, pembiayaan *netto* Kabupaten Asahan mencapai nilai sebesar Rp 17,57 miliar. Pada tahun 2022-2023, pembiayaan *netto* mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga nilai pembiayaan *netto* mencapai Rp 39,44 miliar dan 91,42 miliar. Pada tahun 2023, nilai pembiayaan *netto* Kabupaten Asahan mengalami penurunan hingga mencapai nilai sebesar Rp 61,94 miliar, kemudian mengalami oeningkatan kembali hingga mencapai Rp 81,20 miliar pada 2024.

Tabel 2.78 Surplus/Defisit Riil APBD Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024 (Rp juta)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.627.537,56	1.644.723,29	1.675.529,39	1.787.731,73	1.830.259,89
	Dikurangi					
2	Realisasi Belanja Daerah	1.603.180,73	1.592.769,00	1.711.055,53	1.768.592,79	1.850.569,86
	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.500,00	2.500,00	-	-	-
	Surplus/Defisit Riil	**21.856,83**	**49.454,29**	**-35.526,15**	**19.138,94**	**-20.309,96**

Sumber: LRA 2020-2023 dan RKPD Kabupaten Asahan 2025 (diolah)

Tabel 2.79 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Asahan (Rp Juta)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	19.992,15	41.926,94	91.390,00	55.884,03	81.198,04
Penerimaan Kembali Dana Bergulir	77,17	8,78	32,24	6.053,31	0,00

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

Sumber: LRA 2020-2023 dan RKPD Kabupaten Asahan 2025(diolah)

2.2.1.7 Ruang Fiskal Daerah

Ruang fiskal pada dasarnya merupakan ukuran besarnya dana daerah dalam satu tahun anggaran yang bisa digunakan secara bebas oleh daerah setelah dikeluarkannya pendapatan-pendapatan yang sudah tertentu penggunaannya dan dipenuhinya belanja yang bersifat wajib. Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari, seperti gaji PNS dan berbagai jenis pendapatan yang bersifat (*earmarked* ; ditentukan penggunaannya). Semakin besar ruang fiskal daerah maka semakin besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah termasuk untuk penyertaan modal pada BUMD. Secara teknis perhitungan ruang fiskal dapat menggunakan formula berikut ini :

Ruang Fiskal = **(Total Pendapatan + SiLPA) – Pendapatan Mengikat – Belanja Wajib Daerah**

Pendapatan Mengikat = **DAK + Pendapatan Hibah + Dana Darurat + Dana Penyesuaian/Otsus**

Belanja Wajib = **Belanja Urusan Pendidikan (20%) + Belanja Urusan Kesehatan (10%) + Gaji dan Tunjangan + Belanja Wajib lainnya**

Efektivitas penggunaan anggaran berpengaruh juga pada terciptanya ruang fiskal untuk memberi ruang dalam pembangunan daerah bersangkutan. Dalam hal ini, perencanaan dan penganggaran yang dituangkan dalam APBD suatu Daerah memegang peranan sangat penting. Stephen S. Heller (IMF *Policy Discussion Paper*, 2005) mengemukakan bahwa ruang fiskal dapat didefinisikan sebagai ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah untuk menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah.

Sesuai dengan hasil perhitungan ruang fiskal Kabupaten Asahan tahun 2020-2024 ditemukan ruang fiskal Kabupaten Asahan cukup terbatas dalam mendanai penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan daerah. Tabel 3.14 menunjukkan hasil analisis ruang fiskal daerah di Kabupaten Asahan tahun 2020-2024. Pada tahun 2019-2020 berdasarkan perhitungan ruang fiskal menunjukkan nilai negatif atau tidak tersedianya ruang fiskal. Pada tahun 2021, ruang fiskal Kabupaten Asahan mencapai Rp 72,24 miliar kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022 dan 2023 dengan nilai pencapaian secara berurutan sebesar Rp 42,70 miliar dan 33,84 miliar. Nilai yang pasang surut secara signifikan seiring dengan dinamika realisasi pendapatan dan belanja menunjukkan efektivitas penganggaran masih perlu diupayakan perencanaan yang semakin matang, sehingga semakin besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah termasuk untuk penyertaan modal. Penyertaan modal menjadi alternatif langkah yang dapat dilakukan guna meningkatkan PAD Kabupaten Asahan.

Tabel 2.80 Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024 (Rp)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan	**1.647.529,72**	**1.686.650,23**	**1.766.919,39**	**1.843.615,76**	**1.911.457,94**
Pendapatan Mengikat	**515.439,01**	**369.322,22**	**466.500,03**	**514.910,44**	**527.576,26**
Dak	202.063,66	197.820,22	314.194,11	329.981,22	305.137,21
Hibah	107.216,93	3.626,47	842,03	4,40	35.393,10
Dana Penyesuaian	57.564,94	16.152,61	-	12.060,03	13.120,68
Dana Desa	148.593,49	151.722,92	151.463,89	172.864,79	173.925,28
Belanja Mengikat	**738.320,30**	**769.560,31**	**736.459,28**	**741.732,51**	**779.759,47**
Belanja Pegawai	658.161,27	689.921,86	650.906,50	653.302,87	687.230,98
Belanja Adum (5%*Belanja)	80.159,04	79.638,45	85.552,78	88.429,64	92.528,49
Belanja Wajib	**491.152,53**	**475.527,63**	**521.257,80**	**553.129,73**	**585.341,97**
Belanja Pendidikan 20%*(Belanja-Gaji)	189.003,89	180.569,43	212.029,81	223.057,98	232.667,78
Belanja Kesehatan 10%*(Belanja-Gaji)	94.501,95	90.284,71	106.014,90	111.528,99	116.333,89
Belanja Infrastruktur (25%*Dau)	207.646,69	204.673,49	203.213,09	218.542,76	236.340,31
Total Pendapatan Dan Belanja Mengikat Serta Belanja Wajib	**1.744.911,84**	**1.614.410,17**	**1.724.217,11**	**1.809.772,69**	**1.892.677,70**
Ruang Fiskal	**- 97.382,13**	**72.240,06**	**42.702,28**	**33.843,07**	**18.780,23**

Sumber: LRA 2020-2023 dan RKPD Kabupaten Asahan 2025(diolah)

2.2.1.8 Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai tugas pemerintahan. Terkait dengan berbagai hal perhitungan perimbangan dana pusat dan daerah, Kementerian Keuangan RI mengemukakan definisi tentang kapasitas fiskal yang dikaitkan secara langsung dengan kemampuan keuangan daerah yang mencakup Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Pada pasal 1 Peraturan Kementerian Keuangan PMK No. 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah disebutkan bahwa kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Adapun Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah.

Selanjutnya formula yang digunakan untuk menghitung kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

$$KFD_{kabupaten'/kota-i} = Y - [Y_a + X]$$

Keterangan

- *KFD* = Kapasitas Fiskal Daerah
- Y = Pendapatan
- Y_a = Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan
- X = Belanja tertentu

Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

$$IKFD_{kabupaten'/kota-i} = \frac{KFD_{kabupaten'/kota-i}}{\Sigma KFD_{kabupaten'/kota-i}/508}$$

Berdasarkan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota, Daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut untuk tahun 2021:

Rentang IKFD 2021	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
IKFD < 0,530	Sangat rendah
0,530 < IKFD < 0,727	Rendah
0,727 ≤ IKFD < 1,053	Sedang
1,053 ≤ IKFD < 1,838	Tinggi
IKFD ≥1,838	Sangat Tinggi

Sesuai dengan hasil perhitungan kapasitas fiskal daerah yang dihitung oleh Kementerian Keuangan RI setiap tahunnya yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah maka dapat dikemukakan, nilai Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Kabupaten Asahan pada 2018-2021 menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, nilai IKFD Kabupaten Asahan menunjukkan nilai sebesar 1,027 atau masuk dalam kategori sedang. Pada tahun 2019, nilai IKFD Kabupaten Asahan mengalami penurunan yakni menjadi 0,92 namun masih dalam kategori sedang. Pada tahun 2020 nilai IKFD Kabupaten Asahan mengalami penurunan dengan nilai IKFD mencapai 0,856. Kemudian, pada tahun 2021, nilai IKFD Kabupaten Asahan meningkat menjadi 1,024 sehingga masuk dalam kategori sedang.

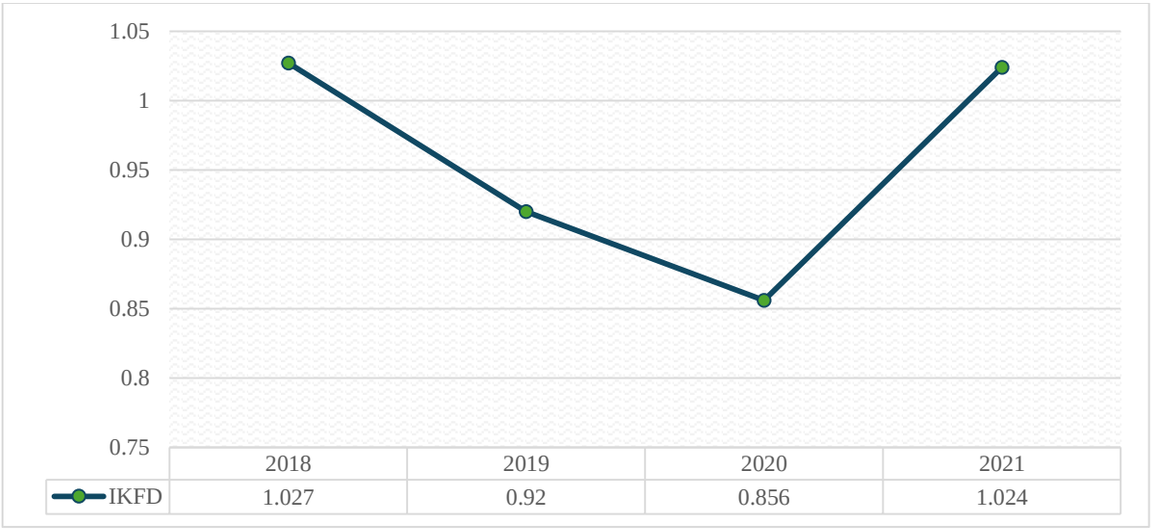

Gambar 2.47 Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018-2021

Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2018-2021

Sejak tahun 2022 terdapat perubahan metode penghitungan Kapasitas fiskal oleh kementerian keuangan dengan menggunakan indikator Rasio Kapasitas Fiskal Daerah. Terkait dengan berbagai hal perhitungan perimbangan dana pusat dan daerah, Kementerian Keuangan RI mengemukakan definisi tentang kapasitas fiskal yang dikaitkan secara langsung dengan kemampuan keuangan daerah yang mencakup provinsi, kabupaten, dan kota. Pada pasal 1 Peraturan Kementerian Keuangan PMK No. 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah disebutkan bahwa kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Adapun Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah.

Selanjutnya formula yang digunakan untuk menghitung kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

$$KFD_{kabupaten'/kota-i} = Y - [Y_a + X]$$

Keterangan

- *KFD* = Kapasitas Fiskal Daerah
- Y = Pendapatan
- Y_a = Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan
- X = Belanja tertentu

Penghitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

$$RKFD_{kabupaten'/kota-i} = \frac{KFD_{kabupaten'/kota-i}}{Belanja\ Pegawai_{kabupaten'/kota-i}}$$

Berdasarkan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota, Daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut untuk tahun 2022:

Rentang RKFD 2022	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
RKFD < 1,171	Sangat rendah
1,171 < RKFD < 1,504	Rendah
1,504 ≤ RKFD < 1,838	Sedang
1,838 ≤ RKFD < 2,171	Tinggi
RKFD ≥ 2,171	Sangat Tinggi

Sesuai dengan hasil perhitungan kapasitas fiskal daerah yang dihitung oleh Kementerian Keuangan RI setiap tahunnya yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Capaian RKFD Kabupaten Asahan pada tahun 2022, 2023, 2024 berturut-turut sebesar 1,263; 1,122 ; dan 1,049 dan termasuk dalam kategori rendah.

2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025-2029

Setelah mengetengahkan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sampai tahun 2024 maka selanjutnya dapat digambarkan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah dari tahun 2025 hingga tahun 2030 mendatang.

2.2.2.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi pendapatan Kabupaten Asahan dilakukan berdasarkan analisis tren pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2020-2024 dan perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan dalam periode lima tahun yang akan datang, dengan kondisi awal APBD Kabupaten Asahan tahun 2024. Hal ini juga diperkuat dengan justifikasi kualitatif angka pertumbuhan masing-masing pos pendapatan dan belanja dari para *stakeholders* pengelolanya. Pada tahun 2023-2024 diasumsikan dengan telah terbentuknya penyesuaian masyarakat terhadap masa pemulihan ekonomi di Indonesia maka akan mendorong kembali mobilitas dan aktivitas masyarakat sehingga dapat memasuki momentum pasca pemulihan ekonomi.

Berdasarkan penghitungan proyeksi dengan asumsi pertumbuhan *medium* pendapatan Daerah pada APBD tahun 2026 diperkirakan mencapai nilai sebesar Rp 1,90 triliun dan menjadi Rp 2,00 triliun pada tahun 2030 sehingga rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 1,38 persen. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari pendapatan transfer yang berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat. Seiring dengan perkembangan pendapatan daerah, belanja daerah mengalami perubahan yang sejalan dengan asumsi pertumbuhan *moderat.* Berdasarkan penghitungan proyeksi, belanja daerah pada APBD tahun 2026 diperkirakan mencapai nilai sebesar Rp 1,92 triliun. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, nominal proyeksi belanja daerah mengalami peningkatan hingga menjadi Rp 2,03 triliun pada tahun 2030 sehingga rata-rata pertumbuhan belanja sebesar 1,39 persen. Pada pertumbuhan PAD diharapkan terjadi peningkatan khususnya kontribusi pajak, retribusi, dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengeluaran pembiayaan dikhususkan pada penyertaan modal daerah yang diharapkan dapat meningkatkan PAD.

Tabel 2.81 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan, Tahun 2025-2030 (Rp, Juta)

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	R
PENDAPATAN	**1.873.449,15**	**1.895.062,23**	**1.918.003,58**	**1.943.251,99**	**1.971.051,13**	**2.001.670,94**	**1,38%**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**240.828,82**	**262.441,90**	**285.383,25**	**310.631,66**	**338.430,80**	**369.050,61**	**8,90%**
Pendapatan Pajak Daerah	157.610,71	176.933,36	196.396,03	217.999,60	241.979,55	268.597,30	11,00%
Pendapatan Retribusi Daerah	13.709,77	12.933,53	13.192,20	13.456,05	13.725,17	13.999,67	2,00%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.174,89	8.174,89	8.174,89	8.174,89	8.174,89	8.174,89	0,00%
Lain-lain PAD Yang Sah	61.333,45	64.400,12	67.620,13	71.001,13	74.551,19	78.278,75	5,00%
PENDAPATAN TRANSFER	**1.602.698,75**	**1.602.698,75**	**1.602.698,75**	**1.602.698,75**	**1.602.698,75**	**1.602.698,75**	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.540.919,03	1.540.919,03	1.540.919,03	1.540.919,03	1.540.919,03	1.540.919,03	
-Dana Desa	173.849,01	173.849,01	173.849,01	173.849,01	173.849,01	173.849,01	
-INSENTIF FISKAL	14.521,74	14.521,74	14.521,74	14.521,74	14.521,74	14.521,74	
-DBH	80.191,54	80.191,54	80.191,54	80.191,54	80.191,54	80.191,54	
-DAU	981.199,63	981.199,63	981.199,63	981.199,63	981.199,63	981.199,63	
-DAK FISIK	42.065,68	42.065,68	42.065,68	42.065,68	42.065,68	42.065,68	
-DAK NON FISIK	249.091,44	249.091,44	249.091,44	249.091,44	249.091,44	249.091,44	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	61.779,72	61.779,72	61.779,72	61.779,72	61.779,72	61.779,72	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**29.921,58**	**29.921,58**	**29.921,58**	**29.921,58**	**29.921,58**	**29.921,58**	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	29.921,58	29.921,58	29.921,58	29.921,58	29.921,58	29.921,58	
BELANJA	**1.934.303,85**	**1.917.035,73**	**1.940.442,72**	**1.966.164,75**	**1.991.088,49**	**2.025.545,87**	**1,39%**
BELANJA OPERASI	**1.399.738,01**	**1.396.766,05**	**1.398.559,19**	**1.437.892,43**	**1.426.801,24**	**1.423.126,88**	**0,48%**
Belanja Pegawai	757.887,92	757.904,10	758.975,97	761.106,69	761.643,63	764.880,33	0,23%
Belanja Barang dan Jasa	582.325,55	581.933,99	582.715,63	584.269,41	584.660,96	601.357,19	0,83%
Belanja Hibah	58.394,35	55.847,05	55.787,84	91.436,21	79.418,44	55.809,19	5,23%
Belanja Bantuan Sosial	1.130,20	1.080,90	1.079,75	1.080,13	1.078,21	1.080,17	
BELANJA MODAL	**225.867,68**	**211.465,58**	**231.505,79**	**215.701,21**	**249.930,32**	**284.950,93**	**8,13%**

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	R
BELANJA TAK TERDUGA	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
BELANJA TRANSFER	**306.698,16**	**306.804,11**	**308.377,74**	**310.571,10**	**312.356,93**	**315.468,06**	**0,70%**
Belanja Bagi Hasil	19.525,38	18.158,45	20.023,30	22.120,21	24.394,22	27.008,62	10,43%
Belanja Bantuan Keuangan	287.172,78	288.645,66	288.354,44	288.450,90	287.962,71	288.459,44	
SURPLUS / (DEFISIT)	**-60.854,70**	**-21.973,50**	**-22.439,14**	**-22.912,76**	**-20.037,36**	**-23.874,93**	**2,71%**
PEMBIAYAAN							
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**60.854,70**	**21.973,50**	**22.439,14**	**22.912,76**	**20.037,36**	**23.874,93**	**2,71%**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	60.854,70	21.973,50	22.439,14	22.912,76	20.037,36	23.874,93	2,71%
Penerimaan Piutang Daerah							
PENGELUARAN PEMBIAYAAN							
Penyertaan Modal							
Pembayaran Hutang Pokok yang Jatuh Tempo							
Pemberian Pinjaman Daerah							
PEMBIAYAAN NETTO							
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

Sumber: diolah,2025

2.2.2.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan diperlukan untuk mengukur sejauh mana fleksibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan dalam menggunakan pendapatan yang dimiliki untuk dialokasikan pada berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah dalam periode RPJM Daerah Tahun 2025-2029. Secara teknis, beberapa langkah yang dilakukan dalam menghitung ruang fiskal daerah adalah

- **Langkah pertama:** menghitung total penerimaan daerah yang berasal dari total pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang umumnya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- **Langkah kedua:** menghitung jumlah pengeluaran wajib dan mengikat daerah tahun 2025-2029. Pengeluaran ini terutama terdapat pada sumber pendapatan daerah berupa DAK yang memang sudah diikat peruntukannya oleh pemerintah pusat**,** dana transfer berupa dana desa**,** serta belanja program non urusan dan gaji yang merupakan syarat minimal bagi berjalannya pelayanan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan.
- **Langkah ketiga:** menghitung kapasitas riil keuangan daerah dengan pengurangan antara total penerimaan daerah dengan pengeluaran wajib dan mengikat selama periode tahun 2025-2029**.**
- **Langkah keempat:** menghitung kebutuhan belanja prioritas I, yaitu belanja pendidikan dan kesehatan.
- **Langkah kelima:** menghitung kebutuhan belanja untuk prioritas pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Tabel 2.82 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 (Rp Juta)

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
Penerimaan	**1.928.685,26**	**1.996.989,70**	**2.068.131,58**	**2.142.242,86**	**2.219.462,31**
Pendapatan Mengikat	**555.380,95**	**576.803,27**	**599.056,72**	**622.173,75**	**646.188,07**
DAK	356.907,68	371.183,99	386.031,35	401.472,60	417.531,51
Hibah	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	13.296,19	13.960,99	14.659,04	15.392,00	16.161,60
Dana Desa	185.177,09	191.658,28	198.366,32	205.309,15	212.494,97
Belanja Mengikat	**775.880,57**	**792.889,72**	**810.312,62**	**828.161,31**	**846.448,26**
Belanja Pegawai	679.696,31	693.290,24	707.156,04	721.299,16	735.725,15
Belanja Adum (5%*Belanja)	96.184,26	99.599,48	103.156,58	106.862,14	110.723,12
Belanja Wajib	**558.678,29**	**580.655,89**	**603.570,10**	**627.463,87**	**652.382,33**
Belanja Pendidikan 20%*(Belanja-Gaji)	248.797,79	259.739,89	271.195,11	283.188,74	295.747,43
Belanja Kesehatan 10%*(Belanja-Gaji)	124.398,90	129.869,95	135.597,55	141.594,37	147.873,72
Belanja Infrastruktur (25%*DAU)	185.481,61	191.046,06	196.777,44	202.680,76	208.761,18
Total Pendapatan Dan Belanja Mengikat Serta Belanja Wajib	**1.889.939,82**	**1.950.348,88**	**2.012.939,44**	**2.077.798,92**	**2.145.018,66**
Ruang Fiskal	**38.745,44**	**46.640,81**	**55.192,14**	**64.443,94**	**74.443,64**

Sumber: LRA Kabupaten Asahan (diolah)

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Asahan tahun 2025-2029 menunjukkan angka yang cukup stabil dengan kenaikan dan penurunan yang kecil seiring dengan dinamika fluktuasi perkembangan pendapatan dan belanja daerah. Selama periode tersebut ruang fiskal Kabupaten Asahan berkisar antara Rp 38,75 miliar hingga Rp 74,44 miliar. Pasang surut ini terutama disebabkan oleh adanya asumsi peningkatan pendapatan daerah yang lebih lambat daripada peningkatan kebutuhan belanja mengikat dan belanja wajib. Selanjutnya kondisi perimbangan pendapatan dan belanja tersebut akan dapat terjaga dengan syarat adanya pertumbuhan pendapatan daerah yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan belanja daerah terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Selain itu, perlu kebijakan pengetatan terhadap belanja mengikat terutama belanja pegawai dan belanja rutin OPD agar lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya dalam kerangka penyusunan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 nantinya maka dapat menggunakan hitungan ruang fiskal ini untuk menentukan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut ke dalam dua kelompok prioritas:

a. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja *mandatory* mengikat yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang meliputi pelayanan dasar di bidang:

1. Pendidikan
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketemtraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan;
6. Sosial.

Belanja pemerintah untuk pelayanan dasar merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

b. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

c. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja pemerintah lainnya.

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Asahan dari tahun 2025 hingga 2029 menyajikan gambaran operasional yang jelas mengenai ruang fiskal yang tersedia untuk pendanaan program dan kebijakan dalam kerangka RPJMD. Data menunjukkan adanya tren peningkatan ruang fiskal dari Rp 38.745,44 juta pada tahun 2025 menjadi Rp 74.443,64 juta pada tahun 2029. Peningkatan tersebu cukup stabil, dengan rata-rata sebesar Rp 9 miliar per tahun, mengindikasikan kapasitas keuangan daerah yang terus tumbuh, didorong oleh pertumbuhan pendapatan mengikat serta kemampuan daerah dalam mengelola belanja wajib.

Secara operasional, ruang fiskal tersebut memebrikan fleksibilitas finansial yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan setelah memenuhi seluruh kewajiban belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Analisis ruang fiskal ini menjadi penting untuk menentukan alokasi kebijakan. Kelompok Prioritas I, yang mencakup belanja mandatory untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial, harus dipastikan terpenuhi terlebih dahulu. Pada hasil analisis, Belanja Pendidikan dan Kesehatan telah dihitung sebagai bagian dari Belanja Wajib, yang secara operasional memudahkan perencanaan pemenuhan SPM.

Selanjutnya, sisa ruang fiskal yang ada setelah dialokasikannya Belanja Prioritas I, akan menjadi penentu utama untuk Belanja Prioritas II dan III. Secara operasional, Ruang Fiskal yang terus meningkat memberikan optimisme bahwa

Pemerintah Kabupaten Asahan akan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah (Prioritas II) yang disusun berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini mencakup program inovatif dan proyek strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan. Dengan proyeksi peningkatan ruang fiskal yang konsisten, Kabupaten Asahan memiliki dasar yang kuat untuk merencanakan pembangunan jangka menengah yang tetap realistis dan berkelanjutan.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

1. **Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan (Pertumbuhan ekonomi yang belum merata dan kurang berkualitas)**

   Angka kemiskinan yang masih cenderung tinggi mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang belum sejahtera. Tingginya tingkat kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan, dan minimnya akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Masalah ini menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan perlu mencakup peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi, dan akses yang lebih baik terhadap layanan publik.

   Pertumbuhan ekonomi yang belum merata menunjukkan adanya kesenjangan antarwilayah dalam hal perkembangan ekonomi. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan yang pesat, sementara yang lain tertinggal. Ketidakmerataan ini dapat disebabkan oleh perbedaan infrastruktur, investasi, dan sumber daya manusia di setiap wilayah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi pembangunan yang inklusif, yang mampu menjangkau seluruh wilayah dan memperhatikan potensi serta kebutuhan masing-masing daerah. Pembangunan infrastruktur yang merata dan kebijakan ekonomi yang berpihak pada daerah tertinggal menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini.

   Berdasarkan kondisi di atas, maka upaya peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting. Pengembangan infrastruktur dan pelayanan dasar untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang relatif tertinggal dan menjadi kantong kemiskinan perlu diprioritaskan. Diharapkan upaya pemberdayaan masyarakat di kantong-kantong kemiskinan akan dapat mendinamisasi kualitas pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, upaya perlindungan sosial adaptif harus diperkuat dengan penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) lokal untuk membantu kelompok rentan.

   Untuk mencapai tujuan ini, beberapa strategi pengembangan perlu diterapkan. Pertama, peningkatan kesempatan kerja melalui pertumbuhan sektor perkebunan, sektor industri dan UMKM, pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan pasar, serta kerja sama dengan perusahaan lokal dan internasional untuk menarik investasi. Kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan akses kredit dan pinjaman, mendorong inovasi dan teknologi dalam sektor pertanian dan perikanan, serta mengembangkan pasar lokal dan regional untuk produk-produk lokal. Ketiga, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik dengan memperbaiki infrastruktur pendidikan dan kesehatan di wilayah tertinggal, meningkatkan kualitas layanan melalui peningkatan sumber daya manusia dan peralatan yang memadai, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan layanan publik. Keempat, pengembangan infrastruktur yang merata dengan meningkatkan aksesibilitas transportasi dan komunikasi, membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sarana irigasi, serta meningkatkan ketersediaan energi listrik dan air bersih. Kelima, merumuskan Rencana Pengentasan Kemiskinan Daerah (RPKD) periode 2025-2029 yang

mencakup strategi jangka pendek, menengah, dan panjang, mengidentifikasi kantong-kantong kemiskinan, dan mengembangkan program-program khusus untuk wilayah tersebut. Terakhir, penguatan perlindungan sosial dengan meningkatkan SJSN lokal, mengembangkan program bantuan sosial berbasis kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dalam mendapatkan perlindungan sosial melalui kampanye dan pendidikan.

Tabel 2.83 Pohon Masalah Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan	Kurangnya lapangan pekerjaan	Keterbatasan investasi dan pertumbuhan sektor ekonomi
		Mismatch antara kualifikasi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar
		Rendahnya produktivitas sektor informal
		Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja hanya terpusat di wilayah tertentu, meninggalkan wilayah lain tertinggal
	Rendahnya tingkat pendidikan	Keterbatasan sekolah, ruang kelas, atau fasilitas pendukung di daerah-daerah terpencil
		Kualitas tenaga pengajar yang belum optimal
		Akses pendidikan yang terbatas akibat biaya
		Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan
	Minimnya akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan	Distribusi fasilitas layanan yang tidak merata
		Keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga profesional
		Akses penunjang seperti jalan dan transportasi menghambat masyarakat untuk mencapai fasilitas layanan dasar.
	Pertumbuhan ekonomi yang belum merata	Ketergantungan pada sektor perkebunan dan pertanian yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan tidak memiliki cukup diversifikasi untuk menciptakan pekerjaan di sektor lain.
		Usaha kecil dan menengah kesulitan mendapatkan pinjaman atau bantuan modal untuk mengembangkan usahanya
		Rendahnya nilai tambah produk lokal

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Produk-produk unggulan daerah kurang dikenal di pasar yang lebih luas.

Sumber : diolah,2025

2. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang belum optimal

Daya saing sumber daya manusia yang belum optimal mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan dan pelatihan kerja belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Rendahnya tingkat keterampilan dan kompetensi tenaga kerja menghambat produktivitas dan inovasi. Untuk meningkatkan daya saing, perlu ada fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan vokasional, dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan industri. Program-program pengembangan SDM harus dirancang untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan mampu bersaing di pasar global.

Tabel 2.84 Pohon Masalah Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kualitas pendidikan dan pelatihan kerja belum mampu memenuhi kebutuhan pasar	Kurikulum dan program pelatihan yang tidak relevan dengan tuntutan industri
		Keterbatasan fasilitas praktik dan laboratorium di lembaga pendidikan
		Rendahnya kolaborasi antara lembaga pendidikan dan sektor swasta
	Rendahnya tingkat keterampilan dan kompetensi tenaga kerja	Kurangnya program sertifikasi profesi yang diakui
		Kurangnya motivasi untuk meningkatkan kompetensi diri
		Keterbatasan akses terhadap pelatihan kerja berkelanjutan
	Tingkat literasi digital dan penguasaan teknologi yang rendah	Kurangnya infrastruktur pendukung seperti akses internet yang merata
		Kurangnya program sosialisasi dan pelatihan digital bagi masyarakat
		Persepsi masyarakat bahwa teknologi hanya relevan untuk sektor tertentu
	Lemahnya budaya inovasi dan kewirausahaan	Minimnya dukungan ekosistem kewirausahaan, termasuk pendampingan dan inkubator bisnis
		Kurangnya akses informasi dan jaringan pasar bagi wirausahawan pemula

Sumber : diolah,2025

3. Belum optimalnya kualitas dan pelayanan infrastruktur wilayah

Pelayanan infrastruktur wilayah yang belum optimal menyebabkan terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas dasar seperti kesehatan, transportasi, air bersih, dan sanitasi. Keterbatasan infrastruktur ini menghambat

mobilitas, kesehatan, dan produktivitas masyarakat. Upaya peningkatan infrastruktur harus mencakup perencanaan yang komprehensif dan berkelanjutan, serta alokasi sumber daya yang memadai. Infrastruktur yang baik akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 2.85 Pohon Masalah Kualitas dan Pelayanan Infrastruktur Wilayah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya kualitas dan pelayanan infrastruktur wilayah	Terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas dasar seperti kesehatan	Keterbatasan pembangunan fasilitas kesehatan hingga ke wilayah terpencil
		Distribusi tenaga kesehatan (dokter, perawat) yang tidak merata, berpusat di perkotaan
		Tingginya biaya transportasi untuk mencapai fasilitas kesehatan di lokasi yang jauh
	Terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas dasar seperti transportasi	Kondisi jalan yang rusak atau tidak memadai, terutama di daerah pedesaan dan terpencil
		Keterbatasan angkutan umum yang menjangkau seluruh wilayah
		Perencanaan tata ruang yang belum mendukung konektivitas antarwilayah secara optimal
	Terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas dasar seperti air bersih	Jaringan pipa air bersih yang belum menjangkau seluruh permukiman penduduk
		Keterbatasan sumber air bersih yang layak konsumsi.
		Masih tingginya penggunaan air dari sumber non-standar (misalnya sumur) yang berisiko terhadap kesehatan
	Terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas dasar seperti sanitasi	Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi yang layak.
		Keterbatasan infrastruktur pengelolaan limbah (misalnya septik tank komunal atau IPAL)
		Kurangnya regulasi dan penegakan hukum terkait pembuangan limbah rumah tangga

Sumber : diolah,2025

4. Belum optimalnya pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan

Belum optimalnya pelestarian lingkungan hidup menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, pencemaran, dan degradasi lingkungan menjadi masalah yang harus segera diatasi. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan penerapan kebijakan pelestarian yang tegas diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan juga menjadi kunci penting dalam menciptakan kesadaran dan tanggung jawab bersama.

Tabel 2.86 Pohon Masalah Pelestarian Lingkungan Hidup

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan	Pengawasan yang lemah terhadap kegiatan eksploitasi yang merusak lingkungan
		Keterbatasan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.
		Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya konservasi sumber daya alam
	Pencemaran, dan degradasi lingkungan	Kurangnya pengelolaan limbah padat dan cair yang efektif dari industri dan rumah tangga
		Kurangnya kesadaran masyarakat dan industri akan dampak pencemaran lingkungan
		Keterbatasan ruang terbuka hijau dan lahan konservasi akibat alih fungsi lahan
		Minimnya teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan
	Kurangnya penataan ruang yang berkelanjutan	Lemahnya penegakan hukum terkait tata ruang
		Kurangnya sinkronisasi rencana tata ruang dengan sektor lain
	Ancaman terhadap keanekaragaman hayati	Perusakan habitat akibat eksploitasi alam
		Kurangnya data dan inventarisasi keanekaragaman hayati
		Minimnya program konservasi flora dan fauna lokal

Sumber : diolah,2025

5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah dan desa

Belum optimalnya tata kelola birokrasi mengakibatkan pelayanan publik yang kurang efisien dan efektif. Masalah ini sering kali disebabkan oleh birokrasi yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, dan akuntabilitas. Reformasi birokrasi yang menyeluruh diperlukan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.

Tabel 2.87 Pohon Masalah Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah dan desa	birokrasi yang berbelit-belit	Sistem dan prosedur pelayanan yang tidak terstandarisasi
		Kurangnya digitalisasi proses birokrasi

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Keterbatasan kompetensi aparatur dalam menjalankan prosedur baru
	kurangnya transparansi, dan akuntabilitas	Minimnya publikasi informasi publik dan dokumen perencanaan
		Lemahnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal
		Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan
	Belum optimalnya pelayanan publik	Kurangnya standar pelayanan minimum (SPM) yang jelas
		Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung pelayanan
		Rendahnya kualitas SDM aparatur dalam memberikan pelayanan prima
	Lemahnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa	Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif
		Perbedaan prioritas pembangunan antara tingkat daerah dan desa

Sumber : diolah,2025

6. Belum optimalnya kemandirian dan diversifikasi pangan

Ancaman kerawanan pangan dan diversifikasi pangan merupakan salah satu permasalahan yang perlu diperhatikan. Terdapat beberapa faktor penyebab yang menjadikan permasalahan ini merupakan permaslahan yang krusial untuk kedepannya. Ketersediaan pangan yang tidak merata akibat aksesibilitas mayarakat yang sulit untuk menjangkau pasar merupakan salah satu penyebab terjadinya ancaman kerawanan pangan. Selain itu, faktor ekonomi dan kemiskinan yang masih cukup tinggi menyebabkan sulitnya akses masyarakat erhadap pangan yang cukup begizi. Lalu faktor penyebab yang lain adalah kurangnya edukasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya diversifikasi pangan untuk meningkatkan keseimbangana gizi bagi masyarakat Kabupaten Asahan.

Tabel 2.88 Pohon Masalah Kemandirian dan Diversifikasi Pangan

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya kemandirian dan diversifikasi pangan	Ketersediaan pangan yang tidak merata	Keterbatasan lahan pertanian produktif
		Kurangnya infrastruktur pascapanen dan distribusi
		Rantai pasok yang panjang dan tidak efisien
		Perubahan iklim dan serangan hama yang memengaruhi hasil panen
		Rendahnya harga jual komoditas pertanian

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Faktor ekonomi dan kemiskinan yang masih cukup tinggi	Keterbatasan akses modal dan kredit bagi petani
		Tingginya biaya sarana produksi pertanian (pupuk, benih)
	Rendahnya diversifikasi sumber pangan	Ketergantungan pada satu komoditas utama seperti beras
		Kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang pangan lokal non-beras
		Minimnya inovasi produk olahan dari pangan lokal

Sumber : diolah,2025

7. Belum optimalnya mitigasi terhadap bencana, gangguan ketentraman, ketertiban dan tingginya jumlah kriminalitas

Belum optimalnya mitigasi terhadap bencana dan tingginya angka kriminalitas menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Ketidaksiapan dalam menghadapi bencana alam dan meningkatnya kriminalitas menunjukkan kelemahan dalam sistem perlindungan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya penguatan sistem mitigasi bencana, peningkatan kesiapsiagaan, dan penegakan hukum yang lebih efektif. Program-program keamanan dan keselamatan harus diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan daerah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Tabel 2.89 Pohon Masalah Mitigasi Terhadap Bencana, Gangguan Ketentaraman, Ketertiban dan Tingginya Jumlah Kirminalitas

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya ketahanan bencana dan mitigasi risiko ketertiban umum	Tingginya risiko bencana alam	Penggundulan hutan dan degradasi DAS (Daerah Aliran Sungai)
		Pembangunan di wilayah rawan bencana tanpa analisis risiko yang memadai
	Kurangnya kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat	Minimnya program edukasi dan simulasi bencana.
		Keterbatasan akses informasi dan peringatan dini yang efektif
	Masih tingginya kriminalitas dan pelanggaran ketertiban umum	Keterbatasan jumlah dan kapasitas personel penegak hukum
		Kurangnya program pencegahan kejahatan berbasis komunitas
		Faktor sosial ekonomi yang mendorong tindakan kriminalitas
	Konflik sosial dan ketegangan antar kelompok	Kurangnya forum dialog dan mediasi antar kelompok masyarakat
		Keterbatasan pemahaman tentang pluralisme dan toleransi

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Penyebaran informasi yang tidak akurat (hoaks) yang memicu perpecahan

Sumber : diolah,2025

2.3.1.1 Isu Strategis Global

Pada tahun 2014, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperbarui konsep Millenium Development Goals (MDGs) dengan memperkenalkan agenda pembangunan global baru yang disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan-tujuan dalam SDGs merupakan peningkatan dari tujuan pembangunan MDGs. Melalui mandat SDGs, PBB berusaha untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas secara global, meningkatkan perekonomian dunia tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) beserta indikator-indikatornya untuk periode 2016-2030 mencakup:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.



Gambar 2.48 Tujuan SDG's

2.3.1.2 Isu Strategis Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dua dokumen perencanaan pembangunan yang saling terkait dan berfungsi sebagai panduan strategis dalam pembangunan nasional dan Daerah. RPJMN berfungsi sebagai peta jalan yang menetapkan arah, prioritas, dan kebijakan pembangunan nasional selama lima tahun, sementara RPJM Daerah merupakan implementasi dari RPJMN di tingkat daerah, disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan spesifik setiap daerah.

RPJMN 2025-2029 akan menjadi periode pertama dalam rangkaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang difokuskan pada tema penguatan fondasi transformasi. Tema penguatan fondasi transformasi dalam RPJMN 2025-2029 merupakan langkah awal yang krusial menuju transformasi yang lebih luas dan mendalam di berbagai aspek pembangunan nasional. Langkah ini bertujuan untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi perubahan struktural yang diperlukan untuk mencapai visi jangka panjang Indonesia Emas 2045.

Dalam mencapai visi jangka panjang Indonesia Emas 2045, diperlukan berbagai upaya transformasi yang dituangkan ke dalam lima pilar utama, yaitu Transformasi Sosial; Transformasi Ekonomi; Transformasi Tata Kelola; Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; serta Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi. Pada periode RPJMN 2025-2029 ini juga telah ditentukan arah kebijakan di setiap transformasi untuk memastikan fondasi pembangunan yang kuat dan terukur pada awal periode pembangunan jangka panjang, yang secara lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.90 Transformasi dan Arah Kebijakan RPJMN 2025-2029

No.	Transformasi	Arah Kebijakan
1	Transformasi Sosial	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2	Transformasi Ekonomi	Hilirissi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3	Transformasi Tata Kelola	Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integrasi partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan budaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5	Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Sumber: RPJMN 2025–2029, diolah tahun 2025.

Arah kebijakan yang disusun dalam RPJMN 2025-2029 bertujuan untuk mengatasi berbagai isu strategis yang dihadapi Indonesia melalui lima pilar transformasi utama. Dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi, reformasi tata kelola pemerintahan, penegakan supremasi hukum, serta ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, kebijakan ini dirancang untuk membangun fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Adapun isu-isu strategis yang menjadi pokok pembahasan pada setiap pilar transformasi pada RPJMN 2025-2029 secara lebih lanjut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.91 Arah Pembangunan dan Isu Strategis RPJMN 2025-2029

No.	Transformasi	Arah Pembangunan	Isu Strategis
1	Transformasi Sosial	Kesehatan Untuk Semua	1. Masalah gizi dan kesehatan anak 2. Tingginya kasus penyakit menular (TBC dan kusta) 3. Belum terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan yang sesuai standar 4. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan
		Pendidikan Berkualitas yang Merata	1. Akses dan kualitas pendidikan yang belum memadai 2. Tenaga pendidik terbatas dan tidak merata 3. Masih rendahnya kualifikasi pendidikan dan produktivitas angkatan kerja
		Perlindungan Sosial yang Adaptif	1. Akurasi program bantuan sosial yang rendah 2. Ancaman bencana dan dampak perubahan iklim 3. Kesempatan yang belum merata bagi kelompok rentan 4. Masih rendahnya Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 5. Belum optimalnya integrasi layanan dan sistem administrasi kependudukan 6. Belum optimalnya Program Jaminan Sosial
2	Tranformasi Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	1. Deindustrialisasi dini 2. Rendahnya produktivitas tenaga kerja 3. Kurangnya daya saing produk 4. Keterbatasan tenaga kerja terlatih dan berpendidikan tinggi 5. Ketidaksesuaian produksi dengan permintaan global 6. Kurangnya kemampuan inovasi 7. Tantangan menuju energi hijau 8. Degradeasi lingkungan dan hilangnya budaya lokal 9. Keterbatasan amenitas, aksesibilitas, dan atraksi pada sektor pariwisata 10. Pengelolaan destinasi dan kualitas layanan pariwisata seringkali tidak memprioritaskan kepuasan pengalaman wisatawan 11. Rendahnya pengeluaran wisatawan dan investasi pariwisata 12. Kurangnya keterampilan SDM pariwisata dan pemanfaatan ekonomi lokal 13. Belum optimalnya ekosistem kekayaan intelektual 14. Terbatasnya ketersediaan data ekonomi kreatif 15. Belum optimalnya kelembagaan ekonomi kreatif 16. Rendahnya daya saing SDM ekonomi kreatif

No.	Transformasi	Arah Pembangunan	Isu Strategis
			17. Belum optimalnya rantai pasok ekonomi kreatif, terutama di Daerah 18. Rendahnya keterkaitan UMKM pada rantai nilai produksi serta minimnya penggunaan teknologi dan inovasi usaha 19. Rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia dibanding negara-negara di kawasan ASEAN 20. Rendahnya kinerja dan daya saing BUMN 21. Belum optimalnya peran BUMN sebagai agen pembangunan
		Penerapan Ekonomi Hijau	1. Rendahnya produktivitas ekonomi di sektor perairan 2. Biaya lingkungan perairan yang belum terkuantifikasi dan kemiskinan di masyarakat pesisir 3. Tuntutan pembangunan berkelanjutan 4. Ketergantungan terhadap energi fosil 5. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang tinggi 6. Potensi energi terbarukan yang besar 7. Kualitas infrastruktur ketenagalistrikan yang belum memadai 8. Belum optimalnya tata kelola ketenagalistrikan, termasuk kebijakan tarif dan harga 9. Keterbatasan dukungan pendanaan dan rantai nilai domestik untuk transisi energi 10. Ketergantungan pada produksi impor energi 11. Keterbatasan untuk adopsi dan adaptasi teknologi 12. Pemanfaatan limbah yang belum optimal 13. Keterbatasan pengolahan limbah elektronik 14. Ketergantungan pada bahan baku kritis 15. Keterbatasan pemanfaatan limbah untuk bahan bakar dan industri 16. Kurangnya kesadaran industri pariwisata akan penerapan ekonomi sirkular dan prinsip berkelanjutan dalam operasional usahanya 17. Keterbatasan pemahaman dan informasi mengenai pekerjaan hijau 18. Belum memadainya sistem pendidikan dan pelatihan vokasi dalam mempersiapkan tenaga kerja hijau 19. Kurangnya integritas kebijakan dan keterlibatan berbagai pihak terkait pekerjaan hijau 20. Kontribusi sektor kehutanan yang rendah terhadap pdb nasional 21. Rendahnya produktivitas dan perkembangan bioekonomi 22. Belum optimalnya tata batas kawasan hutan dan perhutanan sosial 23. Proses transaksi izin dan persetujuan bisnis yang belum efektif 24. Keterlibatan para pihak/multisektor yang belum optimal
		Transformasi Digital	1. Belum optimalnya kontribusi ekonomi perkotaan terhadap nasional 2. Digitalisasi sektor strategis 3. Peningkatan aspek pendukung dan akselerator transformasi digital

No.	Transformasi	Arah Pembangunan	Isu Strategis
		Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global	1. Keterkaitan perekonomian secara domestik masih terbatas 2. Belum optimalnya perdagangan antar wilayah dan ekspor serta partisipasi dalam rantai nilai global 3. Belum optimalnya penguatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global 4. Daya dukung tercapainya integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global perlu ditingkatkan
		Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	1. Masih terbatasnya keterkaitan perekonomian secara domestik 2. Pemenuhan Layanan Perkotaan yang belum memadai dan inklusif 3. Tata kelola yang belum terpadu, inovatif, dan kolaboratif 4. Masalah sosial-ekonomi masyarakat perkotaan 5. Pola pembangunan perkotaan yang menyerak 6. Degradasi lingkungan perkotaan dan rendahnya ketangguhan bencana
3	Transformasi Tata Kelola	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif	1. Belum tercapainya integrasi partai politik 2. Belum terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan kompetitif 3. Belum optimalnya reformasi regulasi dan peningkatan partisipasi publik 4. Belum adanya sistem penilaian K/L/D terintegrasi yang berbasis pada penilaian kinerja, anggaran, dan integritas 5. Belum meratanya akses pelayanan publik bagi masyarakat 6. Belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D 7. Belum terintegrasinya proses bisnis perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan, dan evaluasi
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	1. Praktik penegakan hukum yang belum terpadu, efisien, dan berlandaskan HAM 2. Rendahnya kepatutan hukum masyarakat sebagai akibat dari minimnya literasi dan pemberdayaan 3. Keterbatasan akses terhadap keadilan 4. Kelembagaan penegak hukum yang belum profesional 5. Belum optimalnya keamanan dan stabilitas negara 6. Pelanggaran batas wilayah dan kejahatan transnasional 7. Disrupsi teknologi dan keamanan siber 8. Demokrasi yang masih prosedural
		Stabilitas Ekonomi Makro	1. Krisis ekonomi dan keuangan global 2. Tensi geopolitik dan geoekonomi 3. Perubahan lingkungan dan sosial 4. Tingkat penerimaan dan pengeluaran fiskal yang tidak seimbang 5. Imbal hasil obligasi yang tinggi
		Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	1. Ketidakpastian dalam kebijakan luar negeri 2. Disrupsi rantai pasok global dan tren decoupling ekonomi 3. Belum terselesaikannya permasalahan perbatasan dan diplomasi wilayah

No.	Transformasi	Arah Pembangunan	Isu Strategis
			4. Belum idealnya postur dan sinergi pelaksanaan diplomasi Indonesia 5. Peningkatan kompleksitas dan ancaman dalam konflik global
5	Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	1. Nilai agama belum optimal diejawantahkan menjadi kerja-kerja pembangunan yang membawa kebaikan bersama 2. Wawasan dan identitas nasional sebagai bangsa majemuk tidak serta merta melahirkan kehidupan beragama dan berbudaya yang inklusif 3. Beragama belum disertai dengan kemampuan literasi keagamaan yang inklusif, moderat, dan berorientasi kemaslahatan 4. Karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global 5. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 6. Kearifan lokal belum dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi masyarakat
		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	1. Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda 2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia belum optimal 3. Ketimpangan gender yang masih tinggi 4. Kesulitan mewujudkan pembangunan yang inklusif dan kesetaraan gender
		Lingkungan Hidup Berkualitas	1. Penurunan kualitas lingkungan hidup 2. Peningkatan luasan lahan terkontaminasi limbah B3 3. Terbatasnya daya tampung sampah 4. Krisis keanekaragaman hayati dan ancaman kepunahan spesies
		Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	1. Akses dan kualitas energi yang tidak merata 2. Rendahnya pangsa energi terbarukan dalam bauran energi nasional 3. Kurangnya efisiensi pengusahaan dan pemanfaatan energi 4. Belum optimalnya eksplorasi energi 5. Kurangnya efisiensi dalam institusi pengelolaan energi 6. Ketersediaan air bersih yang terbatas 7. Penurunan kualitas air 8. Pengelolaan sumber daya air yang tidak efisien 9. Kekurangan infrastruktur penyimpanan air 10. Ketersediaan pangan yang tidak memadai 11. Rendahnya kualitas dan keamanan pangan 12. Rendahnya keterjangkauan dan kualitas konsumsi pangan 13. Tingginya fluktuasi harga pangan

No.	Transformasi	Arah Pembangunan	Isu Strategis
			14. Rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan sebagai penyedia utama komoditas pangan
		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	1. Belum optimalnya upaya pencegahan, kesiapsiahaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu 2. Belum optimalnya tata kelola penanganan darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana 3. Kurangnya infrastruktur berketahanan bencana dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana 4. Belum terintegrasinya sistem penataan ruang dan pengembangan informasi geospasial berbasis risiko bencana 5. Tantangan dalam adaptasi terhadap perubahan iklim 6. Kurangnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan 7. Ketergantungan pada bahan bakar fosil

Sumber : diolah, 2025

2.3.1.3 Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara

Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Merata dan Berkeadilan

Pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara masih menghadapi banyak tantangan. Persoalan yang perlu diatasi meliputi luasnya permukiman kumuh, rendahnya akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak, serta kondisi infrastruktur SDA yang masih buruk. Penanganan banjir juga menjadi isu penting. Urban sprawl atau perkembangan kota yang tidak terstruktur serta tingginya risiko bencana di provinsi ini memerlukan perhatian khusus. Layanan ketenagalistrikan masih kekurangan pasokan daya dan tidak efisien, terutama di daerah perbatasan dan pulau terluar. Jangkauan jaringan seluler belum dimanfaatkan optimal untuk kegiatan produktif.

Pembangunan Antar Daerah serta Desa-Kota

Keterkaitan antara daerah dan desa-kota di Sumatera Utara masih belum optimal, sehingga tidak dapat mendukung rantai pasok yang efektif. Pembangunan wilayah Metropolitan Medan masih menghadapi masalah permukiman kumuh, kualitas lingkungan hidup yang menurun, dan infrastruktur transportasi massal yang belum memadai. Urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang terpusat menyebabkan migrasi manusia ke wilayah dengan ekonomi yang lebih baik.

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan

Pengelolaan SDA berkelanjutan belum sepenuhnya mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Tantangan lain meliputi adaptasi perubahan iklim, pengawasan deforestasi, kebakaran hutan, dan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar. Akses dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA, termasuk kelompok marginal, masih perlu ditingkatkan.

Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Transisi demografi menimbulkan tantangan dalam pembangunan kesehatan, seperti meningkatnya penyakit menular dan tidak menular, serta masalah kesehatan penduduk lanjut usia dan kesehatan jiwa. Kualitas pendidikan yang rendah akibat kurangnya sarana-prasarana, distribusi guru yang tidak merata, dan rendahnya kualifikasi pendidikan mempengaruhi keterserapan tenaga kerja. Pemahaman dan kepesertaan dalam jaminan sosial juga masih rendah.

Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur

Konektivitas dan sistem logistik yang kurang memadai menyebabkan mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas ke lokasi pengolahan dan pemasaran. Peningkatan fasilitas perhubungan darat, laut, dan udara perlu

diupayakan untuk mengurangi biaya logistik dan mendukung kelancaran arus barang, jasa, dan informasi.

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

Pelayanan publik di Sumatera Utara masih perlu ditingkatkan melalui reformasi birokrasi dan peningkatan SDM profesional dengan memanfaatkan teknologi informasi. Optimalisasi infrastruktur TIK, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, serta manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2.3.1.4 Isu Strategis Kabupaten

Berdasarkan hasil analisa terhadap dokumen KLHS RPJM Daerah, terdapat 5 (lima) isu strategis Kabupaten Asahan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas hidup manusia, keluarga dan masyarakat inklusif, lebih maju dan merata;
2. Pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi/inklusif dan berkelanjutan dimotori oleh sektor perkebunan;
3. Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup (lahan hutan dan pantai) yang aman, bermanfaat bagi semua pihak secara lestari;
4. Kesiapan penanganan mitigasi dan adaptasi bencana alam dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
5. Terbatasnya kapasitas dan tata kelola kinerja pemerintah Daerah dan pelayanan publik, masyarakat partisipatif.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis utama Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut:

1. Percepatan Penurunan Kemiskinan

Data persentase dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Asahan menunjukkan tren penurunan yang positif pasca lonjakan signifikan pada tahun 2021 akibat dampak pandemi. Sejak tahun 2022 hingga 2024, Kabupaten Asahan berhasil menekan angka kemiskinan dari 9,35% menjadi 8,12%, merefleksikan efektivitas program pemulihan ekonomi dan bantuan sosial. Meskipun demikian, angka ini masih mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat Kabupaten Asahan masih hidup di bawah garis kemiskinan, serta tantangan untuk mencapai target nasional percepatan penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen masih menjadi prioritas. Oleh karena itu, percepatan penurunan kemiskinan tetap menjadi isu strategis yang membutuhkan intervensi terarah dan komprehensif dari pemerintah daerah.

Ke depan, strategi percepatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Asahan harus berfokus pada pendekatan multidimensional yang menyasar akar permasalahan kemiskinan. Hal ini mencakup penguatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja, peningkatan inklusi keuangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penyediaan infrastruktur dasar yang memadai seperti air bersih, sanitasi, dan listrik yang terjangkau. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat juga krusial untuk memastikan program-program ini berjalan efektif dan berkelanjutan, sehingga mampu mendorong lebih banyak keluarga keluar dari garis kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Asahan..

2. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM

Terdapat berapa isu mengenai sumber daya manusia yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius. Salah satu permasalahan utama adalah kualitas pembangunan manusia, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan gender. Hal ini berakibat pada kualitas SDM sebagai modal sosial utama daerah yang belum

optimal. Permasalahan kualitas SDM ini dapat menghambat proses pembangunan daerah yang baik. Oleh karena itu, perlu diprioritaskan sebagai isu strategis untuk dicegah dan ditangani guna mewujudkan kualitas SDM yang lebih baik.

Di sisi lain, terdapat pemenuhan gizi yang masih belum optimal pada masyarakat sehingga menjadikan akar masalah pada isu strategis ini. Masih adanya kasus stunting yang disebabkan karena masih rendanya masyarakat terhadap keragaman pangan dan masih kurangnya terhadap keamanan pangan di Kabupaten Asahan. Kondisi tersebut tentu menjadi perhatian khusus bagi kelangsungan hidup masyarakat di Kabupaten Asahan.

3. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur

Infrastruktur Daerah yang memadai merupakan elemen penting untuk pembangunan Daerah yang berkelanjutan. Di Kabupaten Asahan, terdapat beberapa masalah utama yang menjadi fokus pembangunan, seperti komunikasi dan telekomunikasi yang belum merat untuk meningkatkan literasi digital, penyediaan website yang memberikan informasi terkini dan aman dapat membantu meningkatkan minat baca masyarakat.

Infrastruktur jalan di Asahan juga perlu ditingkatkan, terutama jalan lokal di pedesaan yang mengalami kerusakan berat. Ketidakmerataan pembangunan disebabkan oleh kurangnya konektivitas antar wilayah. Selain itu, kesadaran berlalu lintas yang rendah juga menjadi masalah, ditandai dengan peningkatan kecelakaan lalu lintas setiap tahun.

4. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan masih menghadapi kendala struktural, seperti rendahnya daya saing sektor produktif, terbatasnya infrastruktur penunjang, dan belum optimalnya pemanfaatan potensi kelautan serta perikanan. Kontribusi sektor-sektor unggulan terhadap PDRB masih terbatas, antara lain disebabkan oleh lemahnya hilirisasi industri, belum terbangunnya sistem logistik dan distribusi, serta rendahnya nilai tambah komoditas seperti kelapa sawit, karet, kakao, dan kelapa.

Sementara itu, ketimpangan ekonomi antarkawasan dan antarsektor masih menjadi tantangan yang berimplikasi pada kesenjangan pendapatan dan keterbatasan akses terhadap kesempatan ekonomi. Meskipun rasio gini menunjukkan tren penurunan, agenda pemerataan ekonomi tetap relevan untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah perlu difokuskan pada penguatan sektor unggulan berbasis agroindustri, pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi, serta pengembangan infrastruktur konektivitas ekonomi dan sistem logistik yang mendukung perluasan akses pasar domestik dan ekspor.

5. Pelestarian Lingkungan Hidup

Pelestarian lingkungan hidup merupakan isu strategis yang bersifat lintas sektor dan jangka panjang karena berimplikasi langsung terhadap daya dukung ekosistem, kualitas hidup masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan daerah. Kabupaten Asahan menghadapi tantangan ekologis yang kompleks, di antaranya deforestasi, pencemaran air dan tanah, penambangan tanpa izin, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, serta pengelolaan persampahan yang belum memadai. Kondisi ini mengakibatkan degradasi lingkungan yang signifikan dan menurunkan kapasitas wilayah dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan ekologis.

Penurunan kualitas air sungai dan danau akibat limbah domestik dan industri, kerusakan hutan yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, serta

bencana banjir yang terjadi secara musiman menjadi indikator melemahnya sistem penyangga lingkungan. Di sisi lain, meningkatnya volume sampah, khususnya di kawasan perkotaan, belum diimbangi dengan sistem pengelolaan yang efisien, baik dalam aspek pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, maupun pemrosesan akhir. Persoalan-persoalan ini mencerminkan lemahnya tata kelola lingkungan dan rendahnya efektivitas pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan sumber daya alam.

Kondisi ekologis yang memburuk memberi dampak terhadap produktivitas sektor pertanian, kesehatan masyarakat, ketahanan wilayah terhadap bencana, hingga menurunnya daya saing daerah, khususnya dalam menarik investasi dan mengembangkan pariwisata berbasis alam. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang menempatkan pelestarian lingkungan sebagai arus utama (mainstream) dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Asahan perlu mengarahkan strategi pengelolaan lingkungan melalui penguatan instrumen tata ruang berwawasan lingkungan, peningkatan kapasitas kelembagaan pengawasan, penegakan hukum lingkungan yang konsisten, serta kolaborasi multipihak dalam konservasi sumber daya alam. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan harus didukung oleh pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, peningkatan kesadaran publik, dan integrasi adaptasi perubahan iklim dalam kebijakan lintas sektor. Dengan demikian, pelestarian lingkungan dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi pembangunan daerah yang inklusif, tangguh, dan berketahanan iklim.

6. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi

Bidang tata kelola pemerintahan Daerah adalah salah satu aspek penting untuk mendukung pembangunan yang efisien dan berkelanjutan. Berdasarkan analisis masalah yang telah diuraikan, ada beberapa isu utama yang perlu diprioritaskan penanganannya. Beberapa di antaranya adalah belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang disebabkan oleh keterbatasan sarana infrastruktur pengelolaan pemerintahan. Keterbatasan ini menghambat integrasi sistem informasi sehingga akses masyarakat terhadap informasi terbaru dan faktual belum terpenuhi. Masalah ini memengaruhi kinerja pemerintah Daerah dan hubungannya dengan masyarakat, sehingga perlu menjadi prioritas penanganan untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, serta inovasi dan pengembangan berkelanjutan.

Selain masalah akuntabilitas kinerja pemerintah dan infrastruktur manajemen sistem informasi yang belum optimal, perwujudan kemandirian desa yang belum signifikan juga menjadi isu strategis. Masalah ini mencakup mekanisme perencanaan pembangunan yang belum kolaboratif dan kurangnya kapasitas sumber daya pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik. Kekhawatiran ini dapat memengaruhi kualitas keputusan yang kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perencanaan yang holistik diharapkan dapat menjadikan perangkat daerah Kabupaten Asahan sebagai penyelenggara pemerintahan yang didukung publik, sehingga meningkatkan keberhasilan implementasi program dan kegiatan. Selain itu, kapasitas dan keahlian sumber daya manusia perlu diselaraskan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa untuk mewujudkan tata kelola yang inovatif dan adaptif.

7. Stabilitas Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang memegang peran fundamental dalam menjamin kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asahan. Meskipun ketersediaan pangan relatif tercukupi, dinamika pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan fluktuasi sosial ekonomi menjadi faktor yang menuntut penguatan sistem pangan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga dari aspek keterjangkauan, distribusi, dan pemanfaatan.

Stabilitas ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh kinerja infrastruktur pendukung seperti irigasi, pengelolaan lahan, logistik distribusi, dan efisiensi tata kelola. Sebagian besar lahan pertanian di Asahan masih bergantung pada curah hujan, sehingga revitalisasi sistem irigasi teknis, setengah teknis, dan sederhana menjadi prioritas untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga kesinambungan produksi pangan.

Selain itu, diversifikasi pangan lokal perlu diperkuat guna mengurangi ketergantungan pada komoditas utama dan meningkatkan nilai gizi konsumsi masyarakat. Hal ini menuntut integrasi kebijakan dalam penyediaan sarana produksi, pengelolaan risiko pertanian akibat iklim ekstrem, dan peningkatan kapasitas petani terhadap praktik pertanian berkelanjutan.

Penguatan sistem pangan daerah harus dibangun melalui sinergi lintas sektor, peningkatan efektivitas kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi pertanian modern. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Asahan dapat mewujudkan sistem ketahanan pangan yang tangguh, adaptif terhadap perubahan, dan inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

8. Mitigasi Bencana dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Saat ini perubahan iklim merupakan salah satu isu yang dihadapi dunia. Adanya perubahan iklim yang memprihatinkan tentu akan memberikan dampak berupa bencana. Kabupaten Asahan memiliki potensi terhadap beberapa bencana alam seperti banjir dan kebakaran. Hal tersebut tentu menjadikan pemerintah daerah Kabupaten Asahan untuk memberikan pendampingan terhadap masyarakat mengenai mitigasi bencana yang kemungkinan akan terjadi di Kabupaten Asahan.

Ketenteraman dan ketertiban umum dipengaruhi oleh tingkat kriminalitas. Semakin tinggi tingkat kriminalitas, semakin tidak kondusif suatu Daerah. Tindak kriminalitas dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti ekonomi, kemiskinan, krisis moneter, kurangnya lapangan kerja, dan penyalahgunaan narkoba.

BAB 3 VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Visi RPJM Daerah Tahun 2025-2029

Visi pembangunan daerah dalam RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2024. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Kabupaten Asahan, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2025-2029 adalah:

"KABUPATEN ASAHAN YANG SEJAHTERA, RELIGIUS, MAJU, DAN BERKELANJUTAN"

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Asahan yaitu:

SEJAHTERA

Meningkatnya pendapatan masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang layak berupa pangan, sandang, papan.

RELIGIUS

Terbentuknya jati diri masyarakat Asahan yang beriman dan bertaqwa, mengetahui dan memahami ajaran agama yang dianutnya dan tercermin dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari serta toleran terhadap agama lain.

MAJU

Asahan menjadi Kabupaten yang bergerak maju memiliki Sumber Daya Manusia Berkualitas, Cerdas, Berdaya Saing, Berprestasi dan Modern dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

BERKELANJUTAN

Asahan sebagai bagian NKRI berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkesinambungan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang dengan memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pembangunan masa depan.

3.1.2 Misi RPJM Daerah Tahun 2025-2029

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Asahan yang cerdas, sehat, dan berkarakter.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing perekonomian daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pemerataan kualitas infrastruktur, pengembangan komoditas unggulan, pertanian serta pengelolaan ekonomi biru dan ketahanan pangan.

3. Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan memelihara kerukunan dalam kehidupan beragama
4. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, berintegritas dan akuntabel.
5. Menyelenggarakan pembangunan yang berlandaskan prinsip keseimbangan, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan

Keterkaitan Rumusan Misi terhadap ketercapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Keterkaitan Rumusan Misi terhadap Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan 2025-2029

Unsur Visi	Misi
Sejahtera	Misi 1:
	Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Asahan yang cerdas, sehat, dan berkarakter
	Misi 2:
	Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing perekonomian daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pemerataan kualitas infrastruktur, pengembangan komoditas unggulan, pertanian serta pengelolaan ekonomi biru dan ketahanan pangan
Religius	Misi 3:
	Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan memelihara kerukunan dalam kehidupan beragama
Maju	Misi 4:
	Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, berintegritas dan akuntabel
Berkelanjutan	Misi 5:
	Menyelenggarakan pembangunan yang berlandaskan prinsip keseimbangan, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan

Sumber: diolah, 2025

Misi dalam RPJM Daerah Kabupaten Asahan 2025-2029 ini jika disandingkan dengan kebijakan transformasi, landasan transformasi, dan implementasi transformasi jangka panjang sebagai penjabaran Visi RPJPD Kabupaten Asahan 2025-2045: “Kabupaten Asahan yang Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan”, yang diterjemahkan dalam Misi Jangka Panjang Daerah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2 Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Asahan 2025-2045 dengan Misi RPJM DAERAH

No.	MISI RPJPD	MISI RPJM DAERAH
1	Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Masyarakat Asahan yang Unggul dan Berdaya Saing	Misi 1:
		Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Asahan yang cerdas, sehat, dan berkarakter
2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Menuju Asahan yang Mandiri, Produktif dan Inovatif melalui Pemanfaatan IPTEK	Misi 2:
		Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing perekonomian Daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pemerataan kualitas infrastruktur, pengembangan komoditas unggulan, pertanian serta pengelolaan ekonomi biru dan ketahanan pangan
		Misi 4:
		Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, berintegritas dan akuntabel
3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Menuju Asahan yang Berintegritas dan Adaptif serta Berorientasi kepada Publik	Misi 4:
		Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, berintegritas dan akuntabel
4		Misi 3:

No.	MISI RPJPD	MISI RPJM DAERAH
	Mewujudkan Masyarakat Asahan yang Demokratis dengan Lingkungan yang Aman dan Ekonomi yang Stabil	Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan memelihara kerukunan dalam kehidupan beragama
5	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Ekologis, dan Berketahan Sosial Budaya	Misi 3:
		Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan memelihara kerukunan dalam kehidupan beragama
6	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi	Misi 2:
		Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing perekonomian Daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pemerataan kualitas infrastruktur, pengembangan komoditas unggulan, pertanian serta pengelolaan ekonomi biru dan ketahanan pangan
7	Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Tangguh dan Ramah Lingkungan	Misi 5:
		Menyelenggarakan pembangunan yang berlandaskan prinsip keseimbangan, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan
8	Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Terkoordinasi	Misi 4:
		Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, berintegritas dan akuntabel.

sumber: diolah, 2025

Dilihat dari tabel keselaran antara Misi Jangka Panjang dengan Misi RPJM Daerah Kabupaten Asahan 2025-2029, telah menunjukan dasar pembangunan lima tahunan yang selaras.

Penyusunan Visi Misi RPJM Daerah juga perlu disandingkan dengan kebijakan misi pembangunan pada RPJMN 2025-2029 dan RPJM Daerah Provinsi Sumatera Utara 2025-2029, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Keselarasan Misi RPJM Daerah Kabupaten Asahan 2025-2029 dengan Misi RPJM Daerah Provinsi Sumatera Utara 2025-2029 dan Misi RPJMN 2025-2029

No.	RPJM Daerah Kabupaten Asahan 2025-2029	RPJM DAERAH Provinsi Sumatera Utara 2025-2029	RPJMN 2025-2029 (ASTA CITA)
1	Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Asahan yang cerdas, sehat, dan berkarakter	Misi 1:	Asta Cita 4:
		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
2	Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing perekonomian daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pemerataan kualitas infrastruktur, pengembangan komoditas unggulan, pertanian serta pengelolaan ekonomi biru dan ketahanan pangan	Misi 2: Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah	Asta Cita 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			Asta Cita 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
			Asta Cita 5:

No.	RPJM Daerah Kabupaten Asahan 2025-2029	RPJM DAERAH Provinsi Sumatera Utara 2025-2029	RPJMN 2025-2029 (ASTA CITA)
			Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
		Misi 4:	Asta Cita 3:
		Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
3	Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan memelihara kerukunan dalam kehidupan beragama	Misi 5:	Asta Cita 1:
		Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
			Asta Cita 8:
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi, antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
4	Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, berintegritas dan akuntabel	Misi 3:	Asta Cita 6:
		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
			Asta Cita 7:
			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
5	Menyelenggarakan pembangunan yang berlandaskan prinsip keseimbangan, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan	Misi 5:	Asta Cita 8:
		Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi, antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Sumber : diolah, 2025

3.1.3 Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan Daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis Daerah dan permasalahan pembangunan Daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Daerah diukur melalui realisasi pencapaian target dari indikator Tujuan dan indikator Sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran, sebagai berikut:

3.1.2.1 Tujuan dan Sasaran dari Misi Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Asahan yang cerdas, sehat dan berkarakter

Tujuan : Meningkatnya derajat pembangunan masyarakat, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia.

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah:

a. Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah, dengan indikator:
   1. Harapan Lama Sekolah
   2. Rata-Rata Lama Sekolah
b. Meningkatnya Penguatan Budaya, Bahasa, Literasi, Pendidikan Karakter Pemuda, dan Prestasi Olahraga, dengan indikator:
   1. Indeks Pembangunan Kebudayaan
   2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
   3. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
   4. Indeks Pembangunan Olahraga (Sport Development Index)
c. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH).
d. Meningkatnya kualitas keluarga dan Pembangunan Perempuan serta Pemenuhan Hak Anak, dengan indikator:
   1. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPKB)
   2. Indeks Pembangunan Gender
   3. Rasio Kekerasan Anak

3.1.2.2 Tujuan dan Sasaran dari Misi Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Perekonomian Daerah melalui Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif, Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Pengembangan Komoditas Unggulan, Pertanian serta Pengelolaan Ekonomi Biru dan Ketahanan Pangan.

Tujuan : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang merata dan yang Berkualitas, dengan indikator:
   1. Laju Pertumbuhan Ekonomi
   2. Gini Rasio

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah:

a. Meningkatnya daya dukung ekosistem berusaha, pengelolaan sumberdaya dan hilirisasi sektor ekonomi Daerah, dengan indikator: Kontribusi PDRB Kabupaten
b. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dengan indikator :
   1. Tingkat Kemiskinan (%) ;
   2. Tingkat Pengangguran Terbuka
c. Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Pangan Daerah menuju swasembada pangan, dengan indikator:
   1. Indeks Ketahanan Pangan;
   2. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB
d. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas, dengan indikator: Indeks Infrastruktur Daerah

3.1.2.3 Tujuan dan Sasaran dari Misi Meningkatkan Pemahaman, Pengamalan dan Memelihara Kerukunan dalam Kehidupan Beragama.

Tujuan : Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis, dengan indikator Indeks Harmoni Indonesia

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah Meningkatnya Penerapan Nilai Agama, Demokratisasi, toleransi, dan Kegotongroyongan di Masyarakat, dengan indikator:

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
2. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas

3.1.2.4 Tujuan dan Sasaran dari Misi Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efektif, Inovatif, Berintegritas dan Akuntabel

Tujuan : Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Pelayanan publik yang profesional, efektif, inovatif, terintegritas dan akuntabel, dengan indikator:

1. Indeks Reformasi Birokrasi
2. Indeks Daya Saing Daerah

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah:

a. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa, dengan indikator:
    1. Indeks Pelayanan Publik
    2. Indeks Kepuasan Masyarakat
    3. Indeks Akses Keuangan Daerah
    4. Indeks Pencegahan Korupsi
    5. Indeks Desa

b. Meningkatnya kualitas dan inovasi penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, data informasi, dan teknologi, dengan indikator:
    1. Indeks Inovasi Daerah
    2. Indeks Pemerintahan Digital

3.1.2.5 Tujuan dan Sasaran dari Misi Menyelenggarakan Pembangunan yang Berlandaskan Prinsip Keseimbangan, Keberlanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Tujuan : Terwujudnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana, dengan indikator:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. Indeks Risiko Bencana

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah:

Meningkatnya pengelolaan kualitas air, udara dan lahan, dengan indikator:

1. Penurunan Emisi GRK (GgCO2-e)
2. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana, dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah.

Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Target Tahun						Akhir Perencanaan (2030)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Asahan yang cerdas, sehat, dan berkarakter.	Meningkatnya derajat pembangunan masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia	74,17	74,17-75,5	74,83-76,7	76,55-77,9	78,28-79,1	80-80,3	81,72-82,5	81,72-82,5
		Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Harapan Lama Sekolah	12,64	12,72	12,81	12,9	12,98	13,07	13,16	13,16
			Rata-Rata Lama Sekolah	8,85	8,91	8,97	9,03	9,09	9,15	9,21	9,21
		Meningkatnya Penguatan Budaya, Bahasa, Literasi, Pendidikan Karakter Pemuda, dan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Kebudayaan	47,15	50,02	52,89	55,76	58,63	61,5	61,5	61,5
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	46,77	51	54	58	63	68	73	73
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	0	35	37	39	41	43	45	45
			Indeks Pembangunan Olahraga (Sport Development Index)	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,3	0,3

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Target Tahun						Akhir Perencanaan (2030)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,65	73,90	74,10	74,30	74,50	74,70	74,90	74,90
		Meningkatnya kualitas keluarga dan Pembangunan Perempuan serta Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	66,5	75,2	80,7	84,1	86,3	87,7	88,1	88,1
			Indeks Pembangunan Gender	91,91%	91,91%	91,91%	91,92%	91,92	91,93	91,93%	91,93%
			Rasio Kekerasan Anak (per 10.000)	0,1760	0,1650	0,1625	0,1600	0,1550	0,1525	0,1500	0,1500
Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing perekonomian daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pemerataan kualitas infrastruktur, pengembangan komoditas unggulan, pertanian serta pengelolaan ekonomi biru dan ketahanan pangan.	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang merata dan yang Berkualitas		Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,68	5,2-5,6	5,6-6	6-6,4	6,4-6,8	6,8-7,2	7,2-7,6	7,2-7,6
			Gini Rasio	0,248	0,248-0,246	0,246-0,244	0,244-0,242	0,242-0,24	0,24-0,238	0,239-0,236	0,239-0,236
		Meningkatnya daya dukung ekosistem berusaha,	Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Target Tahun						Akhir Perencanaan (2030)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		pengelolaan sumberdaya dan hilirisasi sektor ekonomi daerah									
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	8,12	7,5-7	6,75-6,25	6,0-5,5	5,25-4,75	4,5-4	3,75-3,25	3,75-3,25
			Tingkat Pengganguran Terbuka (%)	5,94	5,9-5,69	5,8-5,56	5,71-5,43	5,61-5,29	5,51-5,16	5,41-5,03	5,41-5,03
		Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Pangan Daerah menuju swasembada pangan	Indeks Ketahanan Pangan	69,33	70	70,66	71,33	72	72,67	73,34	73,34
			Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	43,47%	44,27%	45,12%	46,05%	47,07%	47,90%	48,70%	48,70%
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Infrastruktur Daerah	0,68	0,69	0,7	0,71	0,72	0,73	0,74	0,74
Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan memelihara kerukunan dalam kehidupan beragama	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis		Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	N/A	N/A	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,7

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Target Tahun						Akhir Perencanaan (2030)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Meningkatnya Penerapan Nilai Agama, Demokratisasi, toleransi, dan Kegotongroyongan di Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78	78,3	78,5	78,6	78,9	79	79,1	79,1
			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	56,05	58,3	61,3	63,83	66	70,5	70,5	70,5
Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, berintegritas dan akuntabel.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Pelayanan publik yang profesional, efektif, inovatif, terintegritas dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	BB (77)	BB (78)	BB (79)	BB (80)	A (81)	A (82)	A (83)	A (83)
			Indeks Daya Saing Daerah	3,66	3,7	3,76	3,8	3,88	3,91	3,95	3,95
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa	Indeks Pelayanan Publik	3,17 (B-)	3,27 (B-)	3,47 (B-)	3,51 (B)	3,55 (B)	3,60 (B)	3,65 (B)	3,65 (B)
			Indeks Kepuasan Masyarakat	86,84 (B)	87,09 (B)	87,34 (B)	87,59 (B)	87,84 (B)	88,09 (B)	88,31 (A)	88,31 (A)
			Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	3,88	3,93	3.95	3,98	4	4,02	4,04	4,04
			Indeks Pencegahan Korupsi	92,54	93	94,5	95	95,5	96	96,5	96,5
			Indeks Desa	0,6807	0,6857	0,6907	0,6957	0,7007	0,7057	0,7057	0,7057

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Target Tahun						Akhir Perencanaan (2030)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Meningkatnya kualitas dan inovasi penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, data informasi, dan teknologi	Indeks Inovasi Daerah	45	48	53	58	63	68	70	70
			Indeks Pemerintahan Digital	2,86	2,88	2,9	2,94	2,97	3,01	3,05	3,05
Menyelenggarakan pembangunan yang berlandaskan prinsip keseimbangan, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,61	75,25	75,42	75,59	75,76	75,93	76,16	76,16
			Indeks Risiko Bencana	148,57	166,95	147,57	146,57	145,57	144,57	145	145
		Meningkatnya pengelolaan kualitas air, udara dan lahan	Penurunan Emisi GRK (CO2 Eq)	n.a	144.122,13	170.584,86	197.047,59	223.510,32	249.973,05	276.435,78	276.435,78
		Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,35	0,37	0,39	0,41	0,43	0,45	0,47	0,47

Sumber : diolah, 2025

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah Tahun 2025-2029

3.2.1 Strategi

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Rangkaian tahapan atau langkah-langkah tersebut berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. **Optimalisasi layanan pendidikan bagi masyarakat**

   Strategi ini menjadi bagian penting untuk meningkatkan derajat kesejahteraan pembangunan masyarakat melalui **Asahan Cerdas dan Berkarakter**. Menitikberatkan pada upaya-upaya untuk mencapai kualitas pembangunan manusia yang lebih baik.
   Kualitas pembangunan masusia khususnya di bidang pendidikan perlu didukung dengan peningkatan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah yang keberhasilannya dapat dilihat dari Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Skor Literasi/Numerasiskor.

   Implementasi optimalisasi layanan Pendidikan bagi masyarakat diarahkan pada penguatan fasilitas layanan dan sistem penyelenggaraan Pendidikan, pemberian beasiswa pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, dan pengembangan *Teacher Learning Center*, Pemberian insentif bagi guru honorer di SD Negeri, dan Fasilitasi Pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.

2. **Optimalisasi pengembangan karakter, budaya, literasi dan prestasi olahraga masyarakat**

   Strategi ini secara komprehensif juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan derajat kesejahteraan pembangunan masyarakat melalui **Asahan Cerdas dan Berkarakter**. Menitikberatkan pada upaya-upaya untuk mencapai kualitas pembangunan manusia yang lebih baik.

   Cakupan bidang Pendidikan diperluas sampai dengan menyentuh sisi pengembangan jati diri masyarakat Kabupaten Asahan dengan mengedepankan penguatan budaya, bahasa, literasi, pendidikan karakter pemuda, dan prestasi olahraga yang nantinya dapat dilihat dari melalui keberhasilan dalam pembangunan kebudayaan, tingkat literasi masyarakat, serta keberhasilan dalam pembangunan kepemudaan dan olahraga daerah.

   Implementasi optimalisasi pengembangan karakter, budaya, literasi dan prestasi olahraga masyarakat diarahkan pada penanaman nilai-nilai budaya dalam membentuk kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter, pengembangan minat baca masyarakat, peningkatan fasilitas dan pengembangan sarana prasara olahraga daerah seperti pembangunan kawasan sirkuit Kisaran dan lanjutan GOR.

3. **Pengembangan dan pemerataan layanan kesehatan serta penguatan kualitas kesehatan masyarakat**

Strategi ini menjadi aspek penting pembangunan manusia yang juga diarahkan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan pembangunan masyarakat di bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan **Asahan Sehat** yang menitikberatkan pada upaya-upaya untuk mencapai kualitas pembangunan manusia yang lebih baik di bidang kesehatan.

Dalam mencapai keberhasilan pembangunan manusia di bidang kesehatan dilakukan secara terpadu upaya pemenuhan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari peningkatan Usia Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Asahan.

Implementasi pengembangan dan pemerataan layanan kesehatan serta penguatan kualitas kesehatan masyarakat diarahkan pada penguatan penyelenggaraan fasilitas dan sistem layanan kesehatan yang merata, penguatan layanan dan pendampingan kesehatan ibu dan anak, percepatan penurunan stunting, fasilitasi pemberian makan bergizi gratis, pemberdayaan kader posyandu, percepatan eliminasi penyakit menular dan tidak menular, fasilitasi pelayanan kesehatan gratis, dan peningkatan fasilitas layanan kesehatan daerah berupa lanjutan rumah sakit modern Kabupaten Asahan, laboratorium kesehatan, dan faskes dasar lainnya.

4. **Penguatan pembangunan SDM sehat dan sejahtera berbasis keluarga dan gender**

Strategi ini menjadi satu bagian integral dari pembangunan manusia di bidang kesehatan yang juga berperan penting dalam rangka mewujudkan **Asahan Sehat**. Dimensi Asahan Sehat yang ingin dibangun lima tahun ke depan diperluas dengan juga mengikutsertakan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga dan pembangunan perempuan serta pemenuhan hak anak yang keberhasilannya dilihat dari pemberdayaan di tingkat keluarga (Indeks Pembangunan Keluarga), Indeks Pemberdayaan Gender, dan Rasio Kekerasan Perempuan dan Anak.

Implementasi penguatan pembangunan SDM sehat dan sejahtera berbasis keluarga dan gender diarahkan pada penguatan pengendalian penduduk melalui program nasional keluarga, Pengarus Utamaan Gender (PUG), peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

5. **Fasilitasi dan sinkronisasi investasi daerah dengan daya dukung potensi lokal, SDM masyarakat, dan proses hilirisasi.**

Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas dalam rangka mewujudkan **Asahan Ekonomi Bangkit**. Menitikberatkan pada upaya-upaya untuk mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang terus tumbuh dengan tingkat ketimpangan semakin kecil.

Pemerataan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat dicapai jika didukung dengan adanya ekosistem berusaha, pengelolaan sumberdaya dan hilirisasi sektor ekonomi daerah yang keberhasilannya dilihat dari adanya peningkatan investasi, rasio industri pengolahan, pertumbuhan sektor perdagangan, dan kontribusi penyediaan akomodasi makan minum dalam dalam PDRB, serta proporsi usaha mikro yang naik kelas.

Implementasi fasilitasi dan sinkronisasi investasi daerah dengan daya dukung potensi lokal dan SDM masyarakat daerah diarahkan pada pemetaan dan pengembangan potensi investasi daerah, pengembangan *agromarine industri* dan hilirisasi komoditas unggulan daerah untuk industri pengolah, pengembangan pasar tradisional dan modern, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah, pembangunan gerai UMKM, Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Pembentukan BUMD Aneka Usaha.

6. **Kolaborasi dan Sinergitas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui pemberdayaan**

Strategi ini merepresentasikan bagaimana kebijakan *pro poor* dari Pemerintah Kabupaten Asahan dapat disinergikan menjadi salah satu faktor

pendukung utama pembangunan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan **Asahan Ekonomi Bangkit**. Prioritas yang berkaitan dengan pemertaan ketimpangan antar penduduk di dalam pembangunan perekonomian daerah akan berdampak pada keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan kesenjangan kesejahteraan di masyarakat.

Program pengentasan kemiskinan nantinya tidaklah mungkin hanya dilaksanakan oleh pemerintah saja, namun skenario besar harus disiapkan dengan adanya kolaborasi lintas stakeholders seperti dengan pihak swasta, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang dapat secara terpadu mendorong percepatan penanganan kemiskinan dan tingkat pengganguran terbuka dalam sebuah pengarusutamaan. Oleh karena itu mengedepankan kolaborasi dan sinergitas untuk memberdayakan masyarakat menjadi sebuah keniscayaan yang harus diambil bagi Kabupaten Asahan lima tahun ke depan.

Implementasi kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui pemberdayaan diarahkan pada fasilitasi pemberian bansos, mendorong program CSR untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat miskin berbasis kelompok, percepatan Pengentasan Masalah Kesejahteraan Sosial, fasilitasi pembangunan balai latihan kerja, pelatihan dan pemberdayaan wirausaha muda.

7. Percepatan dan optimalisasi sistem pertanian terpadu mendukung ketahanan pangan

Strategi ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pangan dan pertanian dalam rangka mewujudkan **Asahan Swasembada Pangan dan Petani Makmur**. Pengelolaan sumberdaya pertanian dari hulu sampai hilir dengan ekosistem terintegrasi termasuk pengelolaan potensi ekonomi biru di sisi kelautan dan perikanan, menjadi strategi baru untuk semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah secara merata. Kabupaten Asahan memiliki potensi unggulan seperti sawit, karet, dan kelapa yang dapat sebagai lokomotif daya saing sektor pertanian. Potensi pertanian dan juga kelautan perikanan ke depannya perlu dikelola dengan ekosistem yang menghubungkan dengan sektor indudstri pengolah sehingga akan menghasilkan nilai tambah dan mendukung tercapainya swasembada pangan.

Pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertanian dalam arti luas menuju swasembada pangan ini keberhasilannya dapat dilihat dari sejauh apa ketahanan pangan dapat terbangun dari pengelolaan ekosistem potensi pertanian yang ada.

Implementasi percepatan dan optimalisasi sistem pertanian terpadu mendukung ketahanan pangan diarahkan pada pengembangan pertanian terintegrasi, intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, pengembangan ekosistem ekonomi biru (*agromarine*), pengembangan Sentra Kawasan Peternakan (Kambing,Domba, dan Sapi), dan penyediaan saprodi bagi petani dan nelayan.

8. Optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana daerah

Strategi ini merupakan salah satu prasyarat penting dalam mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah melalui **Asahan Infrastruktur Kuat**. Penyediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas tentunya menjadi katalisator bagi pergerakan perekonomian daerah di seluruh wilayah. Adanya aksesibilitas yang memadahi, pengembangan kawasan terpadud, dan sarana prasarana infrastruktur lainnya yang tersedia dan terjaga kualitasnya dengan baik, tentunya akan menjadi fokus pembangunan yang secara bertahap akan terus dilakukan di Kabupaten Asahan.

Pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui infrastruktur yang kuat tentunya dicapai jika masyarakat dapat mengakses semua infrastruktur publik yang dibangun dengan kualitas yang baik. Fokus pembangunan infratruktur daerah meliputi infrastruktur jalan, dan beberapa prioritas infrastruktur yang lain irigasi,

drainase, air minum, termasuk permalahan pertanahan, permukiman dan tata ruang.

Implementasi optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana daerah diarahkan pada peningkatan dan pemeliharaan kualitas jalan daerah, serta optimalisasi kualitas layanan infrastruktur daerah.

9. Penguatan harmonisasi masyarakat berbasis *local wisdom*

Strategi ini diarahkan untuk mendorong meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis dalam rangka mewujudkan **Asahan Religius.** Religius dalam hal ini tidak saja berkaitan dengan pemahaman dan pelaksanaan yang berkaitan dengan agama saja, namun mengandukung makna religius yang lebih luas mencakup bagaimana memelihara kerukunan serta menjaga kondusivitas antar masyarakat. Menitikberatkan pada upaya-upaya untuk mencapai kriteria Indeks Harmoni di Kabupaten Asahan.

Tingkat harmoni daerah dapat dicapai jika didukung dengan adanya penerapan nilai agama, demokratisasi, toleransi, dan kegotongroyongan di masyarakat yang dapat dilihat dari ukuran indeks kerukunan umat beragama.

Implementasi penguatan harmonisasi masyarakat berbasis *local wisdom* diarahkan pada pembinaan organisasi keagamaan, pendampingan kepada pelaku kamtibmas, peningkatan kompetensi guru agama, fasilitasi sarana prasarana peribadatan dan tempat ibadah, sertifikasi gratis rumah ibadah, dan peningkatan kegiatan keagamaan bagi siswa SD dan SMP (seperti pesantren kilat, retret doa, dan lain-lain).

10. Penguatan ekosistem pemerintahan daerah dan desa

Strategi ini diarahkan untuk percepatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang profesional, efektif, inovatif, terintegritas dan akuntabel dalam rangka mewujudkan ***Asahan Clean Governance***. Menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayan publik di Pemerintah Kabupaten Asahan termasuk sampai dengan pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan.

Reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang baik ini akan tercapai jika kualitas tata kelola pemerintahan daerah sampai dengan desa dan kelurahan terselenggara dengan baik dengan tingkat keberhasilannya dilihat dari Indeks Reformasi Birokrasi dan kesiapan desa mandiri yang ada di Kabupaten Asahan (Indeks Desa).

Implementasi penguatan ekosistem pemerintah daerah dan desa diarahkan pada pelaksanaan transparansi birokrasi, penguatan SDM, dan peningkatan Kemandirian Desa.

11. Kolaborasi pengembangan ekosistem pemerintahan digital berbasi riset dan teknologi

Strategi ini juga menjadi satu bagian penting dalam rangka percepatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan **Asahan Modern**. Menitikberatkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan secara bertahap Kabupaten Asahan menuju ekosistem masyarakat digital. Ekosistem masyarakat digitalitu sendiri merupakan tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaan.

Mewujudkan masyarakat digital perlu didukung oleh kualitas layanan teknologi yang baik serta inovasi pada penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, data informasi, dan teknologi yang dapat dilihat dari Indeks Inovasi Daerah, dan Indeks Pemerintahan Digital.

Implementasi kolaborasi pengembangan ekosistem pemerintahan digital berbasis riset dan teknologi diarahkan pada penguatan ekosistem riset dan inovasi, serta peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) selama lima tahun ke depan.

12. Penguatan gerakan pelestarian lingkungan berkelanjutan berbasis masyarakat

Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan **Asahan Nyaman dan Seimbang**. Menitikberatkan pada upaya-upaya untuk mencapai kualitas lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Asahan.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup sangat tergantung dengan bagaimana pengelolaan kualitas air, udara dan lahan yang ada di suatu wilayah. Dalam pelaksanaannya, seluruh stakeholders ke depannya perlu berkolaborasi dalam suatu gerakan untuk secara berkelanjutan menjaga dan meraih kualitas air, kualitas udara, dan kualitas lahan tetap baik.

Implementasi penguatan gerakan pelestarian lingkungan berkelanjutan berbasis masyarakat diarahkan pada pengembangan program kampung iklim serta pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau.

13. Pemberdayaan masyarakat tanggap dan tangguh bencana

Strategi ini secara bersama-sama juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan **Asahan Nyaman dan Seimbang**, namun lebih pada ketangguhan dalam menghadapi bencana. Menitikberatkan pada upaya-upaya untuk mencapai Indeks Risiko Bencana yang semakin baik.

Kondisi risiko bencana semakin baik sangat tergantung dengan bagaimana ketangguhan daerah dalam mengelola potensi bahaya, potensi kerentanan, serta kapasitas daerah dalam menghadapi bencana yang keberhasilannya diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah.

Tabel 3.5 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029

VISI	KABUPATEN ASAHAN SEJAHTERA, RELIGIUS, MAJU, DAN BERKELANJUTAN		
Misi 1	Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Asahan yang cerdas, sehat, dan berkarakter		
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Meningkatnya derajat pembangunan masyarakat	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Optimalisasi layanan pendidikan bagi masyarakat
		Meningkatnya Penguatan Budaya, Bahasa, Literasi, Pendidikan Karakter Pemuda, dan Prestasi Olahraga	Optimalisasi pengembangan karakter, budaya, literasi dan prestasi olahraga masyarakat
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pengembangan dan pemerataan layanan kesehatan serta penguatan kualitas kesehatan masyarakat
		Meningkatnya kualitas keluarga dan Pembangunan Perempuan serta Pemenuhan Hak Anak	Penguatan pembangunan SDM sehat dan sejahtera berbasis keluarga dan gender
Misi 2	Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing perekonomian daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pemerataan kualitas infrastruktur, pengembangan komoditas unggulan, pertanian serta pengelolaan ekonomi biru dan ketahanan pangan		
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI

	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang merata dan yang Berkualitas	Meningkatnya daya dukung ekosistem berusaha, pengelolaan sumberdaya dan hilirisasi sektor ekonomi daerah	Fasilitasi dan sinkronisasi investasi daerah dengan daya dukung potensi lokal, SDM masyarakat, dan proses hilirisasi.
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Kolaborasi dan Sinergitas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui pemberdayaan
		Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Pangan Daerah menuju swasembada pangan	Percepatan dan optimalisasi sistem pertanian terpadu mendukung ketahanan pangan
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana daerah
Misi 3	**Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan memelihara kerukunan dalam kehidupan beragama**		
	TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya Penerapan Nilai Agama, Demokratisasi, toleransi, dan Kegotongroyongan di Masyarakat	Penguatan harmonisasi masyarakat berbasis local wisdom
Misi 4	**Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, berintegritas dan akuntabel**		
	TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Pelayanan publik yang profesional, efektif, inovatif, terintegritas dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa	Penguatan ekosistem pemerintahan daerah dan desa
		Meningkatnya kualitas dan inovasi penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, data informasi, dan teknologi	Kolaborasi pengembangan ekosistem pemerintahan digital berbasi riset dan teknologi
Misi 5	**Menyelenggarakan pembangunan yang berlandaskan prinsip keseimbangan, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan**		
	TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
	Terwujudnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana	Meningkatnya pengelolaan kualitas air, udara dan lahan	Penguatan gerakan pelestarian lingkungan berkelanjutan berbasis masyarakat
		Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Pemberdayaan masyarakat tanggap dan tangguh bencana

Sumber : diolah, 2025

3.2.2 Penahapan Pembangunan RPJM Daerah Tahun 2025-2029

Strategi yang ditetapkan merupakan rencana tindakan yang komprehensif yang berisi langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJM Daerah. Penahapan pembangunan disusun untuk memberikan panduan bagaimana tujuan dan sasaran dicapai dalam suatu fokus/tema dan prioritas pembangunan yang berkesinambungan.

Adapun tahapan pembangunan yang merupakan fokus atau tema dan prioritas pembangunan setiap tahun selama periode RPJM Daerah Kabupaten Asahan 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Penahapan Pembangunan RPJM Daerah

Arah Kebijakan				
Tahun 2025	**Tahun 2026**	**Tahun 2027**	**Tahun 2028**	**Tahun 2029**
Penguatan SDM berdaya saing yang harmoni didukung birokrasi yang handal dan pelayanan publik yang inovatif	Pengembangan kawasan strategis didukung layanan infrastruktur yang berkualitas	Pengembangan perekonomian Daerah melalui optimalisasi sektor pertanian dalam arti luas yang terintegrasi dan investasi berbasis potensi lokal	Percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui peningkatan daya saing daerah dan kolaborasi lintas komponen	Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemerataan pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan

Sumber : diolah, 2025

Selanjutnya fokus pada setiap tahapan tersebut dijabarkan ke dalam arah kebijakan sebagai berikut:

3.2.2.1 Fokus Pembangunan Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Asahan. Prioritas pembangunan tahap ini ditujukan untuk **"Penguatan SDM berdaya saing yang harmoni didukung birokrasi yang handal dan pelayanan publik yang inovatif",** dengan kebijakan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Arah Kebijakan dan Lokus Prioritas Pembangunan Tahun 2025

No	Arah Kebijakan	Lokus
1	Penguatan fasilitas layanan dan sistem penyelenggaraan pendidikan	Kabupaten Asahan
2	Beasiswa Pendidikan bagi Pelajar dan Mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu	Kabupaten Asahan
3	Pengembangan Teacher Learning Center	Kec. Kota Kisaran Timur
4	Penanaman Nilai-nilai Budaya dalam membentuk kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter	Kabupaten Asahan
5	Pengembangan Minat Baca Masyarakat	Kabupaten Asahan
6	Peningkatan layanan olahraga daerah dilakukan melalui pembangunan lanjutan Gedung Olahraga (GOR) serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung	Kec. Kota Kisaran Barat
7	Penguatan penyelenggaraan fasilitas dan sistem layanan kesehatan yang merata	Kabupaten Asahan
8	Penguatan layanan dan pendampingan kesehatan Ibu dan Anak	Kabupaten Asahan
9	Percepatan penurunan Stunting	Kabupaten Asahan
10	Fasilitasi Pemberian Makan Bergizi Gratis	Kabupaten Asahan
11	Pemberdayaan kader posyandu	Kabupaten Asahan
12	Percepatan eliminasi penyakit menular dan tidak menular	Kabupaten Asahan
13	Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Gratis	Kabupaten Asahan
14	Peningkatan fasilitas layanan kesehatan Daerah berupa lanjutan Rumah Sakit Modern	Kec. Kota Kisaran Barat

No	Arah Kebijakan	Lokus
	Kabupaten Asahan, Laboratorium Kesehatan, dan faskes dasar lainnya.	
15	Penguatan pengendalian penduduk melalui program nasional keluarga	Kabupaten Asahan
16	Pengarus Utamaan Gender (PUG)	Kabupaten Asahan
17	Peningkatan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Kabupaten Asahan
18	Percepatan Pengentasan Masalah Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Asahan
19	Transparansi Birokrasi	Kabupaten Asahan
20	Peningkatan kualitas SDM	Kabupaten Asahan
21	Peningkatan Kemandirian Desa	Kabupaten Asahan
22	Peningkatan dan pemeliharaan kualitas jalan Daerah	Kabupaten Asahan
23	Intensifikasi Pertanian	Kabupaten Asahan
24	Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Kabupaten Asahan
25	Pembinaan Organisasi Keagamaan	Kabupaten Asahan
26	Pendampingan kepada pelaku Kamtibmas	Kabupaten Asahan
27	Peningkatan Kompetensi Guru Agama	Kabupaten Asahan
28	Lanjutan pengembangan dan pembangunan Menara Masjid Agung H. Achmad Bakrie Kisaran	Kec. Kota Kisaran Barat
29	Sertifikasi Gratis Rumah Ibadah	Kabupaten Asahan
30	Peningkatan kegiatan keagamaan bagi siswa SD dan SMP	Kabupaten Asahan
31	Fasilitasi Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Kabupaten Asahan
32	Fasilitasi Pembangunan Sekolah Rakyat	Kec. Kota Kisaran Timur
33	Pembangunan Gerai UMKM	Kec. Kota Kisaran Barat
34	Cetak Sawah Baru	Kec. Silau Laut, Sei Kepayang, Rawang Panca Arga, Teluk Dalam, Simpang Empat
35	Pembangunan Balai Latihan Kerja	Kec. Kota Kisaran Timur
36	Pembangunan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Kec. Aek Kuasan
37	Sentra kawasan pengembangan peternakan Kambing	Kec. BP. Mandoge, Teluk Dalam, Sei Dadap, Simpang Empat, Aek Ledong, Bandar Pulau, Silau Laut, Pulau Rakyat, Air Joman, Sei Kepayang Timur, Tanjung Balai, Sei Kepayang Barat, Aek Songsongan dan Aek Kuasan
38	Sentra kawasan pengembangan peternakan Sapi	Kec. Pulau Rakyat, Teluk Dalam, BP. Mandoge, Aek Kuasan, Rahuning, Buntu Pane, Setia Janji, Aek songsongan Air Batu, Bandar Pulau, Tinggi Raja, Pulo Bandring, dan Aek Ledong
39	Sentra kawasan pengembangan peternakan Domba	Kec. Air Batu, Pulo Bandring, Setia Janji, Buntu Pane, Meranti, Rawang Panca Arga,

No	Arah Kebijakan	Lokus
		Tinggi Raja, Rahuning dan Sei Kepayang

Sumber : diolah, 2025

3.2.2.2 Fokus Pembangunan Tahun 2026

Fokus pembangunan tahun 2026 difokuskan pada **"Pengembangan kawasan strategis didukung layanan infrastruktur yang berkualitas"** dengan asumsi bahwa sasaran tahun 2025 telah tercapai. Pada tahun 2026 prioritas pembangunan daerah diarahkan pada:

Tabel 3.8 Arah Kebijakan dan Lokus Prioritas Pembangunan Tahun 2026

No	Arah Kebijakan	Lokus
1	Peningkatan dan pemeliharaan kualitas jalan Daerah	Kabupaten Asahan
2	Optimalisasi kualitas layanan infrastuktur Daerah	Kabupaten Asahan
3	Pengembangan Agromarine Industry dan hilirisasi komoditas unggulan Daerah untuk industri pengolah	Kec. Tanjung Balai, Kec. Silau Laut
4	Intensifikasi Pertanian	Kabupaten Asahan
5	Pengembangan Pasar Tradisional dan Modern	Pasar Kartini, Pasar Inpres I, Pasar Inpres II, Pasar Bagan Asahan, Pasar Desa Gajah, Pasar Bhakti, dan Pasar Air Joman
6	Pengembangan Pariwisata dan ekonomi kreatif Daerah	Kec. Kota Kisaran Barat, Kec. Aek Songsongan, Kec. Silau Laut, Kec. Bandar Pulau
7	Pembangunan Balai Latihan Kerja	Kec. Kota Kisaran Timur
8	Pembentukan BUMD Aneka Usaha	Kabupaten Asahan
9	Pelatihan dan Pemberdayaan Wirausaha Muda	Kabupaten Asahan
10	Pembangunan Gerai UMKM	Kec. Kota Kisaran Barat
11	Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Kabupaten Asahan
12	Percepatan Pengentasan Masalah Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Asahan
13	Peningkatan kualitas SDM	Kabupaten Asahan
14	Peningkatan Kemandirian Desa	Kabupaten Asahan
15	Penguatan fasilitas layanan dan sistem penyelenggaraan pendidikan	Kabupaten Asahan
16	Pengembangan Teacher Learning Center	Kec. Kota Kisaran Timur
17	Beasiswa Pendidikan bagi Pelajar dan Mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu	Kabupaten Asahan
18	Penanaman Nilai-nilai Budaya dalam membentuk kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter	Kabupaten Asahan
19	Fasilitasi Pembangunan Sekolah Rakyat	Kec. Kota Kisaran Timur

No	Arah Kebijakan	Lokus
20	Peningkatan layanan olahraga daerah dilakukan melalui pembangunan lanjutan Gedung Olahraga (GOR) serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung	Kec. Kota Kisaran Barat
21	Penguatan penyelenggaraan fasilitas dan sistem layanan kesehatan yang merata	Kabupaten Asahan
22	Peningkatan fasilitas layanan kesehatan Daerah berupa lanjutan Rumah Sakit Modern Kabupaten Asahan, Laboratorium Kesehatan, dan faskes dasar lainnya.	Kec. Kota Kisaran Barat
23	Penyelesaian pembangunan menara Masjid Agung H. Achmad Bakrie Kisaran	Kec. Kota Kisaran Barat
24	Cetak Sawah Baru	Kec. Silau Laut, Sei Kepayang, Rawang Panca Arga, Teluk Dalam, Simpang Empat
25	Sertifikasi Gratis Rumah Ibadah	Kabupaten Asahan
26	Pemetaan dan Pengembangan Potensi Investasi Daerah	Kabupaten Asahan
27	Pengembangan Program Kampung iklim	Kec. Pulo Bandring
28	Pembangunan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Kec. Aek Kuasan
29	Fasilitasi Sekolah Unggulan	Kabupaten Asahan
30	Sentra kawasan pengembangan peternakan Kambing	Kec. BP. Mandoge, Teluk Dalam, Sei Dadap, Simpang Empat, Aek Ledong, Bandar Pulau, Silau Laut, Pulau Rakyat, Air Joman, Sei Kepayang Timur, Tanjung Balai, Sei Kepayang Barat, Aek Songsongan dan Aek Kuasan
31	Sentra kawasan pengembangan peternakan Sapi	Kec. Pulau Rakyat, Teluk Dalam, BP. Mandoge, Aek Kuasan, Rahuning, Buntu Pane, Setia Janji, Aek songsongan Air Batu, Bandar Pulau, Tinggi Raja, Pulo Bandring, dan Aek Ledong
32	Sentra kawasan pengembangan peternakan Domba	Kec. Air Batu, Pulo Bandring, Setia Janji, Buntu Pane, Meranti, Rawang Panca Arga, Tinggi Raja, Rahuning dan Sei Kepayang

Sumber : diolah, 2025

3.2.2.3 Fokus Pembangunan Tahun 2027

Dengan asumsi bahwa SDM telah memiliki daya saing yang cukup kuat, dan kawasan strategis telah mulai terbangun, maka pada tahun 2027 arah kebijakan pembangunan fokus pada **"Pengembangan perekonomian daerah melalui optimalisasi sektor pertanian dalam arti luas yang terintegrasi dan investasi berbasis potensi lokal",** dengan prioritas pada:

Tabel 3.9 Arah Kebijakan dan Lokus Prioritas Pembangunan Tahun 2027

No	Arah Kebijakan	Lokus
1	Pengembangan Agromarine Industry dan hilirisasi komoditas	Kec. Tanjung Balai, Kec. Silau Laut

No	Arah Kebijakan	Lokus
	ungglan Daerah untuk industri pengolah	
2	Pengembangan Pasar Tradisional dan Modern	Pasar Kartini, Pasar Inpres I, Pasar Inpres II, Pasar Bagan Asahan, Pasar Desa Gajah, Pasar Bhakti, dan Pasar Air Joman
3	Pengembangan Pariwisata dan ekonomi kreatif Daerah	Kec. Simpang Empat, Kec. Aek Songsongan, Kec. Silau Laut, Kec. Bandar Pulau
4	Pelatihan dan Pemberdayaan Wirausaha Muda	Kabupaten Asahan
5	Pengembangan pertanian terintegrasi	Kabupaten Asahan
6	Cetak Sawah Baru	Kec. Silau Laut, Sei Kepayang, Rawang Panca Arga, Teluk Dalam, Simpang Empat
7	Penyediaan Saprodi bagi Petani dan Nelayan	Kabupaten Asahan
8	Penguatan fasilitas layanan dan sistem penyelenggaraan pendidikan	Kabupaten Asahan
9	Beasiswa Pendidikan bagi Pelajar dan Mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu	Kabupaten Asahan
10	Penanaman Nilai-nilai Budaya dalam membentuk kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter	Kabupaten Asahan
11	Penyelesaian pembangunan Gedung Olahraga (GOR) menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur dan peningkatan fasilitas olahraga daerah	Kec. Kota Kisaran Barat
12	Penguatan penyelenggaraan fasilitas dan sistem layanan kesehatan yang merata	Kabupaten Asahan
13	Peningkatan fasilitas layanan kesehatan Daerah berupa lanjutan Rumah Sakit Modern Kabupaten Asahan, Laboratorium Kesehatan, dan faskes dasar lainnya.	Kec. Kota Kisaran Barat
14	Optimalisasi kualitas layanan infrastuktur Daerah	Kabupaten Asahan
15	Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Kabupaten Asahan
16	Transparansi Birokrasi	Kabupaten Asahan
17	Peningkatan kualitas SDM	Kabupaten Asahan
18	Peningkatan Kemandirian Desa	Kabupaten Asahan
19	Pengembangan Program Kampung iklim	Kec. Sei Dadap
20	Pembangunan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Kec. Aek Kuasan
21	Penguatan Desa Tangguh Bencana	Kec. Rahuning

No	Arah Kebijakan	Lokus
22	Pengembangan Fasilitas Kesehatan lainnya berupa Laboratorium Kesehatan Daerah Tingkat II	Kec. Kota Kisaran Barat
23	Sertifikasi Gratis Rumah Ibadah	Kabupaten Asahan
24	Pembinaan Organisasi Keagamaan	Kabupaten Asahan
25	Peningkatan dan pemeliharaan kualitas jalan Daerah	Kabupaten Asahan
26	Sentra kawasan pengembangan peternakan Kambing	Kec. BP. Mandoge, Teluk Dalam, Sei Dadap, Simpang Empat, Aek Ledong, Bandar Pulau, Silau Laut, Pulau Rakyat, Air Joman, Sei Kepayang Timur, Tanjung Balai, Sei Kepayang Barat, Aek Songsongan dan Aek Kuasan
27	Sentra kawasan pengembangan peternakan Sapi	Kec. Pulau Rakyat, Teluk Dalam, BP. Mandoge, Aek Kuasan, Rahuning, Buntu Pane, Setia Janji, Aek songsongan Air Batu, Bandar Pulau, Tinggi Raja, Pulo Bandring, dan Aek Ledong
28	Sentra kawasan pengembangan peternakan Domba	Kec. Air Batu, Pulo Bandring, Setia Janji, Buntu Pane, Meranti, Rawang Panca Arga, Tinggi Raja, Rahuning dan Sei Kepayang
29	Pengembangan Teacher Learning Center	Kec. Kota Kisaran Timur

Sumber : diolah, 2025

3.2.2.4 Fokus Pembangunan Tahun 2028

Berdasarkan asumsi bahwa sektor pertanian dalam arti luas telah berkembang secara terintegrasi dan investasi berbasis potensi lokal juga telah mulai berhasil, maka pada tahun 2028 kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk **"Percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui peningkatan daya saing daerah dan kolaborasi lintas komponen".** Adapun fokus pembangunan diarahkan pada:

Tabel 3.10 Arah Kebijakan dan Lokus Prioritas Pembangunan Tahun 2028

No	Arah Kebijakan	Lokus
1	Pengembangan Agromarine Industry dan hilirisasi komoditas unggulan Daerah untuk industri pengolah	Kec. Sei Kepayang, Kec.Sei Kepayang Barat, Kec. Sei Kepayang Timur
2	Pengembangan Pasar Tradisional dan Modern	Pasar Kartini, Pasar Inpres I, Pasar Inpres II, Pasar Bagan Asahan, Pasar Desa Gajah, Pasar Bhakti, dan Pasar Air Joman
3	Pengembangan Pariwisata dan ekonomi kreatif Daerah	Kec. Aek Songsongan, Kec. Bandar Pulau, Kec. Silau Laut, Kec. Air Batu
4	Pelatihan dan Pemberdayaan Wirausaha Muda	Kabupaten Asahan
5	Pembangunan Gerai UMKM	Kec. Kota Kisaran Barat
6	Optimalisasi kualitas layanan infrastuktur Daerah	Kabupaten Asahan
7	Penguatan ekosistem riset dan inovasi	Kabupaten Asahan
8	Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Kabupaten Asahan
9	Transparansi Birokrasi	Kabupaten Asahan
10	Peningkatan kualitas SDM	Kabupaten Asahan

No	Arah Kebijakan	Lokus
11	Peningkatan Kemandirian Desa	Kabupaten Asahan
12	Pengembangan Program Kampung iklim	Kec. Buntu Pane
13	Pembangunan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Kec. Aek Kuasan
14	Penguatan Desa Tangguh Bencana	Kec. Aek Ledong
15	Pembinaan Organisasi Keagamaan	Kabupaten Asahan
16	Peningkatan fasilitas layanan kesehatan Daerah berupa lanjutan Rumah Sakit Modern Kabupaten Asahan dan faskes dasar lainnya	Kec. Kota Kisaran Barat
17	Cetak Sawah Baru	Silau Laut, Sei Kepayang, Rawang Panca Arga, Teluk Dalam, Simpang Empat
18	Intensifikasi Pertanian	Kabupaten Asahan
19	Peningkatan dan pemeliharaan kualitas jalan Daerah	Kabupaten Asahan
20	Sertifikasi Gratis Rumah Ibadah	Kabupaten Asahan
21	Mengawali pembangunan sirkuit di Kisaran sebagai bagian dari kebijakan pengembangan prasarana olahraga daerah	Kec. Kota Kisaran Barat
22	Sentra kawasan pengembangan peternakan Kambing	Kec. BP. Mandoge, Teluk Dalam, Sei Dadap, Simpang Empat, Aek Ledong, Bandar Pulau, Silau Laut, Pulau Rakyat, Air Joman, Sei Kepayang Timur, Tanjung Balai, Sei Kepayang Barat, Aek Songsongan dan Aek Kuasan
23	Sentra kawasan pengembangan peternakan Sapi	Kec. Pulau Rakyat, Teluk Dalam, BP. Mandoge, Aek Kuasan, Rahuning, Buntu Pane, Setia Janji, Aek songsongan Air Batu, Bandar Pulau, Tinggi Raja, Pulo Bandring, dan Aek Ledong
24	Sentra kawasan pengembangan peternakan Domba	Kec. Air Batu, Pulo Bandring, Setia Janji, Buntu Pane, Meranti, Rawang Panca Arga, Tinggi Raja, Rahuning dan Sei Kepayang
25	Pengembangan Teacher Learning Center	Kec. Kota Kisaran Timur

Sumber : diolah, 2025

3.2.2.5 Fokus Pembangunan Tahun 2029

Tahun 2029 merupakan tahun terakhir pelaksanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Asahan. Sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan jangka panjang, maka periode lima (5) tahun pertama pembangunan jangka menengah ini ditujukan untuk meletakkan pondasi bagi Asahan untuk bertransformasi. Berdasarkan asumsi bahwa tujuan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya telah tercapai, maka fokus pembangunan daerah pada tahun 2029 diarahkan pada **"Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemerataan pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan",** dengan prioritas kebijakan:

Tabel 3.11 Arah Kebijakan dan Lokus Prioritas Pembangunan Tahun 2029

No	Arah Kebijakan	Lokus
1	Penguatan ekosistem riset dan inovasi	Kabupaten Asahan
2	Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Kabupaten Asahan
3	Transparansi Birokrasi	Kabupaten Asahan
4	Peningkatan kualitas SDM	Kabupaten Asahan
5	Peningkatan Kemandirian Desa	Kabupaten Asahan
6	Pengembangan Program Kampung iklim	Kec. Bandar Pasir Mandoge
7	Pembangunan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Kec. Aek Kuasan
8	Pengembangan Agromarine Industry dan hilirisasi komoditas ungglan Daerah untuk industri pengolah	Kec. Sei Kepayang, Kec.Sei Kepayang Barat, Kec. Sei Kepayang Timur
9	Pengembangan Pasar Tradisional dan Modern	Pasar Kartini, Pasar Inpres I, Pasar Inpres II, Pasar Bagan Asahan, Pasar Desa Gajah, Pasar Bhakti, dan Pasar Air Joman
10	Pengembangan Pariwisata dan ekonomi kreatif Daerah	Kec. Aek Songsongan, Kec. Bandar Pulau, Kec. Silau Laut, Kec. BP. Mandoge
11	Pelatihan dan Pemberdayaan Wirausaha Muda	Kabupaten Asahan
12	Penguatan fasilitas layanan dan sistem penyelenggaraan pendidikan	Kabupaten Asahan
13	Penguatan Desa Tangguh Bencana	Kec. Aek Songsongan
14	Pembinaan Organisasi Keagamaan	Kabupaten Asahan
15	Penguatan penyelenggaraan fasilitas dan sistem layanan kesehatan yang merata	Kabupaten Asahan
16	Peningkatan fasilitas layanan kesehatan Daerah berupa lanjutan Rumah Sakit Modern Kabupaten Asahan, dan faskes dasar lainnya	Kec. Kota Kisaran Barat
17	Intensifikasi Pertanian	Kabupaten Asahan
18	Optimalisasi kualitas layanan infrastuktur Daerah	Kabupaten Asahan
19	Sertifikasi Gratis Rumah Ibadah	Kabupaten Asahan
20	Peningkatan dan pemeliharaan kualitas jalan Daerah	Kabupaten Asahan
21	Menyelesaikan pembangunan kawasan sirkuit di Kisaran dalam rangka mendukung pengembangan sarana olahraga	Kec. Kota Kisaran Barat
22	Sentra kawasan pengembangan peternakan Kambing	Kec. BP. Mandoge, Teluk Dalam, Sei Dadap, Simpang Empat, Aek Ledong, Bandar Pulau, Silau Laut, Pulau Rakyat, Air Joman, Sei

No	Arah Kebijakan	Lokus
		Kepayang Timur, Tanjung Balai, Sei Kepayang Barat, Aek Songsongan dan Aek Kuasan
23	Sentra kawasan pengembangan peternakan Sapi	Kec. Pulau Rakyat, Teluk Dalam, BP. Mandoge, Aek Kuasan, Rahuning, Buntu Pane, Setia Janji, Aek songsongan Air Batu, Bandar Pulau, Tinggi Raja, Pulo Bandring, dan Aek Ledong
24	Sentra kawasan pengembangan peternakan Domba	Kec. Air Batu, Pulo Bandring, Setia Janji, Buntu Pane, Meranti, Rawang Panca Arga, Tinggi Raja, Rahuning dan Sei Kepayang
25	Pengembangan Teacher Learning Center	Kec. Kota Kisaran Timur

Sumber : diolah, 2025

3.2.3 Lokus Pembangunan RPJM Daerah Tahun 2025-2029

Dalam konteks pengembangan kawasan Provinsi Sumatera Utara, wilayah Kabupaten Asahan termasuk dalam kawasan wilayah pengembangan timur, bersama dengan Labuhanbatu, Tebingtinggi, Tanjungbalai, Batu Bara, Serdang Bedagai, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan. Wilayah pengembangan timur itu berkaitan dengan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan berikut ini:

a. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Simalungun-Batubara-Asahan: Pengolahan hasil pertanian, pelabuhan, dan industri hilir
b. Kawasan Industri Sei Mangkei: Bioindustri dan manufaktur berbasis sawit
c. Pusat pertumbuhan pelabuhan dan perikanan Kuala Tanjung dan Teluk Nibung

Rencana pengembangan detail untuk Kabupaten Asahan di RPJM Daerah Sumatera Utara adalah:

- Penguatan industri kelapa sawit, karet, dan bioindustri.
- Pembangunan jaringan distribusi ekspor hasil pertanian.
- Revitalisasi sistem irigasi dan ketahanan pangan.

Posisi Asahan serta wilayah lain di wilayah pengembangan timur pada peta Sumatera Utara adalah seperti yang ditunjukan pada gambar di bawah ini.

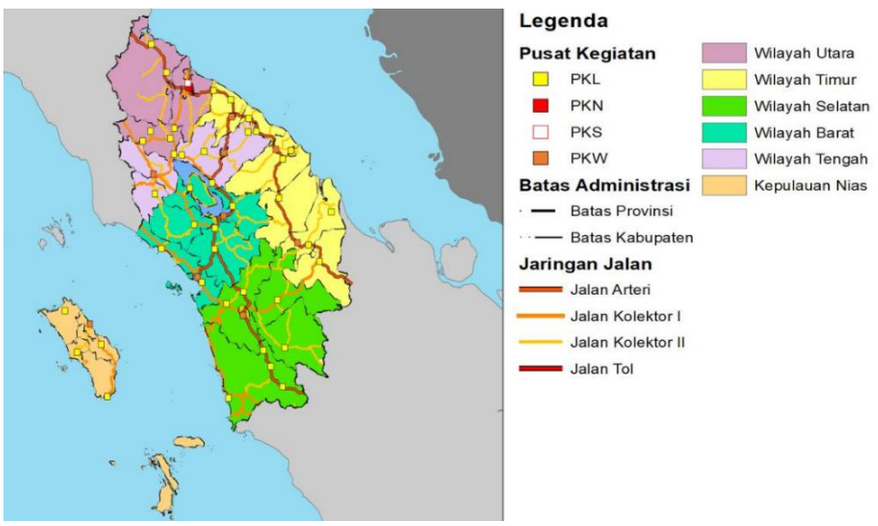

Gambar 3.1 Wilayah Asahan dalam Wilayah Pengembangan Timur Sumatera Utara

Sumber : Ranwal RPJM Daerah Sumatera Utara 2025-2029

Dalam RPJPD Kabupaten Asahan 2025-2045 ditegaskan empat kawasan pertumbuhan, yaitu: 1) Pertumbuhan Kawasan Pertanian; 2) Pertumbuhan Kawasan Industri; 3) Pertumbuhan Kawasan Pariwisata; dan 4) Pertumbuhan Kawasan Permukiman dan Perkotaan.

Arah pengembangan kewilayahan di Kabupaten Asahan periode 2025-2029 difokuskan pada pengembangan berkelanjutan, peningkatan produktivitas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Visi dan Misi Kabupaten Asahan yang menekankan keseimbangan, kesinambungan, dan berwawasan lingkungan menjadi pedoman dalam setiap kebijakan pengembangan.

3.2.3.1 Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian di Kabupaten Asahan difokuskan pada pengembangan lahan basah dan kering untuk tanaman pangan. Lahan basah tersebar di beberapa kecamatan, seperti Aek Kuasan, Aek Ledong, dan lainnya dengan luas total 15.046,12 Ha. Lahan kering tersebar di kecamatan seperti Aek Songsongan, Air Batu, dan lainnya dengan luas total 1.284,14 Ha. Pengembangan pertanian diarahkan menjadi lahan pertanian berkelanjutan dan cadangan pertanian.

Potensi:

Sektor pertanian telah berkontribusi lebih dari 35% terhadap PDRB Kabupaten Asahan selama periode 2010-2023. Potensi besar ini menjadikan pertanian sebagai sektor penting bagi pertumbuhan ekonomi. Pengembangan pertanian berkelanjutan dan agropolitan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Kebutuhan:

1. Pengelolaan lahan yang berkelanjutan dengan memperhatikan konservasi dan lingkungan.
2. Penggunaan teknologi modern dalam pertanian untuk meningkatkan produktivitas.
3. Pengembangan infrastruktur irigasi dan sarana pendukung pertanian.
4. Peningkatan akses pasar bagi hasil pertanian.

Fokus Pembangunan:

1. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui penggunaan teknologi dan inovasi.
2. Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan dan cadangan pertanian.
3. Peningkatan kesejahteraan petani melalui pendidikan dan pelatihan.

Pengembangan pasar lokal dan internasional untuk hasil pertanian.

3.2.3.2 Kawasan Industri dan Ekonomi Kreatif

Kawasan industri di Kabupaten Asahan terdiri dari industri besar/menengah dan kecil. Kawasan industri besar seperti Bagan Asahan, Simpang Empat, dan Air Joman dengan luas total 485,24 Ha. Industri kecil berfokus pada pengolahan hasil perkebunan di seluruh kecamatan.

Potensi:

Sektor industri pengolahan telah menjadi kontributor terbesar kedua bagi PDRB Kabupaten Asahan. Pengembangan industri berkelanjutan dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja.

Kebutuhan:

1. Pengembangan kawasan industri yang ramah lingkungan.
2. Infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan air bersih.
3. Pengelolaan limbah industri yang efektif.
4. Peningkatan investasi dan iklim usaha yang kondusif.

Fokus Pembangunan:

1. Pengembangan kawasan industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
2. Peningkatan produktivitas industri melalui teknologi dan inovasi.
3. Peningkatan investasi dan iklim usaha yang mendukung.
4. Pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) untuk meningkatkan ekonomi lokal.

3.2.3.3 Kawasan Pariwisata Berkelanjutan

Kawasan pariwisata di Kabupaten Asahan mencakup wisata alam, budaya, religi, dan hasil buatan manusia. Kawasan pengembangan pariwisata terbagi menjadi Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK).

Potensi:

Sektor pariwisata telah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan PAD, lapangan kerja, dan investasi. Wisata alam seperti arung jeram Sungai Asahan dan Air Terjun Ponot menarik banyak pengunjung.

Kebutuhan:

1. Pengembangan infrastruktur pariwisata seperti jalan, akomodasi, dan sarana pendukung.
2. Pengelolaan lingkungan wisata yang berkelanjutan.
3. Promosi pariwisata secara nasional dan internasional.
4. Pengembangan produk wisata baru dan inovatif.

Fokus Pembangunan:

1. Pengembangan kawasan pariwisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung pariwisata.
3. Pengembangan produk wisata baru dan inovatif.
4. Promosi pariwisata secara nasional dan internasional.

3.2.3.4 Kawasan Permukiman dan Perkotaan

Kawasan permukiman di Kabupaten Asahan mencakup perkotaan dan perdesaan dengan luas total 19.495,67 Ha. Pengembangan kawasan permukiman difokuskan pada penyediaan air minum, sanitasi, dan fasilitas sosial.

Potensi:

Pengembangan kawasan permukiman dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas sosial yang memadai.

Kebutuhan:

1. Pengembangan infrastruktur air minum dan sanitasi.
2. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan luas minimal 30% dari luas kawasan perkotaan.
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas kawasan permukiman.

Fokus Pembangunan:

1. Pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
2. Penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi yang memadai.
3. Pengembangan RTH dan fasilitas sosial lainnya.
4. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas kawasan permukiman.

3.2.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja dan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah yang selaras dengan strategi agar lebih optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah.

Arah Kebijakan Kabupaten Asahan 2025-2029 dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan selaras dengan strategi adalah sebagai berikut

Tabel 3.12 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi: Kabupaten Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan.

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Asahan yang cerdas, sehat, dan berkarakter	Meningkatnya derajat pembangunan masyarakat	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Optimalisasi layanan pendidikan bagi masyarakat	Penguatan fasilitas layanan dan sistem penyelenggaraan pendidikan
				Pengembangan Teacher Learning Center
				Beasiswa Pendidikan bagi Pelajar dan Mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu
				Fasilitasi pembangunan Sekolah Unggulan, Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda
				Pemberian insentif bagi guru honorer di SD Negeri
		Meningkatnya Penguatan Budaya, Bahasa, Literasi, Pendidikan Karakter Pemuda, dan Prestasi Olahraga	Optimalisasi pengembangan karakter, budaya, literasi dan prestasi olahraga masyarakat	Penanaman Nilai-nilai Budaya dalam membentuk kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter
				Pengembangan Minat Baca Masyarakat
				Peningkatan fasilitas dan pengembangan sarana prasara olahraga daerah seperti pembangunan kawasan sirkuit Kisaran, dan Lanjutan GOR
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pengembangan dan pemerataan layanan kesehatan serta penguatan kualitas kesehatan masyarakat	Penguatan penyelenggaraan fasilitas dan sistem layanan kesehatan yang merata
				Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Gratis
				Percepatan eliminasi penyakit menular dan tidak menular
				Penguatan layanan dan pendampingan kesehatan Ibu dan Anak
				Percepatan penurunan Stunting
				Fasilitasi Pemberian Makan Bergizi Gratis

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Pemberdayaan kader posyandu
				Peningkatan fasilitas layanan kesehatan daerah berupa lanjutan pembangunan Rumah Sakit Modern Kabupaten Asahan, pembangunan Laboratorium Kesehatan, dan faskes dasar lainnya
		Meningkatnya kualitas keluarga dan Pembangunan Perempuan serta Pemenuhan Hak Anak	Penguatan pembangunan SDM sehat dan sejahtera berbasis keluarga dan gender	Pengarus Utamaan Gender (PUG)
				Peningkatan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
				Penguatan pengendalian penduduk melalui program nasional keluarga
Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing perekonomian daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pemerataan kualitas infrastruktur, pengembangan komoditas unggulan, pertanian serta pengelolaan ekonomi biru dan ketahanan pangan	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang merata dan yang Berkualitas	Meningkatnya daya dukung ekosistem berusaha, pengelolaan sumberdaya dan hilirisasi sektor ekonomi daerah	Fasilitasi dan sinkronisasi investasi daerah dengan daya dukung potensi lokal, SDM masyarakat, dan proses hilirisasi	Pemetaan dan Pengembangan Potensi Investasi Daerah
				Pengembangan Agromarine Industry dan hilirisasi komoditas unggulan daerah untuk industri pengolah
				Pengembangan Pasar Tradisional dan Modern
				Pembangunan Gerai UMKM
				Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Pembentukan BUMD Aneka Usaha
				Pengembangan Pariwisata dan ekonomi kreatif daerah
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Kolaborasi dan Sinergitas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui pemberdayaan	Pemberdayaan masyarakat miskin berbasis kelompok
				Fasilitasi pemberian bansos
				mendorong program CSR untuk mempercepat pengentasan kemiskinan
				Percepatan Pengentasan Masalah Kesejahteraan Sosial
				Fasilitasi Pembangunan Balai Latihan Kerja
				Pelatihan dan Pemberdayaan Wirausaha Muda
		Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Pangan Daerah menuju swasembada pangan	Percepatan dan optimalisasi sistem pertanian terpadu mendukung ketahanan pangan	Pengembangan pertanian terintegrasi
				Penyediaan Saprodi bagi Petani dan Nelayan
				Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian
				Pengembangan Sentra Kawasan Peternakan (Kambing, Domba, dan Sapi)
				Pengembangan ekosistem ekonomi biru (agromarine)
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana daerah	Optimalisasi kualitas layanan infrastuktur daerah
				Peningkatan dan pemeliharaan kualitas jalan daerah
Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan memelihara kerukunan	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya Penerapan Nilai Agama, Demokratisasi, toleransi, dan Kegotongroyongan di Masyarakat	Penguatan harmonisasi masyarakat berbasis local wisdom	Pembinaan Organisasi Keagamaan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
dalam kehidupan beragama				
				Pendampingan kepada pelaku Kamtibmas
				Peningkatan Kompetensi Guru Agama
				Fasilitasi sarana prasarana peribadatan dan tempat ibadah
				Sertifikasi Gratis Rumah Ibadah
				Peningkatan kegiatan keagamaan bagi siswa SD dan SMP (seperti pesantren kilat, retret doa, dan lain-lain)
Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, berintegritas dan akuntabel	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Pelayanan publik yang profesional, efektif, inovatif, terintegritas dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa	Penguatan ekosistem pemerintahan daerah dan desa	Transparansi Birokrasi
				Peningkatan kualitas SDM
				Peningkatan Kemandirian Desa
		Meningkatnya kualitas dan inovasi penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, data informasi, dan teknologi	Kolaborasi pengembangan ekosistem pemerintahan digital berbasi riset dan teknologi	Penguatan ekosistem riset dan inovasi
				Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Menyelenggarakan pembangunan yang berlandaskan prinsip keseimbangan, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana	Meningkatnya pengelolaan kualitas air, udara dan lahan	Penguatan gerakan pelestarian lingkungan berkelanjutan berbasis masyarakat	Pengembangan Program Kampung iklim
				Pembangunan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
		Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Pemberdayaan masyarakat tanggap dan tangguh bencana	Penguatan Desa Tangguh Bencana

Sumber : diolah, 2025

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dan berkesinambungan, dokumen RPJM Daerah Kabupaten Asahan disusun selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Penyelarasan ini merupakan prasyarat strategis untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang diusung oleh pemerintah daerah tidak hanya relevan dengan kebutuhan lokal, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMN serta RPJM Daerah Provinsi Sumatera Utara.

3.3 Program Prioritas Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah Tahun 2025-2029

Program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang bersifat strategik yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Perumusan program prioritas daerah sangat erat hubungannya dengan janji politik yang telah dirumuskan di dalam Visi dan Misi yang kemudian dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran RPJM Daerah.

Di dalam Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Asahan 2025-2029, terdapat Program Prioritas Pembangunan Daerah yang dikelompokkan melalui pendekatan Slogan Pembangunan berupa **9 (Sembilan) Program Unggulan** yang diuraikan sebagai berikut:

1. **Asahan Cerdas dan Berkarakter**; prioritas pada penguatan fasilitas layanan dan sistem penyelenggaraan Pendidikan, pemberian beasiswa pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, dan pengembangan *Teacher Learning Center*, Pemberian insentif bagi guru honorer di SD Negeri, dan Fasilitasi Pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Prioritas Asahan Cerdas dan Berkarakter juga pada penanaman nilai-nilai budaya dalam membentuk kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter, pengembangan minat baca masyarakat, peningkatan fasilitas dan pengembangan sarana prasara olahraga daerah seperti pembangunan kawasan sirkuit Kisaran dan lanjutan GOR.
2. **Asahan Sehat**; prioritas pada penguatan penyelenggaraan fasilitas dan sistem layanan kesehatan yang merata, penguatan layanan dan pendampingan kesehatan ibu dan anak, percepatan penurunan stunting, fasilitasi pemberian makan bergizi gratis, pemberdayaan kader posyandu, percepatan eliminasi penyakit menular dan tidak menular, fasilitasi pelayanan kesehatan gratis, dan peningkatan fasilitas layanan kesehatan daerah berupa lanjutan rumah sakit modern Kabupaten Asahan, laboratorium kesehatan, dan faskes dasar lainnya. Prioritas Asahan Sehat juga pada penguatan pengendalian penduduk melalui program nasional keluarga, Pengarus Utamaan Gender (PUG), peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
3. **Asahan Ekonomi Bangkit**; prioritas pada pemetaan dan pengembangan potensi investasi daerah, pengembangan *agromarine industri* dan hilirisasi komoditas unggulan daerah untuk industri pengolah, pengembangan pasar tradisional dan modern, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah, pembangunan gerai UMKM, Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Pembentukan BUMD Aneka Usaha. Prioritas Ekonomi Bangkit juga pada fasilitasi pemberian bansos, mendorong program CSR untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat miskin berbasis kelompok, percepatan Pengentasan Masalah Kesejahteraan Sosial, fasilitasi pembangunan balai latihan kerja, pelatihan dan pemberdayaan wirausaha muda.

15. **Asahan Swasembada Pangan dan Petani Makmur**, prioritas pada pengembangan pertanian terintegrasi, intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, pengembangan ekosistem ekonomi biru (*agromarine*),

pengembangan Sentra Kawasan Peternakan (Kambing, Domba, dan Sapi), dan penyediaan saprodi bagi petani dan nelayan.

4. **Asahan Infrastruktur Kuat**; prioritas pada optimalisasi kualitas layanan infrastuktur daerah dan Peningkatan dan pemeliharaan kualitas jalan daerah.
5. **Asahan Religius**; prioritas pada pembinaan Organisasi Keagamaan, Pendampingan kepada pelaku Kamtibmas, Peningkatan Kompetensi Guru Agama, Fasilitasi sarana prasarana peribadatan dan tempat ibadah, Sertifikasi Gratis Rumah Ibadah, Peningkatan kegiatan keagamaan bagi siswa SD dan SMP (seperti pesantren kilat, retret doa, dan lain-lain).
6. **Asahan *Clean Governance***; prioritas pada mempercepat proses transparansi birokrasi, peningkatan kualitas SDM, sampai dengan peningkatan kemandirian desa.
7. **Asahan Modern**; prioritas pada optimalisasi SPBE dan penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah.
8. **Asahan Nyaman dan Seimbang**; prioritas pada Pembangunan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Pengembangan Program Kampung iklim dan penguatan desa tangguh bencana.

Keterkaitan 9 Program Unggulan dengan ketercapaian Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJM Daerah Kabupaten Asahan 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13 Keterkaitan Program Unggulan dengan Misi, Tujuan, dan Sasaran

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM UNGGULAN
Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Asahan yang cerdas, sehat, dan berkarakter	Meningkatnya derajat pembangunan masyarakat	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	ASAHAN CERDAS DAN BERKARAKTER
		Meningkatnya Penguatan Budaya, Bahasa, Literasi, Pendidikan Karakter Pemuda, dan Prestasi Olahraga	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	ASAHAN SEHAT
		Meningkatnya kualitas keluarga dan Pembangunan Perempuan serta Pemenuhan Hak Anak	
Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing perekonomian daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pemerataan kualitas infrastruktur, pengembangan komoditas unggulan, pertanian serta pengelolaan ekonomi biru dan ketahanan pangan	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang merata dan yang Berkualitas	Meningkatnya daya dukung ekosistem berusaha, pengelolaan sumberdaya dan hilirisasi sektor ekonomi daerah	ASAHAN EKONOMI BANGKIT
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	
		Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Pangan Daerah menuju swasembada pangan	ASAHAN SWASEMBADA PANGAN DAN PETANI MAKMUR
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	ASAHAN INFRASTRUKTUR KUAT

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM UNGGULAN
Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan memelihara kerukunan dalam kehidupan beragama	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya Penerapan Nilai Agama, Demokratisasi, toleransi, dan Kegotongroyongan di Masyarakat	ASAHAN RELIGIUS
Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, berintegritas dan akuntabel	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Pelayanan publik yang profesional, efektif, inovatif, terintegritas dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa	ASAHAN CLEAN GOVERNANCE
		Meningkatnya kualitas dan inovasi penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, data informasi, dan teknologi	ASAHAN MODERN
Menyelenggarakan pembangunan yang berlandaskan prinsip keseimbangan, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana	Meningkatnya pengelolaan kualitas air, udara dan lahan	ASAHAN NYAMAN DAN SEIMBANG
		Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	

Sumber : diolah, 2025

Program prioritas pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara semangat pembangunan melalui Slogan Program Unggulan dengan bidang urusan pemerintahan daerah melalui program-program pilihan yang dijalankan oleh perangkat daerah penanggungjawab berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Dalam implementasi Program Prioritas Pembangunan Daerah tersebut, diperlukan keterpaduan lintas sektor sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan strategi dan arah kebijakan yang kemudian sebagai pedoman bagi perumusan program kegiatan pada masing-masing perangkat daerah. Pemetaan ini menjadi panduan penting dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran daerah setiap tahunnya.

Bagi Perangkat Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah tersebut sebagai pengarusutamaan dalam pengambilan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaannya melalui serangkaian program dan kegiatan. Artinya selain tugas pokok dalam mengawal urusan di masing-masing perangkat daerah, ada kebijakan menyukseskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran daerah yang telah ditetapkan melalui sinergitas Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Adapun pemetaan Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:.

Tabel 3.14 Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Unggulan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4
1	**ASAHAN CERDAS DAN BERKARAKTER**		
	Penguatan fasilitas layanan dan sistem	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas yang membawahi urusan Pendidikan

No.	Program Unggulan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4
	penyelenggaraan pendidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas yang membawahi urusan Pendidikan
	Pengembangan Teacher Learning Center	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas yang membawahi urusan Pendidikan
		Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Fasilitasi sekolah rakyat dan sekolah garuda	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas yang membawahi urusan Pendidikan
	Fasilitasi Sekolah Unggulan Garuda	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas yang membawahi urusan Pendidikan
	Beasiswa Pendidikan bagi Pelajar dan Mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas yang membawahi urusan Pendidikan
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Pemberian insentif bagi guru honorer di SD Negeri	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas yang membawahi urusan Pendidikan
	Penanaman Nilai-nilai Budaya dalam membentuk kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas yang membawahi urusan Kebudayaan
	Pengembangan Minat Baca Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas yang membawahi urusan Perpustakaan
	Peningkatan fasilitas dan pengembangan sarana prasara olahraga daerah seperti pembangunan kawasan sirkuit Kisaran, dan Lanjutan GOR	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas yang membawahi urusan Pertanahan
		Program Penatagunaan Tanah	Dinas yang membawahi urusan Pertanahan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas yang membawahi urusan Kepemudaan dan Olahraga
2	**ASAHAN SEHAT**		
	Penguatan penyelenggaraan fasilitas dan sistem layanan kesehatan yang merata	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas yang membawahi urusan Kesehatan
	Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas yang membawahi urusan Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas yang membawahi urusan Kesehatan
	Percepatan eliminasi penyakit menular dan tidak menular	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas yang membawahi urusan Kesehatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Haji Abdul Manan Simatupang

No.	Program Unggulan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4
	Penguatan layanan dan pendampingan kesehatan Ibu dan Anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas yang membawahi urusan Kesehatan
	Penguatan pengendalian penduduk melalui program nasional keluarga	Program Pengendalian Penduduk	Dinas yang membawahi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Percepatan penurunan Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas yang membawahi urusan Kesehatan
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas yang membawahi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pendaftaran Penduduk	Dinas yang membawahi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas yang membawahi urusan Pendidikan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas yang membawahi urusan Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas yang membawahi urusan Perikanan
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas yang membawahi urusan Sosial
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas yang membawahi urusan Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas yang membawahi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
	Fasilitasi Pemberian Makan Bergizi Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas yang membawahi urusan Kesehatan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas yang membawahi urusan Pendidikan
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas yang membawahi urusan Pertanahan
		Program Penatagunaan Tanah	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas yang membawahi urusan Pangan

No.	Program Unggulan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4
	Pemberdayaan kader posyandu	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas yang membawahi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan	Dinas yang membawahi urusan Kesehatan
	Peningkatan fasilitas layanan kesehatan daerah berupa lanjutan Rumah Sakit Modern Kabupaten Asahan, Laboratorium Kesehatan, dan faskes dasar lainnya.	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas yang membawahi urusan Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD Haji Abdul Manan Simatupang
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas yang membawahi urusan Pertanahan
		Program Penatagunaan Tanah	Dinas yang membawahi urusan Pertanahan
	Pengarus Utamaan Gender (PUG)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas yang membawahi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Peningkatan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Program Perlindungan Perempuan	Dinas yang membawahi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas yang membawahi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	**ASAHAN EKONOMI BANGKIT**		
	Pemetaan dan Pengembangan Potensi Investasi Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas yang membawahi urusan Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal	Dinas yang membawahi urusan Penanaman Modal
	Pengembangan Agromarine Industry dan hilirisasi komoditas unggulan daerah untuk industri pengolah	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas yang membawahi urusan Perindustrian
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas yang membawahi urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas yang membawahi urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		Program Pengembangan UMKM	Dinas yang membawahi urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas yang membawahi urusan Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	Dinas yang membawahi urusan Perdagangan

No.	Program Unggulan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas yang membawahi urusan Perdagangan
		Program Pengembangan dan Penyediaan Sarana Pertanian	Dinas yang membawahi urusan Pertanian
		Program Pengembangan dan Penyediaan Prasarana Pertanian	Dinas yang membawahi urusan Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas yang membawahi urusan Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas yang membawahi urusan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
	Pengembangan Pasar Tradisional dan Modern	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas yang membawahi urusan Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	Dinas yang membawahi urusan Perdagangan
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas yang membawahi urusan Perdagangan
	Pembangunan Gerai UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas yang membawahi urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas yang membawahi urusan Perdagangan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas yang membawahi urusan Perindustrian
		Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dinas yang membawahi urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas yang membawahi urusan Pertanahan
		Program Penatagunaan Tanah	Dinas yang membawahi urusan Pertanahan
	Pengembangan Pariwisata dan ekonomi kreatif daerah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas yang membawahi urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		Program Pengembangan UMKM	Dinas yang membawahi urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas yang membawahi urusan Perindustrian

No.	Program Unggulan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas yang membawahi urusan Perhubungan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas yang membawahi urusan Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas yang membawahi urusan Pariwisata
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas yang membawahi urusan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas yang membawahi urusan Komunikasi dan Informatika
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dinas yang membawahi urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Program Promosi Penanaman Modal	Dinas yang membawahi urusan Penanaman Modal
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Program Pelayanan Usaha Simpan Pinjam	Dinas yang membawahi urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	
	Pembentukan BUMD Aneka Usaha	Program Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
	Fasilitasi pemberian bansos	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas yang membawahi urusan Sosial
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas yang membawahi urusan Pendidikan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas yang membawahi urusan Kesehatan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.	Dinas yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas yang membawahi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Penanganan Kerawanan Pangan .	Dinas yang membawahi urusan Pangan

No.	Program Unggulan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4
	Pemberdayaan masyarakat miskin berbasis kelompok	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas yang membawahi urusan Sosial
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Pengadaan Kolam Terbes, Bibit Ikan, Pakan dan Sarana Budidaya	Dinas yang membawahi urusan Perikanan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas yang membawahi urusan Pertanian
		Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM).	Dinas yang membawahi urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.	Dinas yang membawahi urusan Pangan
	Mendorong program CSR untuk mempercepat pengentasan kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas yang membawahi urusan Sosial
		Program Pelatihan Kerja dan Produkivitas Tenaga Kerja	Dinas yang membawahi urusan Tenaga Kerja
	Percepatan Pengentasan Masalah Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas yang membawahi urusan Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas yang membawahi urusan Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas yang membawahi urusan Sosial
	Pembangunan Balai Latihan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas yang membawahi urusan Tenaga Kerja
		Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas yang membawahi urusan Pertanahan
		Program Penatagunaan Tanah	Dinas yang membawahi urusan Pertanahan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas yang membawahi urusan Pendidikan
	Pelatihan dan Pemberdayaan Wirausaha Muda	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas yang membawahi urusan Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas yang membawahi urusan Tenaga Kerja
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas yang membawahi urusan Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas yang membawahi urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		Program Pengembangan UMKM	Dinas yang membawahi urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No.	Program Unggulan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas yang membawahi urusan Perindustrian
4	**ASAHAN SWASEMBADA PANGAN DAN PETANI MAKMUR**		
	Pengembangan pertanian terintegrasi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas yang membawahi urusan Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas yang membawahi urusan Pertanian
	Penyediaan Saprodi bagi Petani dan Nelayan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas yang membawahi urusan Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas yang membawahi urusan Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas yang membawahi urusan Perikanan
	Sentra Kawasan Pengembangan Peternakan (Kambing,Domba, dan Sapi)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas yang membawahi urusan Pertanian
	Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas yang membawahi urusan Pertanian
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas yang membawahi urusan Pangan
	Pengembangan ekosistem ekonomi biru (agromarine)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas yang membawahi urusan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas yang membawahi urusan Perikanan
5	**ASAHAN INFRASTRUKTUR KUAT**		
	Peningkatan dan pemeliharaan kualitas jalan daerah	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Optimalisasi Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Program Unggulan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	**ASAHAN RELIGIUS**		
	Pembinaan Organisasi Keagamaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan yang membawahi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan yang membawahi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Pendampingan kepada pelaku Kamtibmas	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dinas yang membawahi urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan yang membawahi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Peningkatan Kompetensi Guru Agama	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas yang membawahi urusan Pendidikan
	Fasilitasi sarana prasarana peribadatan dan tempat ibadah	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Sertifikasi Gratis Rumah Ibadah	Program Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Dinas yang membawahi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Peningkatan kegiatan keagamaan bagi siswa SD dan SMP (seperti pesantren kilat, retret doa, dan lain-lain)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas yang membawahi urusan Pendidikan
7	**ASAHAN CLEAN GOVERNANCE**		
	Transparansi Birokrasi	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Bagian Organisasi
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas yang membawahi urusan Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan yang membawahi urusan Keuangan
	Peningkatan kualitas SDM	Program Kepegawaian Daerah	Badan yang membawahi urusan Kepegawaian
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan yang membawahi urusan Pendidikan dan Pelatihan

No.	Program Unggulan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4
	Peningkatan Kemandirian Desa	Program Penataan Desa	Dinas yang membawahi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	**ASAHAN MODERN**		
	Penguatan ekosistem riset dan inovasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan yang membawahi urusan Penelitian dan Pengembangan
		Program Riset dan Inovasi Daerah	Badan yang membawahi urusan Penelitian dan Pengembangan
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas yang membawahi urusan Komunikasi dan Informatika
	Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas yang membawahi urusan Komunikasi dan Informatika
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan yang membawahi urusan Perencanaan
		Program Pendaftaran Penduduk	Dinas yang membawahi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Dinas yang membawahi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas yang membawahi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas yang membawahi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Kepegawaian Daerah	Badan yang membawahi urusan Pendidikan dan Pelatihan
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas yang membawahi urusan Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan yang membawahi urusan Keuangan
		Program Pengelolaan Barang Daerah	Badan yang membawahi urusan Keuangan
		Program Perumusaan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas yang membawahi urusan Pendidikan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Bagian Organisasi
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Hukum
		Program Pengelolaan Arsip	Dinas yang membawahi urusan Kearsipan
9	**ASAHAN NYAMAN DAN SEIMBANG**		
	Pengembangan Program Kampung iklim	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas yang membawahi urusan Lingkungan Hidup

No.	Program Unggulan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4
		Program Pengelolaan Persampahan	Dinas yang membawahi urusan Lingkungan Hidup
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas yang membawahi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas yang membawahi urusan Pertanian
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas yang membawahi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas yang membawahi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Penanggulangan Bencana	Dinas yang membawahi urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Pembangunan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas yang membawahi urusan Lingkungan Hidup
	Penguatan Desa Tangguh Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Dinas yang membawahi urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Sumber : diolah, 2025

Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*)

Sembilan Program Prioritas Daerah tersebut mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor. Langkah-langkah secara cepat dalam mendorong ketercapaian Program Prioritas Daerah tersebut termuat dalam **Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*)** yang terdiri dari:

1. Beasiswa Pendidikan bagi Pelajar dan Mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu
2. Pengembangan Teacher Learning Center
3. Pembangunan kawasan sirkuit mini Kisaran, dan Lanjutan GOR
4. Pemberian insentif bagi guru honorer SD Negeri
5. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Gratis
6. Fasilitasi Pemberian Makan Bergizi Gratis

7. Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Modern Kab. Asahan dan Fasilitasi Pembangunan Laboratorium Kesehatan
8. Pengembangan Pasar Tradisional dan Modern dan pembangunan Gerai UMKM
9. Pengembangan wisata kuliner dan religi
10. Pembangunan Balai Latihan Kerja
11. Cetak Sawah Baru
12. Fokus pada perbaikan infrastruktur jalan sebagai sarana penghubung antar wilayah
13. Peningkatan Kompetensi Guru Agama
14. Lanjutan pengembangan dan pembangunan Menara Masjid Agung H. Achmad Bakrie Kisaran
15. Sertifikasi Gratis Rumah Ibadah
16. Peningkatan kegiatan keagamaan bagi siswa SD dan SMP (seperti pesantren kilat, retret doa, dan lain-lain)
17. Penyederhanaan regulasi dan penguatan *merit system* aparatur
18. Digitalisasi sistem layanan masyarakat
19. Pengembangan Kampung Iklim di tiap kecamatan

Program Prioritas Pembangunan Daerah dijabarkan dalam perencanaan lima tahun beserta dengan pagu indikatif, dan target kinerja, dan Perangkat Daerah penangungjawab.

Adapun Program Prioritas Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Asahan Tahun 2025-2030

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1				**Misi 1: Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Asahan yang cerdas, sehat, dan berkarakter.**																	
1	**1**			**Tujuan: Meningkatnya derajat pembangunan masyarakat**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**74,17**	**74,17-75,5**		**74,83-76,7**		**76,55-77,9**		**78,28-79,1**		**80-80,3**		**81,72-82,5**		**81,72-82,5**		
1	**1**	**1**		**Sasaran 1: Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah**	**Harapan Lama Sekolah**	**12,64**	**12,72**		**12,81**		**12,9**		**12,98**		**13,07**		**13,16**		**13,16**		
					Rata-Rata Lama Sekolah	**8,85**	**8,91**		**8,97**		**9,03**		**9,09**		**9,15**		**9,21**		**9,21**		
1	1	1	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS)	64,58	67,62	143.804.808.208,40	70,66	137.441.937.633,00	73,7	139.503.566.698,00	76,74	141.596.120.198,00	79,78	143.720.062.001,00	82,82	145.875.862.931,00	82,82	851.942.357.669,40	Dinas yang membawahi urusan Pendidikan
					Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan SD	98,83	98,86		98,89		98,92		98,95		98,98		99,01		99,04		Dinas yang membawahi urusan Pendidikan

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					dan SMP (APS)																
1	1	1	2		Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus Kesetaraan (APS)	13,17	13,53		13,89		14,27		14,65		15,05		15,45		15,46		Dinas yang membawahi urusan Pendidikan
					Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS)	24,95	25,62		26,32		27,03		27,76		28,51		29,27		29,28		Dinas yang membawahi urusan Pendidikan
1	1	1	2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan Guru	49,25	50,48	1.125.045.000,00	51,74	568.400.000,00	53,04	576.926.000,00	54,36	585.579.620,00	55,72	594.363.504,30	57,12	603.278.321,86	58,54	4.053.592.446,16	Dinas yang membawahi urusan Pendidikan
					Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	31,53	32,3		33,07		33,84		34,61		35,38		36,15		36,15		Dinas yang membawahi urusan Pendidikan
1	**1**	**2**		**Sasaran 2: Meningkatnya Penguatan Budaya, Bahasa, Literasi, Pendidikan**	**Indeks Pembangunan Kebudayaan**	**47,15**	**50,02**		**52,89**		**55,76**		**58,63**		**61,5**		**61,5**		**61,5**		

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Karakter Pemuda, dan Prestasi Olahraga																	
1	1	2	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	10,34	40	7.844.999.950,00	40	6.622.875.000,00	40	6.722.218.125,00	40	6.823.050.834,38	40	6.925.396.841,89	40	7.029.278.119,52	40	41.967.818.870,79	Dinas yang membawahi urusan Pendidikan
					Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	**46,77**	**51**		**54**		**58**		**63**		**68**		**73**		**73**		
1	1	2	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	52,32	53	1.696.295.038,00	55	991.634.496,00	57	1.006.509.013,00	60	1.021.606.649,00	63	1.036.930.748,00	67	1.052.484.711,00	67	6.805.460.655,00	Dinas yang membawahi urusan Perpustakaan
1	1	2	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda	0,49%	0,67%	3.339.999.920,00	0,89%	1.220.250.000,00	1,21%	814.500.000,00	1,47%	758.000.000,00	1,76%	907.000.000,00	2,46%	914.500.000,00	2,46%	7.954.249.920,00	Dinas yang membawahi urusan Kepemudaan dan Olahraga
					Indeks Pembangunan Pemuda	**0**	**35**		**37**		**39**		**41**		**43**		**45**		**45**		
					Indeks Pembangunan Olahraga (Sport Development Index)	**0**	**0,25**		**0,26**		**0,27**		**0,28**		**0,29**		**0,3**		**0,3**		

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1	2	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Berprestasi	71,00 %	75,00 %	14.038.861.000,00	75,00 %	11.968.081.270,00	80,00 %	12.260.456.959,00	80,00 %	12.841.417.546,00	85,00 %	12.999.826.775,00	85,00 %	13.287.804.649,00	85,00 %	77.396.448.199,00	Dinas yang membawahi urusan Kepemudaan dan Olahraga
1	**1**	**3**		**Sasaran 3: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**	**Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)**	**73,65**	**73,9**		**74,1**		**74,3**		**74,5**		**74,7**		**74,9**		**74,9**		
1	**1**	**3**	**1**	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kematian Ibu	5	5	143.853.752.589,20	4	123.554.750.855,70	4	124.724.597.969,57	3	126.222.309.600,71	3	127.979.891.442,34	3	130.023.811.995,10	3	776.359.114.452,62	Dinas yang membawahi urusan Kesehatan
					Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	3,21	90		92		94		96		98		100		100		Dinas yang membawahi urusan Kesehatan
					Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	85	90		92		94		96		98		100		100		Dinas yang membawahi urusan Kesehatan
					Cakupan Kasus Malaria	2,3	1,6		1,5		1,4		1,3		1,2		1		1		Dinas yang

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					(Annual Paracite Incidence)																membawahi urusan Kesehatan
					Persentase Capaian SPM Kesehatan	95,2	100		100		100		100		100		100		100		Dinas yang membawahi urusan Kesehatan
					Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna	77	76,78		76,78		76,78		76,78		80		100		100		Dinas yang membawahi urusan Kesehatan
					Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	2,5	2,2		2,1		2		1,8		1,6		1,4				Dinas yang membawahi urusan Kesehatan
					Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	8	12		15		50		60		80		100				Dinas yang membawahi urusan Kesehatan
					Prevalensi Obesitas > 18 tahun	18,8	26,5		26		25,5		25		24,5		24				Dinas yang membawahi urusan Kesehatan
					Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	85,12	85,25		85,37		85,45		85,67		85,85		86,12				Dinas yang membawahi urusan Kesehatan
					Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	48	48,35		50,76		53,29		55,95		58,74		61,67				Dinas yang membawahi urusan Kesehatan

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	0,7	0,8		0,83		0,85		0,87		0,9		0,92				Dinas yang membawahi urusan Kesehatan
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	1	1		1		1		1		1		1				Dinas yang membawahi urusan Kesehatan
					Persentase lanjut usia yang mandiri	74,3	75		77		79		81		83		85				Dinas yang membawahi urusan Kesehatan
1	1	3	2	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman	100	100	366.746.000,00	100	371.486.480,00	100	377.058.777,33	100	382.714.658,86	100	388.455.378,74	100	394.282.209,43	100	2.280.743.504,36	Dinas yang membawahi urusan Kesehatan
					Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	88,13	100		100		100		100		100		100		100		Dinas yang membawahi urusan Kesehatan
					Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	85,3	100		100		100		100		100		100		100		Dinas yang membawahi urusan Kesehatan

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	54,54	60		65		70		75		80		85		85		Dinas yang membawahi urusan Kesehatan
					Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	50	60		65		70		75		80		85		85		Dinas yang membawahi urusan Kesehatan
1	1	3	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	84	80	2.485.773.919,00	84	2.200.986.000,00	88	2.234.000.790,00	92	2.267.510.801,85	96	2.301.523.463,88	100	2.336.046.315,84	100	13.825.841.290,57	Dinas yang membawahi urusan Kesehatan
1	1	3	4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pelayanan Rujukan Tingkat Daerah	100	100	4.661.048.046,00	100	4.931.290.000,00	100	5.276.480.000,00	100	5.645.840.000,00	100	6.041.000.000,00	100	6.463.920.000,00	100	33.019.578.046,00	UPTD RSUD HAMS
1	**1**	**4**		**Sasaran 4:**		**66,5**	**75,2**		**80,7**		**84,1**		**86,3**		**87,7**		**88,1**		**88,1**		

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Meningkatnya kualitas keluarga dan Pembangunan Perempuan serta Pemenuhan Hak Anak	**Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)**																
1	1	4	1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,37	2,35	5.102.001.000,00	2,34	1.849.039.221,37	2,32	1.207.513.496,31	2,31	1.369.032.383,56	2,29	1.360.499.270,38	2,28	1.371.218.465,25	2,28	12.259.303.836,87	Dinas yang membawahi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR15-19)	20,60 %	20,40 %		20,30 %		20,10 %		20,00 %		19,80 %		19,50 %		19,50 %		Dinas yang membawahi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	1	4	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	100,00 %	100,00 %	1.392.983.309,50	100,00 %	1.372.881.800,69	100,00 %	1.923.914.534,00	100,00 %	1.864.440.865,46	100,00 %	1.940.211.322,19	100,00 %	1.929.357.954,43	100,00 %	10.423.789.786,27	Dinas yang membawahi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Indeks Pembangunan Gender	**91,91**	**91,91**		**91,91**		**91,92**		**91,92**		**91,93**		**91,93**		**91,93**		
					Rasio Kekerasan Anak (per 10.000)	**0,176**	**0,165**		**0,1625**		**0,16**		**0,155**		**0,1525**		**0,15**		**0,15**		
1	1	4	3	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	25,76 %	11,61 %	60.000.000,00	59,00 %	134.989.306,00	59,20 %	190.545.144,00	59,40 %	146.431.492,00	59,70 %	152.670.607,00	60,00 %	159.286.292,00	60,00 %	843.922.841,00	Dinas yang membawahi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Perempuan	49,76 %	50,00 %		51,00 %		52,00 %		53,00 %		54,00 %		55,00 %		55,00 %		Dinas yang membawahi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	1	4	4	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif	100,00 %	100,00 %	141.777.500,00	100,00 %	136.786.914,00	100,00 %	189.339.342,71	100,00 %	192.734.432,85	100,00 %	198.180.479,36	100,00 %	200.678.156,08	100,00 %	1.059.496.825,00	Dinas yang membawahi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	1	4	5	PROGRAM PERLINDUNGAN	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan	100,00 %	100,00 %	443.912.500,00	100,00 %	363.865.000,00	100,00 %	369.322.975,00	100,00 %	374.862.818,88	100,00 %	380.485.760,96	100,00 %	386.193.047,11	100,00 %	2.318.642.101,95	Dinas yang membawahi urusan

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				KHUSUS ANAK	Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif																Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		Dinas yang membawahi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2				**Misi 2: Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing perekonomian daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pemerataan kualitas infrastruktur, pengembangan komoditas unggulan, pertanian serta pengelolaa**																	

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				n ekonomi biru dan ketahanan pangan.																	
2	1			Tujuan: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang merata dan yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,68%	5,2% - 5,6%		5,6% - 6%		6% - 6,4%		6,4% - 6,8%		6,8% - 7,2%		7,2% - 7,6%		7,2% - 7,6%		
					Gini Rasio	0,248	0,248-0,246		0,246-0,244		0,244-0,242		0,242-0,24		0,24-0,238		0,239-0,236		0,239-0,236		
2	1	1		Sasaran 1: Meningkatnya daya dukung ekosistem berusaha, pengelolaan sumberdaya dan hilirisasi sektor ekonomi daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	5,03%	5,03%		5,03%		5,03%		5,03%		5,03%		5,03%		5,03%		
2	1	1	1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap Target Investasi	100%	100%	80.000.000,00	100%	255.000.000,00	100%	155.825.000,00	100%	256.662.375,00	100%	57.512.310,00	100%	58.374.995,00	100%	863.374.680,00	Dinas yang membawahi urusan Penanaman Modal
2	1	1	2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	12,00 %	16,00 %	60.000.000,00	20,00 %	259.999.000,00	25,00 %	162.400.000,00	30,00 %	164.836.000,00	35,00 %	167.308.540,00	40,00 %	200.000.000,00	40,00 %	1.014.543.540,00	Dinas yang membawahi urusan Penanaman Modal

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	1	1	3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100,00 %	100,00 %	208.539.900,00	100,00 %	219.214.780,00	100,00 %	248.631.370,00	100,00 %	252.360.842,00	100,00 %	256.146.254,00	100,00 %	299.988.448,00	100,00 %	1.484.881.594,00	Dinas yang membawahi urusan Penanaman Modal
2	1	1	4	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	0,00%	2,72%	2.340.592.045,00	2,79%	970.000.000,00	2,84%	925.000.000,00	2,88%	925.000.000,00	2,91%	975.000.000,00	2,93%	975.000.000,00	2,93%	7.110.592.045,00	Dinas yang membawahi urusan Perindustrian
2	1	1	5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	16,36 %	18,18 %	1.164.949.950,00	20,00 %	1.830.000.000,00	21,82 %	1.830.000.000,00	23,64 %	1.830.000.000,00	25,45 %	1.880.000.000,00	27,27 %	1.930.000.000,00	27,27 %	10.464.949.950,00	Dinas yang membawahi urusan Perdagangan
2	1	1	6	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Barang	278.133 (Jt)	283.695 (Jt)	269.862.800,00	289.369 (Jt)	550.000.000,00	295.156 (Jt)	550.000.000,00	301.606 (Jt)	550.000.000,00	307.081 (Jt)	550.000.000,00	313.222 (Jt)	550.000.000,00	313.222 (Jt)	3.019.862.800,00	Dinas yang membawahi urusan Perdagangan
2	1	1	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	64,00 %	69,23 %	3.685.000,00	74,07 %	200.000.000,00	78,57 %	200.000.000,00	82,76 %	200.000.000,00	86,67 %	200.000.000,00	90,32	200.000.000,00	90,32 %	1.003.685.000,00	Dinas yang membawahi urusan Perdagangan
2	1	1	8	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	2,00%	5,00%	35.000.000,00	5,40%	1.475.000.000,00	6,30%	1.526.000.000,00	6,80%	1.076.000.000,00	7,10%	1.077.000.000,00	7,40%	1.078.000.000,00	7,40%	6.267.000.000,00	Dinas yang membawahi urusan Pariwisata
2	1	1	9	PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase pelaku Pariwisata dan	73,79 %	75,21 %	17.500.000,00	77,38 %	430.000.000,00	80,41 %	430.000.000,00	84,31 %	430.000.000,00	89,20 %	430.000.000,00	95,26 %	430.000.000,00	95,26 %	2.167.500.000,00	Dinas yang membawa

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi																hi urusan Pariwisata
2	**1**	**2**		**Sasaran 2: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat**	**Tingkat Kemiskinan**	**8,12**	**7,5-7**		**6,75-6,25**		**6,0-5,5**		**5,25-4,75**		**4,5-4**		**3,75-3,25**		**3,75-3,25**		
2	1	2	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan atau Relawan Sosial yang Bersertifikat atau Memenuhi Kualifikasi Kompetensi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	-	67%	770.068.000,00	75%	540.040.900,00	80%	560.040.900,00	85%	560.040.900,00	90%	560.040.900,00	100%	560.040.900,00	100%	3.550.272.500,00	Dinas yang membawahi urusan Sosial
					Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya	36,23 %	100,00 %		67,00 %		67%		67%		67%		80%		100%		Dinas yang membawahi urusan Sosial
2	1	2	2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan	100%	100%	774.881.950,00	100%	797.087.800,00	100%	827.087.800,00	100%	832.087.800,00	100%	882.751.000,00	100%	882.751.000,00	100%	4.996.647.350,00	Dinas yang membawahi urusan Sosial

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Dasarnya di Luar Panti																
					Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	70%	70%		75%		80%		85%		90%		95%		100%		Dinas yang membawahi urusan Sosial
					Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas yang membawahi urusan Sosial
					Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas yang membawahi urusan Sosial
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas yang membawahi urusan Sosial
2	1	2	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi	-	73%	757.500.650,00	73%	773.000.000,00	73,00 %	793.000.000,00	73,00 %	797.000.000,00	73,00 %	797.000.000,00	73,00 %	797.000.000,00	100,00 %	4.714.500.650,00	Dinas yang membawahi urusan Sosial

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Kebutuhan Dasar																
					Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	-	-		0,03%		0,03%		0,03%		0,03%		0,03%		0,03%		Dinas yang membawahi urusan Sosial
					Persentase Keluarga Miskin dan rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	-	-		0,09%		0,09%		0,09%		0,09%		0,09%		0,09%		Dinas yang membawahi urusan Sosial
2	**1**	**3**			**Tingkat Penggangguran Terbuka (%)**	**5,94**	**5,9-5,69**		**5,8-5,56**		**5,71-5,43**		**5,61-5,29**		**5,51-5,16**		**5,41-5,03**		**5,41-5,03**		
2	1	3	1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	80,00 %	80,00 %	324.999.950,00	82,00 %	380.485.941,20	83,00 %	371.902.501,08	84,00 %	368.433.331,73	86,00 %	366.369.818,85	86,00 %	375.037.456,17	86,00 %	2.187.228.999,03	Dinas yang membawahi urusan Tenaga Kerja
2	1	3	2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	39,49 %	39,70 %	219.791.550,00	39,91 %	235.479.949,00	40,12 %	239.012.148,00	40,33 %	242.597.330,00	40,54 %	246.236.290,00	40,75 %	249.929.835,01	40,75 %	1.433.047.102,01	Dinas yang membawahi urusan Tenaga Kerja
2	1	3	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN	Pertumbuhan Wirausaha	4,71%	4,82%	113.216.500,00	4,91%	430.000.000,00	4,97%	430.000.000,00	5,01%	480.000.000,00	5,04%	510.000.000,00	5,05%	530.000.000,00	5,05%	2.493.216.500,00	Dinas yang membawahi urusan Koperasi, Usaha

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				USAHA MIKRO (UMKM)																	Kecil, dan Menengah
2	1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan	0,564 %	0,585 %	346.924.300,00	0,606 %	150.000.000,00	0,626 %	150.000.000,00	0,645 %	200.000.000,00	0,663 %	200.000.000,00	0,681 %	250.000.000,00	0,681 %	1.296.924.300,00	Dinas yang membawahi urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	**1**	**4**		**Sasaran 3: Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Pangan Daerah menuju swasembada pangan**	**Indeks Ketahanan Pangan**	**69,33**	**70**		**70,66**		**71,33**		**72**		**72,67**		**73,34**		**73,34**		
					Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	**43,47 %**	**44,27 %**		**45,12 %**		**46,05 %**		**47,07 %**		**47,90 %**		**48,70 %**		**48,70 %**		
2	1	4	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	41,46 %	51,22 %	680.000.000	60,98 %	680.000.000	65,85 %	321.818.000	70,73 %	321.818.000	75,61 %	334.818.000	80,49 %	321.818.000	80,49 %	2.660.272.000	Dinas yang membawahi urusan Pangan

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	1	4	2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Nilai Skore Pola Pangan Harapan (PPH)	87,05 %	87,27 %	492.084.825	87,49 %	543.016.938	87,70 %	583.259.989	87,92 %	642.689.602	88,14 %	484.704.427	88,36 %	636.023.032	88,63 %	3.381.778.813	Dinas yang membawahi urusan Pangan
2	1	4	3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	83,82 %	80,88 %	185.000.050	79,41 %	157.125.051	77,94 %	243.125.051	75,98 %	246.771.927	73,53 %	246.771.927	72,06 %	246.771.927	72,06 %	1.325.565.933	Dinas yang membawahi urusan Pangan
2	1	4	4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	100%	90%	55.688.900	95%	41.524.234	95%	53.989.450	95%	54.799.292	100%	54.799.292	100%	82.175.707	100%	342.976.875	Dinas yang membawahi urusan Pangan
2	1	4	5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	119.176,73	125.638,44	2.042.841.275,00	145.441,14	2.867.577.908,40	151.963,17	2.846.902.338,58	158.527,62	2.851.108.972,21	175.445,58	2.880.060.388,52	177.234,29	2.936.758.157,31	177.234,29	16.425.249.040,02	Dinas yang membawahi urusan Pertanian
					Peningkatan Produksi Hortikultura	1.189,74	1.211,13		1.233,08		1.255,54		1.278,54		1.302,10		1.326,21		1.326,21		Dinas yang membawahi urusan Pertanian
					Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	1.523.941,30	1.527.681,20		1.531.256,03		1.534.836,88		1.538.411,72		1.541.983,54		1.545.547,98		1.545.547,98		Dinas yang membawahi urusan Pertanian
2	1	4	7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang	8.304,00	8.473,00	9.624.678.827,50	8.473,00	4.310.302.457,81	8.473,00	4.313.693.058,30	8.473,00	4.562.759.615,43	8.473,00	4.654.450.495,78	8.473,00	4.643.928.739,33	9.858,00	32.109.813.194,15	Dinas yang membawa

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				NGAN PRASARANA PERTANIAN	Ditetapkan Menjadi LP2B																hi urusan Pertanian
2	1	4	8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	0,81%	0,91%	200.000.003,00	1,01%	190.000.000,00	1,11%	240.427.674,04	1,21%	226.547.839,00	1,31%	250.275.253,81	1,41%	259.050.273,00	1,41%	1.666.301.042,85	Dinas yang membawahi urusan Pertanian
2	1	4	9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik	65,00 %	60,00 %	65.927.848,88	65,00 %	25.000.000,00	70,00 %	25.375.000,00	75,00 %	80.000.000,00	80,00 %	30.000.000,00	80,00 %	70.918.579,00	80,00 %	391.293.579,00	Dinas yang membawahi urusan Pertanian
2	1	4	10	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	46.586,81	47,518.55	2.542.800.000,00	48,516.44	1.385.600.000,00	49,583.80	1.370.000.000,00	50,724.22	1.570.000.000,00	51,941.61	1.620.000.000,00	53,240.15	1.610.000.000,00	53,240.15	10.098.400.000,00	Dinas yang membawahi urusan Perikanan
2	1	4	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan budidaya	1,980.37	2,000.17	3.419.850.000,00	2,021.17	2.570.000.000,00	2,043.40	1.612.250.000,00	2,066.89	2.194.533.750,00	2,091.69	2.296.851.756,00	2,117.83	2.349.204.533,00	2,117.83	14.442.690.039,00	Dinas yang membawahi urusan Perikanan
2	**1**	**5**		**Sasaran 4: Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas**	**Indeks Infrastruktur Daerah**	**0,68**	**0,69**		**0,7**		**0,71**		**0,72**		**0,73**		**0,74**		**0,74**		
2	1	5	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER	Cakupan daerah layanan irigasi yang berfungsi	69,48 %	74,04 %	1.784.823.637,00	89,76 %	12.150.000.000,00	91,38 %	14.150.000.000,00	94,27 %	7.850.000.000,00	95,71 %	4.850.000.000,00	97,16 %	3.850.000.000,00	97,16 %	44.634.823.637,00	Dinas yang membawahi urusan

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				DAYA AIR (SDA)	dengan kondisi baik																Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	1	5	2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah yang terlayani air minum	41,88 %	49,20 %	2.274.999.175,00	49,45 %	7.570.000.000,00	49,71 %	8.160.000.000,00	49,96 %	7.750.000.000,00	50,21 %	7.750.000.000,00	50,47 %	7.750.000.000,00	50,47 %	41.254.999.175,00	Dinas yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	1	5	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Kota dalam Kondisi Baik	91,49 %	91,78 %	6.005.493.475,00	92,07 %	5.700.000.000,00	92,36 %	5.500.000.000,00	92,65 %	5.200.000.000,00	92,94 %	5.200.000.000,00	93,23 %	5.200.000.000,00	93,23 %	32.805.493.475,00	Dinas yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	1	5	4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	86,36 %	86,36 %	55.492.715.100,00	90,91 %	46.401.002.512,00	95,45 %	26.010.849.857,00	100,00 %	28.830.072.882,00	100,00 %	30.205.997.133,00	100,00 %	28.474.554.959,00	100,00 %	215.415.192.443,00	Dinas yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	1	5	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	36,18 %	38,33 %	188.929.320.502,00	40,48 %	137.238.074.930,00	42,62 %	150.395.740.175,00	44,77 %	160.852.065.029,00	46,91 %	164.276.179.007,00	49,06 %	171.468.050.736,00	49,06 %	973.159.430.379,00	Dinas yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	1	5	6	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Dokumen Perencanaan Tata Ruang	4,86%	22,22 %	1.162.998.775,00	33,33 %	2.250.000.000,00	44,44 %	3.650.000.000,00	77,78 %	3.850.000.000,00	88,89 %	3.350.000.000,00	100,00 %	3.350.000.000,00	100,00 %	17.612.998.775,00	Dinas yang membawahi urusan

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				PENATAAN RUANG	yang Terselesaikan																Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	1	5	7	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	-	100	29.805.000,00	100	50.000.000,00	100	50.750.000,00	100	51.511.250,00	100	52.283.918,00	100	52.859.041,00	100	287.209.209,00	Dinas yang membawahi urusan Pertanahan
2	1	5	8	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	75,5	100	359.812.500,00	100	200.000.000,00	100	203.000.000,00	100	206.045.000,00	100	209.135.675,00	100	211.436.167,00	100	1.389.429.342,00	Dinas yang membawahi urusan Pertanahan
2	1	5	9	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik	58,47	60	7.601.320.007,00	65	6.834.600.703,53	70	7.540.544.718,18	75	8.106.002.888,91	80	7.557.542.932,24	85	7.669.394.826,15	85	45.329.406.076,01	Dinas yang membawahi urusan Perhubungan
					Persentase angutan Umum lulus uji	100	100		100		100		100		100		100		100		Dinas yang membawahi urusan Perhubungan
2	1	5	10	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1,987	0,088	673.159.500,00	0,681	1.600.000.000,00	0,686	1.624.000.000,00	0,691	1.648.360.000,00	0,696	1.673.085.400,00	0,7	1.691.489.339,00	0,7	8.910.094.239,00	Dinas yang membawahi urusan Perumahan dan

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																					Kawasan Pemukiman
2	1	5	11	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang Telah Diserahkan ke Pemda Dalam Kondisi Baik	83,87	86,11	12.870.372.000,00	87,8	3.350.000.000,00	89,13	3.400.250.000,00	90,2	3.451.253.750,00	91,07	3.503.022.556,00	91,8	3.541.555.804,00	91,8	30.116.454.110,00	Dinas yang membawahi urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
3				**Misi 3: Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan memelihara kerukunan dalam kehidupan beragama**																	
3	**1**			**Tujuan: Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis**	**Indeks Harmoni Indonesia (IHal)**	**n/a**	**n/a**		**6,3**		**6,4**		**6,5**		**6,6**		**6,7**		**6,7**		
3	**1**	**1**		**Sasaran 1: Meningkatnya Penerapan Nilai Agama, Demokratisasi, toleransi, dan**	**Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)**	**78**	**78,3**		**78,5**		**78,6**		**78,9**		**79**		**79,1**		**79,1**		

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Kegotongroyongan di Masyarakat																	
3	1	1	1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	100	698.376.700,00	100	952.281.274,00	100	957.281.274,00	100	1.043.220.349,00	100	1.082.220.349,00	100	1.142.220.349,00	100	5.875.600.295,00	Badan yang membawahi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	1	1	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif dan Tertib Administrasi	39,13	39,61	7.067.877.000,00	40,1	7.132.477.000,00	40,58	7.139.480.750,00	40,58	7.165.740.500,00	40,58	7.215.740.500,00	40,58	7.245.740.500,00	42,03	42.967.056.250,00	Badan yang membawahi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	1	1	3	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	100	100	1.697.078.275,00	100	1.627.669.519,00	100	1.596.687.909,00	100	1.611.035.160,00	100	1.646.035.161,00	100	1.692.711.370,00	100	9.871.217.394,00	Badan yang membawahi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	1	1	4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHT	Persentase kegiatan keagamaan yang didukung	100,00 %	100,00 %	13.065.968.500,00	100,00 %	13.861.317.970,27	100,00 %	14.030.571.753,57	100,00 %	14.216.550.227,69	100,00 %	14.421.013.411,60	100,00 %	14.645.911.240,78	100,00 %	84.241.333.103,91	Sekretariat Daerah

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				ERAAN RAKYAT	oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan beragama masyarakat																
					Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	**56,05**	**58,3**		**61,3**		**63,83**		**66**		**70,5**		**70,5**		**70,5**		
3	1	1	5	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100,00 %	100,00 %	1.717.044.350,00	100,00 %	2.267.950.128,00	100,00 %	2.327.211.052,00	100,00 %	2.408.930.201,00	100,00 %	2.511.958.138,00	100,00 %	2.524.196.823,00	100,00 %	13.757.290.692,00	Dinas yang membawahi urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
					Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		Dinas yang membawahi urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	12,30 %	26,00 %		40,00 %		55,00 %		68,00 %		85,00 %		85,00 %		85,00 %		Dinas yang membawahi urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
					Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	12,00 %	12,00 %		12,00 %		12,00 %		12,00 %		18,00 %		18,00 %		18,00 %		Dinas yang membawahi urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
4				**Misi 4: Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, berintegritas dan akuntabel.**																	
4	**1**			**Tujuan: Terwujudnya Reformasi Birokrasi**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**BB (77)**	**BB (78)**		**BB (79)**		**BB (80)**		**A (81)**		**A (82)**		**A (83)**		**A (83)**		

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				dan Pelayanan publik yang profesional, efektif, inovatif, terintegritas dan akuntabel																	
					Indeks Daya Saing Daerah	3,66	3,7		3,76		3,8		3,88		3,91		3,95		3,95		
4	1	1		Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa	Indeks Pelayanan Publik	3,17 (B-)	3,27 (B-)		3,47 (B-)		3,51 (B)		3,55 (B)		3,60 (B)		3,65 (B)		3,65 (B)		Sekretariat Daerah
					Indeks Kepuasan Masyarakat	86,84 (B)	87,09 (B)		87,34 (B)		87,59 (B)		87,84 (B)		88,09 (B)		88,31 (A)		88,31 (A)		
					Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	3,88	3,93		3,95		3,98		4		4,02		4,04		4,04		
					Indeks Pencegahan Korupsi	92,54	93		94,5		95		95,5		96		96,5		96,5		
4	1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK/APIP/Auditor	0,00%	100,00 %	42.012.643.676,00	100,00 %	42.594.310.783,54	100,00 %	43.114.409.107,72	100,00 %	43.685.900.573,60	100,00 %	44.314.193.526,54	100,00 %	45.005.279.904,56	100,00 %	260.726.737.571,96	Sekretariat Daerah
					Persentase Pegawai dengan SKP minimal Nilai Baik Lingkup Sekretariat Daerah	99,00 %	100,00 %	812.167.150,00	100,00 %	832.574.752,42	100,00 %	842.740.916,06	100,00 %	853.911.641,85	100,00 %	866.192.644,64	100,00 %	879.701.046,57	100,00 %	5.087.288.151,54	Sekretariat Daerah

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	93,50 %	80,00 %	17.938.520.848,00	80,00 %	13.534.688.584,74	80,00 %	13.699.954.056,15	80,00 %	13.881.550.116,22	80,00 %	14.081.195.310,65	80,00 %	14.300.793.626,47	80,00 %	87.436.702.542,23	Sekretariat Daerah
					Persentase fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan	100,00 %	100,00 %	2.740.428.000,00	100,00 %	1.351.043.945,52	100,00 %	1.367.540.883,24	100,00 %	1.385.667.953,98	100,00 %	1.405.596.704,43	100,00 %	1.427.517.192,16	100,00 %	9.677.794.679,33	Sekretariat Daerah
4	1	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan hukum daerah	100,00 %	100,00 %	1.245.222.250,00	100,00 %	1.082.519.389,28	100,00 %	1.095.737.504,80	100,00 %	1.110.261.758,89	100,00 %	1.126.229.602,74	100,00 %	1.143.793.319,35	100,00 %	1.245.222.250,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan perekonomian dan Pemantauan sumber daya alam yang terlaksana	100,00 %	100,00 %	7.853.829.420,00	100,00 %	2.185.238.046,42	100,00 %	2.220.435.792,64	100,00 %	2.257.058.041,02	100,00 %	2.290.442.794,98	100,00 %	2.325.259.697,12	100,00 %	19.132.263.792,18	Sekretariat Daerah
					Persentase pengendalian dan evaluasi program pembangunan	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		Sekretariat Daerah
					Level Kematangan UKPBJ	Level Proaktif	Level Proaktif		Level Proaktif		Level Proaktif		Level Proaktif		Level Proaktif		Level Proaktif		Level Proaktif		Sekretariat Daerah
4	1	1	4	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN	Persentase ketepatan waktu penyusunan program kerja DPRD	100,00 %	100,00 %	27.955.598.081,00	100,00 %	19.438.520.543,87	100,00 %	19.585.728.998,74	100,00 %	19.771.961.230,84	100,00 %	20.034.162.819,58	100,00 %	20.370.040.159,27	100,00 %	127.156.011.833,30	Sekretariat DPRD

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi Pembahasan Raperda sesuai Propemperda	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		Sekretariat DPRD
					Persentase Realisasi Fasilitasi Kegiatan di DPRD	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		Sekretariat DPRD
4	1	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	81,00 %	83,00 %	5.872.820.000,00	85,00 %	5.649.000.000,00	87,00 %	5.688.800.000,00	88,00 %	5.634.750.000,00	89,00 %	5.586.960.000,00	90,00 %	5.546.620.000,00	90,00 %	33.978.950.000,00	Inspektorat
4	1	1	6	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Manajemen Risiko	Level 3 skor 3,001	Level 3 Skor 3,050	506.240.000,00	Level 3 Skor 3,100	496.150.000,00	Level 3 Skor 3,150	501.510.000,00	Level 3 Skor 3,200	530.210.000,00	Level 3 Skor 3,250	548.260.000,00	Level 3 Skor 3,300	567.030.000,00	Level 3 Skor 3,300	3.149.400.000,00	Inspektorat
					Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Level 3 skor 3,024	Level 3 Skor 3,050		Level 3 Skor 3,100		Level 3 Skor 3,150		Level 3 Skor 3,200		Level 3 Skor 3,250		Level 3 Skor 3,300		Level 3 Skor 3,300		Inspektorat
					Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3 skor 3,000	Level 3 Skor 3,050		Level 3 Skor 3,100		Level 3 Skor 3,150		Level 3 Skor 3,200		Level 3 Skor 3,250		Level 3 Skor 3,300		Level 3 Skor 3,300		Inspektorat
4	1	1	7	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%	100%	1.690.959.750,00	100%	1.173.757.161,00	100%	1.547.013.491,63	100%	1.570.218.696,00	100%	1.593.771.979,00	100%	1.617.678.561,00	100%	9.193.399.638,63	Badan yang membawahi urusan Perencanaan
					Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Badan yang membawahi urusan Perencanaan

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	1	1	8	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang Menggungakan Layanan Kepegawaian Berbasis Digital	66,17 %	85,00 %	2.140.894.420,00	88,00 %	2.423.952.170,00	91,00 %	2.463.987.530,00	94,00 %	2.488.347.430,00	97,00 %	2.513.072.710,00	100,00 %	2.538.168.880,00	100,00 %	14.568.423.140,00	Badan yang membawahi urusan Kepegawaian
					Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	84,09 %	85,00 %		86,00 %		87,00 %		88,00 %		89,00 %		90,00 %		90,00 %		Badan yang membawahi urusan Kepegawaian
					Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		Badan yang membawahi urusan Kepegawaian
					Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	89,86 %	95,00 %		95,00 %		95,00 %		95,00 %		95,00 %		95,00 %		95,00 %		Badan yang membawahi urusan Kepegawaian
4	1	1	9	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	8,39%	5,00%	401.103.350,00	5,50%	792.858.860,00	6,00%	804.751.760,00	6,50%	816.823.040,00	7,00%	829.075.400,00	7,5%	841.511.540,00	7,5%	4.486.123.950,00	Badan yang membawahi urusan Pendidikan dan Pelatihan
					Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		Badan yang membawahi urusan Pendidikan dan Pelatihan

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	74,09 %	75,00 %		76,00 %		77,00 %		78,00 %		79,00 %		80,00 %		80,00 %		Badan yang membawahi urusan Pendidikan dan Pelatihan
					Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	10,00 %	20,00 %		30,00 %		40,00 %		50,00 %		60,00 %		70,00 %		70,00 %		Badan yang membawahi urusan Pendidikan dan Pelatihan
4	1	1	10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,20 (BB)	70,20 (BB)	9.644.283.324,00	70,50 (BB)	15.730.361.075,09	70,70 (BB)	15.694.425.833,28	71,00 (BB)	16.614.590.641,62	71,15 (BB)	17.630.611.986,55	71,50 (BB)	18.717.754.825,62	71,50 (BB)	94.032.027.686,16	Badan yang membawahi urusan Keuangan
4	1	1	11	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Belanja Pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	21,38 %	22,88 %	312.016.463.941,00	24,38 %	314.269.302.816,62	25,88 %	318.208.677.509,84	27,38 %	321.585.665.123,28	28,88 %	325.297.673.409,78	30,38 %	329.416.407.198,21	30,38 %	1.920.794.189.998,73	Badan yang membawahi urusan Keuangan
					Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	23,31 %	24,81 %		26,31 %		27,81 %		29,31 %		30,81 %		32,31 %		32,31 %		Badan yang membawahi urusan Keuangan
					Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	47,10 %	48,60 %		50,10 %		51,60 %		53,10 %		54,60 %		56,10 %		56,10 %		Badan yang membawahi urusan Keuangan

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Persentaase Penurunan SILPA	74,96 %	76,46 %		77,96 %		79,46 %		80,96 %		82,46 %		83,96 %		83,96 %		Badan yang membawahi urusan Keuangan
					Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		Badan yang membawahi urusan Keuangan
4	1	1	12	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG DAERAH	Perrsentase Penambahan Nilai Aset Tetap	5,13%	6,63%	2.013.788.045,00	8,13%	2.563.286.857,25	9,63%	2.719.611.160,11	11,13 %	2.885.483.941,32	12,63 %	3.062.967.817,21	14,13 %	3.252.875.564,41	14,13 %	16.498.013.385,30	Badan yang membawahi urusan Keuangan
4	1	1	13	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	9,04%	10,00 %	2.804.257.575,00	10,20 %	2.744.999.600,00	10,40 %	3.047.500.000,00	10,60 %	3.227.500.000,00	10,80 %	3.407.500.000,00	11,00 %	3.587.500.000,00	11,11 %	18.819.257.175,00	Badan yang membawahi urusan Keuangan
					Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		Badan yang membawahi urusan Keuangan
					Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	100,00 %	25,00 %		25,00 %		50%		75%		100%		100%		100,00 %		Badan yang membawahi urusan Keuangan
4	1	1	14	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip	73,62 %	74%	63.280.443,00	74,50 %	227.066.370,00	75,00 %	260.922.366,00	75,20 %	264.836.201,00	75,50 %	268.808.745,00	75,70 %	272.840.876,00	75,70 %	1.357.755.001,00	Dinas yang membawahi urusan Kearsipan
4	1	1	15	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINT	Persentase Penyelesaian masalah di	100,00 %	100,00 %	172.177.700,00	100,00 %	523.817.003,05	100,00 %	528.785.331,79	100,00 %	535.351.220,65	100,00 %	547.176.338,53	100,00 %	558.177.026,14	100,00 %	2.865.484.620,16	KECAMATAN

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				AHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	bidang pemerintahan																
4	1	1	16	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Kelompok Masyarakat yang dibina dengan baik di tingkat kecamatan	100,00 %	100,00 %	12.871.449.840,00	100,00 %	12.691.270.495,91	100,00 %	12.751.508.382,41	100,00 %	12.891.526.055,99	100,00 %	13.058.479.144,77	100,00 %	13.247.888.830,66	100,00 %	77.512.122.749,74	KECAMATAN
4	1	1	17	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	100,00 %	100,00 %	5.600.500,00	100,00 %	39.931.210,62	100,00 %	43.033.573,33	100,00 %	46.367.301,63	100,00 %	48.234.757,92	100,00 %	49.205.288,96	100,00 %	232.372.632,46	KECAMATAN
4	1	1	18	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	100,00 %	100,00 %	578.063.150,00	100,00 %	455.324.861,46	100,00 %	460.113.610,32	100,00 %	468.752.054,72	100,00 %	482.770.187,52	100,00 %	492.162.728,79	100,00 %	2.937.186.592,81	KECAMATAN
4	1	1	19	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan tertib administrasi pemerintahan desa	100,00 %	100,00 %	317.436.850,00	100,00 %	419.782.505,41	100,00 %	445.122.076,83	100,00 %	479.595.090,20	100,00 %	493.810.848,76	100,00 %	502.965.559,08	100,00 %	2.658.712.930,28	KECAMATAN
					Indeks Desa	**0,6807**	**0,6857**		**0,6907**		**0,6957**		**0,7007**		**0,7057**		**0,7057**		**0,7057**		
4	1	1	22	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	100,00 %	100,00 %	48.700.250,00	100,00 %	50.000.000,00	100,00 %	100.000.000,00	100,00 %	240.000.000,00	100,00 %	100.000.000,00	100,00 %	100.000.000,00	100,00 %	638.700.250,00	Dinas yang membawahi urusan Pemberdayaan

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																					Masyarakat dan Desa
4	1	1	23	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	100,00 %	100,00 %	2.742.219.233,00	100,00 %	1.488.000.250,00	100,00 %	1.459.228.183,00	100,00 %	1.898.000.000,00	100,00 %	1.550.000.250,00	100,00 %	1.750.000.000,00	100,00 %	10.887.447.916,00	Dinas yang membawahi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	100%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		Dinas yang membawahi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	**1**	**2**		**Sasaran 2: Meningkatnya kualitas dan inovasi penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, data informasi, dan teknologi**	**Indeks Inovasi Daerah**	**45**	**48**		**53**		**58**		**63**		**68**		**70**		**70**		
					Indeks Pemerintahan Digital	**2,86**	**2,88**		**2,9**		**2,94**		**2,97**		**3,01**		**3,05**		**3,05**		
4	1	2	1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan	100%	100%	519.360.625,00	100%	850.000.000,00	100%	558.250.000,00	100%	566.623.750,00	100%	575.123.111,00	100%	583.749.962,00	100%	3.653.107.448,00	Badan yang membawahi urusan Penelitian dan Pengembangan

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					dalam Implementasi Pembangunan																
					Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Badan yang membawahi urusan Penelitian dan Pengembangan
					Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Badan yang membawahi urusan Penelitian dan Pengembangan
					Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Badan yang membawahi urusan Penelitian dan Pengembangan
4	1	2	2	PROGRAM INFORMASI	Persentase Tingkat	100	100	6.634.483.882,76	100	6.219.147.275,00	100	6.312.434.484,00	100	6.407.121.001,00	100	6.503.227.816,00	100	6.583.370.229,00	100	38.659.784.687,76	Dinas yang

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)																membawahi urusan Komunikasi dan Informatika
4	1	2	3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Layanan Jaringan Internet Pemerintah Daerah	89,62	91,54	5.190.100.216,00	93,08	4.320.000.000,00	94,62	4.390.988.830,00	96,54	4.507.958.717,00	98,46	4.507.958.717,00	100	4.580.210.002,00	100	27.497.216.482,00	Dinas yang membawahi urusan Komunikasi dan Informatika
4	1	2	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,63	2,7	1.010.056.800,00	2,8	281.800.000,00	2,9	285.652.000,00	3	299.936.780,00	3,1	299.936.780,00	3,2	299.936.780,00	3,2	2.477.319.140,00	Dinas yang membawahi urusan Statistik
4	1	2	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	166	190	43.322.000,00	215	144.450.000,00	230	199.000.000,00	255	213.959.945,00	275	231.410.501,81	300	252.459.311,53	300	1.084.601.758,34	Dinas yang membawahi urusan Persandian
4	1	2	6	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	1,41%	2,00%	867.092.145,00	2,50%	834.245.285,00	3,00%	973.080.000,00	3,50%	928.840.000,00	4,00%	993.860.000,00	4,50%	1.063.430.000,00	4,50%	5.660.547.430,00	Dinas yang membawahi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	60,91 %	65,12 %		70,50 %		75,00 %		80,12 %		85,00 %		90,00 %		90,00 %		Dinas yang membawahi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5				**Misi 5: Menyelenggarakan pembangunan yang berlandaskan prinsip keseimbangan, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan**																	
5	**1**			**Tujuan: Terwujudnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**64,61**	**75,25**		**75,42**		**75,59**		**75,76**		**75,93**		**76,16**		**76,16**		
					Indeks Risiko Bencana	**148,57**	**148,57**		**147,57**		**146,57**		**145,57**		**144,57**		**143,57**		**143,57**		
5	**1**	**1**		**Sasaran 1: Meningkatnya pengelolaa**	**Penurunan Emisi GRK (GgCO2-e)**	**n.a**	**14412 2,13**		**17058 4,86**		**19704 7,59**		**22351 0,32**		**24997 3,05**		**27643 5,78**		**27643 5,78**		

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				n kualitas air, udara dan lahan																	
5	1	1	1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	58,57	74,65	331.389.400,00	74,85	501.999.100,00	74,05	513.999.100,00	75,25	705.999.100,00	75,45	570.999.100,00	76	582.999.100,00	76	3.207.384.900,00	Dinas yang membawahi urusan Lingkungan Hidup
					Indeks Kualitas Udara	87,21	81,07		81,27		81,47		81,67		81,87		82		82		
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	33,2	65,5		65,57		65,64		65,71		65,78		66		66		
5	1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik yang dikelola	50	50	4.865.624.527,00	50	1.785.900.022,57	50	1.901.340.507,84	50	2.627.960.899,14	50	1.867.042.406,66	50	4.005.220.302,68	40	17.053.088.665,89	Dinas yang membawahi urusan Lingkungan Hidup
5	**1**	**2**		**Sasaran 2: Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana**	**Indeks Ketahanan Daerah**	**0,35**	**0,37**		**0,39**		**0,41**		**0,43**		**0,45**		**0,47**		**0,47**		
5	1	2	1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tingkat Kebijakan Penanggulangan Bencana	-	25	2.323.896.540,00	50	1.886.466.426,36	25	2.006.298.186,42		2.098.097.163,97		2.147.914.033,47	25	2.321.097.501,93	100	12.783.769.852,15	Badan yang membawahi urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
					Persentase Korban	100	100		100		100		100		100		100		100		Badan yang

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Bencana yang Dijangkau Tim Reaksi Cepat (TRC)																membawahi urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Persentase Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) Terealisasi	100	100		100		100		100		100		100		100		Badan yang membawahi urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

BAB 4 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Program pembangunan dan program perangkat daerah dirancang untuk mempercepat pencapaian target-target *outcomes* hingga *impacts*, memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Untuk itu, penting mengetahui kebutuhan dan kapasitas daerah dalam merancang langkah-langkah pembangunan dengan maksimal.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah merupakan gambaran kapasitas keuangan riil daerah yang akan dialokasikan untuk mendukung program pembangunan dalam jangka menengah selama lima tahun ke depan. Kapasitas keuangan riil ini dihitung berdasarkan total penerimaan daerah setelah dikurangi dengan berbagai kewajiban belanja dan pengeluaran yang bersifat wajib serta mengikat.

Dalam menyusun alokasi pendanaan pembangunan, perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta memastikan keselarasan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, prinsip penganggaran harus lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Pendekatan yang digunakan berbasis *money follow program* dan *money follow function*, di mana penganggaran difokuskan pada program atau kegiatan yang berkaitan langsung dengan prioritas pembangunan daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta selaras dengan tugas dan fungsi utama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam implementasi kebijakan pembangunan daerah, pencapaian tujuan pembangunan diwujudkan melalui alokasi anggaran belanja daerah yang terdiri atas beberapa komponen utama, seperti belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, belanja tak terduga. Penggunaan Dana Belanja Operasi digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial. Belanja Modal digunakan untuk belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, belanja modal aset lainnya dan belanja modal BLUD. Belanja Transfer digunakan untuk belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Penjelasan mengenai masing-masing belanja sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029

Kode			Kapasitas Riil/Belanja	Proyeksi (Rp Juta)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
			KAPASITAS RIIL KEUANGAN						
5			**BELANJA**	**1.934.303,85**	**1.936.001,98**	**1.971.574,60**	**2.009.942,50**	**2.051.366,58**	**2.096.135,34**
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**1.399.738,01**	**1.408.194,63**	**1.411.566,30**	**1.452.226,70**	**1.443.188,49**	**1.436.731,99**
5	1	1	Belanja Pegawai	757.887,92	779.926,22	781.876,03	783.830,72	785.790,30	787.754,78
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	582.325,55	568.743,86	570.165,72	571.591,14	573.020,12	589.452,67
5	1	5	Belanja Hibah	58.394,35	58.394,35	58.394,35	95.674,64	83.247,87	58.394,35
5	1	6	Belanja Bantuan Sosial	1.130,20	1.130,20	1.130,20	1.130,20	1.130,20	1.130,20

Kode			Kapasitas Riil/Belanja	Proyeksi (Rp Juta)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				-		-	-	-	-
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**225.867,68**	**204.169,74**	**222.276,51**	**205.197,20**	**240.139,44**	**275.066,93**
				-	-	-	-	-	-
5	**3**		**BELANJA TAK TERDUGA**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
5	3	1	Belanja Tak Terduga	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				-	-	-	-	-	-
5	**4**		**BELANJA TRANSFER**	**306.698,16**	**321.637,61**	**335.731,79**	**350.518,60**	**366.038,64**	**382.336,42**
5	4	1	Belanja Bagi Hasil	19.525,38	18.986,69	20.958,82	23.145,56	25.570,47	28.259,70
5	4	2	Belanja Bantuan Keuangan	287.172,78	287.172,78	287.172,78	287.172,78	287.172,78	287.172,78

Program Perangkat Daerah merupakan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait, beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Asahan berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Rencana program Perangkat Daerah pada RPJM Daerah Kabupaten Asahan disusun dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030. Selanjutnya, program yang telah disusun akan menjadi bagian dari upaya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah sebagai pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan datang. Rincian program yang mencakup semua urusan Kabupaten Asahan terdapat pada berikut ini:

Tabel 4.2 Rencana Program Perangkat Daerah Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Asahan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																			
			DINAS PENDIDIKAN																			
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai (Kategori)	63,10 (B)	64,14 (B)	370.212.442.811,53	65,27 (B)	366.042.223.303,34	67,33 (B)	370.103.591.822,78	69,17 (B)	374.750.254.176,69	71,47 (BB)	380.046.772.216,92	72,11 (BB)	386.064.726.710,19	72,11 (BB)	2.247.220.011.041,45	Dinas Pendidikan
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS)	persen	64,58	67,62	143.804.808.208,40	70,66	137.441.937.633,00	73,70	139.503.566.698,00	76,74	141.596.120.198,00	79,78	143.720.062.001,00	82,82	145.875.862.931,00	82,82	851.942.357.669,40	Dinas Pendidikan
					Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan SD dan SMP (APS)	persen	98,83	98,86		98,89		98,92		98,95		98,98		99,01		99,04		Dinas Pendidikan
					Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	persen	13,17	13,53		13,89		14,27		14,65		15,05		15,45		15,46		Dinas Pendidikan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Kesetaraan (APS)																	
					Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS)	persen	24,95	25,62		26,32		27,03		27,76		28,51		29,27		29,28		Dinas Pendidikan
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	persen	19,17	19,65	-	20,14	-	20,64	-	21,16	-	21,69	-	22,23	-	22,78	-	Dinas Pendidikan
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru	persen	49,25	50,48	1.125.045.000,00	51,74	568.400.000,00	53,04	576.926.000,00	54,36	585.579.620,00	55,72	594.363.504,30	57,12	603.278.321,86	58,54	4.053.592.446,16	Dinas Pendidikan
					Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	persen	31,53	32,30		33,07		33,84		34,61		35,38		36,15		36,15		Dinas Pendidikan
1	1	5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbaharui	persen	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	Dinas Pendidikan
1	1	6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	persen	12,50	12,81	-	13,13	-	13,46	-	13,80	-	14,14	-	14,50	-	14,86	-	Dinas Pendidikan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																			
			DINAS KESEHATAN																			
1	2	1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	***Nilai AKIP Perangkat Daerah***	**Nilai (Kategori)**	63,40	63,50	83.214.148.630,00	70,50	81.290.969.044,94	73,00	82.550.254.606,61	75,00	83.788.508.427,21	80,50	85.045.336.053,61	82,00	86.321.016.094,41	82,00	502.210.232.856,78	Dinas Kesehatan
1	2	2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat**	***Jumlah Kematian Ibu***	**Orang**	5,00	5,00	143.853.752.589,20	4,00	123.554.750.855,70	4,00	124.724.597.969,57	3,00	126.222.309.600,71	3,00	127.979.891.442,34	3,00	130.023.811.995,10	3,00	776.359.114.452,62	Dinas Kesehatan
					Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	**persen**	3,21	90,00		92,00		94,00		96,00		98,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
					Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	**persen**	85,00	90,00		92,00		94,00		96,00		98,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
					Cakupan Kasus Malaria (Annual Paracite Incidence)	**persen**	2,30	1,60		1,50		1,40		1,30		1,20		1,00		1,00		Dinas Kesehatan
					Persentase Capaian SPM Kesehatan	**persen**	95,20	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna	**persen**	77,00	76,78		76,78		76,78		76,78		80,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
					Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	**persen**	2,50	2,20		2,10		2,00		1,80		1,60		1,40				Dinas Kesehatan
					Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	**persen**	8,00	12,00		15,00		50,00		60,00		80,00		100,00				Dinas Kesehatan
					Prevalensi Obesitas > 18 tahun	**persen**	18,80	26,50		26,00		25,50		25,00		24,50		24,00				Dinas Kesehatan
					Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	**persen**	85,12	85,25		85,37		85,45		85,67		85,85		86,12				Dinas Kesehatan
					Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	**persen**	48,00	48,35		50,76		53,29		55,95		58,74		61,67				Dinas Kesehatan
					Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	**persen**	0,70	0,80		0,83		0,85		0,87		0,90		0,92				Dinas Kesehatan
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan	**persen**	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00				Dinas Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					dengan perbekalan kesehatan sesuai standar																	
					Persentase lanjut usia yang mandiri	**persen**	74,30	75,00		77,00		79,00		81,00		83,00		85,00				Dinas Kesehatan
1	2	3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan**	*Persentase Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan*	**persen**	8,00	8,00	4.559.489.753,93	13,00	2.388.421.000,00	18,00	2.482.547.315,00	23,00	2.522.409.024,73	28,00	2.563.026.070,10	33,00	2.607.156.992,95	33,00	17.123.050.156,71	Dinas Kesehatan
					Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	**per 1.000 penduduk**	2,00	2,05		2,10		2,15		2,20		2,17		2,50				Dinas Kesehatan
					Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	**persen**	54,00	65,00		70,00		75,00		80,00		90,00		90,00				Dinas Kesehatan
					Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	**persen**	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				Dinas Kesehatan
1	2	4	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman**	*Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman*	**persen**	100,00	100,00	366.746.000,00	100,00	371.486.480,00	100,00	377.058.777,33	100,00	382.714.658,86	100,00	388.455.378,74	100,00	394.282.209,43	100,00	2.280.743.504,36	Dinas Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	**persen**	88,13	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
					Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	**persen**	85,30	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
					Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	**persen**	54,54	60,00		65,00		70,00		75,00		80,00		85,00		85,00		Dinas Kesehatan
					Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	**persen**	50,00	60,00		65,00		70,00		75,00		80,00		85,00		85,00		Dinas Kesehatan
1	2	5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan**	***Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan***	**persen**	84,00	80,00	2.485.773.919,00	84,00	2.200.986.000,00	88,00	2.234.000.790,00	92,00	2.267.510.801,85	96,00	2.301.523.463,88	100,00	2.336.046.315,84	100,00	13.825.412.905,57	Dinas Kesehatan
			UPTD RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG																			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tercapainya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai (Kategori)**	64,7 (B)	70,00 (BB)	92.741.703.247,80	70,25 (BB)	88.881.196.346,30	70,5 (BB)	89.681.504.795,23	70,75 (BB)	90.570.834.849,22	71,00 (BB)	91.559.468.200,61	71,25 (BB)	92.658.841.842,33	71,25 (BB)	546.093.349.323,39	UPTD RSUD HAMS
1	2	2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan**	**Tingkat Pelayanan Rujukan Tingkat Daerah**	**Persen**	100,00	100,00	4.661.048.046,00	100,00	4.931.290.000,00	100,00	5.276.480.000,00	100,00	5.645.840.000,00	100,00	6.041.000.000,00	100,00	6.463.920.000,00	100,00	33.019.578.046,00	UPTD RSUD HAMS
1	3		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**																			
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG																			
1	3	1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai (Kategori)**	65,10	70,10	12.505.243.743,65	70,60	12.586.700.106	71,10	18.467.736.901,32	71,60	14.410.478.450	72,10	17.419.211.978,60	72,60	16.498.565.616,65	72,60	91.878.979.257,78	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	3	2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhdap irigasi**	**Cakupan daerah layanan irigasi yang berfungsi dengan kondisi baik**	**persen**	69,48 %	74,04 %	1.784.823.637,00	89,76%	12.150.000.000,00	91,38%	14.150.000.000,00	94,27%	7.850.000.000	95,71 %	4.850.000.000	97,16%	3.850.000.000	97,16%	44.634.823.637,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	3	3	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum**	**Persentase Rumah yang terlayani air minum**	**persen**	41,88 %	49,20 %	2.274.999.175,00	49,45%	7.570.000.000,00	49,71%	8.160.000.000,00	49,96%	7.750.000.000,00	50,21 %	7.750.000.000,00	50,47%	7.750.000.000,00	50,47%	41.254.999.175,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	3	5	**PROGRAM PENGELOLAAN**	**Meningkatnya akses**	**Persentase Rumah**	**persen**	95,00 %	96,00 %	569.187.000	96,20%	830.000.000	96,41%	1.239.110.000	96,62%	1.750.000.000	96,83 %	860.500.000	96,83%	871.735.000	96,83%	6.120.000.000	Dinas Pekerjaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah**	**yang terlayani akses Air Limbah**				900,00		000,00		0.000,00		0.000,00		000,00		000,00		2.900,00	Umum dan Tata Ruang
1	3	6	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan**	**Persentase Drainase Kota dalam Kondisi Baik**	**persen**	91,49%	91,78%	6.005.493.475,00	92,07%	5.700.000.000.000,00	92,36%	5.500.000.000.000,00	92,65%	5.200.000.000.000,00	92,94%	5.200.000.000.000,00	93,23%	5.200.000.000.000,00	93,23%	32.805.493.475,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	3	8	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Meningkatnya bangunan gedung dalam kondisi baik	**Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik**	**persen**	86,36%	86,36%	55.492.715.100,00	90,91%	46.401.002.512,00	95,45%	26.010.849.570	100,00%	28.830.072.820	100,00%	30.205.997.133,00	100,00%	28.474.545.490	100,00%	215.415.192.443,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	3	10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Meningkatnya aksesbilitas masyarakat yang nyaman dan aman	**Tingkat Kemantapan Jalan**	**persen**	36,18%	38,33%	188.929.320.502,00	40,48%	137.238.074.930,00	42,62%	150.395.740.175,00	44,77%	160.852.065.029,00	46,91%	164.276.179.007,00	49,06%	171.468.050.736,00	49,06%	973.159.430.379,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	3	11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli**	**Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli**	**persen**	0,00%	80,00%	100.021.000,00	80,00%	300.000.000,00	80,00%	200.000.000,00	80,00%	300.000.000,00	80,00%	200.000.000,00	80,00%	300.000.000,00	80,00%	1.400.021.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	3	12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	**Persentase Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang Terselesaikan**	**persen**	4,86%	22,22%	1.162.998.775,00	33,33%	2.250.000.000,00	44,44%	3.650.000.000,00	77,78%	3.850.000.000,00	88,89%	3.350.000.000,00	100,00%	3.350.000.000,00	100,00%	17.612.998.775,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	4		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**																			
			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																			
1	4	1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai (Kategori)**	BB (73,50)	BB (73,60)	5.451.881	BB (73,70)	5.773.871	BB (73,80)	5.816.811	BB (73,90)	5.876.421	BB (74,00)	2.600.900	BB (74,10)	6.030.150	BB (74,10)	31.550.071.5	Dinas Perumahan dan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Perangkat Daerah**					8.038,00		6.585,67		8.426,66		4.811,15		5.024,40		8.681,38		67,26	Kawasan Pemukiman
1	4	2	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Meningkatnya jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni**	**Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni**	**persen**	0,00	100,00	641.702.000,00	100,00	925.000.000,00	100,00	938.875.000,00	100,00	952.958.125,00	100,00	967.252.495,00	100,00	1.042.721.118,00	100,00	5.468.508.738,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Meningkatnya jumlah warga negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	**Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni**	**persen**	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
1	4	3	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Meningkatnya luas kawasan kumuh yang ditangani**	**Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani**	**persen**	3,95	4,58	2.032.149.250,00	5,21	3.455.000.000,00	5,84	3.506.826.500,00	6,47	3.559.427.375,00	7,10	3.612.818.505,00	7,72	3.657.559.792,00	7,72	19.818.780.202,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	4	4	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Meningkatnya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni**	**Cakupan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni**	**persen**	1,987	0,088	673.159.500,00	0,681	1.600.000.000,00	0,686	1.624.000.000,00	0,691	1.648.360.000,00	0,696	1.673.085.400,00	0,700	1.691.489.333,00	0,700	8.910.094.233,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	4	5	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman**	**Persentase PSU Perumahan yang Telah Diserahkan ke Pemda Dalam**	**persen**	83,87	86,11	12.870.372.000,00	87,80	3.350.000.000,00	89,13	3.400.250.000,00	90,20	3.451.253.750,00	91,07	3.503.022.556,00	91,80	3.541.555.804,00	91,80	30.116.454.110,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Kondisi Baik																	
1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																			
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																			
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai (Kategori)	71,2 (BB)	71,21 (BB)	14.691.822.508,00	71,22 (BB)	12.204.161.923,59	71,3 (BB)	11.253.247.782,55	71,5 (BB)	11.363.552.747,43	72 (BB)	11.375.321.840,61	73 (BB)	11.648.948.519,42	73 (BB)	72.537.055.216,60	Satpol PP
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	persen	100,00 %	100,00 %	1.717.044.350,00	100,00 %	2.267.950.128,00	100,00 %	2.327.211.052,00	100,00 %	2.408.930.201,00	100,00%	2.511.958.138,00	100,00 %	2.524.196.823,00	100,00 %	13.757.290.692,00	Satpol PP
				Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	persen	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00%		100,00 %		100,00 %		Satpol PP
				Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	persen	12,30 %	26,00 %		40,00%		55,00%		68,00%		85,00 %		85,00%		85,00%		Satpol PP
				Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	persen	12,00 %	12,00 %		12,00%		12,00%		12,00%		18,00 %		18,00%		18,00%		Satpol PP
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	persen	100,00 %	100,00 %	2.022.482.155,00	100,00 %	3.146.869.505,00	100,00 %	4.253.659.500,00	100,00 %	4.298.030.750,00	100,00%	4.443.123.812,00	100,00 %	4.443.123.812,00	100,00 %	22.607.291.534,00	Satpol PP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	**Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**persen**	12,00 %	16,00 %		16,00%		16,00%		16,00%		20,00 %		20,00%		20,00%		Satpol PP
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																			
1	5	1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tercapainya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai (Kategori)**	73,40 (BB)	73,40 (BB)	3.821.953.842,00	73,45 (BB)	3.992.625.839,00	73,50 (BB)	3.944.584.803,00	73,55 (BB)	3.931.661.023,00	73,60 (BB)	3.968.568.553,00	73,65 (BB)	3.890.769.485,00	73,65 (BB)	23.550.157.625,00	BPBD
1	5	3	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Tersedianya Dokumen Kebijakan Penanggulangan Bencana**	**Tingkat Kebijakan Penanggulangan Bencana**	**persen**	-	25,00	2.323.896.540,00	50,00	1.886.466.422,00	25,00	2.006.298.188,00		2.098.167.163,00		2.147.913.470,00	25,00	2.321.091.507,00	100,00	12.783.692.515,00	BPBD
				Terjangkaunya Korban Bencana oleh Tim Reaksi Cepat (TRC)	**Persentase Korban Bencana yang Dijangkau Tim Reaksi Cepat (TRC)**	**persen**	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BPBD
				Tersedianya Dokumen Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA)	**Persentase Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) Terealisasi**	**persen**	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BPBD
1	6		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**																			
			DINAS SOSIAL																			
1	6	1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai (Kategori)**	BB	BB	5.669.283.791,80	BB	5.384.288.681,68	BB	5.411.781.114,25	BB	5.443.913.116,46	BB	5.465.872.522,88	BB	5.605.195.610,58	BB	32.983.317.617,65	Dinas yang membawahi urusan Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	6	2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Meningkatnya pemberdayaan sosial**	**Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan atau Relawan Sosial yang Bersertifikat atau Memenuhi Kualifikasi Kompetensi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**	**persen**	-	67%	770.068.000,00	75%	540.040.900,00	80%	560.040.900,00	85%	560.040.900,00	90%	560.040.900,00	100%	560.040.900,00	100%	3.550.272.500,00	Dinas yang membawahi urusan Sosial
					Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya	**persen**	36,23 %	100,00 %		67,00%		67%		67%		67%		80%		100%		Dinas yang membawahi urusan Sosial
1	6	3	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	**Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan**	**orang**	-	12 Orang	-	12 Orang	-	12 Orang	-	12 Orang	-	12 Orang	-	12 Orang	-	12 Orang	-	Dinas yang membawahi urusan Sosial
					Persentase Warga Negara Migran Korban	**persen**	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas yang membawahi

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Tindak Kekerasan yang Tertangani																	urusan Sosial
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	persen	100%	100%	774.881.950,00	100%	797.087.800,00	100%	827.087.800,00	100%	832.087.800,00	100%	882.751.000,00	100%	882.751.000,00	100%	4.996.647.350,00	Dinas yang membawahi urusan Sosial
					Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	persen	70%	70%		75%		80%		85%		90%		95%		100%		Dinas yang membawahi urusan Sosial
					Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas yang membawahi urusan Sosial
					Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas yang membawahi urusan Sosial
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas yang membawahi urusan Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti																	
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	persen	-	73%	757.500.650,00	73%	773.000.000,00	73,00%	793.000.000,00	73,00%	797.000.000,00	73,00 %	797.000.000,00	73,00%	797.000.000,00	100,00 %	4.714.500.650,00	Dinas yang membawahi urusan Sosial
					Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	persen	-	-		0,03 %		0,03 %		0,03 %		0,03 %		0,03 %		0,03 %		Dinas yang membawahi urusan Sosial
					Persentase Keluarga Miskin dan rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	persen	-	-		0,09 %		0,09 %		0,09 %		0,09 %		0,09 %		0,09 %		Dinas yang membawahi urusan Sosial
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada saaat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah	persen		100%	485.329.705,00	100%	465.000.000,00	100%	465.000.000,00	100%	465.000.000,00	100%	508.626.439,00	100%	508.626.439,00	100%	2.897.582.583,00	Dinas yang membawahi urusan Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Kabupaten/ Kota																	
					Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas yang membawahi urusan Sosial
					Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	persen		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		Dinas yang membawahi urusan Sosial
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makan Pahlawan Nasional yang terkelola dengan Baik	persen	58%	100%	115.360.095,00	100%	270.561.345,00	100%	270.561.345,00	100%	342.851.665,00	100%	348.000.000,00	100%	342.211.100,00	100%	1.689.545.550,00	Dinas yang membawahi urusan Sosial
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																			
			DINAS KETENAGAKERJAAN																			
2	7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai (Kategori)	BB	75,8(BB)	3.847.359.023,50	76,5(BBB)	3.847.082.674,54	77,52(BB)	3.904.788.914,66	78,54(BB)	3.963.360.748,38	79,56(BB)	4.001.635.056,01	80,56(BB)	4.061.659.581,85	80,56(BB)	23.625.859.984	Dinas yang membawahi urusan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			DAERAH KABUPATEN/KOTA																			Tenaga Kerja
2	7	2	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Terkelolanya informasi tenaga kerja**	**Persentase Kabupaten yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja**	**persen**	100,00 %	0,00%	19.812.951,50	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	31.770.434,19	100,00 %	32.246.990,70	100,00 %	83.830.376,39	Dinas yang membawahi urusan Tenaga Kerja
2	7	3	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Meningkatnya produktivitas tenaga kerja**	**Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi**	**persen**	80,00 %	80,00 %	324.999.950,00	82,00%	380.485.941,20	83,00%	371.902.501,08	84,00%	368.433.331,73	86,00 %	366.369.818,85	86,00%	375.037.456,17	86,00%	2.187.228.999,03	Dinas yang membawahi urusan Tenaga Kerja
2	7	4	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Meningkatnya penempatan tenaga kerja**	**Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri**	**persen**	39,49 %	39,70 %	219.791.550,00	39,91%	235.479.949,00	40,12%	239.012.148,00	40,33%	242.597.330,00	40,54 %	246.236.290,00	40,75%	249.929.835,01	40,75%	1.433.047.102,01	Dinas yang membawahi urusan Tenaga Kerja
2	7	5	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi**	**Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial**	**angka**	23.256,00	23.306,00	580.282.100,00	23.356,00	660.016.031,50	23.406,00	669.916.271,97	23.456,00	679.965.016,05	23.506,00	683.913.261,58	23.556,00	694.171.960,50	23.556,00	3.968.264.641,60	Dinas yang membawahi urusan Tenaga Kerja
2	8		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**																			
			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,																			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
2	8	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai (Kategori)	68 (BB)	67,76 (B)	7.204.241.431,00	68 (B)	8.025.016.302,00	71 (BB)	8.127.587.851,03	72 (BB)	8.205.083.688,85	73 (BB)	8.292.085.685,60	74 (BB)	8.470.523.737,65	74(BB)	48.324.542.132,13	Dinas yang membawahi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	persen	25,76 %	11,61 %	60.000.000,00	59,00%	134.989.306,00	59,20%	190.545.144,00	59,40%	146.431.492,00	59,70 %	152.670.607,00	60,00%	159.286.292,00	60,00%	843.922.841,00	Dinas yang membawahi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Perempuan	persen	49,76 %	50,00 %		51,00%		52,00%		53,00%		54,00 %		55,00%		55,00%		Dinas yang membawahi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan	persen	100,00 %	100,00 %	141.777.500,00	100,00 %	136.786.914,00	100,00 %	189.339.342,71	100,00 %	192.734.432,85	100,00%	198.180.479,36	100,00 %	200.678.156,08	100,00 %	1.059.496.825,00	Dinas yang membawahi urusan Pemberdayaan Perempu

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Komprehensif																	an dan Perlindungan Anak
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	persen	0,00%	0,00%	15.491.400,00	0,00%	72.100.000,00	50,00%	77.147.000,00	52,00%	82.418.000,00	54,00%	83.654.270,00	56,00%	84.909.084,00	56,00%	415.719.754,00	Dinas yang membawahi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	angka	71,71	71,72	572.607.475,00	71,73	153.366.667,00	71,74	155.366.667,00	71,75	158.366.667,00	71,76	160.366.667,00	71,77	165.366.667,00	71,77	1.365.440.810,00	Dinas yang membawahi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Persentase Pelayanan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	persen	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		Dinas yang membawahi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	100,00%	100,00%	443.912.500,00	100,00%	363.865.000,00	100,00%	369.322.975,00	100,00%	374.862.818,88	100,00%	380.485.760,96	100,00%	386.193.047,11	100,00%	2.318.642.101,95	Dinas yang membawahi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				salah lainnya terhadap anak																		
					Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	persen	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		Dinas yang membawahi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																		
			DINAS KETAHANAN PANGAN																		
2	9	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai (Kategori)	65,15 (B)	65,30 (B)	3.618.357.470	66 (B)	3.573.623.140,53	67 (B)	3.804.091.912,04	68 (B)	3.807.227.807.800,40	69 (B)	4.025.896.644,59	70 (BB)	3.941.249.453,98	73 (BB)	22.770.463.022,03	Dinas yang membawahi urusan Pangan
2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	persen	41,46 %	51,22 %	680.000.000	60,98%	680.000.000	65,85%	321.818.000	70,73%	321.818.000	75,61 %	334.818.000	80,49%	321.818.000	80,49%	2.660.270.020.000	Dinas yang membawahi urusan Pangan
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Nilai Skore Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	87,05 %	87,27 %	492.084.825	87,49%	543.016.938	87,70%	583.259.989	87,92%	642.689.602	88,14 %	484.704.427	88,36%	636.023.032	88,63%	3.381.778.813	Dinas yang membawahi urusan Pangan
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	persen	83,82 %	80,88 %	185.000.050	79,41%	157.125.051	77,94%	243.125.051	75,98%	246.771.927	73,53 %	246.771.927	72,06%	246.771.927	72,06%	1.325.565.933	Dinas yang membawahi urusan Pangan
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN	Meningkatnya pengawasan mutu dan	Persentase Pangan Segar yang	persen	100%	90%	55.6	95%	41.5	95%	53.9	95%	54.7	100%	54.7	100%	82.1	100%	342.	Dinas yang membaw

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			KEAMANAN PANGAN	**keamanan pangan**	**Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan**				88.900		24.234		89.450		99.292		99.292		75.707		976.875	ahi urusan Pangan
2	10		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**																			
			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN																			
2	10	4	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan yang belum bersertifikat melalui proses mediasi**	**Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi**	**persen**	100	100	310.350.000,00	100	200.000.000,00	100	203.000.000,00	100	206.045.000,00	100	209.135.675,00	100	211.436.167,00	100	1.339.966.842,00	Dinas yang membawahi urusan Pertanahan
2	10	5	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Meningkatnya penyelesaian masalah ganti kerugian tanah**	**Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**	**persen**	-	100	29.805.000,00	100	50.000.000,00	100	50.750.000,00	100	51.511.250,00	100	52.283.918,00	100	52.859.041,00	100	287.209.209,00	Dinas yang membawahi urusan Pertanahan
2	10	6	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Menigkatnya tanah obyek landreform yang siap untuk didistribusikan, khususnya tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee**	**Persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum**	**persen**	17,66	-	-	20,00	100.000.000,00	20,00	101.500.000,00	20,00	103.022.500,00	20,00	104.567.837,00	20,00	105.718.083,00	20,00	514.808.420,00	Dinas yang membawahi urusan Pertanahan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					dan Tanah Absentee																	
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Meningkatnya luas tanah aset pemerintahan yang telah disertifikatkan	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	persen	75,50	100	359.812.500,00	100	200.000.000,00	100	203.000.000,00	100	206.045.000,00	100	209.135.675,00	100	211.436.167,00	100	1.389.429.342,00	Dinas yang membawahi urusan Pertanahan
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																			
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP																			
2	11	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai (Kategori)	72,65 (BB)	73(BB)	23.026.077.854,00	74 (BB)	21.564.832.547,00	75 (B)B	22.077.932.547,00	76 (BB)	21.586.032.547,00	77 (BB)	22.593.132.547,00	77 (BB)	21.094.232.547,00	77(BB)	131.942.240.589,00	Dinas yang membawahi urusan Lingkungan Hidup
2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	persen	0,00	0,00	-	100,00	250.000.000,00	100,00	100.000.000,00	0,00	-	100,00	250.000.000,00	0,00	-	100,00	600.000.000,00	Dinas yang membawahi urusan Lingkungan Hidup
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	nilai	58,57	74,65	331.389.400,00	74,85	501.999.100,00	74,05	513.999.100,00	75,25	705.999.100,00	75,45	570.999.100,00	76,00	582.999.100,00	76,00	3.207.384.900,00	Dinas yang membawahi urusan Lingkungan Hidup
					Indeks Kualitas Udara	nilai	87,21	81,07		81,27		81,47		81,67		81,87		82,00		82,00		Dinas yang membawahi urusan Lingkungan Hidup
					Indeks Kualitas	nilai	33,20	65,50		65,57		65,64		65,71		65,78		66,00		66,00		Dinas yang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Tutupan Lahan																	membawahi urusan Lingkungan Hidup
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik yang dikelola	persen	50,00	50,00	4.865.624.527,00	50,00	1.785.900.022,57	50,00	1.901.340.507,84	50,00	2.627.960.899,14	50,00	1.867.042.406,66	50,00	4.005.220.302,68	40,00	17.053.888.659,89	Dinas yang membawahi urusan Lingkungan Hidup
2	11	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola	persen	97,28	100,00	40.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	55.000.000,00	100,00	60.000.000,00	100,00	65.000.000,00	100,00	70.000.000,00	100,00	340.000.000,00	Dinas yang membawahi urusan Lingkungan Hidup
2	11	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	persen		80,00	80.399.709,00	80,00	245.000.000,00	85,00	247.000.000,00	85,00	248.000.000,00	85,00	249.000.000,00	90,00	250.000.000,00	90,00	1.319.399.709,00	Dinas yang membawahi urusan Lingkungan Hidup
2	11	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	persen	85,00	90,00	541.488.096,00	95,00	347.211.234,00	95,00	350.211.234,00	95,00	353.211.234,00	100,00	356.211.234,00	100,00	357.211.234,00	100,00	2.305.544.266,00	Dinas yang membawahi urusan Lingkungan Hidup
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak	persen		95,00	16.548.326,00	95,00	60.000.000,00	95,00	65.000.000,00	95,00	70.000.000,00	100,00	75.000.000,00	100,00	80.000.000,00	100,00	366.548.326,00	Dinas yang membawahi urusan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				lingkungan hidup	Pidana Lingkungan Hidup																	Lingkungan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	nilai	35,00	50,00	1.867.522.000,00	55,00	1.036.766.000,00	60,00	846.766.000,00	65,00	852.766.000,00	70,00	858.766.000,00	70,00	864.766.000,00	70,00	6.327.352.000,00	Dinas yang membawahi urusan Lingkungan Hidup
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																			
			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																			
2	12	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai (Kategori)	72,15	72,75	8.328.845.874,00	73,75	8.290.751.292,48	74,12	8.227.813.732,47	75,50	8.342.905.873,89	76,40	8.464.250.328,59	78,50	8.528.141.358,51	78,50	50.182.708.459,94	Dinas yang membawahi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	persen	1,41%	2,00%	867.092.145,00	2,50%	834.245.285,00	3,00%	973.080.000,00	3,50%	928.840.000,00	4,00%	993.860.000,00	4,50%	1.063.430.000,00	4,50%	5.660.547.430,00	Dinas yang membawahi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase Kepemilikan Kartu	persen	60,91 %	65,12 %		70,50%		75,00%		80,12%		85,00 %		90,00%		90,00%		Dinas yang membawahi

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Identitas Anak																	urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	3	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil**	**Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melapor**	**persen**	100,00 %	100,00 %	131.780.200,00	100,00 %	148.035.240,00	100,00 %	177.489.476,00	100,00 %	215.398.730,00	100,00%	164.179.115,00	100,00 %	171.694.530,00	100,00 %	1.008.577.291,00	Dinas yang membawahi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	**persen**	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00%		100,00 %		100,00 %		Dinas yang membawahi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	**persen**	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00%		100,00 %		100,00 %		Dinas yang membawahi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	**persen**	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00%		100,00 %		100,00 %		Dinas yang membawahi urusan Administrasi

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																						Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan**	**Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan**	**persen**	35,48 %	41,93 %	54.710.600,00	48,38%	77.413.320,00	54,83%	82.832.260,00	61,29%	95.905.680	67,74 %	94.834.650,00	74,19%	101.473.070,00	74,19%	507.169.568,00	Dinas yang membawahi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	5	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Meningkatnya kualitas profil kependudukan**	**Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan**	**persen**	80,00 %	100,00 %	32.634.750,00	100,00 %	58.892.910,00	100,00 %	63.015.410,00	100,00 %	67.426.490,00	100,00%	72.146.340,00	100,00 %	77.196.590,00	100,00 %	371.312.515,00	Dinas yang membawahi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**																			
			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																			
2	13	1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai (Kategori)**	71,47 (BB)	71,47 (BB)	4.142.662.333,00	71,5 (BB)	4.573.939.567,73	71,52 (BB)	4.828.431.140,52	71,55 (BB)	5.185.935.925,39	71,57 (BB)	6.400.504.419,94	71,6 (BB)	6.254.021.851,93	71,6 (BB)	31.385.495.238,51	Dinas yang membawahi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	13	2	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	persen	100,00 %	100,00 %	48.700.250,00	100,00 %	50.000.000,00	100,00 %	100.000.000,00	100,00 %	240.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00 %	100.000.000,00	100,00 %	638.700.250,00	Dinas yang membawahi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	persen	100,00 %	100,00 %	9.200.000,00	100,00 %	90.000.000,00	100,00 %	90.000.000,00	100,00 %	200.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00 %	200.000.000,00	100,00 %	689.200.000,00	Dinas yang membawahi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	persen	100,00 %	100,00 %	5.023.400.180,00	100,00 %	7.029.771.156,00	100,00 %	6.915.617.610,00	100,00 %	6.046.871.992,00	100,00%	5.615.479.331,00	100,00 %	5.676.644.698,00	100,00 %	36.307.784.967,00	Dinas yang membawahi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	persen	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00%		100,00 %		100,00 %		Dinas yang membawahi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyara	persen	100,00 %	100,00 %	2.742.219.233,00	100,00 %	1.488.000.250,00	100,00 %	1.459.228.183,00	100,00 %	1.898.000.000,00	100,00%	1.550.000.250,00	100,00 %	1.750.000.000,00	100,00 %	10.887.447.916,00	Dinas yang membawahi urusan Pemberdayaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Hukum Adat dalam pembangunan	katan Desa (LKD)																	Masyarakat dan Desa
					Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	persen	100%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00%		100,00 %		100,00 %		Dinas yang membawahi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																			
			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK																			
2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	anak per keluarga	2,37	2,35	5.102.001.000,00	2,34	1.849.039.221,37	2,32	1.207.513.496,31	2,31	1.369.039.233,56	2,29	1.360.490.927.038,00	2,28	1.371.218.465.255,00	2,28	12.259.303.683.687,00	Dinas yang membawahi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age	persen	20,60 %	20,50 %		20,40%		20,30%		20,20%		20,10 %		20,00%		20,00%		Dinas yang membawahi urusan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Spesific Fertility Rate/ASFR15-19)																	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	angka	51,30	51,50	2.621.489.962,00	52,00	5.432.403.685,00	52,50	5.513.889.740,00	53,00	5.596.598.080,00	53,50	5.680.547.705,00	54,00	5.765.755.264,00	54,00	30.610.683.795,00	Dinas yang membawahi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	persen	21,00 %	20,50 %		20,00%		19,50%		19,00%		18,50 %		18,00%		18,00%		Dinas yang membawahi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	persen	100,00 %	100,00 %	1.392.983.309,50	100,00 %	1.372.881.800,69	100,00 %	1.923.914.534,00	100,00 %	1.864.445.860,46	100,00 %	1.940.211.322,19	100,00 %	1.929.357.954,43	100,00 %	10.423.789.867,27	Dinas yang membawahi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			DINAS PERHUBUNGAN																			
2	15	1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai (Kategori)**	B (66,75)	BB(70,1)	27.845.149.128,00	BB (72,25)	24.109.716.530,91	BB(75,50)	23.082.831.878,61	BB(77,75)	22.734.718.474,37	A(80,1)	23.969.100.943,71	A(80,25)	24.420.921.800,14	A(80,25)	146.162.438.755,74	Dinas yang membawahi urusan Perhubungan
2	15	2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat**	**Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik**	**persen**	58,47	60,00	7.601.320.007,00	65,00	6.834.600.703,53	70,00	7.540.544.718,18	75,00	8.106.002.888,91	80,00	7.557.542.932,24	85,00	7.669.394.826,15	85,00	45.329.406.076,01	Dinas yang membawahi urusan Perhubungan
					Persentase angutan Umum lulus uji	**persen**	100	100		100		100		100		100		100		100		
2	15	3	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Meningkatnya pengawasan operasional angkutan perairan**	**Persentase Pelaksanaan Pengawasan Pelayaran**	**persen**	74,00	76,00	132.476.530,00	78,00	246.428.079,25	80,00	1.097.124.500,44	82,00	1.147.831.367,95	84,00	901.548.838,46	86,00	864.322.071,04	86,00	4.389.731.387,14	Dinas yang membawahi urusan Perhubungan
2	16		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**																			
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			
2	16	1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai (Kategori)**	72,05	73,00	5.128.835.343,00	74,00	4.968.604.580,35	75,00	4.940.488.855,19	76,00	4.913.375.575,09	77,00	5.034.854.781,96	78,00	5.119.939.092,19	78,00	30.106.098.227,78	Dinas yang membawahi urusan Komunikasi dan Informatika
2	16	2	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap akses**	**Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat**	**persen**	100,00	100,00	6.634.883.762,00	100,00	6.219.147.275,00	100,00	6.312.434.484,00	100,00	6.407.121.001,00	100,00	6.503.227.816,00	100,00	6.583.370.229,00	100,00	38.659.784.629,00	Dinas yang membawahi

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)																87,76	urusan Komunikasi dan Informatika
2	16	3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya layanan jaringan internet pemerintah daerah	Cakupan Layanan Jaringan Internet Pemerintah Daerah	persen	89,62	91,54	5.190.100.216,00	93,08	4.320.000.000,00	94,62	4.390.988.836.000,00	96,54	4.507.958.717.000,00	98,46	4.507.958.717.000,00	100,00	4.580.210.002,00	100,00	27.497.216.482,00	Dinas yang membawahi urusan Komunikasi dan Informatika
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																			
			DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN																			
2	17	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai (Kategori)	BB	BB	6.673.130.543,00	BB	6.792.199.337,40	BB	6.975.693.703,25	BB	6.973.379.954,51	BB	6.986.732.308,13	BB	7.027.410.000.160,00	BB	41.428.515.846,45	Dinas yang membawahi urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	17	2	PROGRAM PELAYANAN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	persen	0,249 %	0,299 %	-	0,349%	20.000.000,00	0,399%	20.000.000,00	0,449%	20.000.000,00	0,499 %	20.000.000,00	0,549%	20.000.000,00	0,549%	100.000.000,00	Dinas yang membawahi urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	17	3	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi**	**Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**persen**	100%	100%	69.900.050,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	319.900.050,00	Dinas yang membawahi urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	17	4	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi**	**Persentase Koperasi Aktif**	**persen**	46,34 %	47,13 %	29.919.700,00	47,90%	30.000.000,00	48,64%	30.000.000,00	49,37%	30.000.000,00	50,07 %	30.000.000,00	50,75%	30.000.000,00	50,75%	179.919.700,00	Dinas yang membawahi urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	17	5	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian**	**Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan**	**persen**	7,47%	0,00%	60.000.000,00	7,98%	200.000.000,00	8,58%	200.000.000,00	9,17%	250.000.000,00	9,74%	280.000.000,00	10,29%	300.000.000,00	10,29%	1.290.000.000,00	Dinas yang membawahi urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	17	6	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Meningkatnya produktivitas koperasi**	**Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas**	**persen**	9,87%	10,46 %	-	11,03%	90.000.000,00	11,59%	90.000.000,00	12,13%	100.000.000,00	12,66 %	100.000.000,00	13,17%	110.000.000,00	13,17%	490.000.000,00	Dinas yang membawahi urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	17	7	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri**	**Pertumbuhan Wirausaha**	**persen**	4,71%	4,82%	113.216.500,00	4,91%	430.000.000,00	4,97%	430.000.000,00	5,01%	480.000.000,00	5,04%	510.000.000,00	5,05%	530.000.000,00	5,05%	2.493.216.500,00	Dinas yang membawahi urusan Koperasi, Usaha

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																						Kecil, dan Menengah
2	17	8	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Meningkatnya daya saing UMKM**	**Proporsi UKM Menjalin Kemitraan**	**persen**	0,564 %	0,585 %	346.924.300,00	0,606%	150.000.000,00	0,626%	150.000.000,00	0,645%	200.000.000,00	0,663 %	200.000.000,00	0,681%	250.000.000,00	0,681%	1.296.924.300,00	Dinas yang membawahi urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	18		**URUSAN PENANAMAN MODAL**																			
			DINAS PELAYANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																			
2	18	1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai (Kategori)**	73,50 (BB)	73,75 (BB)	6.298.680.835,00	74,00 (BB)	6.145.899.199,02	74,25 (BB)	6.359.266.317,40	74,50 (BB)	6.343.590.232,59	74,75 (BB)	6.637.234.911,23	75,00 (BB)	6.657.902.730,78	75,00 (BB)	38.442.574.226,02	Dinas yang membawahi urusan Penanaman Modal
2	18	2	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Meningkatnya kemudahan berinvestasi**	**Realisasi Total terhadap Target Investasi**	**persen**	100%	100%	80.000.000,00	100%	255.000.000,00	100%	155.825.000,00	100%	256.662.375,00	100%	57.512.310,00	100%	58.374.995,00	100%	863.374.680,00	Dinas yang membawahi urusan Penanaman Modal
2	18	3	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal**	**Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi**	**persen**	12,00 %	16,00 %	60.000.000,00	20,00%	259.999.000,00	25,00%	162.400.000,00	30,00%	164.836.000,00	35,00 %	167.308.540,00	40,00%	200.000.000,00	40,00%	1.014.543.540,00	Dinas yang membawahi urusan Penanaman Modal
2	18	4	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko**	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin**	**persen**	100,00 %	100,00 %	208.539.900,00	100,00 %	219.214.780,00	100,00 %	248.631.370,00	100,00 %	252.360.842,00	100,00%	256.146.254,00	100,00 %	299.988.448,00	100,00 %	1.484.881.594,00	Dinas yang membawahi urusan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Sesuai Ketentuan																	Penanaman Modal
2	18	5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal**	**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha**	**persen**	100,00 %	100,00 %	127.637.725,00	100,00 %	133.800.175,00	100,00 %	150.450.178,00	100,00 %	152.706.930,00	100,00%	154.997.534,00	100,00 %	170.436.636,00	100,00 %	890.029.178,00	Dinas yang membawahi urusan Penanaman Modal
2	18	6	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal**	**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**	**persen**	100,00 %	100,00 %	132.444.600,00	100,00 %	100.785.600,00	100,00 %	125.000.000,00	100,00 %	126.875.000,00	100,00%	128.778.125,00	100,00 %	130.709.797,00	100,00 %	744.593.122,00	Dinas yang membawahi urusan Penanaman Modal
2	19		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**																			
			DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA																			
2	19	1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai (Kategori)**	70,95 (BB)	70,95 (BB)	4.785.119.630,00	70,96 (BB)	5.031.356.992,86	70,97 (BB)	5.049.899.186,59	70,98 (BB)	5.232.018.341,63	70,99 (BB)	5.208.274.925,10	71 (BB)	5.227.511.708,42	71 (BB)	30.534.180.784,60	Dinas yang membawahi urusan Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Meningkatnya daya saing kepemudaan**	**Rasio Wirausaha Pemuda**	**persen**	0,49%	0,67%	3.339.999.920,00	0,89%	1.220.250.000,00	1,21%	814.500.000,00	1,47%	758.000.000,00	1,76%	907.000.000,00	2,46%	914.500.000,00	2,46%	7.954.249.920,00	Dinas yang membawahi urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	19	3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga**	**Persentase Atlet yang Berprestasi**	**persen**	71,00 %	75,00 %	14.038.861.000,00	75,00%	11.968.081.270,00	80,00%	12.260.456.590	80,00%	12.841.417.460	85,00 %	12.999.826.750	85,00%	13.287.804.649,00	85,00%	77.396.448.199,00	Dinas yang membawahi urusan Kepemudaan dan Olahraga
2	19	4	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Meningkatnya kualitas kepramukaan**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan**	**persen**	3,83%	3,99%	250.000.000,00	4,16%	275.000.000,00	4,57%	750.000.000,00	4,61%	750.000.000,00	4,77%	750.000.000,00	4,85%	750.000.000,00	4,85%	3.525.000.000,00	Dinas yang membawahi urusan Kepemudaan dan Olahraga
2	20		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**																			
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			
2	20	2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem statistik sektoral daerah**	**Indeks Pembangunan Statistik (IPS)**	**angka**	2,63	2,70	1.010.056.800,00	2,80	281.800.000,00	2,90	285.652.000,00	3,00	299.936.780,00	3,10	299.936.780,00	3,20	299.936.780,00	3,20	2.477.319.140,00	Dinas yang membawahi urusan Kepemudaan dan Statistik
2	21		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**																			
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			
2	21	2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Meningkatnya kualitas pengamanan informasi pemerintah daerah**	**Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**	**nilai**	166,00	190,00	43.322.000,00	215,00	144.450.000,00	230,00	199.000.000,00	255,00	213.959.945,00	275,00	231.410.501,81	300,00	252.459.311,53	300,00	1.084.601.758,34	Dinas yang membawahi urusan Kepemudaan dan Persandian
2	22		**URUSAN PEMERINTAHAN**																			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			BIDANG KEBUDAYAAN																			
			DINAS PENDIDIKAN																			
2	22	2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan**	**persen**	10,34	40,00	7.849.995,00	40,00	6.622.875,00	40,00	6.722.218,12	40,00	6.823.050,83	40,00	6.925.396,84	40,00	7.029.278,11	40,00	41.967.818,70,79	Dinas yang membawahi urusan Kebudayaan
2	22	3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional**	**Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan**	**persen**	100,00	100,00	1.034.994.300,00	100,00	974.400.000,00	100,00	989.016.000,00	100,00	1.003.851.000,00	100,00	1.018.909.000,00	100,00	1.034.192.000,00	100,00	6.055.362.300,00	Dinas yang membawahi urusan Kebudayaan
2	22	4	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal**	**persen**	42,13	43,19	-	44,27	-	45,37	-	46,51	-	47,67	-	48,86	-	50,08	-	Dinas yang membawahi urusan Kebudayaan
2	22	5	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan**	**Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan**	**persen**	85,71	87,14	1.212.839.256,00	87,14	527.800.000,00	88,57	535.717.000,00	88,57	543.752.000,00	88,57	551.909.000,00	91,43	560.187.000,00	91,43	3.932.204.256,00	Dinas yang membawahi urusan Kebudayaan
2	22	6	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Meningkatnya tata kelola museum**	**Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Museum**	**persen**	4,05	4,79	194.999.994,00	5,31	197.925.000,00	5,83	200.893.000,00	6,35	203.907.000,00	6,87	206.965.000,00	7,25	210.070.000,00	7,25	1.214.759.994,00	Dinas yang membawahi urusan Kebudayaan
2	23		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**																			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP																			
2	23	1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tercapainya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai (Kategori)**	71,45	72,00	427298236700	73,00	422934447551	73,25	421931712321	73,50	427274554215	74,00	433326230517	74,50	440175329629	74,50	25.729.405.109,33	Dinas yang membawahi urusan Perpustakaan
2	23	2	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan**	**Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat**	**Nilai**	52,32	53,00	169.629 5.038,00	55,00	991.634.496,00	57,00	1.006.509.013,00	60,00	1.021.606.649,00	63,00	1.036.930.748,00	67,00	1.052.484.711,00	67,00	6.805.460.655,00	Dinas yang membawahi urusan Perpustakaan
2	23	3	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno**	**Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki**	**Persen**	12,00 %	17,00 %	-	22,00%	103.139.150,00	27,00%	104.686.237,00	32,00%	106.157.531,00	37,00 %	107.749.894,00	42,00%	109.366.143,00	42,00%	531.098.955,00	Dinas yang membawahi urusan Perpustakaan
2	24		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**																			
			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP																			
2	24	2	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis**	**Tingkat ketersediaan arsip**	**Persen**	73,62 %	74%	63.280.443,00	74,5%	227.066.370,00	75,00%	260.922.366,00	75,20%	264.836.201,00	75,50 %	268.808.745,00	75,70%	272.840.876,00	75,70%	1.357.750.011,00	Dinas yang membawahi urusan Kearsipan
2	24	3	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK**	**Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Persen**	33,30 %	33,30 %	-	50,00%	88.632.347,00	50,00%	117.247.148,00	66,67%	119.005.863,00	66,67 %	120.790.950,00	83,30%	122.602.808,00	83,30%	568.279.116,00	Dinas yang membawahi urusan Kearsipan
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	25		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**																			
			DINAS PERIKANAN																			
3	25	1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai (Kategori)**	B 64,20	B 64,50	4.057.440.909,00	B 69,64	4.369.211.902,57	BB 70,01	5.286.185.212,67	BB 70,25	4.617.809.434,24	BB 70,50	4.590.720.902,50	BB 70,75	4.686.113.397,64	BB 70,75	27.607.481.758,62	Dinas yang membawahi urusan Perikanan
3	25	3	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Meningkatnya produksi perikanan tangkap**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**	**Ton**	46.586,81	47,518.55	2.542.800.000,00	48,516.44	1.385.600.000,00	49,583.80	1.370.000.000,00	50,724.22	1.570.000.000,00	51,941.61	1.620.000.000,00	53,240.15	1.610.000.000,00	53,240.15	10.098.400.000,00	Dinas yang membawahi urusan Perikanan
3	25	4	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Meningkatnya produksi perikanan budidaya**	**Jumlah Produksi Perikanan budidaya**	**Ton**	1,980.37	2,000.17	3.419.850.000,00	2,021.17	2.570.000.000,00	2,043.40	1.612.250.000,00	2,066.89	2.194.533.750,00	2,091.69	2.296.851.756,00	2,117.83	2.349.204.533,00	2,117.83	14.442.690.039,00	Dinas yang membawahi urusan Perikanan
3	25	5	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati**	**Cakupan usaha perikanan tangkap dan usaha perikanan budidaya yang diawasi**	**persen**	0,00%	0,00%	-	20,00%	30.000.000,00	20,00%	40.000.000,00	20,00%	40.000.000,00	20,00%	40.000.000,00	20,00%	40.000.000,00	100,00%	190.000.000,00	Dinas yang membawahi urusan Perikanan
3	25	6	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat**	**Angka Konsumsi Ikan**	**Kg/Tahun/Kapita**	48,74	48,96	165.350.000,00	49,23	134.958.866,00	49,55	285.000.000,00	49,92	285.000.000,00	50,34	285.000.000,00	50,81	285.000.000,00	50,81	1.440.308.866,00	Dinas yang membawahi urusan Perikanan
3	26		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**																			
			DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA																			
3	26	2	**PROGRAM PENINGKATAN**	**Meningkatnya daya tarik**	**Persentase Pertumbuh**	**persen**	2,00%	5,00%	35.000.0	5,40%	1.475.00	6,30%	1.526.00	6,80%	1.076.00	7,10%	1.077.00	7,40%	1.078.00	7,40%	6.267.00	Dinas yang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	destinasi pariwisata	an Kunjungan Wisatawan				00,00		0.000,00		0.000,00		0.000,00		0.000,00		0.000,00		0.000,00	membawahi urusan Pariwisata
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	persen	7,10%	13,30%	-	17,60%	208.500.000,00	20,00%	208.500.000,00	20,80%	208.500.000,00	24,10%	208.500.000,00	25%	208.500.000,00	25,00%	1.042.500.000,00	Dinas yang membawahi urusan Pariwisata
3	26	4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)	persen	50,00%	58,00%	20.000.000,00	66,67%	453.000.000,00	75,00%	279.000.000,00	83,00%	305.000.000,00	91,67%	331.000.000,00	100,00%	357.000.000,00	100,00%	1.745.000.000,00	Dinas yang membawahi urusan Pariwisata
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	persen	73,79%	75,21%	17.500.000,00	77,38%	430.000.000,00	80,41%	430.000.000,00	84,31%	430.000.000,00	89,20%	430.000.000,00	95,26%	430.000.000,00	95,26%	2.167.500.000,00	Dinas yang membawahi urusan Pariwisata
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																			
			DINAS PERTANIAN																			
3	27	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai (Kategori)	74,25 (BB)	72,45 (BB)	12.910.489.086,50	72,46 (BB)	13.124.452.460,63	72,47 (BB)	13.446.819.139,91	72,48 (BB)	13.464.160.265,77	72,49 (BB)	13.642.873.183,63	72,50 (BB)	13.927.854.795,27	72,50 (BB)	80.516.648.931,71	Dinas yang membawahi urusan Pertanian
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Ton	119.176,73	125.638,44	2.042.841.275,00	145.441,14	2.867.577.908,40	151.963,17	2.846.902.332,58	158.527,62	2.851.108.972,21	175.445,58	2.880.608.388,52	177.234,29	2.936.758.157,31	177.234,29	16.425.249.040,02	Dinas yang membawahi urusan Pertanian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Peningkatan Produksi Hortikultura	Ton	1.189,74	1.211,13		1.233,08		1.255,54		1.278,54		1.302,10		1.326,21		1.326,21		Dinas yang membawahi urusan Pertanian
					Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	1.523.941,30	1.527.681,20		1.531.256,03		1.534.836,88		1.538.411,72		1.541.983,54		1.545.547,98		1.545.547,98		Dinas yang membawahi urusan Pertanian
3	27	3	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian**	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	8.304,00	8.473,00	9.624.678.827,50	8.473,00	4.310.302.457,81	8.473,00	4.313.693.058,30	8.473,00	4.562.759.615,43	8.473,00	4.654.450.495,78	8.473,00	4.643.928.739,33	9.858,00	32.109.813.194,15	Dinas yang membawahi urusan Pertanian
3	27	5	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian**	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	persen	100,00%	100,00%	752.129.140,00	100,00%	555.407.477,05	100,00%	504.945.690,93	100,00%	512.519.876,29	100,00%	520.207.674,44	100,00%	528.010.789,55	100,00%	3.373.220.648,26	Dinas yang membawahi urusan Pertanian
3	27	6	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian**	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	persen	85,00%	88,16%	154.999.390,00	90,79%	155.230.687,75	93,42%	155.000.000,00	96,05%	157.325.000,00	98,03%	159.684.875,00	100,00%	162.080.148,13	100,00%	944.320.100,88	Dinas yang membawahi urusan Pertanian
3	27	7	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian**	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (%)	persen	100%	100%	1.133.807.100,00	100%	785.050.430,50	100%	796.826.186,96	100%	808.778.579,76	100%	820.910.258,46	100%	833.223.912,34	100%	5.178.596.468,02	Dinas yang membawahi urusan Pertanian
					Persentase Kelembagaan Kelompoktani yang Dibina	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas yang membawahi urusan Pertanian
			DINAS PETERNAKAN DAN																			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			KESEHATAN HEWAN																			
3	27	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai (Kategori)	72,05	70,01	5.050.417.859,00	70,25	5.179.801.579,70	70,50	5.055.889.044,53	70,75	5.107.874.062,13	71,00	5.151.325.156,88	71,25	5.187.303.674,40	71,25	31.088.759.916,64	Dinas yang membawahi urusan Pertanian
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	persen	0,81%	0,91%	200.000.003,00	1,01%	190.000.000,00	1,11%	240.427.674,04	1,21%	226.547.839,00	1,31%	250.275.253,81	1,41%	259.050.273,00	1,41%	1.666.301.042,85	Dinas yang membawahi urusan Pertanian
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik	persen	65,00 %	60,00 %	65.927.848,88	65,00%	25.000.000,00	70,00%	25.375.000,00	75,00%	80.000.000,00	80,00 %	30.000.000,00	80,00%	70.918.579,00	80,00%	391.293.579,00	Dinas yang membawahi urusan Pertanian
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS	persen	100,00 %	100,00 %	674.079.033	100,00 %	573.637.607,00	100,00 %	707.889.210,00	100,00 %	662.682.546,00	100,00%	733.011.762,00	100,00 %	758.960.895,00	100,00 %	4.483.225.863,00	Dinas yang membawahi urusan Pertanian
					Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	persen	38,00 %	40,00 %		43,00%		46,00%		49,00%		53,00 %		57,00%		57,00%		Dinas yang membawahi urusan Pertanian
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	persen	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	100,00 %	-	100,00 %	-	100,00%	-	100,00 %	-	100,00 %	-	Dinas yang membawahi urusan Pertanian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	27	6	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian**	**Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan**	**persen**	66,00 %	68,00 %	37.453.443,00	72,00%	38.015.245,00	74,00%	28.435.473,00	76,00%	60.862.005,00	78,00 %	50.294.935,00	80,00%	29.734.359,00	80,00%	244.795.460,00	Dinas yang membawahi urusan Pertanian
3	27	7	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian**	**Persentase Kelembagaan Kelompok Tani yang Dibentuk dan Beroperasi**	**persen**	0,29%	0,39%	199.808.186,00	0,49%	176.865.776,00	0,59%	200.805.309,00	0,69%	203.817.388,00	0,79%	218.084.606,00	0,88%	227.347.387,00	0,88%	1.266.728.666,00	Dinas yang membawahi urusan Pertanian
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																			
			DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN																			
3	30	2	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**	**Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi**	**Persen**		4,07%	-	4,44%	45.000.000,00	4,79%	45.000.000,00	5,14%	45.000.000,00	5,48%	45.000.000,00	5,80%	45.000.000,00	5,80%	225.000.000,00	Dinas yang membawahi urusan Perdagangan
3	30	3	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi**	**Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya**	**persen**	16,36 %	18,18 %	1.164.949.950,00	20,00%	1.830.000.000,00	21,82%	1.830.000.000,00	23,64%	1.830.000.000,00	25,45 %	1.880.000.000,00	27,27%	1.930.000.000,00	27,27%	10.464.949.950,00	Dinas yang membawahi urusan Perdagangan
3	30	4	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting**	**Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**persen**	6,23%	6,20%	119.811.950,00	6,17%	130.000.000,00	6,14%	130.000.000,00	6,11%	130.000.000,00	6,08%	130.000.000,00	6,05	130.000.000,00	6,05	769.811.950,00	Dinas yang membawahi urusan Perdagangan
3	30	5	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Meningkatnya pelaku usaha yang**	**Nilai Ekspor Barang**	**persen**	278.133 (Jt)	283.695 (Jt)	269.862.	289.369 (Jt)	550.000.	295.156 (Jt)	550.000.	301.606 (Jt)	550.000.	307.081 (Jt)	550.000.	313.222 (Jt)	550.000.	313.222 (Jt)	3.019.86	Dinas yang membaw

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				berorientasi ekspor					800,00		000,00		000,00		000,00		000,00		000,00		2.800,00	ahi urusan Perdagangan
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Pelaku Usaha yang Memenuhi Uji Metrologi Legal	persen	31,54%	32,00%	149.355.061,00	32,43%	190.000.000,00	32,86%	190.000.000,00	33,29%	190.000.000,00	33,71%	190.000.000,00	34,14%	190.000.000,00	34,14%	1.099.355.061,00	Dinas yang membawahi urusan Perdagangan
3	30	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	persen	64,00%	69,23%	3.685.000,00	74,07%	200.000.000,00	78,57%	200.000.000,00	82,76%	200.000.000,00	86,67%	200.000.000,00	90,32	200.000.000,00	90,32%	1.003.685.000,00	Dinas yang membawahi urusan Perdagangan
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																			
			DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN																			
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	persen	0,00%	2,72%	2.340.592.045,00	2,79%	970.000.000,00	2,84%	925.000.000,00	2,88%	925.000.000,00	2,91%	975.000.000,00	2,93%	975.000.000,00	2,93%	7.110.592.045,00	Dinas yang membawahi urusan Perindustrian
3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	persen	30,03%	30,06%	20.592.957,00	30,12%	40.000.000,00	30,20%	45.000.000,00	30,28%	45.000.000,00	30,34%	45.000.000,00	30,38%	45.000.000,00	30,38%	240.592.957,00	Dinas yang membawahi urusan Perindustrian
3	31	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Cakupan Layanan Sistem Informasi Industri Nasional	persen	18,19%	19,09%	29.601.000,00	19,26%	35.000.000,00	19,39%	35.000.000,00	19,39%	35.000.000,00	19,55%	35.000.000,00	19,58%	35.000.000,00	19,58%	204.601.000,00	Dinas yang membawahi urusan Perindustrian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																			
4	1		**SEKRETARIAT DAERAH**																			
			SEKRETARIAT DAERAH																			
4	1	1		**Meningkatnya akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang berkualitas**	**Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Sesuai Pedoman dan Tepat Waktu**	**persen**	100,00 %	100,00 %	63.503.759.674,00	100,00 %	62.996.946.770,22	100,00 %	63.757.656.845,17	100,00 %	64.595.895.476,65	100,00%	65.523.683.066,26	100,00 %	66.546.437.496	100,00 %	386.924.073.282,06	
				Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efisien, transparan, dan akuntabel.	**Persentase realisasi anggaran belanja lingkup Setda yang sesuai dengan rencana dan pelaporan keuangan**	**persen**	93,49 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00%		100,00 %		100,00 %			
				Meningkatnya kepatuhan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja instansi.	**Persentase tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK/APIP/Auditor**	**persen**		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00%		100,00 %		100,00 %			
				Meningkatnya kinerja aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah.	**Persentase Pegawai dengan SKP minimal Nilai Baik**	**persen**	99,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00%		100,00 %		100,00 %			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Lingkup Sekretariat Daerah																	
				Terpeliharanya aset dan fasilitas kantor dalam kondisi layak guna dan siap pakai	**Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik**	**persen**	93,50 %	80,00 %		80,00%		80,00%		80,00%		80,00 %		80,00%		80,00%		
				Terselenggaranya kegiatan protokoler dan komunikasi pimpinan yang mendukung kelancaran tugas pemerintahan	**Persentase fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan**	**persen**	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
				Terwujudnya struktur organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik	**Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran**	**persen**	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
4	1	2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Meningkatnya kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemenuhan IKK LPPD yang akurat dan tepat sasaran.**	**Persentase Pemenuhan IKK LPPD**	**persen**	100,00 %	100,00 %	15.621.239.100,00	100,00 %	16.286.813.348,35	100,00 %	16.485.671,01	100,00 %	16.704.205.215,1	100,00 %	16.944.459.292,26	100,00 %	17.208.697.124,38	100,00 %	99.251.084.457,51	
				Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	**Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan mekanisme**	**persen**	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					pembentukan hukum daerah																	
				Meningkatnya kualitas kehidupan beragama masyarakat melalui dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan keagamaan	**Persentase kegiatan keagamaan yang didukung oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan beragama masyarakat**	**persen**	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00%		100,00 %		100,00 %		
4	1	3	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Terlaksananya kebijakan perekonomian dan pemantauan sumber daya alam yang efektif dalam mengendalikan inflasi dan mendukung stabilitas harga di daerah**	**Persentase kebijakan perekonomian dan Pemantauan sumber daya alam yang terlaksana**	**persen**	100,00 %	100,00 %	7.853.829.420,00	100,00 %	2.185.238.046,42	100,00 %	2.220.435.792,64	100,00 %	2.257.058.041,02	100,00%	2.290.442.794,98	100,00 %	2.325.259.697,12	100,00 %	19.132.263.792,18	Sekretariat Daerah
				Meningkatnya efektivitas program pembangunan melalui pengendalian dan evaluasi yang tepat waktu dan berbasis hasil	**Persentase pengendalian dan evaluasi program pembangunan**	**persen**	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00%		100,00 %		100,00 %		
				Meningkatnya kualitas dan efektivitas pengadaan barang/jasa melalui	**Level Kematangan UKPBJ**	**Kategori**	Level Proaktif	Level Proaktif		Level Proaktif		Level Proaktif		Level Proaktif		Level Proaktif		Level Proaktif		Level Proaktif		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				peningkatan level kematangan UKPBJ																		
4	2		**SEKRETARIAT DPRD**																			
			SEKRETARIAT DPRD																			
4	2	1	**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai (Kategori)**	70,50	70,70	34.995.567.399,00	71,00	36.223.783.702,00	71,20	36.756.240.456,53	71,50	37.316.834.062,49	71,80	37.875.686.573,68	72,00	38.442.921.868,65	72,00	221.611.034.062,35	Sekretariat DPRD
4	2	2	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan program kerja DPRD**	**persen**	100,00 %	100,00 %	27.955.598.081,00	100,00 %	19.438.520.443,87	100,00 %	19.585.728.998,74	100,00 %	19.771.961.230,84	100,00%	20.034.162.819,58	100,00 %	20.370.040.159,27	100,00 %	127.156.011.833,30	Sekretariat DPRD
					Persentase Fasilitasi Pembahasan Raperda sesuai Propemperda	**persen**	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00%		100,00 %		100,00 %		Sekretariat DPRD
				Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	**Persentase Realisasi Fasilitasi Kegiatan di DPRD**	**persen**	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00%		100,00 %		100,00 %		Sekretariat DPRD
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																			
5	1		**PERENCANAAN**																			
			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI																			
5	1	1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai (Kategori)**	72,40	73,00	7.762.351.911,00	74,00	7.964.546.613,13	75,00	7.712.089.927,79	76,00	7.807.700.139,08	77,00	7.917.612.789,34	78,00	8.043.413.833,19	78,00	47.207.715.213,53	Badan yang membawahi urusan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																						Perencanaan
5	1	2	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah**	**Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD**	**persen**	100%	100%	1.69 0.95 9.75 0,00	100%	1.17 3.75 7.16 1,00	100%	1.54 7.01 3.49 1,63	100%	1.57 0.21 8.69 6,00	100%	1.59 3.77 1.97 9,00	100%	1.61 7.67 8.56 1,00	100%	9.19 3.39 9.63 8,63	Badan yang membawahi urusan Perencanaan
					Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	**persen**	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Badan yang membawahi urusan Perencanaan
5	1	3	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**persen**	100%	100%	1.59 4.27 3.90 0,00	100%	1.24 6.53 3.12 2,00	100%	1.55 4.30 3.94 9,00	100%	1.57 7.61 8.51 0,00	100%	1.60 1.28 2.78 8,00	100%	1.62 5.30 2.03 0,00	100%	9.19 9.31 4.29 9,00	Badan yang membawahi urusan Perencanaan
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**persen**	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Badan yang membawahi urusan Perencanaan
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA**	**persen**	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Badan yang membawahi urusan Perencanaan
5	2		**KEUANGAN**																			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																			
5	2	1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP Perangkat Daerah	angka	70,20 (BB)	70,20 (BB)	9.644.283.324,00	70,50 (BB)	15.730.361.075,09	70,70 (BB)	15.695.425.833,28	71,00 (BB)	16.614.590.641,62	71,15 (BB)	17.630.611.786,55	71,50 (BB)	18.717.754.825,62	71,50 (BB)	94.032.027.686,16	Badan yang membawahi urusan Keuangan
5	2	2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Meningkatnya tata kelola anggaran**	Persentase Belanja Pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	persen	21,38 %	22,88 %	312.016.463.941,00	24,38%	314.269.302.816,62	25,88%	318.208.677.509,84	27,38%	321.585.665.123,28	28,88 %	325.297.673.409,78	30,38%	329.416.407.198,21	30,38%	1.920.794.189.998,73	Badan yang membawahi urusan Keuangan
					Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	persen	23,31 %	24,81 %		26,31%		27,81%		29,31%		30,81 %		32,31%		32,31%		Badan yang membawahi urusan Keuangan
				Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	persen	47,10 %	48,60 %		50,10%		51,60%		53,10%		54,60 %		56,10%		56,10%		Badan yang membawahi urusan Keuangan
					Persentaase Penurunan SILPA	Persen	74,96 %	76,46 %		77,96%		79,46%		80,96%		82,46 %		83,96%		83,96%		Badan yang membawahi urusan Keuangan
				Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persen	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00%		100,00 %		100,00 %		Badan yang membawahi urusan Keuangan
5	2	3	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG DAERAH**	**Meningkatnya tata kelola aset daerah**	Perrsentase Penambahan Nilai Aset Tetap	persen	5,13%	6,63%	2.013.788.045,00	8,13%	2.563.286.857,25	9,63%	2.719.611.600,11	11,13%	2.885.483.941,32	12,63 %	3.062.967.817,21	14,13%	3.252.875.564,41	14,13%	16.498.013.385,30	Badan yang membawahi

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																						urusan Keuangan
			BADAN PENDAPATAN DAERAH																			
5	2	1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai (Kategori)**	BB	BB	22.166.783.610,35	BB	21.048.523.525,93	BB	21.036.920.527,39	BB	21.176.562.746,27	BB	21.347.974.736,79	BB	21.554.507.863,70	BB	128.331.273.010,43	Badan yang membawahi urusan Keuangan
5	2	2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan**	**Persentase laporan keuangan tepat waktu**	**persen**	100,00%	100,00%	27.329.000,00	100,00%	29.999.750,00	100,00%	29.999.750,00	100,00%	29.999.750,00	100,00%	29.999.750,00	100,00%	29.999.750,00	100,00%	177.327.750,00	Badan yang membawahi urusan Keuangan
5	2	4	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan**	**Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah**	**persen**	9,04%	10,00%	2.804.257.575,00	10,20%	2.749.960.000,00	10,40%	3.047.500.000,00	10,60%	3.227.500.000,00	10,80%	3.407.500.000,00	11,00%	3.587.500.000,00	11,11%	18.819.257.575,00	Badan yang membawahi urusan Keuangan
				Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	**Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan**	**persen**	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		Badan yang membawahi urusan Keuangan
				Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	**Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital**	**persen**	100,00%	25,00%		25,00%		50%		75%		100%		100%		100,00%		Badan yang membawahi urusan Keuangan
5	3		**KEPEGAWAIAN**																			
			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBAGAN SUMBER DAYA MANUSIA																			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5	3	1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai (Kategori)**	BB = 73,20	BB = 73,50	9.946.385.282,00	BB = 74,00	9.845.206.128,91	BB = 74,50	9.952.771.780,41	BB = 75,00	10.091.594.788,03	BB = 75,50	10.247.290.407	BB = 75,50	10.421.687.122,78	BB = 75,50	60.504.935.420,90	Badan yang membawahi urusan Kepegawaian
5	3	2	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian**	**Persentase ASN yang Menggunakan Layanan Kepegawaian Berbasis Digital**	**persen**	66,17 %	85,00 %	2.140.894.425.200,00	88,00%	2.423.952.172.000,00	91,00%	2.463.987.537.000,00	94,00%	2.488.347.437.000,00	97,00 %	2.513.072.710.000,00	100,00 %	2.538.168.880.000,00	100,00 %	14.568.423.140.000,00	Badan yang membawahi urusan Kepegawaian
				Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	**Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya**	**persen**	84,09 %	85,00 %		86,00%		87,00%		88,00%		89,00 %		90,00%		90,00%		Badan yang membawahi urusan Kepegawaian
				Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	**Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya**	**persen**	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		Badan yang membawahi urusan Kepegawaian
				Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	**Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik**	**persen**	89,86 %	95,00 %		95,00%		95,00%		95,00%		95,00 %		95,00%		95,00%		Badan yang membawahi urusan Kepegawaian
5	4		**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**																			
			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBAGAN SUMBER DAYA MANUSIA																			
5	4	2	**PROGRAM PENGEMBANGAN**	**Meningkatnya layanan pengembangan**	**Persentase ASN yang Mendapata**	**persen**	8,39%	5,00%	401.103.	5,50%	792.858.	6,00%	804.751.	6,50%	816.823.	7,00%	829.075.	7,5%	841.511.	7,5%	4.486.12	Badan yang membaw

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			SUMBER DAYA MANUSIA	**kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional**	**kan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional**				350,00		860,00		760,00		040,00		400,00		540,00		3.950,00	ahi urusan Pendidikan dan Pelatihan
				Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	**Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan**	**persen**	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		Badan yang membawahi urusan Pendidikan dan Pelatihan
				Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	**Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi**	**persen**	74,09 %	75,00 %		76,00%		77,00%		78,00%		79,00 %		80,00%		80,00%		Badan yang membawahi urusan Pendidikan dan Pelatihan
				Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	**Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis**	**persen**	10,00 %	20,00 %		30,00%		40,00%		50,00%		60,00 %		70,00%		70,00%		Badan yang membawahi urusan Pendidikan dan Pelatihan
5	5		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**																			
			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI																			
5	5	2	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Meningkatnya pemanfaatan Kelitbangan dalam perencanaan pembangunan**	**Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai**	**persen**	100%	100%	519.360.625,00	100%	850.000.000,00	100%	558.250.000,00	100%	566.623.750,00	100%	575.123.111,00	100%	583.749.962,00	100%	3.653.107.448,00	Badan yang membawahi urusan Penelitian dan Pengembangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Landasan dalam Implementasi Pembangunan																	
				Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	**Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah**	**persen**	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Badan yang membawahi urusan Penelitian dan Pengembangan
				Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	**Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah**	**persen**	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Badan yang membawahi urusan Penelitian dan Pengembangan
				Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	**Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah**	**persen**	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Badan yang membawahi urusan Penelitian dan Pengembangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5	5	3	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	**Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan**	**Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan**	**persen**	60%	65%	-	70%	130.000.000,00	70%	131.950.000,00	75%	133.929.250,00	80%	135.938.191,00	85%	137.977.266,00	85%	669.794.707,00	Badan yang membawahi urusan Penelitian dan Pengembangan
				Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	**Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi Daerah**	**persen**	65%	67%		70%		73%		75%		78%		78%		78%		Badan yang membawahi urusan Penelitian dan Pengembangan
6			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																			
6	1		**INSPEKTORAT DAERAH**																			
			INSPEKTORAT																			
6	1	1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tercapainya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai (Kategori)**	BB (72,40)	BB (73,00)	14.602.119.121,00	BB (73,50)	14.425.655.971,35	BB (74,0)	14.631.676.035,45	BB (74,50)	14.933.026.276,85	BB (75,00)	15.266.198.641,19	BB (75,50)	15.621.526.918,53	BB (75,50)	89.480.202.964,37	Inspektorat
6	1	2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, Baik yang Bersifat Anggaran atupun Proses dan Kewenangan**	**Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1**	**persen**	81,00 %	83,00 %	5.872.820.000,00	85,00%	5.649.000.000,00	87,00%	5.688.800.000,00	88,00%	5.634.750.000,00	89,00 %	5.586.960.000,00	90,00%	5.546.620.000,00	90,00%	33.978.950.000,00	Inspektorat
6	1	3	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,**	**Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi**	**Indeks Manajemen Risiko**	**Level**	Level 3 skor 3,001	Level 3 Skor 3,050	506.240.000,00	Level 3 Skor 3,100	496.150.000,00	Level 3 Skor 3,150	501.510.000,00	Level 3 Skor 3,200	530.210.000,00	Level 3 Skor 3,250	548.260.000,00	Level 3 Skor 3,300	567.030.000,00	Level 3 Skor 3,300	3.149.400.000,00	Inspektorat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Level	Level 3 skor 3,024	Level 3 Skor 3,050		Level 3 Skor 3,100		Level 3 Skor 3,150		Level 3 Skor 3,200		Level 3 Skor 3,250		Level 3 Skor 3,300		Level 3 Skor 3,300		
					Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3 skor 3,000	Level 3 Skor 3,050		Level 3 Skor 3,100		Level 3 Skor 3,150		Level 3 Skor 3,200		Level 3 Skor 3,250		Level 3 Skor 3,300		Level 3 Skor 3,300		
7			UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	1		KECAMATAN																			
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai (Kategori)	B	B	61.678.871.720,00	B	54.005.696.297,56	B	54.739.232.646,05	B	55.460.387.981,98	B	56.256.554.788,43	BB	57.142.129.249,42	BB	339.282.872.683,44	KECAMATAN
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan palayanan publik di kecamatan	Persentase Penyelesaian masalah di bidang pemerintahan	persen	100,00 %	100,00 %	172.177.700,00	100,00 %	523.817.003,05	100,00 %	528.785.331,79	100,00 %	535.351.220,65	100,00%	547.176.338,53	100,00 %	558.177.026,14	100,00 %	2.865.484.620,16	KECAMATAN
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan wilayah	Cakupan Kelompok Masyarakat yang dibina dengan baik di tingkat kecamatan	persen	100,00 %	100,00 %	12.871.449.840,00	100,00 %	12.691.270.495,91	100,00 %	12.751.508.382,41	100,00 %	12.891.526.055,99	100,00%	13.058.479.144,77	100,00 %	13.247.888.306,66	100,00 %	77.512.122.749,74	KECAMATAN
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya rasa aman dan tertib di lingkungan masyarakat	Tingkat penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	persen	100,00 %	100,00 %	5.600.500,00	100,00 %	39.931.210,62	100,00 %	43.033.573,33	100,00 %	46.367.013,63	100,00%	48.234.757,92	100,00 %	49.205.288,96	100,00 %	232.372.632,46	KECAMATAN
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAA	Terlaksananya urusan	Persentase pembinaan	persen	100,00 %	100,00 %	578.063.	100,00 %	455.324.	100,00 %	460.113.	100,00 %	468.752.	100,00%	482.770.	100,00 %	492.162.	100,00 %	2.937.18	KECAMATAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	pemerintahan umum lebih terkoordinasi dan efektif	wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional				150,00		861,46		610,32		054,72		187,52		728,79		6.592,81	
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan desa	Cakupan tertib administrasi pemerintahan desa	persen	100,00 %	100,00 %	317.436.850,00	100,00 %	419.782.505,41	100,00 %	445.122.076,83	100,00 %	479.595.090,20	100,00%	493.810.848,76	100,00 %	502.965.559,08	100,00 %	2.658.712.930,28	KECAMATAN
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																			
8	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																			
			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																			
8	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai (Kategori)	66,12 (B)	66,30 (B)	3.536.270.169,50	67 (B)	3.946.082.148,55	B (68)	4.152.447.245,20	B (69)	4.195.904.082,33	B(70)	4.242.119.299,37	BB (71)	4.285.266.344,33	BB (71)	24.358.089.289,28	Badan yang membawahi urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persen	100,00	100,00	698.376.700,00	100,00	952.281.274,00	100,00	957.281.274,00	100,00	1.043.220.349,00	100,00	1.082.220.349,00	100,00	1.142.220.349,00	100,00	5.875.600.295,00	Badan yang membawahi urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindun

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																						gan Masyarakat
8	1	3	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Meningkatnya etika dan budaya politik**	**Persentase Pendidikan Politik pada Pemuda dan Masyarakat**	**persen**	100,00	100,00	1.992.237.825,00	100,00	2.151.255.750,00	100,00	2.159.406.500,00	100,00	2.180.323.519,00	100,00	2.220.323.519,00	100,00	2.270.323.519,00	100,00	12.973.870.632,00	Badan yang membawahi urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
8	1	4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan**	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif dan Tertib Administrasi**	**persen**	39,13	39,61	7.067.877.000,00	40,10	7.132.475.000,00	40,58	7.139.485.000,00	40,58	7.165.740.500,00	40,58	7.215.740.500,00	40,58	7.245.740.500,00	42,03	42.967.056.250,00	Badan yang membawahi urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
8	1	5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Meningkatnya ketahanan ekonomi sosial dan budaya**	**Persentase Aparutur dan Masyarakat yang Memiliki Pemahaman Ketahanan Ekososbud**	**persen**	100,00	100,00	68.472.375,00	100,00	204.140.500,00	100,00	204.140.500,00	100,00	228.080.500,00	100,00	254.080.500,00	100,00	284.080.500,00	100,00	1.242.994.875,00	Badan yang membawahi urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
8	1	6	**PROGRAM PENINGKATAN**	**Meningkatnya penanganan**	**Persentase Konflik**	**persen**	100,00	100,00	1.697.07	100,00	1.627.66	100,00	1.596.68	100,00	1.611.03	100,00	1.646.03	100,00	1.692.71	100,00	9.871.21	Badan yang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**konflik sosial yang diselesaikan**	**Sosial yang diselesaikan**				8.275,00		9.519,00		7.909,00		5.160,00		5.161,00		1.370,00		7.394,00	membawahi urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Jumlah									2.043.417.032,82		1.917.035.734,64		1.940.442.719,19		1.966.164.754,22		1.991.081.927,36		2.025.545.866,51		11.883.687.034,70	

Tabel 4.3 Dukungan Kabupaten/Kota Terhadap PHTC Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
1. Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) Kepulauan Nias (2026), Kepulauan Nias dan Pantai Barat (2027), Kepulauan Nias, Pantai Barat dan Dataran Tinggi (2028), Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur (2029) 33 Kabupaten/Kota	2025	Penyusunan kajian akademik tentang bersekolah gratis, Pembentukan Tim Pokja, Validasi data siswa SMA/SMK/SLB Negeri di zona kepulauan Nias, zona Pantai Barat, zona Dataran Tinggi, zona Pantai Timur • 33 Kabupaten/Kota	Asahan Cerdas dan Berkarakter - Menyediakan basis data siswa SMP/SLTP kelas IX yang akan melanjut SLTA - Melakukan edukasi kepada siswa SLTP agar seluruhnya melanjut kepada jenjang SLTA
	2026	tidak ada	
	2027	tidak ada	
	2028	tidak ada	
	2029	Implementasi Program Bersekolah Gratis •Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran tinggi, dan Pantai Timur	
	2030	Implementasi Program Bersekolah Gratis •Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran tinggi, dan Pantai Timur	
2. Program Berobat Gratis (Probis) melalui Program Universal Health Coverage (UHC) (mulai Oktober tahun 2025, UHC+ tahun 2026 - 2030).	2025	Melakukan Launching UHC Penyusunan regulasi (Pergub/SK Gub UHC) MoU 33 Kabupaten/Kota Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara Triwulan IV dimulai Oktober 2025 • 33 Kabupaten/Kota	Asahan Sehat - Dukungan penganggaran APBD Kabupaten/Kota untuk UHC/PBPU yaitu pada Tahun 2025 sebesar 80%, tahun 2026 sebesar 77,5%, tahun 2027 sebesar 75%, tahun 2028 sebesar 72,5%, tahun 2029 dan 2030 sebesar 70%. - Melakukan penginputan, pemutakhiran dan verifikasi data
	2026	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera	

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		Utara • 33 Kabupaten/Kota	DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) pada Pusdatin Kemensos setiap bulannya - failitasi penyediaan data kependudukan kab/kota)
	2027	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara • 33 Kabupaten/Kota	
	2028	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara • 33 Kabupaten/Kota	
	2029	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara - Peningkatan Pelayanan Kesehatan menjadi UHC Plus • 33 Kabupaten/Kota	
	2030	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara - Peningkatan Pelayanan Kesehatan menjadi UHC Plus • 33 Kabupaten/Kota	
3. Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP)	2025	tidak ada	Asahan Swasembada Pangan dan Petani Makmur - fasilitasi penyiapan lahan dan kelompok tani (CPCL) serta pendampingan kelompok tani
	2026	tidak ada	
	2027	tidak ada	
	2028	tidak ada	

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
	2029	tidak ada	- fasilitasi pembentukan koperasi
	2030	tidak ada	
4. Digitalisasi Pelayanan Publik “Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif” (CERDAS)	2025	Identifikasi dan pemetaan pelayanan publik yang akan di digitalisasi 1. Pemetaan layanan publik yang akan didigitalisasi, Audit kesiapan infrastruktur dan SDM dan kebijakan pendukung 2. Penyusunan roadmap dan desain awal sistem Layanan digital. Lokasi: • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.	Asahan Modern - Penyiapan kebijakan/regulasi - penyiapan peningkatan kapasitas SDM - Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan kabupaten. - Penentuan lokasi - Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
		Identifikasi Penetapan Lokasi 1. Pelaksanaan Survei lapangan untuk identifikasi kebutuhan dan potensi gangguan jaringan. 2. Integrasi Sistem (Layanan). 3. Pemetaan Lokasi Strategis. 4. Koordinasi kepada Stake Holder dan Penyusunan dokumen perencanaan Teknis dan Administratif. Lokasi Kegiatan: - 33 kabupaten/kota	
	2026	tidak ada	
	2027	Pengembangan dan penambahan 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. 2. Integrasi Sistem (Layanan). 3. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 4. Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat. 5. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur	

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		Lokasi: • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.	
		Pembangunan dan implementasi serta titik pemasangan jaringan internet 1. Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet. 2. Pemasangan Titik akses Wifi. 3. Sosialisasi Penggunaan. 4. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Mointoring. Lokasi Penggunaan: - 25 Kab	
	2028	tidak ada	
	2029	Perluasan area layanan dan akses jaringan internet 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. 2. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 3. Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat. 4. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur Lokasi Kegiatan: • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.	
		1. Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet. 2. Pemasangan Titik akses Wifi. 3. Sosialisasi Penggunaan. 4. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Mointoring. Lokasi Perluasan Area Layanan: - 25 Kab	
	2030	Evaluasi dan Monitoring 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi.	

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		2. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 3. Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat. 4. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur Lokasi kegiatan: 33 kab/kota	
		1. Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet. 2. Pemasangan Titik akses Wifi. 3. Sosialisasi Penggunaan. 4. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Monitoring. Lokasi Perluasan Area Layanan: - 33 kab/kota	
5 a. Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI)	2025	tidak ada	Infrastruktur Kuat: Dukungan penanganan akses jalan dalam koridor pembangunan jalan provinsi yang mendukung kawasan prioritas.
	2026	1.Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) 2.Penyusunan Leger jalan 3.Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Simalungun, Kab. Batu Bara, Kab. Deli Serdang, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kab. Pakpak Bharat, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Karo, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Mandailing Natal, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbatu, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab.	

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		Pakpak Bharat, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Selatan, Kab. Nias Barat 4.Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Simalungun, Kab. Samosir Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Asahan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Mandailing Natal Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana: Kab. Langkat target: jalan 202,84 km jembatan 202,90 m.	
	2027	1.Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) 2.Penyusunan Leger jalan 3.Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Simalungun, Kota Pematang Siantar, Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Dairi, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Padang Lawas, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbatu, Kab. Dairi, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Afirmasi: Kab. Nias, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat, Kab. Nias Selatan Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana: Kab. Langkat 4.Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Batu Bara, Kab. Deli Serdang Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Serdang Bedagai, Kab. Asahan, Kota Tanjung Balai	

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Serdang Bedagai, Kab. Pakpak Barat serta target: jalan 130,99 km & jembatan 708,45 m	
	2028	1.Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) 2.Penyusunan Leger jalan 3.Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Batu Bara, Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Humbang Hasundutan,Kab. Tapanuli Tengah, Kab Toba,Kota Gunungsitoli, Kota Padangsidimpuan Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Karo, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kota Tanjung Balai, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Padang Lawas Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Mandailing Natal, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbatu, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Langkat Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana : Kab. Langkat 4.Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Samosir, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Dairi Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Pakpak Bharat serta target: jalan 135,10 km & jembatan 438,90 m	

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
	2029	1.Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) 2.Penyusunan Leger jalan 3.Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Asahan, Kab. Padang Lawas Utara Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Simalungun,Kab. Deli Serdang, Kab. Toba, Kota Padangsidimpuan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Mandailing Natal, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbatu, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana: Kab. Langkat 4.Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Samosir, Kab. Toba Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Nias Utara Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Mandailing Natal, Kab. Toba Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Barat serta target: jalan 87,60 km & jembatan 147,20 m	
	2030	1.Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) 2.Penyusunan Leger jalan 3.Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Mandailing Natal, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Karo, Kab. Labuhanbatu,	

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		Kab. Asahan, Kab. Padang Lawas, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Simalungun, Kab. Batu Bara, Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Barat Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana: Kab. Langkat 4.Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Deli Serdang Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Labuhanbatu, Kab. Serdang Bedagai Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Serdang Bedagai serta target: jalan 126,20 km & jembatan 51 m	
b. Penguatan Infrastruktur Irigasi dan Sumber Air Pertanian untuk Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan	2025	tidak ada	Swasembada Pangan dan Petani Makmur: - Dukungan dalam pengelolaan jaringan irigasi tersier. - Sinergi antara pemerintah daerah, kelompok tani, dan BUMDes untuk pemeliharaan jaringan irigasi - Pembangunan embung, sumur bor, dan pompanisasi untuk sumber air cadangan.
	2026	tidak ada	
	2027	Akselerasi cakupan layanan target 3.175 Ha. Kab. Langkat - D.I Secanggang, Kab. Mandailing Natal- DI. Terusan, Kab. Padang Lawas- DI. Balakka Sitongkon, Padang Lawas- DI.Sigorbus, Kab.Mandailing Natal- DI Roburan Maga, Kab. Simalungun- DI.Raja Maligas, Kab. Simalungun- DI.Javaconisasi, Kab. Dairi- D.I Buluh Duri, Kab. Toba- D.I Hinalang, Kab. Tapanuli Utara- D.I Aek Sigeaon,Kab. Tapanuli Utara- D.I Hasak I dan II, Kab. Tapanuli Tengah- D.I Mombangboru, Kab. Samosir- D.I Tele Harian Boho, Kab. Humbang Hasundutan- D.I Parmiahan/Hutapaung, Kab. Nias- D.I Gido Zebua, Kab. Simalungun- D.I Bah Tongguran I, Kab.	

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		Simalungun- DI Raja Hombang/ Tongah Mangaraja, Kab. Padang Lawas Utara- DI.Padang Garugur, Padang Lawas Utara- D.I Napa Tanjung Beringin, Kab. Labuhanbatu- D.I.R Cinta Makmur, Kab. Asahan- D.I.Serbangan, Kab. Batu Bara- D.I.Simodong, Kab. Padang Lawas Utara- D.I.Padang Garugur, Kab. Labuhanbatu- D.I.R. Sei Serdang/sei Rakyat, Kab. Mandailing Natal- D.I. Terusan, Kab. Deli Serdang-D.I. Namorambe, Kab. Mandailing Natal- D.I. Tapus	- dukungan digitalisasi sistem irigasi (smart irrigation) berbasis sensor dan aplikasi. - Pemberdayaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) untuk pengelolaan irigasi. - Integrasi dengan program ketahanan pangan daerah.
	2028	tidak ada	
	2029	tidak ada	
	2030	tidak ada	
c. Peningkatan Kualitas Permukiman Layak, Terjangkau, dan Inklusif melalui Penyediaan Hunian Murah serta dukungan terhadap pelaksanaan program 3 juta rumah	2025	tidak ada	Infrastruktur Kuat 1. Pendataan dan Validasi Calon Penerima (BNBA = by name by address) 2. Penetapan Kawasan kumuh 3. Pembentukan Pokja Penanganan Kawasan Kumuh 4. Melakukan sosialisasi kepada MBR dan ASN 5. Pelaksana teknis di lapangan secara menyeluruh mulai
	2026	tidak ada	
	2027	tidak ada	
	2028	tidak ada	
	2029	tidak ada	
	2030	- Membentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya - Survei Lokasi di setiap kab/kota - Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerja sama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dll) - Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN	

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		Pemerintah Daerah - Pembangunan Fisik setiap Tahun - Perluasan pemasaran dan kepemilikan rumah bagi MBR dan ASN - Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan •Kab. Asahan, Kota Tanjung Balai, Kab. Nias Selatan, Kab. Nias, Kota Gunungsitoli, Kab. Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi	pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, pendampingan, monitoring, dan pelaporan langsung dari lokasi perbaikan. 6. fasilitasi bantuan teknis konstruksi, menyusun RAB, dan memberikan supervisi teknis kepada pelaksana di lapangan. 7. fasiitasi pembaruan dan verifikasi data kemiskinan di tingkat lokal. 8. Fasilitasi gotong royong di masyarakat 9. Penyediaan data ASN yang belum memilik rumah
6. Bantuan Hukum dan perlindungan rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE).	2025	tidak ada	Asahan Clean Governance - Replikasi Kegiatan Prestice - Edukasi dan Sosialisasi Prestice sampai dengan ke level Kecamatan dan Desa. - Pendampingan hukum kasus tidak pidana ringan yang ditangani oleh PRESTICE
	2026	- Pembentukan kelembagaan Prestice, Bimbingan Teknis Paralegal Desa dan Edukasi dan Sosialisasi PRESTICE di 25 kabupaten/kota (Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Humbahas, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapsel, Tapteng, Taput, Toba - Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba - Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan	

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		kasus tindak pidana ringan. - Pelatihan mediator tingkat kabupaten/kota (2 orang per kab/kota, dilaksanakan di Kota Medan)	
	2027	- Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan - Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba - Pelatihan mediator tingkat kabupaten/kota (2 orang per kab/kota, dilaksanakan di Kota Medan)	
	2028	- Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan - Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba - Pelatihan mediator tingkat kabupaten/kota (2 orang per kab/kota, dilaksanakan di Kota Medan)	
	2029	- Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan - Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba - Pelatihan mediator tingkat kabupaten/kota (2 orang per kab/kota, dilaksanakan di Kota Medan)	
	2030	- Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan. - Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba	

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		- Pelatihan mediator tingkat kabupaten/kota (2 orang per kab/kota, dilaksanakan di Kota Medan)	

Tabel 4.4 Dukungan terhadap Program Prioritas/Proyek Strategis Daerah (PSD) RPJMD Provinsi Sumatera utara Tahun 2025-2029

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
PP1. PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM SEKOLAH UNGGULAN BERBASIS PENINGKATAN SKILL YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI DAN POTENSI WILAYAH DI TINGKAT LOKAL			**ASAHAN CERDAS DAN BERKARAKTER**
1. Pemenuhan 100% Fasilitasi Listrik dan Layanan Internet pada Seluruh SMA/SMK/SLB di Sumatera Utara	2025	tidak ada	Pembangunan akses jalan yang baik ke sekolah yang akan dibangun akses listrik dan layanan internet.
		tidak ada	
	2026	tidak ada	
	2027	tidak ada	
	2028	tidak ada	
	2029	tidak ada	
	2030	tidak ada	
2. Pembangunan 4 SMA/SMK/SLB Unggulan (Nias/SMA - 2026, Asahan/SMK - 2027, Samosir/SMK – 2028, Karo/SLB - 2029)	2025	tidak ada	- Penyediaan lahan/hibah lahan yang diperlukan - Pembangunan akses jalan yang baik dari dan ke sekolah sesuai kewenangan - Menyediakan basis data siswa SMP/SLTP kelas IX yang berprestasi
	2026	Pembangunan fisik sekolah Unggulan SMAN Sukma Nias, Kajian Akademis dan Perencanaan Pembangunan Sekolah Unggulan SMKN 1 Tinggi Raja Asahan	
	2027	Pembangunan fisik sekolah Unggulan SMKN 1 Tinggi Raja Asahan,	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		Kajian Akademis dan Perencanaan Pembangunan sekolah unggulan SMKN 1 Pariwisata Samosir	dan direkomendasikan masuk ke dalam sekolah unggulan
	2028	tidak ada	
	2029	tidak ada	
	2030	tidak ada	
3. Rehabilitasi Ruang Kelas SMA/SMK/SLB sebanyak 490 Sekolah	2025	Pendataan valid rehab ruang kelas tahun 2026-2029 •Provinsi Sumatera Utara (Dokumen Aprasial)	- Pembangunan infrastruktur akses jalan yang baik dari dan menuju sekolah yang akan dilakukan kegiatan rehabilitasi ruangan kelas rusak sesuai kewenangan
	2026	Pelaksanaan Fisik Tahap I – 150 Ruang Kelas (2026) di 21 kab/kota •Medan, Binjai, Langkat, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Tanjung Balai, Labuhanbatu, Pematangsiantar, Samosir, Toba, Sibolga, Padangsidimpuan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Padang Lawas Utara, Nias, Nias Selatan, Gunungsitoli, Nias Utara, Nias Barat	
	2027	Pelaksanaan Fisik Tahap II – 150 Ruang Kelas (2027) di 22 kab/kota • Medan, Binjai, Langkat, Serdang	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Tanjung Balai, Labuhanbatu, Pematangsiantar, Samosir, Toba, Sibolga, Padangsidimpuan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Padang Lawas Utara, Nias, Nias Selatan, Gunungsitoli, Nias Utara, Nias Barat	
	2028	Pelaksanaan Fisik Tahap III – 190 Ruang Kelas (2028) di 28 kab/kota •Medan, Binjai, Langkat, Karo, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Dairi, Tebing Tinggi, Batu Bara, Asahan, Tanjung Balai, Labuhanbatu, Labura, Labusel, Simalungun, Pematangsiantar, Samosir, Toba, Humbahas, Taput, Tapsel, Tapteng, Sibolga, Padangsidimpuan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Padang Lawas	
	2029	Monitoring, Evaluasi & Pemutakhiran Data (2029)	
	2030	Tidak Ada	
4. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru	2025	Pendataan Kebutuhan RKB (mendesak), Pembangunan RKB Tahap I sebanyak 57 RKB di 15 kab/kota	- Penyediaan atau hibah Lahan dari kabupaten/kota untuk lokasi Pembangunan RKB sesuai kebutuhan.

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		• Deli Serdang, Langkat, Dairi, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Simalungun, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Asahan	- Pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan akses jalan yang baik dari dan menuju sekolah sesuai kewenangan
	2026	Pembangunan RKB (mendesak) Tahap II (2026) sebanyak 80 RKB di 19 kab/kota • Langkat, Binjai, Medan, Dairi, Serdang Bedagai, Batu Bara, Asahan, Simalungun, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Padangsidimpuan, Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 4 unit USB	
	2027	Pembangunan RKB sebanyak 30 RKB di 14 kab/kota Medan, Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Tapanuli Utara, Padangsidimpuan, Tapanuli Tengah, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Nias, Nias Selatan, Gunungsitoli	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
	2028	Pembangunan RKB sebanyak 30 RKB di 13 kab/kota Binjai, Langkat, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Asahan, Tanjung Balai, Samosir, Toba, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu, Labusel, Sibolga Pembangunan 2 Sekolah Baru	
	2029	-	
5. Optimalisasi Sarana dan Prasarana BLK Provsu menuju BLK Tematik Bioindustri dan Pariwisata	2025	tidak ada	1. Dukungan sarana dan prasaran pendukung sesuai kewenangan kabupaten 2. Memfasilitasi kerja sama antara BLK dan perusahaan lokal untuk program magang, pelatihan kerja, atau penyerapan tenaga kerja berbasis potensi daerah
	2026	tidak ada	
	2027	tidak ada	
	2028	tidak ada	
	2029-2030	tidak ada	
PP2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM BERKARYA DAN BERPRESTASI			**ASAHAN CERDAS DAN BERKARAKTER**
6. Liga Olahraga Pelajar Sumut Piala Gubernur Sumatera Utara Cabang Olahraga Sepak Bola dan Voli tahun 2026 - 2030	2025	1. Inisiasi dan konsolidasi melalui rapat rapat koordinasi tahun 2025 2. Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2025	- Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan liga olahraga pelajar sumut

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		• Provinsi Sumatera Utara	- Melaksanakan side event pada saat pelaksanaan liga olahraga (pameran UMKM) dan sejenisnya
	2026	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2026 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2026 • Provinsi Sumatera Utara	
	2027	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2027 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2027 • Provinsi Sumatera Utara	
	2028	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2028 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2028 • Provinsi Sumatera Utara	
	2029	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2029 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2029 • Provinsi Sumatera Utara	
	2030	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2030 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2030	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		Penguatan Legacy & Keberlanjutan Tahun 2030 • Provinsi Sumatera Utara	
7. Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Sumatera Utara pada Cabang Olahraga Atletik Tahun 2026 - 2030	2025	Inisiasi konsolidasi melalui pertemuan koordinasi Tahun 2025 • Kota Medan dan Kab Deli Serdang	Memperkuat perekrutan dan pembinaan para atlet disabilitas pelajar
	2026	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2026 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2026-2027 •Kota Medan dan Kab. Deli Serdang	
	2027	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2027 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi PelaksanaanTahun 2027-2028 •Kota Medan dan Kab. Deli Serdang	
	2028	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2028 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		PelaksanaanTahun 2028-2029 •Kota Medan dan Kab. Deli Serdang	
	2029	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2029 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi PelaksanaanTahun 2029-2030 •Kota Medan dan Kab. Deli Serdang	
	2030	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2030 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2030 •Kota Medan dan Kab. Deli Serdang	
PP 3 KESEHATAN YANG TERINTEGRASI DI BEBERAPA TITIK KAWASAN YANG MENJADI SENTRA LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT TERPADU			ASAHAN SEHAT
8. Digitalisasi sistem kesehatan terintegrasi (Sumut e-Health Integration system)	2025	Penyusunan Kajian dan Bisnis Proses Platform e-Health Integration System Tahun 2025 Pembangunan Aplikasi Tahun 2025 Launching Aplikasi Sumut e-Health	-Penyediaan data kepesertaan JKN kab/kota -Sosialisasi dan edukasi platform kepada faskes tingkat kabupaten

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		Integration System Tahun 2025 •33 Kabupaten/Kota	
	2026	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2026 Pengembangan Aplikasi Sumut e-Health Integration System Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota	
	2027	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2027 Pengembangan Aplikasi Sumut e-Health Integration System Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota	
	2028	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2028 Pengembangan Aplikasi Sumut e-Health Integration System Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota	
	2029	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2029 Pengembangan Aplikasi Sumut e-Health Integration System Tahun 2026-2029	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		33 Kabupaten/Kota	
	2030	"-	
9. Beasiswa Ikatan Dinas bagi Dokter Spesialis dan dokter spesialis residen di Wilayah Kurang Terlayani (2025 – 2030)	2025	tidak ada	-Menyediakan data dokter umum yang memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh beasiswa dokter spesialis - Mengidentifikasi jenis dan jumlah spesialis yang dibutuhkan di RSUD atau faskes daerah - fasilitasi komitmen bersama terkait peserta dokter spesialis akan kembali ke daerah asal dan RSUD setempat - Menentukan jenis spesialis yang paling dibutuhkan - Kesiapan Sarana dan Prasarana RSUD - fasilitasi Surat menyurat, dukungan Legal Formal, da Akomodasi dokter residen
	2026	tidak ada	
	2027	- Pemenuhan Dokter Spesialis melalui pemberian beasiswa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yakni USU dan UGM - Distribusi dokter spesialis sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Primer dan Rujukan melalui dokter residen (Layanan MedisMerata) Tahun 2025-2030 •RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi, RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tj. Balai, RSUD Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara, RSUD Tarutung Kab. Taput, RSUD Sidikalang Kab. Dairi, RSUD Tanjung Pura Kab. Langkat, RSUD Kabanjahe Kab. Karo, RSUD Aek Kanopan Kab. Labura, RSUD H. Abdul M. Simatupang Kab. Asahan,	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		Lanjutan 2026 : 8 orang, Lanjutan 2025 : 21 Orang	
	2028	tidak ada	
	2029	tidak ada	
	2030	- Pemenuhan dokter spesialis melalui pemberian beasiswa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yakni USU dan UGM - Distribusi dokter spesialis sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Primer dan Rujukan melalui dokter residen (Layanan MedisMerata) Tahun 2025-2030 •kab/kota yang terintervensi pada tahun 2026, 2027, 2028 dan 2029	
PP4 PEMBERANTASAN KEMISKINAN MELALUI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RENTAN SECARA MENYELURUH DAN TEPAT SASARAN			**ASAHAN EKONOMI BANGKIT**
10. Bantuan Sosial Produktif melalui Program Masyarakat Produktif (MAPRO).	2025	tidak ada	- Dukungan penjajakan calon penerima bantuan agar tepat sasaran. - Dukungan koordinasi penyiapan
	2026	tidak ada	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
	2027	tidak ada	kegiatan pelatihan bagi calon penerima bantuan - Replikasi kegiatan serupa
	2028	tidak ada	
	2029	tidak ada	
	2030	tidak ada	
11. Pelaksanaan Program Pasar Murah Bergerak (PMB)	2025	Identifikasi kebutuhan dan lokasi sasaran (IHK, P3KE, desa rentan pangan, dan wilayah 3T); Penentuan komoditas & harga jual; Penyusunan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) Pasar Murah Bergerak (PMB); Koordinasi dan Kemitraan dengan TPID, BULOG, CSR, Distributor, Pengusaha daerah/koperasi/bumdes, Pemerintah kab/kota;Penentuan jadwal & titik lokasi; Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB)	1. Pendataan kecamatan dan jumlah penduduk miskin dan rawan miskin; 2. Pendataan jumlah KUMKM penyedia Bahan Kebutuhan Pokok; 3. Pengawasan distribusi dan harga bahan kebutuhan pokok; 4. kerja sama antar kabupaten dalam penyediaan Bahan Kebutuhan Pokok 5. Penyediaan lokasi untuk pelaksanaan; 6. Monitoring dan evaluasi
		Lokasi: Medan (kontributor inflasi), Pematangsiantar (kota IHK), Padangsidimpuan (akses terbatas), Gunungsitoli (kemiskinan ekstrem), Simalungun (penyangga distribusi), Labusel (wilayah miskin), Tapanuli Selatan (wilayah rawan harga), Langkat (rawan lonjakan harga dan distribusi), Tapanuli Utara (akses geografis sulit),	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		Deli Serdang (wilayah IHK), Humbang Hasundutan (terpencil), Binjai (urban miskin), Toba (hinterland), Serdang Bedagai (penyangga pangan), Asahan (daerah padat penduduk)	
	2026	tidak ada	
		tidak ada	
	2027	tidak ada	
		tidak ada	
	2028	tidak ada	
		tidak ada	
	2029	Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) • 15 Kabupaten/Kota	
		Tebing Tinggi (kota IHK baru), Binjai (urban miskin), Toba (wilayah distribusi luas), Langkat (wilayah perbatasan), Samosir (akses logistik air), Pakpak Bharat (akses sangat terbatas), Humbahas (wilayah dataran tinggi), Tapanuli Tengah (harga fluktuatif), Mandailing Natal (kemiskinan struktural), Padang Lawas (akses distribusi sulit),	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		Deli Serdang (wilayah IHK), Karo (rawan inflasi hortikultura), Nias Selatan (logistik laut), Simalungun (distribusi lintas kabupaten), Asahan (wilayah urban pertanian)	
	2030	tidak ada	
12. Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja Rentan (Subsidi BPJS Ketenagakerjaan)	2025	1. Pendataan dan verifikasi 2. Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan (Pekerja rentan yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja dibawah standar) sebanyak 21.000 (APBD dan DBH Sawit) 3. Penguatan peran dan komitmen kabupaten/kota dalam pembiayaan dan regulasi (MoU Pemprovsu dengan Kabupaten dan Kota) -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2)	1. Mendukung pelaksanaan agar bisa mencapai target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) sebesar 60% sesuai RPJMD 2025-2029 2. Memberikan sosialisasi untuk masyarakat, khususnya untuk tenaga kerja rentan dan masyarakat yang berada di garis kemiskinan 3. Pengalokasian DBH sawit dengan persentase pembagian 80 persen kab/kota dan 20 persen provinsi utk perlindungan pekerja rentan miskin ekstrem desil 1 dan 2
	2026	Perluasan kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.645 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2	
	2027	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.646 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2	
	2028	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.647 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2	
	2029	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.648 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2	
	2030	1. Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.648 dengan skema penganggaran	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		20% Provinsi dan 80% kab/kota 2. Evaluasi menyeluruh dan pencapaian target cakupan 60% UCJ -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	
13. Revitalisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Panti Sosial Provinsi	2025	Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi	- mendukung pelaksanaan pelatihan bimbingan mental, dan pendidikan paket A/B/C bagi penerima manfaat yang dirujuk dari panti sosial provinsi khususnya panti anak dan remaja - bersama Provinsi melakukan pemantauan, evaluasi atas keberlanjutan penerima manfaat.
	2026	Penyusunan dokumen appraisal/penilaian kerusakan bekerja sama dengan Dinas PUPR Penyusunan dokumen perencanaan (jasa konsultan perencanaan) untuk 13 panti sosial Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi	
	2027	Revitalisasi fisik gedung Panti Sosial (4 unit) 1.PSAR Anak Tanjung Morawa (Kab. Deli Serdang) 2.PS Lansia Kisaran (Kab. Asahan) 3.PS Gepeng Binjai	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		4.PS Lansia TRW Pematangsiantar Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi	
	2028	tidak ada	
	2029	tidak ada	
	2030	Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi	
PP 5 PENGUATAN STABILITAS MAKRO EKONOMI DAN KESINAMBUNGAN FISKAL DAERAH			**ASAHAN EKONOMI BANGKIT**
14. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Pertanian dan pariwisata	2025	KEK Pertanian tidak ada	2025: - Dukungan Pengembangan KEK Pariwisata - Koordinasi terkait rencana pengajuan DPSP Danau Toba menjadi KEK
		KEK Pariwisata : Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba Tidak ada	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
	2026	KEK Pertanian tidak ada KEK Pariwisata : Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba Tidak ada	2026: - Persetujuan Pemerintah Kabupaten di Kawasan Danau Toba dan Penetapan Lokasi - Penertapan Pebup RTRW; Kesesuaian Dokumen RTRW dan RDTR
	2027	KEK Pertanian tidak ada KEK Pariwisata : Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba Tidak ada	2027: - Penyediaan Lahan (Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KEK dalam hal terdapat lahan yang belum dibebaskan) - Peningkatan infrastruktur kewenangan kabupaten (jalan, air, sarana persampahan, sanitasi) - Kemudahan Perizinan Usaha
	2028	KEK Pertanian tidak ada KEK Pariwisata : Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba Tidak ada	2028: - Peningkatan SDM Pariwisata dan Pertanian - Penyediaan Lahan - Peningkatan Infrastruktur kewenangan kabupaten

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
			- Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan kabupaten
	2029	KEK Pertanian tidak ada	2029: - Peningkatan SDM Pariwisata - Penyediaan Lahan - Peningkatan Infrastruktur kewenangan kab/kota - Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan kab/kota - Promosi Investasi
		KEK Pariwisata : Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba Tidak ada	
	2030	KEK Pertanian tidak ada	2030: - Peningkatan SDM Pariwisata dan Pertanian - Penyediaan Lahan - Peningkatan Infrastruktur kewenangan kab/kota - Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan kab/kota - Promosi Investasi
		KEK Pariwisata : Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba Tidak ada	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
15. Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan di Kawasan Industri Sumatera Utaraindeks	2025	Penguatan Hilirisasi Produk Unggulan Sumatera Utara Identifikasi rantai pasok dan IKM Komoditas Unggulan Lokasi • Kelapa: Kab. Nias Barat, Kab. Nias Selatan, Kab. Nias Utara, Kab. Asahan, Kab. Batu Bara, dan Kab. Labuhanbatu Utara • Kopi: Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Utara, dan Kab. Simalungun • Aren:Kabupaten Kab. Tapanuli Selatan dan Kab. Mandailing Natal • Cabai : Kab. Karo, Kab. Batu Bara, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Deli Serdang • Kelapa Sawit :	- Fasilitasi penyediaan Data IKM sektor Kelapa (jenis produk, data produksi, nilai omset produksi)
	2026	1. Hilirisasi komoditas Unggulan Sumatera Utara Peningkatan Kapasitas Produksi IKM dengan Produk Hilirisasi , Riset inovasi produk dan teknologi tepat guna • Kelapa: VCO, Santan Kemasan, Minyak kelapa kopra (cooking oil); Gula Kelapa/gula semut, Kelapa kering, arang aktif dari batok kelapa, Produk berbasis serat sabut (keset, geotekstil, jok mobil) • Cabe : Cabe Kering, Cabe Bubuk, Saos (cabe bawang tomat), saos pasta ;	- Peningkatan capacity building pada IKM (kelapa); - menyusun regulasi pengembangan hilirisasi,

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		Produk Turunan untuk Industri Non-Pangan (Ekstrak capsaicin → bahan baku industri farmasi, kosmetik (krim pereda nyeri, pelangsing), pestisida organik; Oleoresin cabai → pewarna dan pemberi rasa pedas alami untuk industri makanan & minuman; Spray pengusir hama berbahan capsaicin • Kopi : Minuman kopi kemasan siap minum (RTD Coffee) — botol/sachet/cup; Kopi instan (pure instant coffee, 3-in-1, cappuccino sachet); Drip bag coffee — kopi bubuk dalam kantong celup; Cold brew • Aren : Gula Aren, Sirup Aren, Tuak, manisan kolang kaling, Sapu ijuk, sikat, keset, anyaman kerajinan dari lidi atau serat kayu/daun aren	
		• Kelapa: Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara dan Asahan • Kopi: Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Simalungun • Aren:Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal • Cabe : Karo dan Kab. Batu Bara	
	2027	1. Hilirisasi Produk Unggulan Sumatera Utara	- Penguatan kemitraan hilirisasi antar kab/kota.

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		Peningkatan Kapasitas Produksi Hilir dan peningkatan kemitraan IKM dengan industri hilir ; Diversifikasi Produk & Inovasi • Kelapa: Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara,Asahan, Kab. Batu Bara, dan Labuhanbatu Utara • Kopi: Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Simalungun • Aren:Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal • Cabe : Karo, Kab. Batu Bara, Serdang Bedagai, Deli Serdang	- Pemasaran, dukungan promosi, - capacity buliding - diversivikasi produk hilirisasi - Fasilitasi penyediaan Rumah kemasan
	2028	1. Hilirisasi Produk Unggulan Sumatera Utara Peningkatan SDM, Peningkatan Kapasitas Produksi dan peningkatan kemitraan IKM dengan industri hilir; Penguatan Pasar & Branding ; MoU dengan Industri Besar untuk menampung produk hilirisasi dari IKM Binaan • Kelapa: Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara,Asahan,Batu Bara, dan Labuhanbatu Utara • Kopi: Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Simalungun • Aren: Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal	Menentukan IKM yang akan dilakukan capacity building, menyusun regulasi pengembangan hilirisasi, penguatan kemitraan hilirisasi antar kab/kota, peningkatan akses pembiayaan melalui KUR atau Koperasi, fasilitasi capacity building standarisasi eksport bagi pelaku IKM.

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		• Cabe: Karo, Batu Bara, Serdang Bedagai dan Deli Serdang	
	2029	1. Hilirisasi Produk Unggulan Sumatera Utara Integrasi Ekosistem Industri / (dari hulu ke hilir mulai dari bahan baku, sampai ke pasok industri besar) dan Bisnis Matching dengan Industri Besar dalam dan luar negeri • Kelapa: Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Asahan, Batu Bara, dan Labuhanbatu Utara • Kopi: Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Simalungun • Aren:Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal • Cabe : Karo, Kab. Batu Bara, Serdang Bedagai dan Deli Serdang	Dukungan pembiayaan KUR , identifikasi IKM berpotensi untuk dilakukan business matching.
	2030	1. Hilirisasi Produk Unggulan Sumatera Utara Evaluasi, Ekspansi dan Keberlanjutan Produk Hilirisasi Industri di pasar global • Kelapa: Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Asahan, Batu Bara, dan Labuhanbatu Utara • Kopi: Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Simalungun • Aren: Kabupaten Tapanuli Selatan dan	Branding Ekspor

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		Mandailing Natal • Cabe: Kabupaten Karo, Batu Bara, Serdang Bedagai dan Deli Serdang	
16. Pemanfaatan Aset barang milik daerah melalui kerja sama ekonomi	2025	• Inventarisasi Barang Milik Daerah yang belum optimal, serta potensi pemanfaatan • Penyusunan skema/proses bisnis pemanfaatan aset BMD • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi • Proses digitalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah	- Dukungan pelaksanaan pengamanan BMD dalam penerbitan SKT lahan (Surat Keterangan Kepemilikan Lahan) dari Pemerintah Setempat (Kelurahan atau Kepala Desa)
	2026	• Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi • Penyusunan Regulasi penggunaan web aplikasi pemanfaatan Barang Milik Daerah • Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM penilai barang	
	2027	•Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		• Pengembangan skema peman faatan Barang Milik Daerah • Pengembangan sistem informasi atau promosi	
	2028	• Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi • Penguatan kemitraan dalam perluasan pemanfaatan Barang Milik Daerah termasuk kerja sama dengan platform lain	
	2029	• Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi •Penguatan kemitraan dalam perluasan pemanfaatan Barang Milik Daerah termasuk kerja sama dengan platform lain (kerja sama dengan 1 Platform) • Evaluasi dan Monitoring secara berkala terhadap Pemanfaatan Barang Milik Daerah produktif berkelanjutan	
	2030	• Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		(target 2 BMD yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi • Evaluasi dan Monitoring secara berkala terhadap Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui kerja sama ekonomi berkelanjutan	
PP.6 PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU			**ASAHAN SWASEMBADA PANGAN DAN PETANI MAKMUR**
17. Pengembangan Kawasan Perkebunan (Kelapa, Kopi, Aren)	2025	tidak ada	1. Dukungan data CPCL di lokasi intervensi 2. Melakukan Pembinaan dan pelatihan peningkatan produksi atau peningkatan pasca produksi di lokasi intervensi pengembangan kawasan perkebunan
	2026	tidak ada	
	2027	tidak ada	
	2028	tidak ada	
	2029	- Verifikasi CPCL dan sosialisasi awal kepada kelompok pekebun di lokasi intervensi pengembangan kawasan yang dilaksanakan mulai bulan maret - Pembinaan dan pengawasan dilakukan pada bulan Juli-Agustus untuk melihat perkembangan kawasan perkebunan dan pelatihan pengolahan hasil produksi di lokasi intervensi yang telah dilaksanakan pada tahun 2028 - Pemberian benih pada komoditas kelapa sebanyak 80.000 batang benih,	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		160 ton pupuk organik dan 10 paket alat pasca panen pembuatan kopra dan VCO kepada 20 kelompok pekebun di Kab. Asahan dan Kab. Batu Bara. pemberian benih pada komoditas aren sebanyak 10.000 batang benih, 20 ton pupuk organik dan 8 paket alat pengolahan pembuatan gula semut kepada 10 kelompok pekebun di Kab. Simalungun dilaksanakan pada bulan Oktober	
	2030	tidak ada	
18. Pengembangan Kawasan Unggulan Perikanan Tangkap dan Budidaya	2025	tidak ada	- Pendataan kelompok nelayan dan pembudidaya kab/kota - Klasterisasi - Sosialisasi dan Edukasi -Replikasi di daerah yang sama
	2026	1. Pembuatan master plan 2. Pembangunan sarana prasana produksi a. Perikanan tangkap : sampan, jala dan dermaga b. Perikanan budidaya : revitalisasi kolam, benih, pakan, kincir, saluran air, automatic feeder • Perikanan tangkap : kawasan Tapteng-Sibolga, kawasan Asahan-Tanjung Balai, Nias Utara ; • Perikanan budidaya : Simalungun, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai.	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
	2027	1. Pengembangan unit pengolahan ikan dalam bentuk coolbox dan gudang ikan 2. Kemitraan usaha dengan : • Dinas Perindustrian dan Perdagangan – Pengolahan, pemasaran, dan ekspor produk perikanan. • Dinas Koperasi dan UKM – Penguatan kelembagaan usaha nelayan/pembudidaya. • Perikanan tangkap : kawasan Tapteng-Sibolga, kawasan Asahan-Tanjung Balai, Nias Utara ; • Perikanan budidaya : Simalungun, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai.	
	2028	1. Sertifikasi mutu 2. Digitalisasi pemasaran dan sistem logistik hasil perikanan 3. Pembukaan akses pasar ekspor kawasan perikanan tangkap: Tapteng-Sibolga (Ikan Asin), kawasan Asahan-Tanjung Balai (Ikan Teri), Nias Utara (Udang Beku), Kawasan perikanan budidaya: Simalungun (Ikan Dori), Deli Serdang	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		(Ikan Mas), Langkat (Udang), Serdang Bedagai (Ikan Gurami).	
	2029	1. Pembangunan sarana prasana produksi a. Perikanan tangkap : sampan, jala dan dermaga b. Perikanan budidaya : revitalisasi kolam, benih, pakan, kincir, saluran air, automatic feeder • Perikanan tangkap : Kab. Batu Bara, Kab. Langkat, Kota Medan dan Kab. Deli Serdang; • Perikanan budidaya : Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Tapsel, Kab. Batu Bara	
	2030	1. Pengembangan unit pengolahan ikan dalam bentuk coolbox dan gudang ikan 2. Kemitraan usaha dengan : • Dinas Perindustrian dan Perdagangan – Pengolahan, pemasaran, dan ekspor produk perikanan. • Dinas Koperasi dan UKM – Penguatan kelembagaan usaha nelayan/pembudidaya. • Perikanan tangkap : Kab. Batu Bara, Langkat, Kota Medan dan Kab. Deli Serdang;	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		• Perikanan budidaya : Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Tapsel, Kab. Batu Bara	
19. Pengawasan Konservasi Laut SEMESTA (Pemberdayaan Nelayan Sebagai Pasukan Penjaga Laut)	2025	Pokja Pengawas Laut, Peta digital kawasan rawan pelanggaran, draf rencana aksi	- Pendataan Nelayan kab/kota - Klasterisasi - Sosialisasi dan Edukasi
	2026	Laporan Patroli dan Peralatan + Aplikasi e-Mawas • Kabupaten/kota dan perairan Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara.	
	2027	Laporan Patroli dan Peralatan + Aplikasi e-Mawas • Kabupaten/kota dan perairan Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara.	
	2028	Modul Hukum & Klinik Konsultasi. • Kabupaten/kota dan perairan Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara.	
	2029	Laporan Evaluasi dan strategi pengawas baru • Kabupaten/kota dan perairan Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara.	
	2030	Buku capaian dan film dokumenter • Kabupaten/kota dan perairan Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara.	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
20. Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir berbasis Masyarakat	2025	tidak ada	1. Kolaborasi Multistakeholder dalam kegiatan 2. Pemberdayaan Masyarakat 3. Membantu dalam proses pengadaan lahan dan memastikan status hukum lahan tersebut jelas 4. pemantauan dan pemeliharaan secara berkala untuk memastikan pertumbuhan mangrove berjalan baik dan program mencapai tujuannya.
	2026	tidak ada	
	2027	tidak ada	
	2028	tidak ada	
	2029	tidak ada	
	2030	1. Melakukan penanaman mangrove seluas 18 Ha di Kabupaten Asahan 2. Kegiatan Mangrove Fest berkolaborasi dengan NGO/Pemerhati, pemberdayaan masyarakat 3. Pembentukan ekowisata berbasis mangrove silvofishery Lingkungan	
21. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (PLTS Pompa Air Untuk Irigasi Pertanian/PLTA Mikrohidro dan lainnya)	2025	Survei Lokasi terkait PLTS Pompa Air/PLTA Mikro Hidro; Persiapan dan pemilihan penyedia melalui tender oleh Pokja ULP, penandatanganan kontrak, pembangunan dan pengawasan PLTS pompa air/PLTA Mikrohidro , hingga serah terima pekerjaan (BAST) ke pemanfaatan - 1 unit Kecamatan Onan Runggu-Kabupaten Samosir	1. fasilitasi Data Kelompok Tani (CPCL) 2. penentuan lokasi 3. pengadaan lahan 4. Dukungan data produksi pertanian, kondisi air, dan data readiness criteria
	2026	Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB,	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek - Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara	
	2027	Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek - Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara	
	2028	Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek - Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara	
	2029	Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB,	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek - Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara	
	2030	Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek - Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara	
PP 7 KETAHANAN PANGAN MELALUI PENGUATAN NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL AGAR DIVERSIFIKASI HASIL PERTANIAN MENJADI LEBIH PRODUKTIF DAN BERDAMPAK PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL			**ASAHAN SWASEMBADA PANGAN DAN PETANI MAKMUR**
22. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Unggulan Padi, Jagung, Cabai Merah, dan bawang merah	2025	1. Kajian pengembangan kawasan unggulan padi, jagung, cabai merah dan bawang merah 2. Pembuatan masterplan 3. Penyusunan tim kerja dan Inventarisir data	• Memfasilitasi penyediaan benih unggul, pupuk, dan alat pertanian dasar. • Mendorong sinergi antar pemangku kepentingan lokal (petani, penyuluh, BUMDes). • Memfasilitasi

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		4. Pengembangan kawasan unggulan padi, jagung, cabai merah dan bawang merah 5. Pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian Kawasan Padi :Kab. Asahan dan Kab. Serdang Bedagai Kawasan jagung : Kab. Tapanuli utara dan Kab. Karo kawasan cabai Merah: Kota Padangsidimpuan, Kab. Batu Bara, dan Kab. Deli Serdang Kawasan Bawang Merah : Kab. Simalungun, Kab. Samosir, dan Kab. Humbang Hasundutan	pembangunan/peningkatan akses jalan produksi di kawasan unggulan. • Mendukung pembangunan fasilitas pascapanen: gudang, alat pengering, rumah sortasi. • Mengkoordinasikan petani/UMKM untuk mengikuti pelatihan sertifikasi ekspor dan standar internasional. • Memberikan laporan lengkap atas capaian program, kendala, dan peluang lanjutan. - Replikasi di daerah yang sama
	2026	1. Pengembangan kawasan unggulan padi, jagung, cabai merah dan bawang merah 2. Pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian Kawasan Padi: Kab. Deli Serdang, Kab. Simalungun, Kab. Asahan dan Kab. Serdang Bedagai. Kawasan Jagung: Kab. Humbahas, Kab. Langkat, Kab. Tapanuli utara dan Kab. Karo Kawasan Cabai Merah: Kab. Simalungun, Kab. Dairi, Kab. Batu Bara, dan Kab. Deli	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		Serdang Kawasan Bawang Merah: Kab. Humbang, Kab. Samosir dan Kab. Simalungun	
	2027	1. Pengembangan kawasan unggulan padi, jagung, cabai merah dan bawang merah 2. Pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian 3. Pengembangan bibit olahan dan kemitraan usaha Kawasan Padi: Kab. Mandailing Natal, Kab. Deli Serdang, Kab. Simalungun, Kab. Asahan dan Kab. Serdang Bedagai. Kawasan Jagung: Kab. Humbahas, Kab. Langkat, Kab. Tapanuli utara dan Kab. Karo Kawasan Cabai Merah: Kab. Humbahas, Kab. Taput, Kab. Simalungun dan Kab. Dairi Kawasan Bawang Merah: Kab. Dairi, Kab. Taput, Kab. Humbang, Kab. Samosir dan Kab. Simalungun	
	2028	1. Pengembangan kawasan unggulan padi, jagung, cabai merah dan bawang merah 2. Pembangunan sarana dan prasarana	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		produksi pertanian 3. Pengembangan bibit olahan dan kemitraan usaha 4. Digitalisasi pemasaran dan sistem logistik hasil pertanian Kawasan Padi (Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Mandailing Natal, Kab. Deli Serdang, Kab. Simalungun, Kab. Asahan dan Kab. Serdang Bedagai.), Kawasan Jagung (Kab. Deli Serdang, Kab. Toba, Kab. Humbahas, Kab. Langkat, Kab. Tapanuli utara dan Kab. Karo) Kawasan Cabai Merah (Kab. Deli Serdang, Kab. Langkat, Kab. Humbahas, Kab. Taput, Kab. Simalungun, Kab. Dairi) Kawasan Bawang Merah (Kab. Toba, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Dairi, Kab. Taput, Kab. Humbang, Kab. Samosir, dan Kab. Simalungun)	
	2029	1. Pengembangan kawasan unggulan padi, jagung, cabai merah dan bawang merah 2. Pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian 3. Pengembangan bibit olahan dan kemitraan usaha	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		4. Digitalisasi pemasaran dan sistem logistik hasil pertanian 5. Membuka akses pasar ekspor dan pasar bermutu Kawasan Padi (Kab. Karo, Kab. Toba, Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Mandailing Natal, Kab. Deli Serdang, Kab. Simalungun, Kab. Asahan dan Kab. Serdang Bedagai) Kawasan Jagung (Kab. Samosir, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Deli Serdang, Kab. Toba, Humbahas, Kab. Langkat, Kab. Tapanuli utara dan Kab. Karo) Kawasan Cabai (Kab. Mandailing Natal, Kab. Samosir, Kab. Deli Serdang,Kab. Langkat, Kab. Humbahas, Kab. Taput, Kab. Simalungun, Kab. Dairi) Kawasan Bawang Merah (Kab. Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Toba, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Dairi, Kab. Taput, Kab. Humbang, Kab. Samosir, dan Kab. Simalungun)	
	2030	Evaluasi dan monitoring Kegiatan	
23. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Peternakan unggulan	2025	tidak ada	1. Dukungan data CPCL di lokasi intervensi 2. Melakukan Pembinaan dan pelatihan
	2026	tidak ada	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
	2027	tidak ada	peningkatan produksi atau peningkatan pasca produksi di lokasi intervensi pengembangan kawasan peternakan 3. Pemberian izin usaha untuk koperasi, UMKM, BUMDes yang mengolah hasil produksi berada di kawasan peternakan 4. Replikasi di daerah yang sama
	2028	tidak ada	
	2029	- Verifikasi CPCL dan sosialisasi awal kepada kelompok peternak di lokasi intervensi pengembangan kawasan yang dilaksanakan mulai bulan april - Pembinaan dan pengawasan serta pennguatan kelembagaan peternak yang dilakukan mulai bulan Juli untuk melihat perkembangan kawasan perkebunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2028 - Pemberian bibit 100 ekor sapi potong kepada 10 kelompok tani/ peternak di Kab. Langkat, 30 ekor kerbau kepada 3 kelompok tani/ peternak di Kab. Humbahas, 200 ekor domba kepada 10 kelompok tani/ peternak di Kab. Asahan, dan 200 ekor babi kepada 10 kelompok tani/ peternak di Kab. Tapanuli Utara dilaksanakan pada bulan September	
	2030	tidak ada	
24. Program Pengembangan Bibit Unggul Pertanian	2025	tidak ada	- mempromosikan dan menggunakan bibit unggul padi varietas baru.
	2026	Tahap Uji Multilokasi, MT (Musim Tanam): Penanaman di 5 kabupaten • Deli Serdang, Langkat, Simalungun,	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		Serdang Bedagai, Asahan dan Balai Besar Perakitan Dan Balai Besar Modernisasi Pertanian Tanaman Padi - Subang Provinsi Jawa Barat	
	2027	Produksi benih sumber (Breeder Seed & Foundation Seed) varietas baru dan Distribusi benih sumber ke Penangkar/Pembudidaya untuk produksi benih sebar (Certified Seed) • Kab. Deli Serdang, Kab. Langkat, Kab. Simalungun, Kab. Serdang Bedagai dan Kab. Asahan	
	2028	Peningkatan kapasitas penangkar & perluasan lahan produksi benih - Monitoring dan Evaluasi - Promosi varietas baru (ekspo, lomba hasil panen) - Integrasi pemasaran gabah & beras varietas unggul Pendistribusian benih unggul ke daerah lainnya (Kab. Deli Serdang, Kab. Langkat, Kab. Simalungun, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Asahan, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas, Kab. Tapanuli Utara dan Kab. Mandailing Natal)	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
	2029	Pengembangan produksi benih unggul dan pemasaran di kab/kota sentra produksi padi	
	2030	Pengembangan produksi benih unggul dan pemasaran di kab/kota sentra provinsi Sumatera Utara dan di kepulauan Sumatera	
25. Fasilitasi Akses Permodalan Terhadap Kelompok Tani	2025	Fokus pada persiapan program, pembentukan Tim Pokja FPPS di provinsi dan kabupaten/kota, rekrutmen dan pelatihan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS), pemutakhiran data kelompok tani, koordinasi dengan lembaga keuangan, dan sosialisasi program. • 33 Kabupaten/Kota	Memetakan kelompok tani yang layak dan potensial untuk memperoleh akses permodalan, berdasarkan data luas lahan, komoditas yang diusahakan, serta rekam jejak kelembagaan kelompok
	2026	Mulai pelaksanaan Temu Pembiayaan tahap I dan II, pendampingan realisasi kredit, pelatihan manajemen keuangan bagi kelompok tani penerima pembiayaan, serta monitoring awal terhadap usaha penerima kredit. • 33 Kabupaten/Kota	
	2027	Memperluas cakupan penerima pembiayaan, memperkuat kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan swasta, serta	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		memberikan pelatihan lanjutan kepada FPPS terkait negosiasi bisnis dan pemasaran. • 33 Kabupaten/Kota	
	2028	Mengintegrasikan pemasaran digital dan e-commerce, mengembangkan sistem informasi pembiayaan pertanian berbasis aplikasi, serta melatih FPPS dan kelompok tani dalam penggunaannya • 33 Kabupaten/Kota	
	2029	Melakukan diversifikasi sumber pembiayaan melalui koperasi, CSR, dan investor. Mengembangkan usaha hilir di bidang pascapanen dan olahan, memberikan pelatihan manajemen usaha hilir, serta mendorong pemasaran produk hilir. • 33 Kabupaten/Kota	
	2030	Melaksanakan kajian dampak ekonomi program, menyusun model pendampingan berkelanjutan, dan melatih FPPS menjadi konsultan atau koperasi tani. • 33 Kabupaten/Kota	
PP 8 PARIWISATA YANG MENGGERAKKAN POTENSI ALAM LOKAL			**ASAHAN EKONOMI BANGKIT**

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
DI PEDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA LANGSUNG (KOMUNITAS, PEMERINTAH DAERAH/DESA/KELURAHAN DAN PENGUSAHA LOKAL)			
26. Dukungan terhadap Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	2025	tidak ada	1. Memastikan keselarasan Program/Kegiatan dalam Rencana Aksi Tahap II telah sesuai dengan Dokumen Perencanaan di darah (RPJMD Kab & RKPD Kab) dan Integrasi RIPDN kedalam renja OPD 2. Menyusun rencana aksi tahunan 3. Penyediaan Lahan yang Clean & Clear (jika terdapat pembangunan fisik) 4. Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; 5. Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; 6. Pendampingan Desa Wisata; 7. Pendataan Potensi Unggulan Daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata & Ekonomi Kreatif; 8. Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (Homestay/Hotel), Penyedia Jasa Transportasi, Penyeda Jasa Travel Agent));
	2026	tidak ada	
	2027	tidak ada	
	2028	tidak ada	
	2029	tidak ada	
	2030	tidak ada	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
			9. Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata 10. Pelaksaan Event Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Keratif
27. Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Situs Cagar Budaya Sumatera Utara	2025	tidak ada	1. Fasilitasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Provinsi; 2. Penyediaan Lahan yang Clean & Clear (jika terdapat pembangunan fisik); 3. Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Tingkat kab/kota; 4. Pembentukan Pengelola Kawasan Situs Cagar Budaya; 5. Melaksanakan Program edukasi kepada masyarakat dan pelajar tentang Kawasan Situs Cagar Budaya; 6. Pendataan, Inventarisasi, Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya di kab/kota 7. Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; 8. Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; 9. Pendampingan Desa Wisata; 10. Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (Homestay/Hotel), Penyedia Jasa Transportasi, Penyeda Jasa Travel
	2026	tidak ada	
	2027	tidak ada	
	2028	tidak ada	
	2029	tidak ada	
	2030	tidak ada	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
			Agent)); 11. Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata; 12. Pendataan dan Pendampingan UMKM; 13. Pelaksaan Event Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Keratif berskala Nasional
PP 9 EKONOMI KREATIF DAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI			**ASAHAN EKONOMI BANGKIT**
28. Sumut digital market dan galeri virtual produk UMKM kreatif	2025	Evaluasi Platform e-commerce yang sudah ada (SIMITRA)	- Pendataan UMKM binaan kab/kota - Kurasi Produk UMKM - Klasterisasi UMKM yang dapat dimasukkan ke dalam Galeri - Capacity Building
	2026	Desain dan pengembangan platform e-commerce; Kurasi awal 100 produk UMKM; Kemitraan dengan platform logistik & payment gateway. Manajemen Operasional platform e-commerce; Promosi dan sosialisasi platform e-commerce; • PLUT	
	2027	Onboarding UMKM; Pelatihan dan fasilitasi branding, dan manajemen toko online. Manajemen Operasional platform e-commerce; Promosi dan sosialisasi	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		platform e-commerce; • PLUT	
	2028	Pengembangan E-commerce menjadi Market Place; Integrasi dengan katalog elektronik, Manajemen Operasional platform e-commerce; Promosi dan sosialisasi platform e-commerce; • PLUT	
	2029	Galeri Virtual 3D; Kampanye digital nasional & regional, Manajemen Operasional platform e-commerce; Promosi dan sosialisasi platform e-commerce; • PLUT	
	2030	Kurasi produk ekspor; Promosi virtual di event internasional (virtual expo, marketplace ASEAN), Manajemen Operasional platform e-commerce dan Promosi dan sosialisasi platform e-commerce ; • PLUT	
PP 10 REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN			**ASAHAN CLEAN GOVERNANCE**
	2025	1. Penyusunan SK Tim Forum Pemangku Kepentingan SDGs Provinsi Sumatera	1. Dukungan penyusunan dokumen Tujuan Pembangunan

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
29. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs		Utara Tahun 2025-2030 2. Sosialisasi SK Tim forum dan milestone TPB SDGs 2025-2030 3. Updating target capaian SDGs tahun 2025 disesuaikan dengan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 4. Penyusunan skema Declaration and Registration System 5. Pembangunan fitur aplikasi pendaftaran BRS SDGs 6. Replikasi, instalasi dan Capacity Building Aplikasi E-Monev SDGs (Inovasi) 7. Menyusun Draf Rancangan Awal RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030 8. Launching dan Pelaksanaan BRS pilot project sekaligus penyerahan sertifikat kepada 15 UMKM 9. Workshop Penyusunan Voluntary Local Review (VLR) Kabupaten/Kota 10. Modifikasi Aplikasi E-Monev SDGs 11. Workshop E-Monev dengan Bappeda/Bapperida/Bappelitbang Kabupaten/Kota 12. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2025	Berkelanjutan/SDGs kab/kota se-Sumut tahun 2025-2030 2. Dukungan pelaksanaan skema BRS Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs : identifikasi UMKM/IMK serta pelaku usaha 3. Dukungan pelaksanaan North Sumatera SDGs Action Awards 4. Dukungan proses penginputan E-Monev Kabupaten/Kota 5. Peningkatan Kapasitas untuk implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
	2026	1. Inovasi Business Registration System Policy TPB/SDGs 2. Diseminasi Skema BRS TPB/SDGs (Kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM pada acara FYP, BRS SDGs dijadikan kurikulum) 3. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2025 4. Finalisasi Draf RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030 melalui desk per pilas TPB/SDGs 5. Launching Aplikasi e-Monev 6. Pelaksanaan skema Declaration and Registration System BRS TPB/SDGs 7. Diseminasi RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030 8. Penyusunan Rancang Bangun aplikasi e-Monev SDGs (INOVASI) 9. Workshop Penyusunan Voluntary Local Review (VLR) Kabupaten/Kota 10. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2026 11. Sosialisasi North Sumatra SDGs Action Award 2027 (Indikator RAD TPB/SDGs, VLR dan Laporan Monev)	
	2027	1. Pembangunan aplikasi e-Monev SDGs (INOVASI) 2. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		Tahun 2026 3. Forum Business Registration System (BRS) 4. North Sumatra SDGs Action Award 2027 (Indikator RAD TPB/SDGs, VLR dan Laporan Monev) 5. Desk capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2026 6. Workshop Penyusunan Voluntary Local Review (VLR) Kabupaten/Kota 7. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2027 8. Sosialisasi penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI)	
	2028	1. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2027 2. Finalisasi aplikasi e-Monev SDGs 3. Penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI) 4. North Sumatra SDGs Action Award 2028 5. Launching aplikasi e-Monev SDGs 6. Diseminasi pemanfaatan aplikasi e-Monev SDGs 7. Desk capaian pelaksanaan program	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2027 8. Workshop Penyusunan Voluntary Local Review (VLR) Kabupaten/Kota 9. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2028	
	2029	1. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2028 2. Pelaksanaan Skema BRS 3. Finalisasi integrasi Satu Data SDGs pada aplikasi SADAINA 4. Launching integrasi Satu Data SDGs pada aplikasi SADAINA 5. Diseminasi pemanfaatan aplikasi e-Monev SDGs 6. Desk capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2028 7. Penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI) 8. North Sumatra SDGs Action Award 2029 9. Pelaksanaan Skema BRS 10. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2029	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
	2030	1. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2029 2. Desk capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs tahun 2029 3. North Sumatra SDGs Action Award 2030 4. Menyusun Draf Laporan Monev RAD TPB/SGDs Tahun 2026-2030 5. Workshop Penyusunan Voluntary Local Review (VLR) Kabupaten/Kota 6. Menyusun laporan akhir kegiatan SDGs	
30 kerja sama APIP dan APH dalam Pendampingan Proyek Strategis dan Kegiatan Unggulan Daerah melalui pendampingan sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan dan serah terima kegiatan proyek strategis	2025	- Penyusunan MoU antara APIP dengan APH (Kejaksaan Tinggi, Kepolisian) - Pendampingan Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah	Koordinasi Pengawasan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait pelaksanaan Proyek Strategis yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota
	2026	- Reviu Perencanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Pendampingan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara	
	2027	- Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Pelaksanaan Kolaborasi Pendampingan	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		Proyek Strategis Daerah - Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah	
	2028	- Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Pelaksanaan Kolaborasi Pendampingan Proyek Strategis Daerah - Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah	
	2029	- Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Pelaksanaan Kolaborasi Pendampingan Proyek Strategis Daerah - Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah	
	2030	- Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah	
PP 11. TRANSFORMASI DIGITAL DAN INOVASI TEKNOLOGI PADA PELAYANAN PUBLIK DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT			**ASAHAN MODERN**
31. Pemanfaatan Satu Data SUMUT pusat data dan informasi pembangunan	2025	- Tindak lanjut MoU terkait kerja sama teknis dengan BPS dan Diskominfo dalam pembangunan aplikasi Satu Data (SADAINA Reborn)	Replikasi aplikasi, menyediakan SDM, menyiapkan regulasi terkait

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		- Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Launching SADAINA Reborn di Konreg PDRB ISEI (BPS dan Diskominfo) - Updating SK Tim Pelaksana SADAINA - Diseminasi aplikasi dan tupoksi tim SADAINA	
	2026	- Pemanfaatan SADAINA Reborn - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu Data tingkat Daerah - Proses integrasi Satu Data dengan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Provsu - Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data Geospasial - Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data SDGs	
	2027	- Pemanfaatan SADAINA Reborn - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu Data tingkat Daerah - Pemanfaatan SADAINA dan Data Geospasial - Pemanfaatan SMART SADAINA SDGs	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		- Proses bisnis integrasi SADAINA Reborn dengan kab/kota	
	2028	- Pemanfaatan SADAINA Reborn - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu data tingkat Daerah - Pengembangan fitur SADAINA (API) - Peningkatan kapasitas user SADAINA Reborn - Pemanfaatan dan replikasi SADAINA Reborn	
	2029	- Pemanfaatan SADAINA Reborn - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu data tingkat Daerah - Menyediakan API (Application Programming Interface) - Peningkatan kapasitas user SADAINA Reborn - Pemanfaatan dan replikasi SADAINA Reborn	
	2030	- Menyediakan API (Application Programming Interface) - Pemanfaatan SADAINA Reborn - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		- Forum Satu data tingkat Daerah - Monitoring dan Evaluasi	
PP 12. INFRASTRUKTUR DENGAN PRIORITAS JALAN, JEMBATAN, DAN IRIGASI YANG LANGSUNG BERDAMPAK PADA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL			**ASAHAN INFRASTRUKTUR KUAT**
32. Pembangunan Ruas Jalan Baru Penghubung Wilayah Terisolir atau Strategis yang Merupakan kewenangan Provinsi	2025	tidak ada	1. Memberikan dukungan administratif atas pembangunan jalan yang berada di wilayah kewenangannya, mendukung penyediaan lahan pada trase jalan serta perizinan 2. Menyelaraskan program jalan dengan perencanaan pembangunan daerah dan usulan prioritas lokal. 3. Melaksanakan koordinasi teknis lapangan dan penyedia data kondisi eksisting jalan serta kebutuhan daerah.
	2026	Pelaksanaan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2030, dengan prioritas pada ruas-ruas yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat layanan, serta memperkuat jalur distribusi antar kabupaten/kota • Penanganan sepanjang total 51,96 km pada 9 ruas jalan provinsi belum tembus yang masih dalam kondisi tanah dan belum layak dilalui. Ruas-ruas tersebut menghubungkan wilayah Kab. Mandailing Natal, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Samosir	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
	2027	Pelaksanaan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2030, dengan prioritas pada ruas-ruas yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat layanan, serta memperkuat jalur distribusi antar kabupaten/kota •Total penanganan sepanjang 56,20 km difokuskan pada 9 ruas jalan provinsi yang saat ini belum tembus dan sebagian besar masih berupa jalan tanah. Ruas-ruas ini tersebar di wilayah Kab. Mandailing Natal, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Nias Utara, Kab. Padang Lawas, Kab. Samosir	
	2028	Pelaksanaan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2030, dengan prioritas pada ruas-ruas yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat layanan, serta memperkuat jalur distribusi antar kabupaten/kota •Penanganan sepanjang 64,63 km akan difokuskan pada 6 ruas jalan provinsi yang belum tembus dan masih dalam kondisi tanah. Lokasi tersebar di wilayah	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		Kab. Mandailing Natal, Kab. Samosir, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Nias Utara, Kab. Padang Lawas	
	2029	Pelaksanaan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2030, dengan prioritas pada ruas-ruas yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat layanan, serta memperkuat jalur distribusi antar kabupaten/kota •Pembangunan ruas jalan baru sepanjang 47,17 km akan difokuskan pada 7 ruas jalan provinsi yang belum tembus dan masih berupa tanah. Lokasi berada di kawasan Kab. Mandailing Natal, Kab. Samosir, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Nias Utara, Kab. Langkat	
	2030	Pelaksanaan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2030, dengan prioritas pada ruas-ruas yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat layanan, serta memperkuat jalur distribusi antar kabupaten/kota •Penanganan sepanjang 22,50 km akan dilakukan pada 4 ruas jalan provinsi yang	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		masih berupa jalan tanah dan belum tembus. Lokasi berada di kawasan Kab. Samosir, Kab. Asahan, Kab. Nias Utara	
33. Pemerataan Infrastruktur Layanan Dasar bagi Kawasan Afirmasi, Terluar, dan Terpencil untuk Mewujudkan Keadilan Pembangunan	2025	tidak ada	1. Menyediakan lahan, mengarahkan program RTLH (Air Minum dan Sanitasi), menetapkan penerima bantuan, dan mengalokasikan anggaran daerah. 2. mengurus pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, pendampingan, monitoring, dan pelaporan. 3. Memberikan dukungan teknis konstruksi, membuat RAB, dan mengawasi pelaksanaan di lapangan. 4. Membantu memperbarui dan memverifikasi data kemiskinan lokal. 5. Melakukan identifikasi penerima bantuan, sosialisasi, memfasilitasi gotong royong, serta membantu pemantauan di lapangan.
	2026	tidak ada	
	2027	tidak ada	
	2028	tidak ada	
	2029	tidak ada	
	2030	tidak ada	
PP13. PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK DAN TRANSPORTASI YANG MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN DAYA SAING			**INFRASTRUKTUR KUAT**
	2025	tidak ada	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
34. Subsidi Transportasi Bus Perintis untuk Daerah-Daerah Terpencil	2026	tidak ada	1. Menyediakan data dan kebutuhan daerah terkait angkutan perintis serta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi agar subsidi dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi wilayah terpencil yang membutuhkan akses transportasi. 2. Membantu pelaksanaan program subsidi dengan memastikan armada bus perintis dapat beroperasi di wilayahnya, menyediakan dukungan administratif, dan memantau pelaksanaan layanan agar berjalan lancar dan memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu penyediaan fasilitas pendukung untuk kelancaran operasional, berupa lahan untuk titik keberangkatan 3. Menetapkan rute bus perintis yang strategis sesuai kebutuhan wilayah dan sinkron dengan program nasional, serta mengeluarkan kebijakan pendukung agar subsidi bisa dimanfaatkan optimal untuk membuka keterisolasian daerah, yaitu pengusulan dan penetapan trayek dan sosialisasi program kepada masyarakat serta kesiapan infrastruktur jalan di kabupaten dalam kondisi layak dan aman, yang akan dilalui oleh trayek
	2027	tidak ada	
	2028	tidak ada	
	2029	tidak ada	
	2030	tidak ada	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
			4. melakukan pemantauan operasional bus perintis di lapangan untuk memastikan layanan tetap berjalan dengan baik, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat di daerah terpencil.
PP 14. PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA			**ASAHAN NYAMAN DAN SEIMBANG**
35. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir	2025	tidak ada	1. Menyediakan data wilayah yang terdampak banjir serta kebutuhan teknis di lapangan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi agar pembangunan bisa tepat sasaran dan efektif 2. Membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan dengan menyediakan dukungan administratif, perizinan, penyediaan lahan, dan tenaga lokal di wilayahnya 3. Turut bertanggung jawab melakukan pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian agar fasilitas yang dibangun tetap berfungsi sesuai perencanaan dan umur yang
	2026	tidak ada	
	2027	tidak ada	
	2028	tidak ada	
	2029	tidak ada	
	2030	tidak ada	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
			diharapkan 4. Fasilitasi mendorong partisipasi masyarakat dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah provinsi dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pengendalian banjir melalui manajemen drainase, normalisasi sungai, dan pengelolaan ruang terbuka hijau 5. Menetapkan kebijakan lokal yang mendukung implementasi program pengendalian banjir provinsi, termasuk pengelolaan tata ruang dan penggunaan teknologi mitigasi banjir
36. Pembangunan TPST Regional	2025	tidak ada	1. Penyusunan regulasi pengelolaan sampah terpilah 2. Penyediaan dan penentuan lokasi 3. Dukungan pengumpulan sampah terpilah 4. Dukungan pengangkutan sampah terpilah ke tempat pengolahan 5. Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra pengolahan 6. Dukungan SDM
	2026	tidak ada	
	2027	tidak ada	
	2028	tidak ada	
	2029	tidak ada	
	2030	tidak ada	
37. Pembangunan PLTSa	2025	tidak ada	1. Dukungan Lahan dan wilayah untuk pembangunan PLTSa, Penerapan
	2026	tidak ada	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
	2027	tidak ada	Sistem Persampahan Terpilah Perizinan 2. Penyusunan regulasi pengelolaan sampah terpilah 3. Penyediaan dan penentuan lokasi 4. Dukungan pengumpulan sampah terpilah 5. Dukungan pengangkutan sampah terpilah ke tempat pengolahan 6. Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra pengolahan 7. Dukungan SDM
	2028	tidak ada	
	2029	tidak ada	
	2030	tidak ada	
38. Pengembangan SPAL Regional	2025	tidak ada	1. Perencanaan tata ruang 2. Membuat regulasi dan menerbitkan perizinan 3. Sosialisasi kepada masyarakat 4. Dukungan penyediaan lahan 5. dukungan alokasi anggaran 6. Fasilitasi pembentukan kelembagaan untuk mengelola operasional IPLT
	2026	tidak ada	
	2027	tidak ada	
	2028	tidak ada	
	2029	tidak ada	
	2030	tidak ada	
39. Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati	2025	Rapat koordinasi, pembentukan tim appraisal dan pembentukan pokja rencana Pembangunan Taman Kehati	1. Dukungan terhadap pengadaan lahan 2. Penetapan Taman Kehati pada RTRW kab/kota

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
	2026	Penyusunan dokumen DPPT dan pembebasan lahan	
	2027	Penyusunan dokumen FS, DED, dan dokumen administrasi lainnya	
	2028	Pekerjaan fisik di lapangan sesuai dengan Perdirjen KSDAE Nomor P.5 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Design Dasar (Design Vegetasi dan Design Infrastruktur Taman Kehati)	
	2029	Tahap lanjutan kegiatan penanaman dan pemeliharaan vegetasi serta - Membuat Rencana Kesepakatan Bersama/ kerja sama Pembangunan Taman Kehati sebagai dukungan Pengembangan Kawasan Konservasi Taman Kehati	
	2030	1. Pembukaan dan peresmian Taman Kehati serta tahap lanjutan kegiatan penanaman 2. Pemeliharaan vegetasi serta kegiatan pengembangan 3. Pembentukan UPT Taman Keanekaragaman Hayati	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
PP 15. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA			**ASAHAN CLEAN GOVERNANCE**
40. Penguatan Ekonomi Desa untuk Mengurangi Ketergantungan pada Pusat Kota dengan Penguatan Ekonomi Lokal melalui Pembuatan Master Plan Desa Produktif dan Mandiri.	2025	tidak ada	-Menyediakan data potensi desa yang akurat termasuk peta sebaran komoditi unggulan. -Memperbaiki jalan produksi, pasar desa, gudang, sentra dan pengolahan sesuai kewenangan -Memfasilitasi kerja sama antar desa atau antar BUMDes untuk memperkuat rantai pasok. -Memfasilitasi sertifikasi produk (halal, organik, SNI) untuk meningkatkan daya saing. -Pembinaan Penggunaan dana desa untuk ekonomi desa pada Lokus yang di intervensi
	2026	tidak ada	
	2027	tidak ada	
	2028	tidak ada	
	2029	tidak ada	
	2030		
41. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan bagi Pengelola BUMDES	2025	Pendataan BUMDES/BUMDesma yang akan menerima pemanfaatan kegiatan •27 Kabupaten/Kota yang memiliki desa	- Dukungan penugasan tenaga pendamping desa atau penyuluh ekonomi untuk mendampingi operasional BUMDES. - Memfasilitasi akses internet dan teknologi informasi untuk mendukung pemasaran digital. - Memfasilitasi sertifikasi kompetensi pengelola BUMDES melalui lembaga pelatihan resmi.
	2026	- Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDesma - Monitoring dan Evaluasi kegiatan •Tapteng, Taput, Nias, Simalungun,	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		Asahan, Dairi, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labura, Gunungsitoli, Padangsidimpuan, Karo, Toba, Labusel, Tapsel, Labuhanbatu (20 Kabupaten/Kota)	
	2027	- pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDes/BUMDesma - Monitoring dan Evaluasi kegiatan •27 Kabupaten/kota yang memiliki desa	
	2028	- pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDesma - Monitoring dan Evaluasi kegiatan •27 Kabupaten/kota yang memiliki desa	
	2029	- pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDesma - Monitoring dan Evaluasi kegiatan •27 Kabupaten/kota yang memiliki desa	
	2030		

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
PP 16. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA YANG MENDUKUNG SUASANA YANG HARMONIS, TOLERAN DAN RUKUN			**ASAHAN RELIGIUS**
42. Bantuan Hibah Rumah Ibadah di 33 Kabupaten/Kota	2025	-Penyusunan perubahan Pergub Hibah Rumah Ibadah dengan mekanisme penyaluran hibah yang memuat alokasi terhadap biaya operasional pengelola dan sarpras rumah ibadah Tahun 2025 -Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 -Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	-
	2026	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 -Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	
	2027	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 -Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	
	2028	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 -Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	
	2029	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 -Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	
	2030	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 -Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	
43. Festival Seni dan Budaya Daerah	2025	tidak ada	1. Dukungan ketersediaan anggaran dalam mendukung Proyek Strategis Provinsi; 2. Pelatihan dan pembinaan Sanggar Kesenian Daerah; 3. Pendataan/Inventarisasi potensi Festival Seni Budaya 4. Fasilitasi kontinyuitas pelaksaan Festival Seni Budaya 5. Promosi pelaksaan Festival Seni-Budaya; 6. Penyusunan Kalender Budaya
	2026	tidak ada	
	2027	tidak ada	
	2028	tidak ada	
	2029	tidak ada	
	2030	tidak ada	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
44. Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat	2025	-Pendataan Sasaran Ormas dan Kelompok masyarakat pada daerah rawan konfilk di Sumatera Utara di Tahun 2025 -Penyusunan Modul pembekalan pelatihan wawasan kebangsaan dan Solidaritas Tahun 2025 -Pelaksanaan Kegiatan edukasi wawasan kebangsaan dan Solidaritas bagi Ormas Tahun 2025 -Monitoring dan Evaluasi Tahun 2025 •Asahan, P. Siantar	Replikasi pelaksanaan kegiatan Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat
	2026	tidak ada	
	2027	tidak ada	
	2028	tidak ada	
	2029	tidak ada	
	2030	tidak ada	
PP 17. TERCIPTANYA KEHIDUPAN YANG LEBIH AMAN DAN TERTIB			**ASAHAN RELIGIUS**
45. Patroli Gabungan untuk Narkoba di Pintu Masuk Narkoba dan Kawasan-Kawasan Kenakalan Remaja (Genk Motor).	2025	- Pembentukan SK Gubernur tentang Tim Patroli Gabungan Tahun 2025 - Pelaksanaan Rapat Teknis terkait Pelaksanaan Patroli gabungan dengan	- Dukungan personel dalam pelaksanaan kegiatan.

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
		Stakeholder terkait Tahun 2025 -Pelaksanaan Patroli Gabungan Genk Motordan Pencegahan Pengedaran Narkoba di Pintu Masuk Narkoba Tahun 2025 •Medan, Binjai, Deli Serdang, Tanjungbalai , Asahan, dan Langkat	- Penyediaan data dan peta daerah rawan narkoba
	2026	- Pelaksanaan Patroli Gabungan Genk Motordan Pencegahan Pengedaran Narkoba di Pintu Masuk Narkoba Tahun 2026 - Pembinaan hasil Patroli Gabungan Tahun 2026 •Medan, Binjai, Deli Serdang, Tanjungbalai , Asahan, dan Langkat	
	2027	- Pelaksanaan Patroli Gabungan Genk Motordan Pencegahan Pengedaran Narkoba di Pintu Masuk Narkoba Tahun 2027 - Pembinaan hasil Patroli Gabungan Tahun 2027 •Medan, Binjai, Deli Serdang, Tanjungbalai , Asahan, dan Langkat	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
	2028	- Pelaksanaan Patroli Gabungan Genk Motordan Pencegahan Pengedaran Narkoba di Pintu Masuk Narkoba Tahun 2028 - Pembinaan hasil Patroli Gabungan Tahun 2028 •Medan, Binjai, Deli Serdang, Tanjungbalai , Asahan, dan Langkat	
	2029	- Pelaksanaan Patroli Gabungan Genk Motordan Pencegahan Pengedaran Narkoba di Pintu Masuk Narkoba Tahun 2029 - Pembinaan hasil Patroli Gabungan Tahun 2029 •Medan, Binjai, Deli Serdang, Tanjungbalai , Asahan, dan Langkat	
	2030	- Pelaksanaan Patroli Gabungan Genk Motordan Pencegahan Pengedaran Narkoba di Pintu Masuk Narkoba Tahun 2030 - Pembinaan hasil Patroli Gabungan Tahun 2030 •Medan, Binjai, Deli Serdang, Tanjungbalai , Asahan, dan Langkat	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN LOKUS PELAKSANAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ASAHAN
46. Pemberantasan Pengguna dan Bandar Narkoba melalui Pemindahan Gembong Narkoba dari Lapas ke Nusakambangan	2025	tidak ada	Penguatan pencegahan narkoba di pemerintahan daerah
	2026	tidak ada	
	2027	tidak ada	
	2028	tidak ada	
	2029	tidak ada	
	2030	tidak ada	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja ditetapkan sebagai instrumen untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Daerah selama periode perencanaan. Pencapaian indikator ini mencerminkan akumulasi hasil yang diperoleh dari indikator outcomes program pembangunan Daerah setiap tahun, maupun indikator yang bersifat mandiri pada setiap tahunnya. Dengan demikian, target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dicapai secara optimal. Indikator kinerja Daerah dirumuskan berdasarkan analisis keterkaitan dan pengaruh antara satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcomes*) terhadap tingkat pencapaian indikator kinerja Daerah. Indikator ini merupakan hasil agregasi dan akumulasi capaian indikator kinerja program yang berbasis outcomes dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara itu, indikator kinerja program yang bersifat terukur merupakan hasil agregasi dari pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang berorientasi pada keluaran (*outputs*) yang juga dilaksanakan oleh OPD.

Indikator kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja saat ini, tetapi juga sebagai proyeksi terhadap prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Untuk menjamin akuntabilitas pencapaian kinerja, indikator dan target kinerja harus dinyatakan secara jelas sejak tahap perencanaan hingga akhir pelaksanaan. Oleh karena itu, target kinerja yang ditetapkan harus selaras dengan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah serta memenuhi prinsip *SMART-C* (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, and Continuously Improve*), sehingga dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian kinerja Daerah bergantung pada indikator yang mampu mencerminkan kemajuan pembangunan serta menjadi acuan bagi publik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Indikator tersebut mencakup kinerja dalam penyelenggaraan otonomi Daerah, indeks pembangunan Daerah, daya saing Daerah, serta daya tarik investasi. Secara kumulatif, keberhasilan pelaksanaan otonomi Daerah diukur melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang direpresentasikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indikator kinerja utama Bupati yang mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan Daerah ditetapkan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib, Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta indikator kinerja lainnya yang digunakan oleh Pemerintah. Indikator-indikator ini diintegrasikan dalam sebuah perumusan makro yang terukur dan kuantitatif guna memudahkan proses pengendalian, evaluasi, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban kepada publik. Penetapan indikator kinerja utama Bupati harus disesuaikan dengan tantangan dan permasalahan yang dihadapi Daerah, serta isu-isu strategis yang menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan Daerah. Sementara itu, perumusan indikator kinerja program OPD harus selaras dengan arah kebijakan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama Bupati serta pelayanan yang menjadi tanggung jawab OPD.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Layanan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
INDIKATOR TUJUAN DAERAH									
1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	74,17	74,17-75,5	74,83-76,7	76,55-77,9	78,28-79,1	80-80,3	81,72-82,5

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,68	5,2-5,6	5,6-6	6-6,4	6,4-6,8	6,8-7,2	7,2-7,6
3	Gini Rasio	Rasio	0,248	0,248-0,246	0,246-0,244	0,244-0,242	0,242-0,24	0,24-0,238	0,239-0,236
4	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	Nilai	N/A	N/A	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	BB (77)	BB (78)	BB (79)	BB (80)	A (81)	A (82)	A (83)
6	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,66	3,71	3,75	3,78	3,82	3,86	3,90
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	64,61	75,25	75,42	75,59	75,76	75,93	76,16
8	Indeks Risiko Bencana	Nilai	148,57	166,95	147,57	146,57	145,57	144,57	145
INDIKATOR SASARAN DAERAH									
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,64	12,72	12,81	12,9	12,98	13,07	13,16
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,85	8,91	8,97	9,03	9,09	9,15	9,21
3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	47,15	50,02	52,89	55,76	58,63	61,5	61,5
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai	46,77	51	54	58	63	68	73
5	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	0	35	37	39	41	43	45
6	Indeks Pembangunan Olahraga (Sport Development Index)	Nilai	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,3
7	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	73,65	73,9	74,1	74,3	74,5	74,7	74,9
8	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Nilai	66,5	75,2	80,7	84,1	86,3	87,7	88,1
9	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	91,91	91,91	91,91	91,92	91,92	91,93	91,93
10	Rasio Kekerasan	Rasio	0,1763	0,165	0,162	0,160	0,155	0,152	0,150

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Anak (per 10.000)								
11	Tingkat Kemiskinan	Persen	8,12	7,5-7	6,75-6,25	6,0-5,5	5,25-4,75	4,5-4	3,75-3,25
12	Kontribusi PDRB Kabupaten	Persen	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03
13	Tingkat Penggangguran Terbuka	Persen	5,94	5,9-5,69	5,8-5,56	5,71-5,43	5,61-5,29	5,51-5,16	5,41-5,03
14	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	69,33	70	70,66	71,33	72	72,67	73,34
15	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	Persen	43,47	44,27	45,12	46,05	47,07	47,9	48,7
16	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	0,68	0,69	0,7	0,71	0,72	0,73	0,74
17	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Nilai	78	78,3	78,5	78,6	78,9	79	79,1
18	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Nilai	56,05	58,3	61,3	63,83	66	70,5	70,5
19	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,17 (B-)	3,27 (B-)	3,47 (B-)	3,51 (B)	3,55 (B)	3,60 (B)	3,65 (B)
20	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,84 (B)	87,09 (B)	87,34 (B)	87,59 (B)	87,84 (B)	88,09 (B)	88,31 (A)
21	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Nilai	3,88	3,93	3,95	3,98	4	4,02	4,04
22	Indeks Pencegahan Korupsi	Nilai	92,54	93	94,5	95	95,5	96	96,5
23	Indeks Desa	Nilai	0,6807	0,6857	0,6907	0,6957	0,7007	0,7057	0,7057
24	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	45	48	53	58	63	68	70
25	Indeks Pemerintahan Digital	Nilai	2,86	2,88	2,9	2,94	2,97	3,01	3,05
26	Penurunan Emisi GRK (CO2 Eq)	(GgCO2-e)	n.a	144122,1	170584,9	197047,6	223510,3	249973,1	276435,8
27	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,35	0,37	0,39	0,41	0,43	0,45	0,47

Sumber : diolah, 2025

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Asahan 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**								
I.4	**Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan**								
I.4.1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	70	70,66	71,33	72	72,67	73,34	
I.4.2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	7,64	7,44	7,24	7,04	6,84	6,64	
I.4,3	Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh	600	627,38	656,02	685,96	717,26	750	
I.4.4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	Persen	45	47,46	50,06	52,81	55,7	58,75	
I.5	**Lingkungan Hidup Berkualitas**								
I.5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	75,25	75,42	75,59	75,76	75,93	76,16	
I.5.2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	5	10	15	20	30	35	
I.5.3	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	60	61,48	62,99	64,54	66,12	67,75	
I.5.4	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	60	61,88	63,82	65,81	67,87	70	
I.6	**Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**								
I.6.1	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	CO2 eq	144.122,13	170.584,86	197.047,59	223.510,32	249.973,05	276.435,78	
I.6.2	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,37	0,39	0,41	0,43	0,45	0,47	
I.6.3	Indeks Risiko Bencana	Nilai	166,95	147,57	146,57	145,57	144,57	145	
I.7	**Demografi**								
I.7.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,34	1,28	1,24	1,19	1,14	1,09	
I.7.2	Rasio Penduduk	Persen	102,06	101,98	101,91	101,83	101,74	101,65	
I.7.3	Kepadatan Penduduk	Jiwa/km2	220,9	223,73	226,5	229,18	231,79	234,31	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
II.1	**Kesejahteraan Ekonomi**								

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
II.1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,2-5,6	5,6-6	6-6,4	6,4-6,8	6,8-7,2	7,2-7,6	
II.1.2	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,5-7	6,75-6,25	6,0-5,5	5,25-4,75	4,5-4	3,75-3,25	
II.1.3	PDRB PerKapita (ADHB)	Rp Juta	75.668,5	81.201,3	86.734,1	92.266,9	97.799,7	103.332,5	
II.1.4	PDRB PerKapita (ADHK)	Rp Juta	39.671	40.848,5	42.026	43.203,5	44.381	45.558	
II.1.5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,9-5,69	5,8-5,56	5,71-5,43	5,61-5,29	5,51-5,16	5,41-5,03	
II.1.6	Indeks Gini	Nilai	0,248-0,246	0,246-0,244	0,244-0,242	0,242-0,24	0,24-0,238	0,239-0,236	
II.1.7	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	74,17-75,5	74,83-76,7	76,55-77,9	78,28-79,1	80-80,3	81,72-82,5	
	Kesehatan untuk Semua								
II.2.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,9	74,1	74,3	74,5	74,7	74,9	IUP RPJPD; IKU DAERAH; RIBK
II.2.2	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Per 100.000 kelahiran hidup	32,00	31,00	30,00	29,00	28,00	27,00	IUP RPJPD
II.2.3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	11,00	10,75	10,50	10,25	10,00	9,75	IUP RPJPD; RIBK
II.2.4	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	100,00	IUP RPJPD
II.2.5	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	100,00	IUP RPJPD; RIBK
II.2.6	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	%	90,00	94,00	95,00	98,00	99,00	99,00	IUP RPJPD; RIBK
II.2.7	Total Fertility Rate (Angka kelahiran total)	Jiwa	2,35	2,34	2,32	2,31	2,29	2,28	RIBK
II.2.8	Jumlah kematian ibu	orang	5,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	RIBK
II.2.9	Jumlah kematian balita	orang	21	20	19	18	17	16	RIBK
II.2.10	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	36,00	48,00	52,00	60,00	70,00	80,00	RIBK
II.2.11	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	99,00	RIBK

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
II.2.12	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	RIBK
II.2.13	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	65,00	66,10	67,90	69,70	80,00	82,00	RIBK
II.3	**Pendidikan Berkualitas yang Merata**								
II.3.1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,91	8,97	9,03	9,09	9,15	9,21	
II.3.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,72	12,81	12,9	12,98	13,07	13,16	
II.3.3	Angka Literasi SD	Nilai	69,65	71,12	72,59	74,06	75,53	77	
II.3.4	Angka Numerasi SD	Nilai	67,56	70,56	73,56	76,56	79,56	82,56	
II.3.5	Angka Literasi SMP	Nilai	62,45	65,26	68,07	70,88	73,69	76,5	
II.3.6	Angka Numerasi SMP	Nilai	66,88	69,53	72,18	74,83	77,48	80,13	
II.3.7	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	51	54	58	63	68	73	
II.4	**Perlindungan Sosial yang Adaptif**								
II.4.1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	100	100	100	100	100	100	
II.5	**Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju**								
II.5.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	78,3	78,5	78,6	78,9	79	79,1	
II.5.2	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	50,02	52,89	55,76	58,63	61,5	61,5	
II.5.3	Indeks Harmoni Indonesia	Nilai	n/a	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	
II.6	**Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif**								
II.6.1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)	Nilai	62,4	63,8	65,0	66,2	67,4	67,9	
II.6.2	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,435	0,426	0,418	0,410	0,401	0,393	
II.6.3	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	100	100	100	100	100	100	
II.6.4	Indeks Pembangunan Olahraga (Sport Development Index)	Nilai	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,3	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
III.1	**Daya Saing Sumber Daya Manusia**								
III.1.1	Angka ketergantungan	Persen	49,4	49,52	49,62	49,73	49,83	49,95	
III.2	**Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi**								
III.2.1	Rasio PDRB Industri Pengolahan ADHB	Persen	21,75	22,40	23,07	23,30	23,53	23,77	
III.2.2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen	0,70	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75	
III.2.3	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	20,87	21,04	21,20	21,36	21,51	21,67	
III.2.4	Rasio Kewirausahaan	Persen	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7	
III.2.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	68,15	68,66	69,17	69,68	70,19	70,7	
III.2.6	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	48	53	58	63	68	70	
III.2.7	Indeks Akses Keuangan Daerah	Nilai	3,93	3,95	3,98	4	4,02	4,04	
III.3	**Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru**								
III.3.1	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Nilai	0,59	0,61	0,63	0,65	0,67	0,70	
III.4	**Transformasi Digital**								
III.4.1	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	nn	45,34	45,74	46,24	46,74	47,2	47,7	
III.5	**Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**								
III.5.1	Pembentukan Modal Tetap Bruto	miliar rupiah	8.120,29	8.380,14	8.648,31	8.925,05	9.210,65	9.505,39	
III.5.2	Net Ekspor	miliar rupiah	4.480,92	4.704,96	4.940,21	5.187,22	5.446,58	5.718,91	
III.6	**Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**								
III.6.1	Indeks Infrastruktur	Nilai	0,69	0,7	0,71	0,72	0,73	0,74	
III.6.2	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	68	69,4	70,9	72,5	74,2	76	
III.6.3	Indeks Desa	Nilai	0,6857	0,6907	0,6957	0,7007	0,7057	0,7057	
III.7	**Stabilitas Ekonomi Makro**								
III.7.1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,26	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
III.7.2	Tingkat Inflasi	Persen	2,5± 1	2,5± 1	2,5± 1	2,5± 1	2,5± 1	2,5± 1	proxy ke Kota Pematang Siantar
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
IV.1	**Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif**								
IV.1.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	3,14	3,14	3,55	3,55	3,55	3,96	
IV.1.2	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,27 (B-)	3,47 (B-)	3,51 (B)	3,55 (B)	3,60 (B)	3,65 (B)	
IV.2	**Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial**								
IV.2.1	Persentase Penegakan Perda	Persen	100	100	100	100	100	100	
IV.3	**Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan**								
IV.3.1	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,71	3,75	3,78	3,82	3,86	3,90	

NO. IKK	INDIKATOR (IKK OUTCOME)	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
PENDIDIKAN									
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	persen	61,81	62,63	63,45	64,27	65,91	66,73	
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen	103,91	104,43	105,47	105,99	106,51	107,03	
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	persen	104,93	105,4	105,87	106,34	107,28	107,75	
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	persen	96,66	97,13	97,6	98,07	98,54	99,48	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
KESEHATAN									
1.b.1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	per 1.000 penduduk	0,0976	0,099	0,0991	0,1	0,1001	0,1002	
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	persen	100	100	100	100	100	100	
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	persen	100	100	100	100	100	100	
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	persen	100	100	100	100	100	100	
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	persen	100	100	100	100	100	100	
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	
1.b.8	Persentase orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	
1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	
1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	persen	100	100	100	100	100	100	
1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	persen	100	100	100	100	100	100	
1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	persen	27,41	28,78	30,27	31,91	33,69	35,65	
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	persen	43,93	43,67	43,95	44,23	44,51	44,79	
1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen	96	96,2	96,41	96,62	96,83	96,83	
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	persen	100	100	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	persen	38,33	41,91	45,48	49,06	52,64	56,21	
1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	persen	30	35	40	45	50	55	
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	persen	100	100	100	100	100	100	
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1.d.1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	persen	100	100	100	100	100	100	
1.d.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	persen	100	100	100	100	100	100	
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	persen	4,58	5,21	5,84	6,47	7,1	7,72	
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	persen	4,94	4,87	4,8	4,74	4,67	4,6	
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	persen	80,22	81,83	83,46	85,13	86,84	88,57	
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	persen	100	100	100	100	100	100	
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	persen	100	100	100	100	100	100	
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	persen	100	100	100	100	100	100	
1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	100	100	100	100	100	100	
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100	100	100	100	100	100	
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persen	100	100	100	100	100	100	
1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	18	17,5	17,5	17,5	17	17	
SOSIAL									
1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	persen	100	100	100	100	100	100	
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	persen	100	100	100	100	100	100	
TENAGA KERJA									

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	persen	100	100	100	100	100	100	
2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	persen	51	51,01	51,02	51,03	51,04	51,05	
2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	persen	145,77	156,77	167,77	178,77	189,77	189,9	
2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	persen	9,5	9,6	9,65	9,7	9,8	9,9	
2.a.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	persen	80	83	84	86	88	90	
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	persen	11,61	59,00	59,20	59,40	59,70	60	
2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	persen	100	100	100	100	100	100	
2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000)	angka	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	
PANGAN									
2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	persen	119,42	120,04	120,65	121,27	121,88	121,72	
PERTANAHAN									

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	persen	100	100	100	100	100	100	
2.i.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	persen	100	100	100	100	100	100	
2.i.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	persen	100	100	100	100	100	100	
2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	persen	-	20	20	20	20	20	
2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	persen	100	100	100	100	100	100	
2.i.6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	persen	100	100	100	100	100	100	
LINGKUNGAN HIDUP									
2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	nilai	75,25	75,42	75,59	75,76	75,93	76,16	
2.j.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	persen	50	55	60	65	70	75	
2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	persen	70	75	80	85	90	95	
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.k.1.1	Perekaman KTP elektronik	persen	96,37	96,87	97,37	97,87	98,37	98,87	
2.k.1.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	persen	65,12	70,5	75	80,12	85	90	
2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	persen	98,93	98,95	98,95	98,97	98,97	98,99	
2.k.1.4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	persen	41,94	48,39	54,84	61,29	67,74	74,19	
2.k.1.5	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Perse	96,37	96,87	97,37	97,87	98,37	98,87	
2.k.1.6	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	Persen	98,97	99,17	99,37	99,57	99,77	99,97	
2.k.1.7	Rasio Pasangan Berakte Nikah	Persen	57,22	62,22	67,22	72,22	77,22	82,22	
2.k.1.8	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2.k.1.9	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	
2.k.1.10	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Persen	96,37	96,87	97,37	97,87	98,37	98,87	
2.k.1.11	Cakupan penerbitan akta kelahiran	persen	98,97	99,17	99,37	99,57	99,77	99,97	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2.l.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	persen	100	100	100	100	100	100	
2.l.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	persen	84	87,5	87,5	91,3	91,3	91,3	
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	2,35	2,34	2,32	2,31	2,29	2,28	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	persen	51,5	52	52,5	53	53,5	54	
2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	persen	20,5	20	19,5	19	18,5	18	
PERHUBUNGAN									
2.n.1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	persen	80	80	80	80	80	80	
2.n.2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	nilai	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2.o.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	persen	100	100	100	100	100	100	
2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	100	100	100	100	100	100	
2.o.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	persen	100	100	100	100	100	100	
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
2.p.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	persen	10,46	11,03	11,59	12,13	12,66	13,17	
2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	persen	2,12	2,18	2,25	2,32	2,39	2,46	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
PENANAMAN MODAL									
2.q	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	persen	5	5	5	5	5	5	
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	persen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persen	8	8	8	8	8	8	
2.r.3	Peningkatan prestasi olahraga	persen	40	40	40	40	40	40	
STATISTIK									
2.s.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	persen	100	100	100	100	100	100	
2.s.2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	persen	100	100	100	100	100	100	
PERSANDIAN									
2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	persen	23,88	24,34	24,96	25,27	25,89	26,36	
KEBUDAYAAN									
2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	persen	100	100	100	100	100	100	
PERPUSTAKAAN									
2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	nilai	53	55	57	60	63	67	
2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	nilai	51	54	58	63	68	73	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
KEARSIPAN									
2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	persen	74	74,5	75	75,2	75,7	75,7	
2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	persen	33,33	50	50	66,67	66,67	83,33	
KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	49.518,72	50.537,61	51.627,20	52.791,11	54.033,30	55.357,98	
PARIWISATA									
3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	persen	8,69	12	14,28	15,62	16,22	16,28	
3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	persen	5	5,71	6,3	6,78	7,14	7,4	
3.b.3	Tingkat hunian akomodasi	persen	9,24	9,25	9,26	9,27	9,28	9,29	
3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	persen	0,7	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75	
3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	persen	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	
PERTANIAN									
3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Kw/Ha	661	661,5	662	662,5	663	663,5	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.c.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota	persen	100	100	100	100	100	100	
PERDAGANGAN									
3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	persen	100	100	100	100	100	100	
3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	60	66,5	68	69,5	71	73,5	
3.f.3	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	32,00	32,43	32,86	33,29	33,71	34,14	
PERINDUSTRIAN									
3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	persen	6,98	6,99	7,07	7,10	7,16	7,19	
3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	persen	100	100	100	100	100	100	
3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persen	100	100	100	100	100	100	
3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persen	100	100	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	persen	100	100	100	100	100	100	
3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	persen	19,09	19,26	19,39	19,49	19,55	19,58	
PERENCANAAN DAN KEUANGAN									
4.a.1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	persen	10	10	10	10	10	10	
4.a.2	Rasio PAD	persen	10	10,2	10,4	10,6	10,8	11	
4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	nilai	Level 3 Skor 3,050	Level 3 Skor 3,100	Level 3 Skor 3,150	Level 3 Skor 3,200	Level 3 Skor 3,250	Level 3 Skor 3,300	
4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	nilai	Level 3 Skor 3,050	Level 3 Skor 3,100	Level 3 Skor 3,150	Level 3 Skor 3,200	Level 3 Skor 3,250	Level 3 Skor 3,300	
4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	persen	68	69	70	71	72	73	
4.a.6	Opini Laporan Keuangan	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
PENGADAAN									
4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	persen	100	100	100	100	100	100	
4.b.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	persen	20	25	30	35	40	40	
4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	persen	40	40	40	40	40	40	
4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha	persen	100	100	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah								
KEPEGAWAIAN									
4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	76	76,25	76,5	76,75	77	77,25	
4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	20,05	20,1	20,15	20,2	20,25	20,3	
4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	40,05	40,1	40,15	40,2	40,25	40,3	
MANAJEMEN KEUANGAN									
4.d.1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	persen	100	100	100	100	100	100	
4.d.2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	persen	4	4	4	4	4	4	
4.d.3	Manajemen Aset	Kategori	4	4	4	4	4	4	
4.d.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	persen	4	4	4	4	4	4	
TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK									
4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	persen	100	100	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	(Information on resources available to frontline service delivery units)								
4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	persen	100	100	100	100	100	100	

Sumber : diolah, 2025

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman utama bagi penyelenggaraan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah daerah, tetapi juga menjadi rujukan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan agar dapat berperan aktif sesuai dengan kapasitas, peran, dan tanggung jawab masing-masing dalam mewujudkan pembangunan daerah.

Penyusunan dan pelaksanaan RPJM Daerah ini berlandaskan pada prinsip-prinsip utama, yaitu: (1) konsistensi perencanaan pembangunan, yang memastikan keterpaduan antara dokumen perencanaan dan penganggaran; (2) kerangka pengendalian, yang menjamin tercapainya sasaran pembangunan melalui pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang terstruktur; (3) sistem insentif, yang mendorong pencapaian kinerja berbasis hasil (outcome) dan memberi ruang bagi inovasi perangkat daerah; (4) mekanisme perubahan, yang adaptif terhadap dinamika strategis, seperti perubahan kebijakan nasional, krisis ekonomi, maupun kondisi *force majeure*; serta (5) komunikasi publik, yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

Prinsip-prinsip tersebut diarahkan untuk menjaga agar seluruh proses pembangunan berjalan secara terintegrasi, terukur, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga selaras dengan visi pembangunan daerah, yaitu *“Kabupaten Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan.”*

RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029 disusun bukan sekadar sebagai dokumen formal, melainkan sebagai instrumen operasional yang mampu menggerakkan potensi daerah secara optimal. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan diharapkan dapat berlangsung secara terarah, efisien, responsif terhadap isu strategis, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Asahan.

5.1.1 Konsistensi Perencanaan Pembangunan

Kualitas perencanaan pembangunan Kabupaten Asahan dalam periode Tahun 2025–2029 sangat ditentukan oleh konsistensi antar dokumen perencanaan serta keselarasan dengan kebijakan pendanaan. Konsistensi ini penting untuk memastikan bahwa visi dan misi Kepala Daerah dijabarkan secara operasional ke dalam tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program yang terukur, serta didukung oleh sumber daya yang memadai. Dengan demikian, RPJM Daerah benar-benar berfungsi sebagai dokumen operasional lima tahunan yang memandu penyelenggaraan pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan akuntabel.

Penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Asahan mengintegrasikan berbagai pendekatan, yaitu:

- Pendekatan teknokratik, dengan analisis berbasis data dan informasi yang valid melalui SIPD dan SPBE.
- Pendekatan partisipatif, dengan melibatkan masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media (pentahelix).
- Pendekatan politis, melalui penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

- Pendekatan top-down dan bottom-up, melalui sinkronisasi arah kebijakan nasional, provinsi, dan kebutuhan riil masyarakat.

Konsistensi perencanaan dijaga melalui langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Keselarasan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra PD, Renja PD) dengan dokumen penganggaran (KUA-PPAS dan APBD).
2. Penerapan perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning) yang ditopang oleh data sektoral, statistik resmi, dan sistem informasi daerah.
3. Penguatan forum konsultasi pembangunan untuk memastikan partisipasi dan akuntabilitas dalam peninjauan dokumen perencanaan.
4. Penerapan prinsip keadilan dan inklusivitas, dengan memberi perhatian khusus pada wilayah tertinggal, kelompok rentan, dan masyarakat miskin.
5. Responsivitas terhadap isu strategis, termasuk perubahan iklim, transformasi digital, bonus demografi, dan dinamika geopolitik.

Keterkaitan RPJM Daerah Kabupaten Asahan dengan Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Nasional

RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029 memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan nasional. Secara berjenjang, RPJM Daerah menjadi penjabaran dari RPJP Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025–2045, sekaligus mendukung arah pembangunan yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2025–2029 dan Asta Cita Presiden.

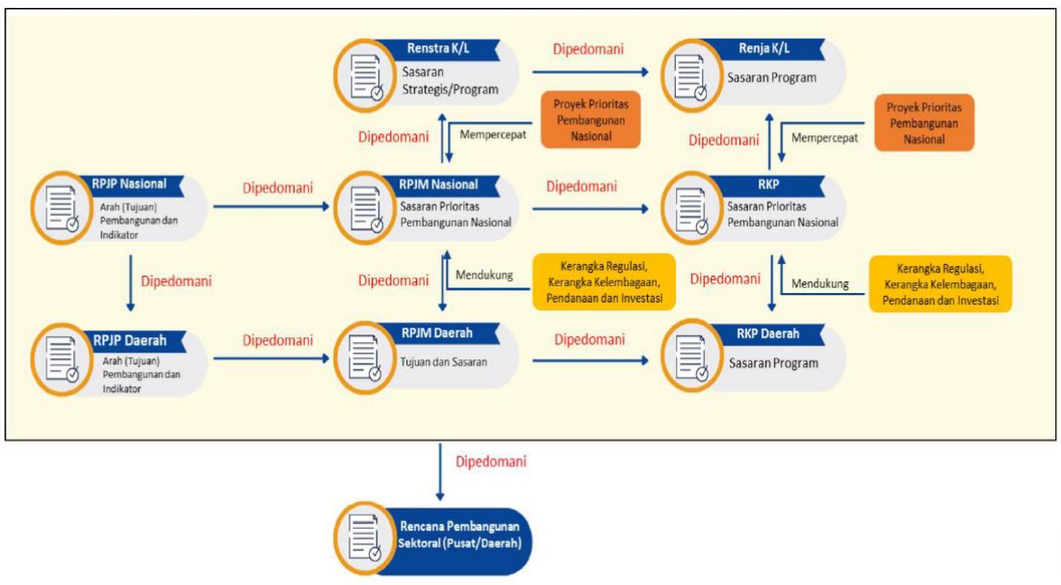

Gambar 5.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Sumber : Kementerian PPN/BAPPENAS, 2023

Hubungan perencanaan tersebut mencakup:

- RPJP Daerah Kabupaten Asahan selaras dengan RPJP Nasional Tahun 2025–2045.
- RPJM Daerah Kabupaten Asahan selaras dengan RPJM Nasional Tahun 2025–2029 serta RPJM Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- RKPD Kabupaten Asahan disesuaikan dengan RKP Nasional setiap tahun.

- Renstra PD dan Renja PD menjadi penjabaran lebih operasional dari sasaran RPJM Daerah Kabupaten Asahan.

Dengan keterpaduan tersebut, arah kebijakan, sasaran, dan indikator pembangunan Kabupaten Asahan tidak hanya konsisten secara internal, tetapi juga menjadi bagian dari kerangka besar pembangunan nasional, sehingga kontribusi daerah terhadap pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 dapat lebih nyata.

Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah menuntut keterpaduan antara perencanaan dan pendanaan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Asahan mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan dengan pendekatan yang efisien, efektif, inovatif, dan akuntabel.

Skema pendanaan pembangunan mencakup:

- Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
- Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L) di wilayah Kabupaten Asahan.
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus ditingkatkan melalui optimalisasi potensi fiskal daerah.
- Skema pembiayaan alternatif, termasuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan pembiayaan non-APBN/APBD yang sah dan tidak mengikat.
- Pinjaman daerah sebagai instrumen terakhir yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam implementasinya, Pemerintah Kabupaten Asahan menekankan pada peningkatan kualitas belanja daerah, dengan mengutamakan program prioritas dan pembangunan yang berorientasi pada hasil (outcome) dan manfaat nyata (impact). Dengan demikian, konsistensi perencanaan dan sinkronisasi pendanaan menjadi instrumen utama untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan.

5.1.2 Kerangka Pengendalian

Untuk memastikan RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029 benar-benar dapat dijalankan secara konsisten, diperlukan kerangka pengendalian yang menyeluruh. Pengendalian pembangunan dimaknai sebagai serangkaian proses yang dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin agar setiap kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan berjalan sesuai arah yang ditetapkan, serta responsif terhadap dinamika yang berkembang. Proses ini dilakukan melalui mekanisme pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang terintegrasi dengan sistem elektronik daerah.

Bapperida Kabupaten Asahan menjadi koordinator utama pengendalian, berperan mengoordinasikan seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja. Instrumen pengendalian yang digunakan antara lain Rencana Aksi Tahunan (RAT), rapat pengendalian berkala setiap triwulan, pemanfaatan SIPD sebagai pusat data pembangunan, serta penyusunan laporan kinerja rutin tahunan. Dengan demikian, pengendalian tidak sekadar formalitas, tetapi menjadi instrumen manajemen yang memungkinkan kebijakan pembangunan dikoreksi dan disesuaikan secara tepat waktu.

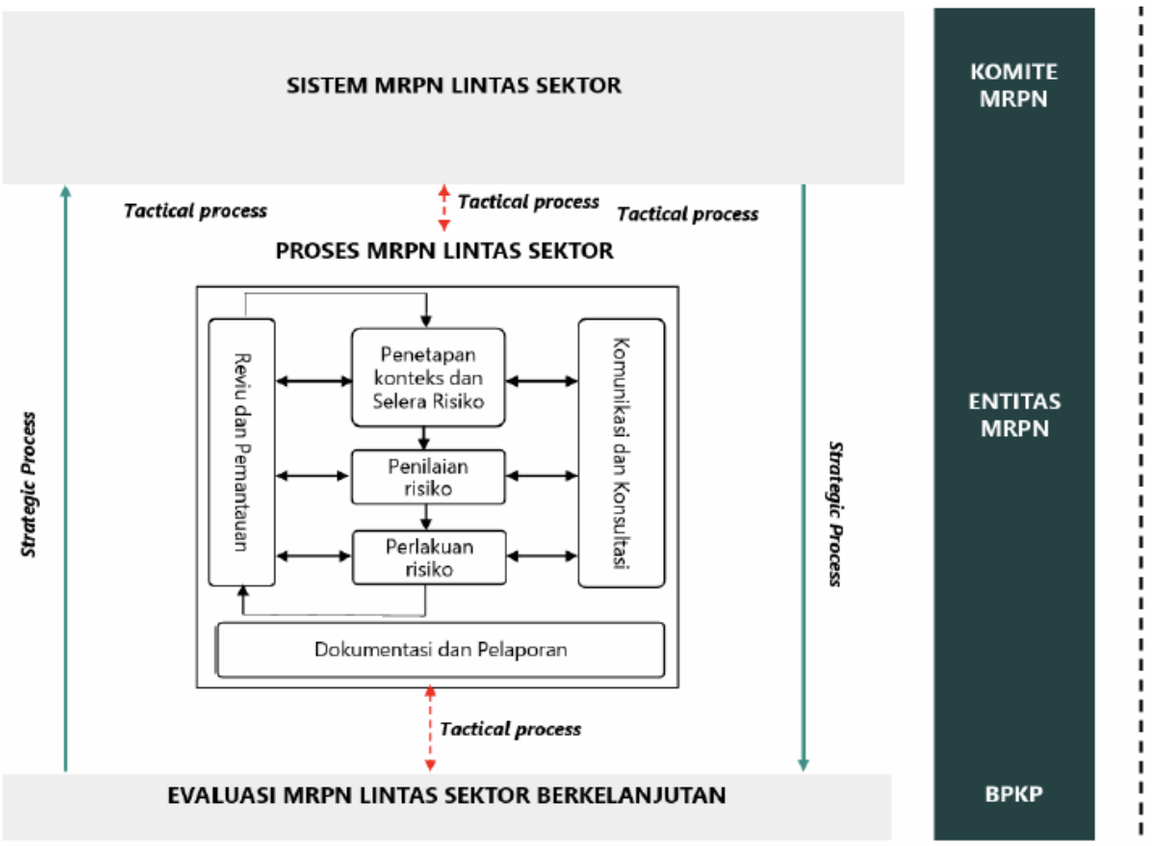

Gambar 5.2 Kerangka Kerja MRPN

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,2024

Kerangka pengendalian Kabupaten Asahan juga berlandaskan pada Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. MRPN memastikan bahwa pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi kegagalan serta cara mitigasinya.

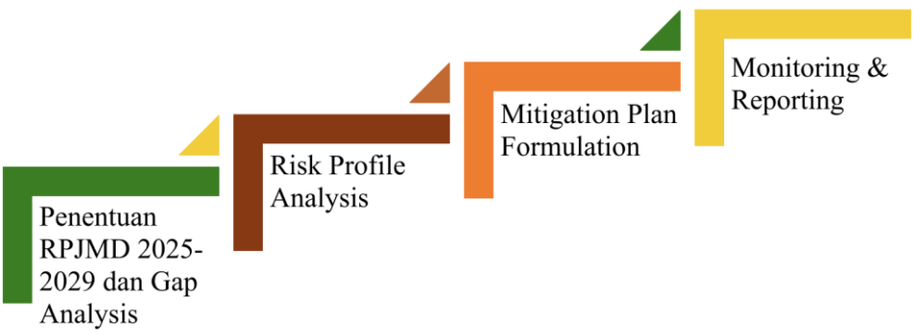

Gambar 5.3 Tahapan Manajemen Risiko untuk Mencapai Target RPJM Daerah

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Pemerintah Kabupaten Asahan wajib menerapkan MRPN sejak tahap perencanaan, dengan langkah-langkah:

Manajemen risiko pembangunan daerah di Kabupaten Asahan dimulai dari proses identifikasi risiko yang berpotensi menghambat pencapaian misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Identifikasi ini dilakukan melalui analisis kesenjangan (*gap analysis*), forum konsultasi publik, serta kajian data sektoral yang dihimpun melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Beberapa risiko yang teridentifikasi antara lain masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, prevalensi stunting dan keterbatasan akses kesehatan di wilayah tertentu, keterlambatan pembangunan infrastruktur dasar, ancaman kerawanan pangan akibat ketergantungan pada sektor pertanian tradisional, kerusakan lingkungan dan banjir tahunan, serta rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan dan resistensi aparatur terhadap digitalisasi pelayanan publik.

Tahap berikutnya adalah analisis risiko dengan menilai tingkat kemungkinan terjadinya risiko serta besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap pencapaian indikator pembangunan. Misalnya, risiko banjir musiman memiliki kemungkinan terjadinya yang tinggi dengan dampak besar terhadap sektor pertanian dan infrastruktur, sementara risiko resistensi aparatur terhadap digitalisasi mungkin memiliki kemungkinan menengah dengan dampak sedang terhadap kecepatan layanan publik. Analisis ini menghasilkan pemetaan risiko dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah, yang menjadi dasar dalam menetapkan fokus prioritas pengendalian.

Setelah dilakukan analisis, risiko-risiko tersebut dievaluasi untuk menentukan prioritas penanganan. Risiko prioritas tinggi yang memerlukan penanganan segera antara lain adalah stunting, banjir tahunan, dan rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Risiko dengan prioritas sedang mencakup lemahnya inovasi pelayanan publik dan resistensi aparatur terhadap SPBE, sedangkan risiko prioritas rendah seperti keterlambatan administrasi dalam penyaluran bantuan sosial tetap mendapat perhatian, tetapi tidak menjadi fokus utama. Proses evaluasi dan penetapan prioritas risiko ini dikoordinasikan oleh Bapperida bersama perangkat daerah terkait melalui forum koordinasi lintas sektor, sehingga tanggung jawab pengendalian dapat dibagi secara jelas.

Tahap selanjutnya adalah perumusan strategi mitigasi risiko. Pada konteks kemiskinan dan pengangguran, strategi mitigasi difokuskan pada penguatan pelatihan keterampilan kerja, fasilitasi UMKM, serta mendorong investasi lokal maupun eksternal. Untuk stunting, strategi diarahkan pada pemberian makanan bergizi gratis, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta pemberdayaan kader posyandu di desa-desa. Risiko banjir dan degradasi lingkungan ditangani melalui program Kampung Iklim, pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau, revitalisasi irigasi, serta pembentukan Desa Tangguh Bencana. Sementara itu, risiko lemahnya birokrasi dan rendahnya nilai reformasi ditangani melalui penerapan SPBE, pemberian insentif berbasis kinerja, peningkatan kualitas SAKIP, serta pelatihan intensif aparatur. Seluruh strategi mitigasi ini kemudian dituangkan dalam Rencana Aksi Tahunan dan menjadi bagian integral dari RKPD setiap tahunnya.

Tahapan terakhir dalam manajemen risiko adalah monitoring dan review risiko secara berkala. Pemerintah Kabupaten Asahan menetapkan sistem monitoring triwulanan melalui rapat evaluasi kinerja perangkat daerah, evaluasi tahunan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD), serta evaluasi tengah periode (midterm review) pada tahun ketiga untuk menilai efektivitas program dan menentukan perlunya perubahan RPJM Daerah. Pada akhir periode, dilakukan evaluasi menyeluruh yang hasilnya menjadi bahan utama dalam penyusunan RPJM Daerah periode berikutnya. Dengan mekanisme ini, pengendalian pembangunan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen manajemen pembangunan yang menjamin pencapaian tujuan secara adaptif, responsif, dan berkelanjutan.

Adapun identifikasi risiko terhadap misi, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Misi Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Asahan yang cerdas, sehat, dan berkarakter.

Peningkatan kualitas SDM dihadapkan pada risiko masih rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), disparitas pendidikan antarwilayah, serta tingginya prevalensi stunting. Data menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di beberapa kecamatan masih rendah, dan sarana kesehatan modern masih terbatas. Tanpa pengendalian yang kuat, capaian indikator Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup, serta Indeks Perlindungan Anak akan sulit ditingkatkan.

Pengendalian dilakukan dengan memastikan implementasi program prioritas berjalan konsisten, seperti pembangunan Rumah Sakit Modern Asahan, Teacher Learning Center, program beasiswa pelajar tidak mampu, serta percepatan penurunan stunting melalui pemberian makanan bergizi gratis dan penguatan posyandu. Risiko ketidaktepatan sasaran penerima manfaat diantisipasi melalui integrasi data kependudukan dan sosial di SIPD, sementara resistensi masyarakat terhadap layanan publik baru ditangani melalui kampanye literasi kesehatan dan pendidikan.

2. Misi Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing perekonomian daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pemerataan kualitas infrastruktur, pengembangan komoditas unggulan, pertanian serta pengelolaan ekonomi biru dan ketahanan pangan.

Pertumbuhan ekonomi Asahan masih menghadapi risiko kesenjangan antarwilayah, tingginya tingkat pengangguran, serta lemahnya hilirisasi komoditas unggulan. Ketersediaan infrastruktur dasar belum merata, sementara sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi masih rentan terhadap fluktuasi harga dan perubahan iklim. Tanpa pengendalian yang kuat, target indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Gini Rasio, dan Indeks Ketahanan Pangan berpotensi tidak tercapai.

Pengendalian diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi, pengembangan agromarine industry termasuk ekonomi biru, serta penyediaan saprodi pertanian. Risiko keterbatasan investasi diatasi dengan fasilitasi dan promosi potensi daerah, sementara risiko ketahanan pangan ditangani melalui diversifikasi produk pangan, pembentukan Sentra Balai Benih Peternakan, serta pengembangan koperasi, UMKM dan BUMD.

3. Misi Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan memelihara kerukunan dalam kehidupan.

Asahan sebagai daerah yang majemuk memiliki potensi risiko intoleransi dan lemahnya pembinaan organisasi keagamaan. Keterbatasan sarana ibadah serta minimnya partisipasi generasi muda dalam kegiatan keagamaan juga dapat menghambat pencapaian indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dan Trantibumlinmas.

Pengendalian dilakukan dengan memperkuat forum kerukunan lintas agama, sertifikasi rumah ibadah, serta pembinaan organisasi keagamaan dan kegiatan keagamaan di sekolah. Risiko konflik sosial diantisipasi dengan memperkuat komunikasi antarumat, sedangkan risiko rendahnya partisipasi generasi muda ditangani melalui kegiatan berbasis kearifan lokal dan program sekolah berbasis karakter.

4. Misi Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, berintegritas dan akuntabel.

Risiko utama dalam misi ini adalah rendahnya nilai Reformasi Birokrasi dan SAKIP, resistensi aparatur terhadap transformasi digital, serta lemahnya inovasi pelayanan publik. Tanpa pengendalian yang baik, target Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pemerintahan Digital sulit tercapai.

Pengendalian dilakukan melalui evaluasi rutin implementasi SPBE, penyederhanaan birokrasi, dan peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan digital. Risiko resistensi pegawai dimitigasi dengan pemberian insentif berbasis kinerja, sementara lemahnya koordinasi desa ditangani melalui penguatan regulasi dan peningkatan nilai Indeks Desa.

5. Misi Menyelenggarakan pembangunan yang berlandaskan prinsip keseimbangan, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kabupaten Asahan menghadapi risiko serius berupa degradasi lahan, banjir tahunan, pencemaran sungai, serta terbatasnya ruang terbuka hijau. Tanpa pengendalian yang tepat, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Risiko Bencana dapat menurun drastis.

Pengendalian diarahkan pada program Kampung Iklim, pengembangan Ruang Terbuka Hijau, serta pembentukan Desa Tangguh Bencana. Risiko lemahnya kesadaran masyarakat ditangani melalui edukasi lingkungan, sedangkan risiko degradasi lingkungan diantisipasi dengan penegakan regulasi lingkungan serta penerapan teknologi ramah lingkungan.

Melalui proses identifikasi dan perumusan strategi manajemen risiko yang tepat pada setiap pencapaian misi, implementasi RPJM Daerah dapat berlangsung lebih efektif sekaligus mampu menekan potensi risiko yang mungkin timbul. Mekanisme pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD dilaksanakan secara periodik dalam jangka pendek (tahunan), dengan hasil evaluasi yang disampaikan kepada Kepala Daerah. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, pengendalian pembangunan daerah mencakup dua lingkup utama, yaitu

1. **Pengendalian Perencanaan** dilakukan sejak tahap penyusunan RPJM Daerah, RKPD, hingga Renstra dan Renja OPD. Analisis kesenjangan (gap analysis) digunakan untuk membandingkan target dengan realisasi periode sebelumnya. Hasil analisis ini menjadi dasar perbaikan dokumen perencanaan setiap tahun.
2. **Pengendalian Pelaksanaan** dilaksanakan secara triwulanan dan tahunan melalui pemantauan capaian indikator dan progres fisik–keuangan. Hasilnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan koreksi kebijakan, penyesuaian alokasi anggaran, hingga mekanisme perubahan RPJM Daerah apabila terjadi dinamika strategis yang signifikan.

Agar pengendalian berjalan efektif, diperlukan regulasi yang kuat dan kapasitas kelembagaan yang memadai. Pemerintah Kabupaten Asahan menempatkan Bapperida sebagai motor koordinasi, didukung oleh OPD teknis, Inspektorat, serta forum konsultasi pembangunan. Sistem pelaporan berbasis SIPD dan SPBE diperkuat agar transparan, akuntabel, dan terbuka bagi publik. Partisipasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media (pentahelix) juga menjadi bagian integral dari mekanisme pengendalian.

5.1.3 Sistem Insentif

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Asahan dalam periode tahun 2025–2029 sangat ditentukan oleh partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Sinergi kolaboratif antara pemerintah daerah,

dunia usaha, akademisi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok masyarakat menjadi faktor penentu dalam mempercepat pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

Untuk mendorong partisipasi yang luas dan bermakna, diperlukan sistem insentif yang dirancang sesuai dengan karakteristik masing-masing pelaku pembangunan. Bagi unsur pemerintah daerah, sistem insentif dikaitkan secara langsung dengan manajemen kinerja dan siklus penganggaran yang terintegrasi. Pemberian insentif diarahkan pada pencapaian nyata, seperti konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program, keselarasan dengan indikator makro pembangunan daerah, efektivitas pengelolaan anggaran, serta capaian program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan profesionalisme aparatur dalam memberikan layanan publik yang berkualitas serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sementara itu, bagi pelaku non-pemerintah, sistem insentif dikembangkan dalam bentuk kemudahan dan fasilitas yang mendorong kontribusi aktif terhadap pembangunan. Insentif tersebut dapat berupa penyederhanaan proses perizinan, fasilitasi akses permodalan dan pembiayaan, penyediaan sarana dan prasarana usaha, hingga penghargaan bagi inisiatif dan inovasi masyarakat. Dengan insentif yang tepat, keterlibatan dunia usaha, UMKM, komunitas lokal, serta kelompok masyarakat dapat semakin meningkat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, penguatan ketahanan sosial, serta keberlanjutan lingkungan hidup di Kabupaten Asahan.

Dengan pendekatan insentif yang terukur dan berbasis kinerja, diharapkan tercipta sinergi kuat antara pemerintah dan masyarakat. Sistem ini tidak hanya mendorong partisipasi yang lebih luas, tetapi juga memastikan bahwa setiap kontribusi memberikan dampak nyata bagi pencapaian sasaran pembangunan secara inklusif, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pembangunan Kabupaten Asahan dapat diwujudkan sebagai gerakan kolektif yang mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya daerah

5.1.4 Mekanisme Perubahan

Menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks, dokumen RPJM Daerah Kabupaten Asahan 2025–2029 dirancang secara adaptif agar mampu merespons berbagai faktor eksternal yang tidak terduga, baik di tingkat nasional, regional, maupun global. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, maupun lingkungan yang dapat memengaruhi capaian pembangunan daerah menjadi dasar penting bagi penyesuaian strategi dan kebijakan. Oleh karena itu, pelaksanaan RPJM Daerah senantiasa dikaitkan dengan hasil analisis kondisi terbaru, sehingga target pembangunan tetap relevan dan dapat diwujudkan meskipun dalam situasi yang berubah.

Untuk mendukung efektivitas implementasi, Pemerintah Kabupaten Asahan mengoptimalkan transformasi digital melalui pengembangan sistem elektronik terpadu yang mencakup seluruh siklus perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Pemanfaatan sistem digital ini tidak hanya bertujuan mempercepat proses bisnis pemerintahan, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat transparansi, serta menghadirkan data dan informasi yang lebih akurat sebagai dasar pengambilan keputusan.

Selain itu, penerapan tata kelola data yang baik (data governance) menjadi pilar utama dalam mendukung perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning). Dengan memanfaatkan data referensi yang terstandarisasi, terintegrasi,

dan dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah daerah mampu menyusun analisis yang lebih komprehensif serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.

Kombinasi antara fleksibilitas perencanaan dan pemanfaatan teknologi digital diharapkan dapat membentuk ekosistem pembangunan Kabupaten Asahan yang tangguh, responsif, dan inovatif. Pendekatan ini sekaligus menjamin kelancaran implementasi RPJM Daerah tahun 2025–2029 serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam merespons tantangan dan peluang pembangunan yang terus berkembang sepanjang periode perencanaan.

5.1.5 Komunikasi Publik

Komunikasi publik yang efektif merupakan salah satu fondasi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam konteks RPJM Daerah Kabupaten Asahan 2025–2029, komunikasi publik tidak hanya diposisikan sebagai sarana penyampaian informasi, melainkan juga sebagai instrumen untuk membangun dialog konstruktif antara pemerintah daerah dan masyarakat. Prinsip *"no one left behind"* menjadi pijakan utama, memastikan setiap kelompok masyarakat memperoleh akses yang setara terhadap informasi pembangunan dan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi.

Tiga pilar utama yang menopang sistem komunikasi publik daerah adalah:

1. Tata kelola komunikasi yang terstruktur dan profesional, dengan mengedepankan koordinasi lintas sektor, transparansi, serta inovasi dalam penyampaian pesan.
2. Penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses, dengan format yang menarik dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. Pendekatan komunikasi partisipatif, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, akademisi, media, maupun kelompok masyarakat rentan untuk memperkuat relevansi kebijakan pembangunan.

Pelaksanaan komunikasi publik di Kabupaten Asahan dilakukan melalui beragam saluran yang disesuaikan dengan karakteristik para pemangku kepentingan. Forum perangkat daerah (OPD) menjadi ruang konsultasi teknis antar instansi, sementara musyawarah berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten menjaga konsistensi kebijakan dan keterpaduan pembangunan. Masyarakat umum, pelaku usaha, akademisi, media, serta kelompok rentan dilibatkan dalam metode komunikasi yang inklusif, sehingga setiap kebijakan dapat dipahami dengan baik dan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi.

Pendekatan komunikasi publik dalam RPJM Daerah ini bertujuan mewujudkan pemerintahan yang benar-benar terbuka, di mana setiap kebijakan pembangunan dapat dipahami secara jelas dan setiap warga memiliki ruang partisipasi yang bermakna. Dengan demikian, komunikasi publik tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga media penguatan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pembangunan daerah secara menyeluruh.

5.2 Pembiayaan Pembangunan

Pencapaian visi pembangunan Kabupaten Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan membutuhkan dukungan kapasitas pembiayaan yang kuat, inovatif, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, strategi pembiayaan pembangunan dirancang secara komprehensif dengan mengoptimalkan sinergi antara sektor publik dan non-publik, serta berlandaskan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Penguatan pembiayaan sektor publik dilaksanakan melalui lima strategi utama. Pertama, peningkatan kualitas perencanaan pembiayaan melalui penataan regulasi daerah, pembentukan kelembagaan yang adaptif, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam siklus perencanaan dan penganggaran. Kedua, pengembangan kerja sama bilateral, multilateral, maupun antar-daerah untuk memperluas akses terhadap sumber pembiayaan yang inovatif dengan persyaratan yang menguntungkan. Ketiga, optimalisasi kemitraan pemerintah dengan badan usaha (*Public Private Partnership/PPP*) melalui penyempurnaan regulasi, tata kelola, serta pembagian risiko yang lebih adil. Keempat, penerapan skema pembiayaan yang mendorong pemberdayaan industri lokal, UMKM, dan koperasi. Kelima, pemanfaatan aset daerah secara produktif melalui mekanisme optimalisasi, daur ulang, dan penangkapan nilai aset (*asset recycling*).

Agar strategi pembiayaan berjalan efektif, penguatan manajemen investasi menjadi faktor krusial. Upaya ini diwujudkan melalui perbaikan mekanisme identifikasi dan seleksi proyek prioritas, modernisasi sistem pemantauan dan evaluasi investasi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pembangunan. Pelibatan sektor swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik terus ditingkatkan, didukung oleh kerangka regulasi yang lebih adaptif serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Dengan pendekatan terpadu ini, Kabupaten Asahan diharapkan mampu membangun ekosistem pembiayaan yang kokoh dan berkelanjutan, yang tidak hanya menjamin kesinambungan fiskal daerah tetapi juga memperkuat sinergi antara sektor publik dan non-publik dalam mendukung percepatan pembangunan menuju Asahan yang sejahtera, religius, maju, dan berkelanjutan.

5.3 Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan utama yang menjadi pedoman pembangunan lima tahunan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran utama, arah kebijakan, indikator kinerja, serta program prioritas yang akan dilaksanakan secara bertahap. RPJM Daerah disusun untuk menjawab berbagai isu strategis dan dinamika pembangunan daerah, dengan tujuan akhir mewujudkan visi Kabupaten Asahan, yaitu: *“Kabupaten Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan.”*

Secara substansi, RPJM Daerah Kabupaten Asahan tahun 2025–2029 menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur yang merata, tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel, serta perlindungan lingkungan hidup dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Arah kebijakan tersebut dijabarkan ke dalam lima misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Asahan yang cerdas, sehat, berkarakter, dan sejahtera.

2. Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing perekonomian daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pemerataan infrastruktur, pengembangan komoditas unggulan pertanian, serta penguatan ekonomi biru dan ketahanan pangan.
3. Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan memelihara kerukunan dalam kehidupan beragama.
4. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, berintegritas, dan akuntabel.
5. Menyelenggarakan pembangunan yang berlandaskan prinsip keseimbangan, keberlanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Untuk mendukung implementasi misi tersebut, ditetapkan sembilan prioritas pembangunan daerah yang dirangkum dalam semangat *"Asahan Bangkit, Mandiri, dan Berkelanjutan"*, yang meliputi:

1. **Asahan Cerdas dan Berkarakter**, melalui penguatan sistem pendidikan, literasi, budaya, serta pembangunan sarana olahraga.
2. **Asahan Sehat**, dengan pemerataan layanan kesehatan, penurunan stunting, dan perlindungan perempuan serta anak.
3. **Asahan Ekonomi Bangkit**, melalui peningkatan investasi, penguatan UMKM, hilirisasi komoditas unggulan, dan pengembangan pariwisata.
4. **Asahan Swasembada Pangan, Petani Makmur**, melalui pembangunan pertanian terintegrasi dan penguatan ekonomi biru.
5. **Asahan Infrastruktur Kuat**, melalui peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah.
6. **Asahan Religius**, dengan penguatan kehidupan beragama dan fasilitasi sarana peribadatan.
7. **Asahan Clean Governance**, melalui reformasi birokrasi dan pemberdayaan desa.
8. **Asahan Modern**, dengan penguatan SPBE dan ekosistem riset serta inovasi daerah.
9. **Asahan Nyaman dan Seimbang**, melalui pelestarian lingkungan, mitigasi bencana, dan pembangunan desa tangguh.

Keberhasilan pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Asahan tahun 2025–2029 harus ditopang oleh beberapa faktor penting, antara lain: (1) komitmen kepemimpinan daerah yang kuat dan berintegritas, (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah, (3) keberpihakan pembangunan kepada masyarakat, (4) partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, serta (5) upaya menjaga keseimbangan dan kesinambungan pembangunan daerah.

Pencapaian visi Kabupaten Asahan menuntut kolaborasi nyata dari seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, pemuda, hingga kelompok rentan. Dukungan politik, komitmen pelaksanaan yang konsisten, serta semangat gotong royong harus diwujudkan dalam bentuk aksi nyata, baik melalui program pembangunan, pengawasan partisipatif, maupun berbagai inisiatif lokal.

Dengan arah kebijakan yang terstruktur, partisipasi yang inklusif, dan tata kelola pembangunan yang transparan, RPJM Daerah Kabupaten Asahan tahun 2025–2029 tidak hanya menjadi pedoman pembangunan daerah, tetapi juga instrumen penting dalam mendukung pencapaian visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN, S.Sos, M.Si